



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

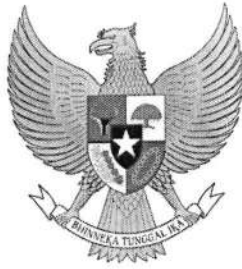
TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**



www.lamongankab.go.id
bappeda@lamongankab.go.id
[la.megilan](https://www.instagram.com/la.megilan)
0322-322690





SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
7. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB III TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD, meliputi :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Bab IX Penutup;

- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 129-10/2021**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah dilaksanakannya dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*)” adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan holistik-tematik” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan integratif” adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan spasial” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1 Latar belakang I-1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

 1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7

 1.4 Maksud dan Tujuan I-29

 1.5 Sistematika Penulisan I-29

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....II-1

 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....II-1

 2.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Geografis II-1

 2.1.1.1 Kondisi Geografis.....II-1

 2.1.1.2 Kondisi Kawasan II-2

 2.1.1.3 Kondisi Topografi.....II-3

 2.1.1.4 Kondisi Geologi.....II-3

 2.1.1.5 Kondisi Hidrologi II-4

 2.1.1.6 Kondisi Klimatologi.....II-4

 2.1.1.7 Penggunaan Lahan II-6

 2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana II-7

 2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah.....II-13

 2.1.2 Aspek Demografi II-19

 2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung.....II-20

 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-26

 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-26

 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....II-26

 2.2.1.2 PDRB Perkapita.....II-31

 2.2.1.3 Inflasi II-31

 2.2.1.4 Indeks Gini.....II-32

 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....II-33

 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-33

 2.2.2.1.1 Harapan Lama Sekolah.....II-34

 2.2.2.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah.....II-36

 2.2.2.1.3 Angka Harapan Hidup II-37

 2.2.2.1.4 Pengeluaran Per Kapita.....II-39

 2.2.2.2 Kemiskinan II-40

2.2.3 Fokus Seni Budaya	II-43
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-44
2.3.1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar.....	II-44
2.3.1.1 Pendidikan	II-44
2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar	II-44
2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni	II-45
2.3.1.1.3 Fasilitas Pendidikan.....	II-46
2.3.1.1.4 Kondisi Ruang Kelas	II-47
2.3.1.1.5 Rasio Guru dan Siswa	II-47
2.3.1.1.6 Akreditasi Sekolah	II-48
2.3.1.1.7 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Tersertifikasi.....	II-48
2.3.1.1.8 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan	II-49
2.3.1.1.9 Capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Pada Urusan Pendidikan	II-51
2.3.1.2 Kesehatan	II-52
2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)	II-52
2.3.1.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)	II-53
2.3.1.2.3 Ketersediaan Sarana Kesehatan.....	II-54
2.3.1.2.4 Penderita Tuberculosis (TB)	II-55
2.3.1.2.5 Temuan kasus HIV/AIDS.....	II-56
2.3.1.2.6 Persentase Masyarakat Ikut Jaminan Kesehatan	II-56
2.3.1.2.7 Angka Balita Stunting.....	II-57
2.3.1.2.8 Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan	II-58
2.3.1.2.9 Jumlah Posyandu Aktif.....	II-58
2.3.1.2.10 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II-59
2.3.1.2.11 Capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Kesehatan	II-60
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-64
2.3.1.3.10 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-68
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-68
2.3.1.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-70
2.3.1.4.5 Capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-70
2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-71
2.3.1.5.1 Konflik Sosial.....	II-72
2.3.1.5.2 Penegakan Pelanggaran Perda.....	II-72

2.3.1.5.3 Gangguan Trantibum.....	II-73
2.3.1.5.4 Desa Tangguh Bencana	II-73
2.3.1.5.5 Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.....	II-74
2.3.1.5.7 Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	II-75
2.3.1.5.8 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-75
2.3.1.5.9 Capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-76
2.3.1.6 Sosial	II-78
2.3.1.6.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	II-78
2.3.1.6.4 Capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Sosial	II-79
2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-80
2.3.2.1 Tenaga kerja.....	II-80
2.3.2.1.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Tenaga Kerja	II-82
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-83
2.3.2.2.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-86
2.3.2.3 Pangan	II-88
2.3.2.4 Pertanahan.....	II-89
2.3.2.5 Lingkungan Hidup.....	II-90
2.3.2.5.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Lingkungan Hidup.....	II-91
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-92
2.3.2.6.1 Jumlah KTP dan KK yang Diterbitkan.....	II-92
2.3.2.6.2 Jumlah Akte Kelahiran dan Kematian yang Diterbitkan ...	II-93
2.3.2.6.3 Jumlah KIA yang Diterbitkan.....	II-94
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-94
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-97
2.3.2.9 Perhubungan.....	II-97
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika.....	II-99
2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II-100
2.3.2.12 Penanaman Modal	II-102
2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.....	II-103
2.3.2.14 Statistik.....	II-105
2.3.2.15 Kebudayaan.....	II-106

2.3.2.17 Perpustakaan	II-107
2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan.....	II-108
2.3.3.1 Pertanian dan Perkebunan	II-108
2.3.3.1.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pertanian ..	II-110
2.3.3.2 Kelautan dan Perikanan	II-110
2.3.3.3 Perindustrian	II-112
2.3.3.3.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Perindustrian	II-113
2.3.3.4 Perdagangan.....	II-113
2.3.3.5 Pariwisata.....	II-115
2.3.3.5.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pariwisata ..	II-116
2.3.3.6 Transmigrasi	II-117
2.3.4.1 Administrasi Pemerintahan	II-117
2.3.4.1.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Administrasi Pemerintahan.....	II-119
2.3.4.2 Keuangan	II-120
2.3.4.2.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Keuangan Daerah	II-121
2.3.4.3 Pengawasan.....	II-122
2.3.4.3.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pengawasan	II-123
2.3.4.4 Kepegawaian	II-123
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-127
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-127
2.4.1.1 Nilai Tukar Petani.....	II-127
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-128
2.4.2.1 Perhubungan.....	II-128
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-129
2.4.3.1 Lama Proses Perijinan Usaha.....	II-129
2.4.3.2 Jumlah Dan Jenis Pajak serta Retribusi Daerah.....	II-130
2.4.3.3 Jumlah Perda/Perbup Yang Mendukung Iklim Usaha.....	II-131
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-5
3.1.1.1 Pendapatan	III-5
3.1.1.2 Belanja	III-8
3.1.1.3 Pembiayaan.....	III-9

3.1.2 Neraca Daerah III-11

3.1.2.1 Aset Daerah.....III-16

3.1.2.2 Kewajiban.....III-16

3.1.2.3 Ekuitas.....III-17

3.1.2.4 Rasio Liquiditas III-17

3.1.2.5 Rasio Solvabilitas III-19

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-20

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-20

3.2.1.1 Pendapatan.....III-20

3.2.1.2 Belanja III-28

3.2.2 Analisis Pembiayaan.....III-36

3.3 Kerangka Pendanaan III-39

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah III-43

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Tahun Periode Perencanaan III-43

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Tahun Periode Perencanaan III-45

3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan III-48

3.3.1.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah III-49

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....III-50

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS IV-1

4.1 Permasalahan IV-1

4.2. Isu Strategis.....IV-2

4.2.1 Isu Strategis Internasional.....IV-2

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDG’S) IV-2

4.2.2 Isu Nasional IV-4

4.2.2.1 Percepatan Perekonomian Jawa Timur dan Pemulihan Ekonomi Nasional IV-4

4.2.3 Isu Regional IV-9

4.2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV-9

4.2.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IV-11

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 IV-14

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....V-1

5.1 VISI.....V-1

5.2 MISI V-2

5.3 TUJUAN DAN SASARAN V-7

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I V-7

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II V-8

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III V-9

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV V-10



5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi V V-11

BAB VISTRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

6.1 Strategi Pembangunan Daerah.....VI-1

6.2 Arah Kebijakan VI-4

6.3 Program Pembangunan VI-14

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Pedoman Transisi.....IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

9.3 Penutup IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keselarasan RPJMN Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan I-8

Tabel I.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Terhadap RPJMD
Kabupaten Lamongan I-9

Tabel I.3 Keselarasan RPJPD 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Lamongan
2021-2026 I-11

Tabel I.4 Keselarasan RTRW 2020-2039 Dengan RPJMD Kabupaten Lamongan
2021-2026 I-14

Tabel I.5 Keselarasan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 Dengan
Daerah Sekitar I-21

Tabel II.1 Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas II-1

Tabel II.2 Kondisi Suhu dan Kelembaban Udara Tahun 2020 II-5

Tabel II.3 Kondisi Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Tahun 2020 II-5

Tabel II.4 Kondisi Jumlah Curah dan Hari Hujan serta Penyinaran Matahari
Tahun 2020 II-6

Tabel II.5 Luas Kabupaten Lamongan Berdasarkan Penggunaan Lahan II-6

Tabel II.6 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Banjir II-7

Tabel II.7 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang II-8

Tabel II.8 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor II-10

Tabel II.9 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Kekeringan II-11

Tabel II.10 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran II-11

Tabel II.11 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi II-12

Tabel II.12 Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk II-19

Tabel II.13 Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur II-20

Tabel II.14 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020 II-20

Tabel II.15 Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis per Kecamatan
Tahun 2020 II-21

Tabel II.16 Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung Tahun 2020 II-22

Tabel II.17 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Lamongan II-29

Tabel II.18 Perkembangan Seni Dan Budaya Tahun 2016-2020 II-43

Tabel II.19 Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016-2020 II-47

Tabel II.20 Rasio Guru dan Siswa Tahun 2016-2019 II-47

Tabel II.21 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Tersertifikasi Tahun 2020 II-48

Tabel II.22 Capaian Pelaksanaan Indikator SPM Pada Urusan Pendidikan .II-49

Tabel II.23 Capaian Indikator SDG’s Urusan Pendidikan
Tahun 2016-2020 II-51

Tabel II.24 Jumlah Puskesmas Dan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar
Tahun 2016-2020 II-55

Tabel II.25 Persentase Masyarakat yang Ikut Jaminan Kesehatan II-56

Tabel II.26 Jumlah Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan II-58

Tabel II.27 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2020 II-58

Tabel II.28 Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 II-59

Tabel II.29 Capaian SDG’s Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020 II-60

Tabel II.30 Capaian Kinerja Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tahun 2016-2020 II-64

Tabel II.31 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020 II-68

Tabel II.32 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-69

Tabel II.33 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 II-70

Tabel II.34 Capaian SDG’S Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 II-70

Tabel II.35 Jumlah dan Persentase Desa Tangguh Bencana II-73

Tabel II.36 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 II-76

Tabel II.37 Capaian Indikator SDG’s Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020.....II-76

Tabel II.38 Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Aspek Sosial Tahun 2016-2020 II-78

Tabel II.39 Capaian SPM Urusan Sosial di Kabupaten Lamongan.....II-79

Tabel II.40 Capaian Indikator SDG’s Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-79

Tabel II.41 Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Tenaga Kerja II-80

Tabel II.42 Capaian SDG’S Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020.....II-82

Tabel II.43 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016-2020 II-83

Tabel II.44 Keterwakilan Perempuan di Parlemen tahun 2016-2020 II-84

Tabel II.45 Pegawai Perempuan Yang Menempati Jabatan.....II-84

Tabel II.46 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun 2016-2020.....II-85

Tabel II.47 Perkembangan Perkawinan Anak Tahun 2016-2020 II-85

Tabel II.48 Capaian SDG’S Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020.....II-86

Tabel II.49 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pangan II-88

Tabel II.50 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 II-90

Tabel II.51 Capaian SDG's Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 ...II-91

Tabel II.52 Status IDM Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.....II-95

Tabel II.53 Status IDM Setiap Kecamatan di Kabupaten Lamongan.....II-95

Tabel II.54 Persentase Bumdes Aktif II-96

Tabel II.55 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 II-97

Tabel II.56 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan.....II-98

Tabel II.57 Capaian Kinerja SDG’s Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020 II-99

Tabel II.58 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2020 II-99

Tabel II.59 Capaian Kinerja SDG’s Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-100

Tabel II.60 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 II-100

Tabel II.61 Capaian Indikator SDG’s Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020 II-102

Tabel II.62 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020 II-102

Tabel II.63 Capaian Indikator SDG’s Bidang Statistik Tahun 2016-2020..II-106

Tabel II.64 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Kebudayaan.....II-106

Tabel II.65 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perpustakaan.....II-108



Tabel II.66 Potensi Kelompok Petani Yang Di Bina Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel II.67 Produksi Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel II.68 Capaian Indikator SDG's Bidang Pertanian Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020	II-110
Tabel II.69 Produksi Perikanan tahun 2016-2020	II-110
Tabel II.70 Nilai Tambah Produksi Perikanan/Pengolahan Ikan	II-111
Tabel II.71 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel II.72 Jumlah produksi garam tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel II.73 Jumlah Industri Rumah Tangga Kecil Dan Menengah.....	II-112
Tabel II.74 Capaian Indikator SDG's Bidang Perindustrian Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel II.75 Jumlah Pelanggaran Perdagangan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel II.76 Jumlah Pedagang Tahun 2016-2020	II-114
Tabel II.77 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2016-2020	II-115
Tabel II.78 Jumlah Wisatawan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel II.79 Capaian Indikator SDG's Bidang Pariwisata tahun 2016-2020	II-116
Tabel II.80 Jumlah Transmigrasi yang di Berangkatkan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel II.81 Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II.82 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	II-118
Tabel II.83 Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan.....	II-119
Tabel II.84 Capaian Indikator SDG's Administrasi Pemerintahan	II-119
Tabel II.85 Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016-2020.....	II-120
Tabel II.86 Capaian Indikator SDG's Bidang Keuangan Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel II.87 Nilai SAKIP Tahun 2016-2020	II-122
Tabel II.88 Level APIP Tahun 2016-2020	II-122
Tabel II.89 Capaian Indikator SDG's Pengawasan Tahun 2016-2020.....	II-123
Tabel II.90 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 ...	II-123
Tabel II.91 Jumlah PNS berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	II-124
Tabel II.92 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2020	II-124
Tabel II.93 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2016-2020.....	II-125
Tabel II.94 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016-2020.....	II-125
Tabel II.95 Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Lamongan.....	II-126
Tabel II.96 Nilai Tukar Petani Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 ...	II-127
Tabel II.97 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Sektoral	II-127
Tabel III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	III-2
Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Lamongan 2016-2020	III-13
Tabel III.3 Nilai Rasio Liquiditas Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	III-18
Tabel III.4 Nilai Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	III-19
Tabel III.5 Rasio Pendapatan Kabupaten Lamongan 2016-2020	III-22
Tabel III.6 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	III-24
Tabel III.7 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	III-25
Tabel III.8 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	III-26
Tabel III.9 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	III-27
Tabel III.10 Proporsi Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.....	III-28

Tabel III.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lamongan III-29

Tabel III.12 Analisis Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur III-34

Tabel III.13 Belanja Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten
Lamongan 2016-2020 III-35

Tabel III.14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamongan 2016-2020 III-37

Tabel III.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran III-37

Tabel III.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran..... III-38

Tabel III.17 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2022 – 2026..... III-40

Tabel III.18 Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2022-2026 III-52

Tabel III.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Kabupaten Lamongan 2022-2026 III-53

Tabel IV.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten
Lamongan 2016-2020 IV-3

Tabel IV.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis IV-11

Tabel IV.3 Rumusan Isu Strategis RPJMD..... IV-14

Tabel V.1 Linearitas Isu Strategis Dengan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan
Periode Tahun 2021-2026..... V-2

Tabel V.2 Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan RPJMD..... V-12

Tabel V.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten
Lamongan Tahun 2022-2026 V-14

Tabel VI.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lamongan VI-6

Tabel VI.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Indikatif VI-13

Tabel VII.1 Kapasitas Riil Kabupaten Lamongan 2022-2026..... VII-2

Tabel VII.2 Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah Berdasarkan
Prioritas Alokasi Belanja Daerah..... VII-4

Tabel VII.3 Program Pembangunan Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022-
2026..... VII-5

Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan
2022-2026 VIII-1

Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) VIII-1

Tabel VIII.3 Indikator Makro Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026 VIII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....I-8

Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan II-2

Gambar II.2 Peta Pengembangan Wilayah Kabupaten Lamongan.....II-14

Gambar II.3 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) (dalam Juta) Kabupaten lamongan tahun 2016-2020 II-27

Gambar II.4 Empat Besar Sektor Degan Kontribusi Terbesar Terhadap Perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 2019 II-28

Gambar II.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan Nasional tahun 2016-2020 (Satuan Persentase) II-29

Gambar II.6 Analisis Klassen Pertumbuhan sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2019 II-30

Gambar II.7 PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-31

Gambar II.8 Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan Tahun 2016-2020 II-32

Gambar II.9 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lamongan II-33

Gambar II.10 Indeks Pembangunan Manusia Kab Lamongan.....II-34

Gambar II.11 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2020.....II-34

Gambar II.12 Harapan Lama Sekolah Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-35

Gambar II.13 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....II-35

Gambar II.14 angka rata-rata lama sekolah Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan tahun 2020 II-36

Gambar II.15 rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020.....II-37

Gambar II.16 Angka Harapan Hidup (Ahh) Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020 II-38

Gambar II.17 Angka Harapan Hidup (Ahh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....II-38

Gambar II.18 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lamongan dan II-39

Gambar II.19 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 (Rp. 000) II-40

Gambar II.20 Perkembangan Penduduk Miskin Dan Angka Kemiskinan Tahun 2016-2020 II-41

Gambar II.21 Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-41

Gambar II.22 Persentase Angka Kemiskinan Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....II-42

Gambar II.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-42

Gambar II.24 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI II-44

Gambar II.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs II-44

Gambar II.26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016-2020 II-45

Gambar II.27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2016-2020 ..II-46

Gambar II.28 Ketersediaan Sarana Pendidikan tahun 2016-2020 II-46

Gambar II.29 Akreditasi Sekolah di Kabupaten Lamongan tahun 2019 II-48

Gambar II.30 Angka Kematian Bayi Kabupaten Lamongan.....II-53

Gambar II.31 Angka Kematian Ibu (Aki) (Per 100.000) Tahun 2016-2020 ...II-54

Gambar II.32 Ketersediaan Sarana Kesehatan Tahun 2016-2020.....II-54

Gambar II.33 Temuan Kasus Penyakit TB Tahun 2016-2020 II-55

Gambar II.34 Temuan Kasus HIV/AIDS TAHUN 2016-2020 II-56

Gambar II.35 Angka Balita Stunting Tahun 2018-2020.....II-57

Gambar II.36 Jumlah Konflik Sosial Tahun 2016-2020 II-72

Gambar II.37 Jumlah Penegakan Pelanggaran Perda Tahun 2016-2020 II-72

Gambar II.38 Jumlah Gangguan Trantibum Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-73

Gambar II.39 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-74

Gambar II.40 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2016-2020.....II-75

Gambar II.41 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020 II-81

Gambar II.42 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-82

Gambar II.43 Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017-2020.....II-83

Gambar II.44 Pergerakan Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat Tahun 2016-2020 II-90

Gambar II.45 Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan tahun 2016-2020 II-92

Gambar II.46 Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian Yang Diterbitkan Tahun 2016-2020 II-93

Gambar II.47 Jumlah KIA Yang Diterbitkan Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 II-94

Gambar II.48 Indikator Jumlah Club Olahraga dan Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020 II-103

Gambar II.49 Jumlah Sarana/Gedung Olahraga tahun 2016-2020 II-104

Gambar II.50 Indikator Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Pemuda Tahun 2016-2020 II-105

Gambar II.51 Ekspor Bersih Tahun 2016-2020.....II-114

Gambar II.52 Rasio Kinerja Jaringan Jalan Tahun 2016-2020 II-128

Gambar II.53 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan.....II-129

Gambar II.54 Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 II-130

Gambar II.55 Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020.....II-131

Gambar IV.1 Pilar Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-2

Gambar V.1 Keterkaitan antar Misi dalam Mencapai Visi Pembangunan Daerah.....V-3

Gambar V.2 Sasaran Misi I V-4

Gambar V.3 Sasaran Misi II V-5

Gambar V.4 Sasaran Misi III V-5

Gambar V.5 Sasaran misi IV V-6

Gambar V.6 Sasaran Misi V V-7

Gambar V.7 Cascading Misi I V-8

Gambar V.8 Cascading Misi II V-9

Gambar V.9 Cascading Misi III.....V-10

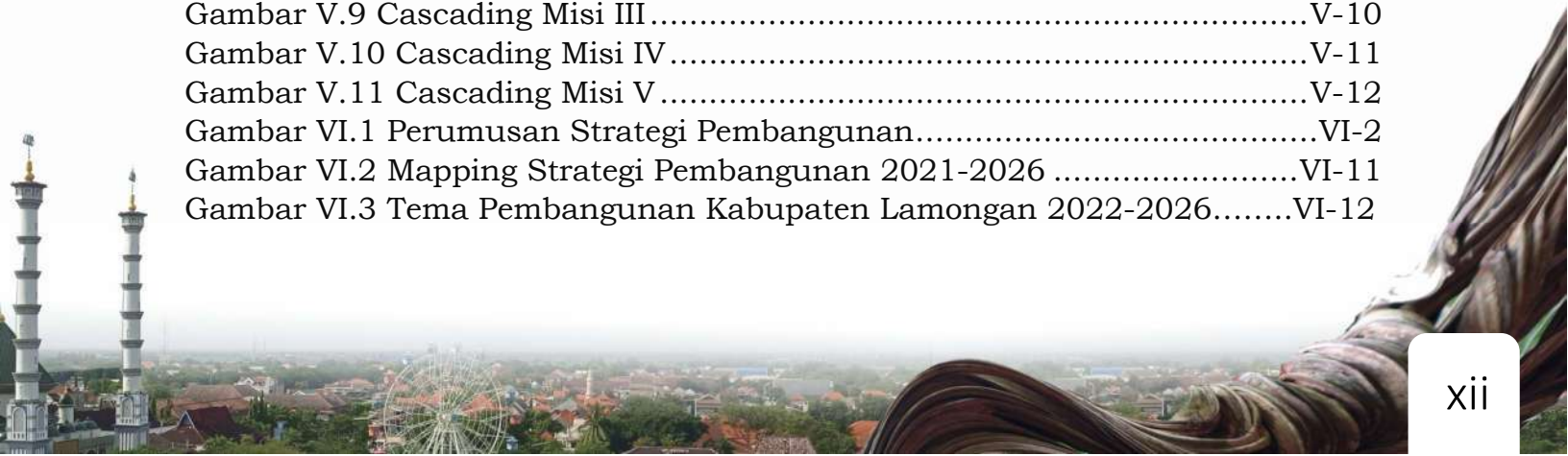
Gambar V.10 Cascading Misi IV V-11

Gambar V.11 Cascading Misi V V-12

Gambar VI.1 Perumusan Strategi Pembangunan.....VI-2

Gambar VI.2 Mapping Strategi Pembangunan 2021-2026 VI-11

Gambar VI.3 Tema Pembangunan Kabupaten Lamongan 2022-2026.....VI-12





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik pusat hingga daerah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan perlu menyusun perencanaan pembangunan baik yang sifatnya jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang substansinya harus saling berkaitan. Dengan adanya perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Merujuk pada ketentuan pasal 261 ayat (4), undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Periode tahun 2021-2026 yakni Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA dan Drs. KH. Abdul Rouf M,Ag yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada jumat 26 Februari 2021 harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s dan isu-isu strategis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Lamongan juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merujuk pada Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Berdasarkan periodisasi tahun perencanaan, RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke 5 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan pada periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kabupaten Lamongan, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2021-2026, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh tujuan RPJPD bisa tercapai pada akhir periode RPJMD. Dalam proses penyusunannya RPJMD Kabupaten Lamongan telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up).

Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 direpresentasikan dengan tersusunya Rancangan Teknokratik RPJMD dengan pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Lamongan. Sedangkan pendekatan partisipatif yakni dalam penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapannya dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* terkait dilingkup Kabupaten Lamongan meliputi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Akademisi, masyarakat dan Komunitas. Adapun pendekatan politis yakni penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah diterjemahkan melalui tujuan dan sasaran beserta indikator, sehingga dapat menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan. Pendekatan top-down dan bottom-up dalam penyusunan RPJMD merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dengan tahapan-tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.

Dengan disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, nantinya dapat menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka menjaga kesinambungan untuk mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofmor 5041) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

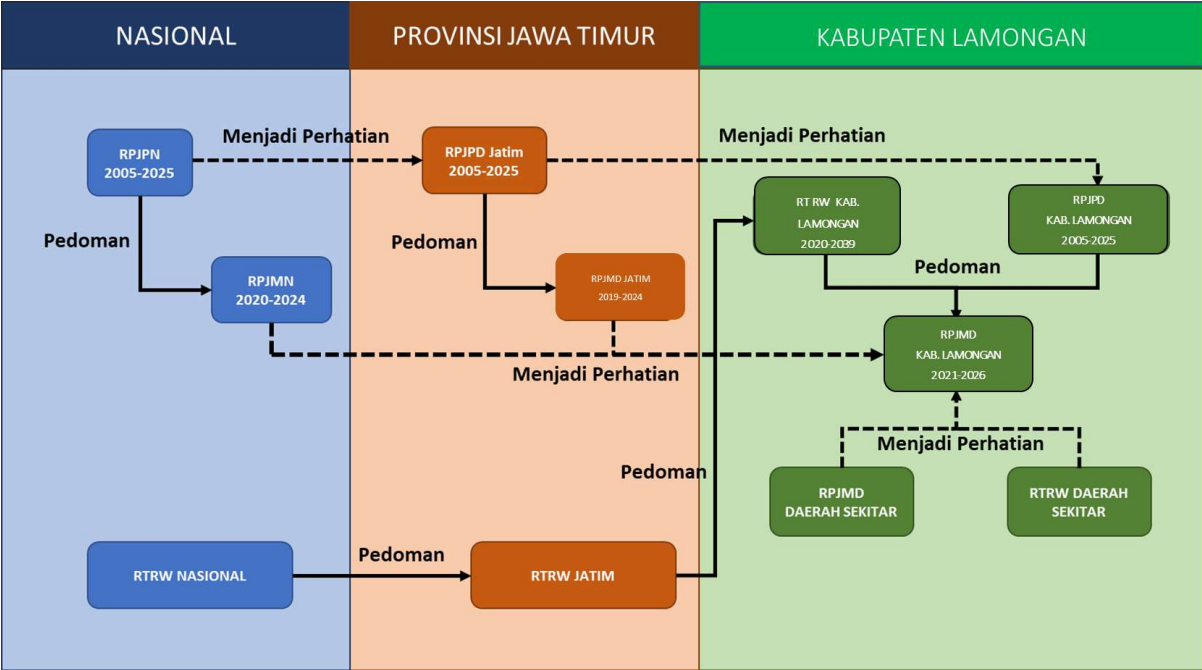
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan, menyebutkan bahwa sebelum disusunnya RPJMD baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota disusun dulu Rancangan Teknokratis RPJMD. Selanjutnya disaat platform politik dari Kepala Daerah terpilih telah muncul, maka rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan menjadi Dokumen RPJMD.

Merujuk terhadap sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan bagi pemerintah daerah. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan gambar di atas, dapat difahami bahwa RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 menyajikan hubungan sinergitas dengan dokumen RPJMN tahun 2019-2024. Hal ini sebagai acuan dalam melakukan telaah dan penyeselarasan kebijakan pembangunan daerah yang berdampak pada target pembangunan nasional berdasarkan isu-isu strategis pembangunan nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN selama periode 2020-2024. Hubungan keselarasan visi, misi dan arahan presiden yang tertuang di dalam RPJMN dengan frame pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel I.1 Keselarasan RPJMN Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan

	RPJMN 2020-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
Visi	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
Misi	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah 2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman 3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram. 5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan

	RPJMN 2020-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
	9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi
Prioritas Pembangunan	Arahan Presiden:	Program Prioritas
	Pembangunan SDM.	PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga miskin)
		Lamongan sehat
		Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Infrastruktur	JAMULA (Jalan Mantap dan alus Lamongan) Yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, pengedalian dan penanganan Banjir dan pembangunan jalan pertanian serta ketersediaan air baku.
	Transformasi Ekonomi	YES (Young Enterprneur Succes)
		RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi)
		YES (Yakin Semua Sejahtera)
	Penyederhanaan Regulasi	100% PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
	Penyederhanaan Birokrasi	Peningkatan Kualitas Manajemen ASN

2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, terutama pedoman tentang isu-isu strategis arah pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan potensi dan pengembangan wilayah. Keselarasan program prioritas Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
Visi	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
Misi	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah 2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman 3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram. 5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
Prioritas Pembangunan	Nawa Bhakti	Program Prioritas
	Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	Perintis (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga Miskin)
		Lamongan sehat
	Jatim Akses: Pemerataan aksesibilitas infrastruktur	JAMULA (Jalan Mulus Lamongan) Yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, pengedalian dan penanganan Banjir dan pembangunan jalan pertanian serta ketersediaan air baku.
	Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	Lumbung Pangan Lamongan DESA BERJAYA
	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.	RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) YES (Young Enterpereneur Success)
	Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	YES : Yakin Semua Sejahtera
	Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	YES (Young Enterprneur Succes) UMKM
	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	100% PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
	Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Lamongan Religi Festival Budaya
	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	

3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 juga memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Kabupaten Lamongan dalam Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota yang terdiri dari Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila). Dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP), Kabupaten Lamongan termasuk dalam WP Gerbangkertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan,

perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Dalam rencana penetapan kawasan andalan, Kabupaten Lamongan masuk sebagai Kawasan dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Selain itu Kabupaten Lamongan juga termasuk dalam rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP yakni kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) dan sekitarnya, kawasan agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara dan Kawasan Perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila dan segitiga emas pertumbuhan Tuban–Lamongan-Bojonegoro.

- Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 berpedoman pada Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025 yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Lamongan , yaitu mewujudkan Lamongan sebagai kabupaten yang adil, merata, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 Tahap V dengan Keselarasan sebagai berikut:

Tabel I.3 Keselarasan RPJPD 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026

No	RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025	Prioritas Pembangunan RPJP Tahun Ke 4 (2021-2025)	RPJMD	Program Prioritas Kepala Daerah
	VISI			
	Terwujudnya Lamongan yang Adil, Merata, Sejahtera, dan Berdaya Saing		Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan	
	MISI			
1	Mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.	Mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam segala bidang dalam konteks pembangunan seJawa Timur. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Lamongan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain	Misi 2: Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Bidang Pendidikan: Beasiswa Pendidikan sampai S2 bagi warga kurang sejahtera dan Berprestasi Insentif Guru Ngaji dan TPQ Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Beasiswa berprestasi khusus Hafiz Bidang Kesehatan: Bantuan klinik Kesehatan di pesantren Layanan konsultasi Kesehatan di Puskesmas dan RSUD Pelayanan kunjungan dan penyuluhan Kesehatan Peningkatan kualitas sarpras puskesmas dan RSUD Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin penyandang masalah



No	RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025	Prioritas Pembangunan RPJP Tahun Ke 4 (2021-2025)	RPJMD	Program Prioritas Kepala Daerah
				kesejahteraan sosial/lanjut usia/disabilitas Bidang Pemuda dan Olahraga: Revitalisasi stadion dan sport centre lamongan Pembinaan atlet usia dini Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga E-Sport Lamongan Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
2	Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah.		Misi 1: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Bidang Ketenagakerjaan: 1.000 Lapangan Pekerjaan Baru Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 10.000 Wirausaha Baru Bidang Pertanian dan Perikanan: Mengembangkan Pertanian Lamongan Berbasis Ramah Lingkungan Diversifikasi Tanaman Pangan Berbasis Komoditi Unggulan Bidan UMKM: Lamongan Kreatif Pesantren Kreatif (Santripreneurship) Bantuan Modal Pendampingan dan Pemasaran Gerakan Membeli Produk Lamongan Revitalisasi Pasar Desa Membangun Sentra UMKM Lamongan Bidang Pariwisata: Membangun Destinasi Pariwisata Religi, Bahari dan Heritage Peningkatan Industri dan Promosi Wisata
3	Mewujudkan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang terisolir dan menghubungkan antar kawasan.	Pencapaian keunggulan pembangunan Kabupaten Lamongan relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain.	Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	Bidang Infrastruktur: Memastikan jalan dalam kondisi mantap melalui standarisasi kualitas pembangunan jalan Pembangunan taman tematik Ketersediaan sumber air baku untuk semua desa Pengembangan kawasan industri Percepatan realisasi ringroad utara Lamongan Pengendalian dan Penanganan Banjir Pengendalian dan Penanganan Bencana alam serta sosial Penanganan dan Pengendalian Limbah dan Sampah



No	RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025	Prioritas Pembangunan RPJP Tahun Ke 4 (2021-2025)	RPJMD	Program Prioritas Kepala Daerah
4	Mewujudkan Lamongan yang Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik).		Misi 5: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Bidang Pelayanan Publik: Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan Menambah Jenis-Jenis Layanan Pada Mal Pelayanan Publik IMB Gratis untuk Rumah tangga kurang mampu Ijin usaha PIRT Gratis bagi UMKM yang memproduksi hasil olahan serta yang hanya memiliki karyawan maksimal 3 orang. Lahir Procot langsung bawa pulang KK, Akta dan KIA Ojek Pelayanan Publik Digitalisasi Pelayanan Publik Tracking proses pelayanan publik Integrasi aplikasi pelayanan publik Meningkatkan kualitas Manajemen ASN
5	Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.	Kontribusi Kabupaten Lamongan terhadap pembangunan regional dan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain.	Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	
6	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal.	Mendayagunakan semaksimal mungkin potensi yang ada	Misi 4: Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.	Bidang Sosial: Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin PMKS/Lanut usia/penyandang disabilitas Bedah rumah dan pemberian sembako bagi warga kurang mampu Memperkuat gerakan Lamongan menghafal Menyelenggarakan festival Hafidz Lamongan Menyelenggarakan secara rutin event syiar agama Meningkatkan aktivitas keagamaan ditingkat desa Menambah bantuan sarana dan prasarana ibadah Bidang Kebudayaan: Menyelenggarakan event kebudayaan khas Lamongan Menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan khas desa Pembinaan pelaku seni budaya lamongan

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



(RTRW) Tahun 2020-2039. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah kesesuaian program prioritas dengan program pada pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026. Keselarasan program RPJMD dengan RTRW sebagai berikut:

Tabel I.4 Keselarasan RTRW 2020-2039 Dengan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026

RPJMD 2021-2026				RTRW 2020-2039	
No	Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi	Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang	Lokasi
1	Jalan Mulus Lamongan (Jamula) yakni program pembangunan infrastruktur jalan, penanganan dan pengendalian banjir serta ketersediaan sumber air baku untuk masyarakat.	Pembangunan Jalan Tol	Lamongan	Rencana pengembangan jalan nasional sebagai jalan tol Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro-Tuban – Lamongan –Gresik	Lamongan
2		Peningkatan Jalan Raya Gresik, Raya Lamongan	Lamongan	Rencana Pemantapan Jalan Nasional sebagai jalan arteri primer	Lamongan-Gresik
3		Jalan radial menuju Pelabuhan Paciran	Paciran	Rencana Peningkatan Fungsi Menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Sukodadi, Karanggeneng, Solokuro, Paciran, Mantup-Balompanggung (Gresik)
4		Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	Turi, Lamongan, Deket	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Utara Lamongan	Turi, Lamongan, Deket
5		Pembangunan drainase Jalan Nasional Arteri Primer (Widang Batas Kota Lamongan, Jl. Jagung Suprpto, Batas Kota Lamongan Batas Kab. Gresik, Jl. P. B. Sudirman)	Babat – Lamongan	Rencana Pemantapan Jalan Nasional sebagai jalan arteri primer	1. Batas Kabupaten. Tuban – Widang; 2. Widang/Bedahan – Batas Kabupaten Lamongan; 3. Jln. Jagung Suprpto; 4. Batas Kota Lamongan – Batas Kabupaten. Gresik; dan 5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan)
6		Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer / Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik	Brondong, Paciran	Rencana Pemantapan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer JKP – 1	1. Lohgung (km.93.175 – Sadang) – BatasKabupaten. Lamongan dan 2. Widang/Bedahan – Babat
7		Pengendalian Banjir Kali Lamong	Lamongan, Gresik dan Surabaya	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana banjir	Kabupaten Lamongan
8		Rehabilitasi Daerah Irigasi Gondang	Kec. Sugio, Kec. Kembangba hu, Kec. Sukodadi, Kec. Lamongan, Kec. Tikung	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat	DI Kewenangan Pusat: 1. DI Bengawan Jero; 2. DI Waduk Prijetan; dan 3. DI Waduk Gondang.
9		Percepatan penuntasan Saluran primer Daerah Irigasi Bengawan Jero (Lanjutan saluran primer Intake Babat Barrage)	Kec. Babat	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan



RPJMD 2021-2026				RTRW 2020-2039	
No	Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi	Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang	Lokasi
10		Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Jero	Kec. Pucuk, Kec. Maduran, Kec. Karanggeneng, Kec. Kalitengah, Kec. Turi, Kec. Karangbina ngun, Kec. Glagah	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan
11		Pembangunan Waduk Pedes dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong	Kec. Sambeng	Normalisasi Waduk dan rawa	Kabupaten Lamongan
12		Pembangunan SPAM	Karangbina ngun	Rencana Pengembangan SPAM Regional	1. SPAM Klaster Kecil (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik) 2. SPAM Klaster Besar (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, KabupatenGresik, KabupatenBangkalan)
13		Peningkatan SPAM	Brondong		
14		Pengembangan Kawasan Industri	Brondong – Paciran	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Paciran; b. Kecamatan Brondong; c. Kecamatan Solokuro; d. Koridor jalan arteri primer, meliputi: 1. Kecamatan Deket 2. Kecamatan Lamongan 3. Kecamatan Sukodadi 4. KecamatanPucuk 5. Kecamatan Babat e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi: 1. Kecamatan Tikung 2. Kecamatan Kembangbahu 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Kedungpring 6. Kecamatan Mantup 7. Kecamatan Modo



RPJMD 2021-2026				RTRW 2020-2039	
No	Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi	Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang	Lokasi
15	Lumbung Pangan Lamongan, yakni program untuk pengembangan sektor pertanian	Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan	Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Agropolitan	a. Kecamatan Mantup b. Kecamatan Kembangbahu c. Kecamatan Sukorame d. Kecamatan Bluluk e. Kecamatan Sambeng f. Kecamatan Modo g. Kecamatan Sugio h. Kecamatan Kedungpring
16		Program Agropolitan Gerbangkertosusila	Kawasan GKS	Pengembangan Kawasan Agropolitan	a. Kecamatan Mantup b. Kecamatan Kembangbahu c. Kecamatan Sukorame d. Kecamatan Bluluk e. Kecamatan Sambeng f. Kecamatan Modo g. Kecamatan Sugio h. Kecamatan Kedungpring
17		Pengembangan Minapolitan (Pemberdayaan Kelompok Nelayan)	Pantura	Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap Pengembangan Minapolitan Budidaya	Brondong dan Paciran 1. Kecamatan Pucuk; 2. Kecamatan Deket; 3. Kecamatan Glagah; 4. Kecamatan Karangbinangun; 5. Kecamatan Turi; 6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Kalitengah; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Paciran; 10. Kecamatan Brondong.
18	Pariwisata Rama dan Terintegrasi (Ramasinta) yakni program	Program Dewi Cemara (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera)	Di Seluruh Kecamatan	Pengembangan kawasan pariwisata	Kabupaten Lamongan



RPJMD 2021-2026				RTRW 2020-2039	
No	Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi	Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang	Lokasi
	pengembangan untuk sektor Pariwisata	melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;	1. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran; 2. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran; 3. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran; 4. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan; 5. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran; 6. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang; 7. Desa Balun di Kecamatan Turi; 8. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan; 9. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong; 10. Situs Candi Pataan di kecamatan Sambeng; dan 11. Kawasan cagar budaya lainnya	melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;	1. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran; 2. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran; 3. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran; 4. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan; 5. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran; 6. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang; 7. Desa Balun di Kecamatan Turi; 8. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan; 9. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong; 10. Situs Candi Pataan di kecamatan Sambeng; dan 11. Kawasan cagar budaya lainnya
		Pengembangan obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata	Seluruh Kecamatan	Pengembangan obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata	Seluruh Kecamatan
		Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi	Seluruh Kecamatan	Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi	Seluruh Kecamatan
		Pelestarian lingkungan alam pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata.	Seluruh Kecamatan	Pelestarian lingkungan alam pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata.	Seluruh Kecamatan

RPJMD 2021-2026				RTRW 2020-2039	
No	Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi	Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang	Lokasi
		Peningkatan dan Pengembangan kualitas lingkungan objek wisata	Seluruh Kecamatan	Peningkatan dan Pengembangan kualitas lingkungan objek wisata	Seluruh Kecamatan
		Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan	Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan
		Peningkatan peran masyarakat/pengembangan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan peran masyarakat/pengembangan	Seluruh Kecamatan
		Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Kecamatan Paciran	Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Kecamatan Paciran
19	Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera (PERINTIS)	Beasiswa Pendidikan Sampai S2			
		Beasiswa Bagi Hafidz			
		Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik			
20	Lamongan Sehat	Bantuan Layanan Kesehatan di Pesantren	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Homecare Servis	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana RSUD Puskesmas Posyandu	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
21	Young Entrepreneur Success (YES)	Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a, Kecamatan Paciran; b. Kecamatan Brondong; c. Kecamatan Solokuro; d. Koridor jalan arteri primer, meliputi: 1. Kecamatan Deket 2. Kecamatan Lamongan 3. Kecamatan Sukodadi 4. Kecamatan Pucuk 5. Kecamatan Babat e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi: 1. Kecamatan Tikung 2. Kecamatan Kembangbahu 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Kedungpring 6. Kecamatan Mantup 7. Kecamatan Modo
		Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja			

RPJMD 2021-2026				RTRW 2020-2039	
No	Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi	Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang	Lokasi
		10.000 Wirausaha Baru (Santripreneur & Kepala Keluarga Perempuan Kurang Sejahtera)	Kabupaten Lamongan	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh Kecamatan
22	UMKM	Fasilitasi Pengembangan UMKM			
		Fasilitasi Pengembangan IKM	Seluruh Kecamatan	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh Kecamatan
		Gerakan Membeli Produk Lamongan			
		Revitalisasi Pasar Desa	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Membangunan Sentra UMKM	Seluruh Kecamatan	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh Kecamatan
23	Pemuda dan Olahraga	Revitalisasi Stadion dan Sport Center	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Pembinaan Atlet Sejak Dini			
		Peningkatan Prestasi Olahraga			
24	Yakin Semua Sejahtera (YES)	Jaminan Sosial bagi PPKS			
		Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera	Kabupaten Lamongan	Penyediaan Perumahan berimbang yang terjangkau semua lapisan masyarakat	Kabupaten Lamongan
			Kabupaten Lamongan	Perbaikan lingkungan bagi kawasan kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan	Kabupaten Lamongan
25	Pelayanan Publik	Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Integrasi Layanan Kependudukan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
26	Desa Berjaya	Bantuan Program Pembangunan Dusun	Seluruh Dusun di Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan
		Pembangunan Desa Berdasarkan Potensi Unggulan	Seluruh Desa Di Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan

6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga memperhatikan program prioritas daerah sekitar. Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar sebagai pertimbangan terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan yakni Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik. Telaah arah pembangunan mengacu pada Visi dan Misi serta program prioritas Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 ketiga daerah tersebut juga sedang menyusun dokumen RPJMD. Selain memperhatikan tiga daerah tersebut, dalam penyusunan RPJMD juga memperhatikan program prioritas pembangunan Kabupaten



Bojonegoro dan Jombang. Terdapat empat aspek program yang memiliki kesamaan antar wilayah yakni sebagai berikut:

Tabel I.5 Keselarasan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 Dengan Daerah Sekitar

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
Visi	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan, Berlandaskan Akhlaqul Karimah	Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan melalui mbangun deso noto kutho	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.	Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing	Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing
Misi	1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah 2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman 3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram. 5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif 2. Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan Desa, dan menata kota 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor, dan antar Wilayah 4. Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat, dan berakhlauqul karimah 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan menciptakan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal 2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan, yang berbasis pemberdayaan dan	1. Melakukan pemerataan dan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia serta pengoptimalan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan	1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan local 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab 3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan 4. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa 5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif 6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal 7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional 2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya 3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
			ekonomi kerakyatan 3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih, menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergisitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif 4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, professional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.	teknologi. 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan. 5. Membangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan, dan optimalisasi PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.	merata dan ramah lingkungan	

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
Program Bidang Sosial & SDM	1. Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera (PERINTIS) a. Beasiswa Pendidikan Sampai S2 b. Beasiswa Bagi Hafidz c. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan d. Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik 2. Lamongan Sehat a. Bantuan Layanan Kesehatan di Pesantren b. Homecare Servis c. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana RSUD Puskesmas Posyandu 3. Pemuda dan Olahraga a. Revitalisasi Stadion dan Sport Center b. Pembinaan Atlet Sejak Dini c. Peningkatan Prestasi Olahraga & Pemuda 4. Yakin Semua Sejahtera (YES) a. Jaminan Sosial bagi PPKS b. Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera	1. Gresik Cerdas. Bantuan melalui voucher dana pendidikan untuk siswa dari tingkat SD/MI hingga SMA/SMK, anak yatim piatu, huffadz, dan penyandang disabilitas. Pemberian insentif bagi guru tidak tetap dan non-sertifikasi, serta guru PAUD dan TK. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pondok pesantren dan sekolah, khususnya di Pulau Bawean. 2. Gresik Sehat. Peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis profesional dengan menjadikan puskesmas sebagai basis program komunitas rumah sehat. Mereka juga akan memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat kurang mampu, membangun rumah sakit baru di daerah selatan, serta memperkuat rumah sakit yang ada di Bawean	1. Memantapkan SDM yang berkualitas melalui pemahaman nilai keagamaan dan kearifan lokal serta pendidikan karakter. 2. Membangun Pendidikan yang partisipatif dan memberikan bantuan pendidikan untuk keluarga tidak mampu, insentif guru, bantuan operasional untuk pesantren dan Madin dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. 3. Membangun Kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan balita hingga lansia, kemudahan akses layanan dan perbaikan sanitasi lingkungan serta air bersih 4. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, seni, budaya dan cinta olahrag bagi Pemuda.	1. Program Bidang Pendidikan yakni peningkatan SDM, Mutu lulusan sekolah, Pelayanan dan Manajemen sekolah 2. Program Bidang Kesehatan yakni pembangunan infrastruktur kesehatan yang memiliki standard penanganan Covid-19, kualitas pelayanan medis hingga desa dan mengkampanyekan pentingnya kesadaran PHBS bagi masyarakat 3. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial melalui sinkronisasi data dan melakukan peningkatan modal sosial masyarakat serta penataan kawasan perkampungan supaya aman, nyaman dan bersih.	1. Program Peningkatan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas dan kualitas SDM 3. Program Perlindungan, Perempuan, anak dan PMKS	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik 3. Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6. Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat 7. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun 8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun 9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun 10. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun 11. Program Perlindungan Perempuan dan Anak 12. Program Peningkatan Kualitas

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
						Hidup Perempuan dan Anak 13. Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan 14. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 15. Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial 16. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
Program Bidang Ekonomi	1. Young Enterpreneur Succes (YES) a. Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja b. Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja c. 10.000 Wirausaha Baru (Santripreneur & Kepala Keluarga Perempuan Kurang Sejahtera) 2. Lumbung Pangan Lamongan a. Ketersediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian b. Diversifikasi Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan c. Peningkatan Bantuan Untuk Pemberantasan OPT d. Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan e. Pembangunan Pasar Ikan Modern yang dilengkapi Cold Storage 3. UMKM a. Fasilitasi Pengembangan UMKM b. Fasilitasi Pengembangan IKM c. Gerakan Membeli Produk Lamongan d. Revitalisasi Pasar Desa e. Pembangunan Sentra UMKM 4. Gerakan Membangun Pariwisata Rama dan Terintegrasi (RAMASINTA) a. Membangun Destinasi Pariwisata Religi, Bahari dan Heritage	1. Gresik Mapan menata dan menambah fasilitas taman kota, memberikan ruang ekonomi bagi produk UMKM. 2. Gresik Lestari. Pengembangan dan revitalisasi ekowisata dengan mengedepankan keunggulan kompetitif di setiap desa. 3. Gresik Agropolitan. Poin utama dalam program ini adalah peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan sektor perikanan dengan menerbitkan kartu Go Tani untuk akses bantuan dan pendampingan peningkatan usaha. Revitalisasi pasar hewan dan tempat pelelangan, penguatan kelompok nelayan, serta pembangunan tekno park berbasis minapolitan. 4. Gema Karya. Dengan program ini, paslon Niat ingin memberikan permodalan serta penguatan manajemen terhadap produk yang dihasilkan pesantren. Program co-working space yang nantinya kita bangun dengan Gresik creative hub.	1. Membangun Ekonomi melalui penguatan produk unggulan desa, penguatan UMKM, Koperasi dan kemitraan dengan dunia usaha. 2. Mengembangkan produk hasil olahan dari potensi perikanan, pertanian dan peternakan serta penguatan sektor pariwisata.	1. Program Pemberdayaan Perempuan melalui pengembangan usaha untuk keluarga 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan melalui pembangunan pertanian berbasis potensi wilayah, gerakan pemberdayaan petani dan memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan sarana dan prasarana pertanian. 3. Program Perluasan Kesempatan Kerja melalui bertumbuhnya jumlah investor, perluasan BLK hingga kecamatan dan melakukan kerjasama Tripartit serta meningkatkan peran UMKM	1. Program Penyediaan lapangan Kerja 2. Program Pengembangan Ekonomi lokal	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4. Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM 5. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan 6. Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman 7. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 8. Program Pembangunan Desa 9. Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal 10. Program Pemasaran Pariwisata 11. Program Pengembangan Pariwisata 12. Program Peningkatan

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
	b. Meningkatkan Industri dan Promosi Wisata 5. Desa Berjaya a. Pembangunan Desa Berdasarkan Potensi Unggulan					Penerapan Teknologi Pertanian 13. Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan 17. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 18. Program Peningkatan Produksi Perikanan 19. Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan 20. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah 21. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
Program Bidang Infrastruktur	1. Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA) a. Pemeliharaan dan pembangunan Jalan b. Pemeliharaan dan pembangunan Jembatan c. Ketersedian Air Baku untuk Pertanian d. Ketersedian Air Bersih Bagi Masyarakat e. Taman Tematik f. Pengembangan Kawasan Industri 2. Desa Berjaya a. Bantuan Program Pembangunan Dusun 3. Pemuda dan Olahraga a. Revitalisasi Stadion dan Sport Center	1. Gresik Mapan. Memberikan bantuan khusus untuk pembangunan infrastruktur dusun. 2. Gresik Lestari. Mendorong terciptanya industri ramah bagi lingkungan dan berkelanjutan, serta membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan.	1. Pembangunan kawasan berbasis pada pelestarian lingkungan, melakukan rehabilitasi lingkungan kawasan pantai, hutan dan pertambangan. Melakukan konservasi sumber air, memperbanyak RTH dan melakukan pengelolaan sampah. 2. Melakukan pembangunan desa dan penguatan Tuban sebagai Koridor maritim Logistik	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Wilayah melalui pengembangan akses perluasan jalan dan sarana pendukungnya serta memberikan kemudahan untuk konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat	1. Program Pembangunan insfratraktur 2. Program Peningkatan kualitas lingkungan	1. Program Penataan Lingkungan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3. Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan 4. Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan 5. Program Konservasi Lingkungan 6. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 7. Program pengelolaan jaringan irigasi 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik 10. Program Pengembangan Perumahan 11. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar

Aspek	RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026	RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026	RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023	RPJMD Kabupaten Jombang 2019-2023
						13. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Program Bidang Pemerintahan	1. Pelayanan Publik a. Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan b. Digitalisasi Pelayanan Publik c. Integrasi Layanan Kependudukan	1. Gresik Akas. Pengurusan kependudukan (catatan sipil) cukup sampai di tingkat kecamatan. Termasuk, kemudahan pengurusan catatan sipil via online dan pengaduan layanan bisa dilakukan di tingkat RT (rukun tetangga) 2. Gema Karya. Peningkatan dan percepatan pelayanan yang terkoneksi dengan pemprov dan pemerintah pusat terkait perizinan dan investasi.	Membangun Pemerintahan melalui pelayanan berbasis IT, penguatan sistem pengendalian internal dan integrasi perencanaan pembangunan Desa-Kota	1. Program pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi bagi OPD 2. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan potensi PAD berbasis IT dan GPS, peningkatan kualitas SDM dan pengawasan terhadap kinerja pengelola PAD	Program peningkatan kinerja pemerintah	1. Program Pengembangan Layanan e-Government 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Bina Pemerintahan Desa 4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Penelitian dan Pengembangan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan, untuk menjaga kesinambungan dalam rangka terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan sepanjang tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Lamongan juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026.
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026.
3. RPJMD Kabupaten Lamongan 2022-2026 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan strategis daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
4. Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan 2022-2026 dapat menjadi acuan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun. RKPD juga sebagai penjabaran dari RPJMD, terutama terkait dengan sasaran, arah kebijakan dan program perangkat daerah.
5. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2022-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Lamongan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lamongan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis mengenai kondisi geografis di daerah Kabupaten Lamongan yang mencakup luas wilayah berdasarkan batas administrasi pemerintahan kabupaten, karakteristik dan potensi pengembangan wilayah serta beberapa data atau informasi lainnya yang terkait dengan kondisi Kabupaten Lamongan. Selain itu, juga terdapat analisis mengenai kondisi demografi atau kependudukan di Kabupaten Lamongan.

2.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Geografis

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah ±1.752,21 km² atau setara dengan 175.221 Ha atau ±3.67% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan wilayah perairan laut seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan. Berikut rincian data terkait dengan luas daerah dan persentase terhadap luas Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020:

Tabel II.1 Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Lamongan Tahun 2020

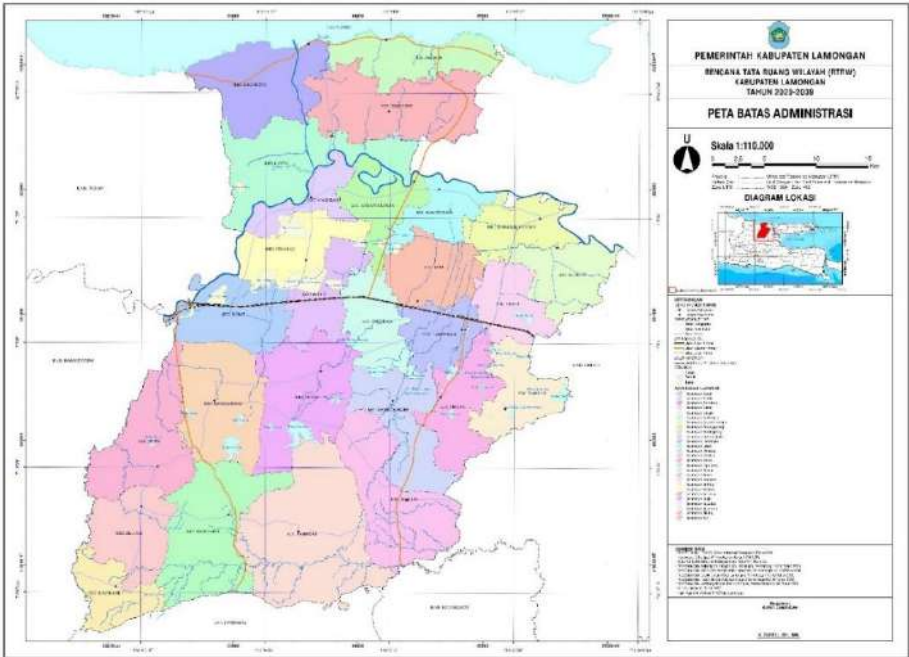
No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1.	Sukorame	Sukorame	3.929	2,24
2.	Bluluk	Bluluk	5.800	3,31
3.	Ngimbang	Sendangrejo	10.006	5,71
4.	Sambeng	Ardirejo	15.078	8,61
5.	Mantup	Mantup	9.123	5,21
6.	Kembangbahu	Kembangbahu	6.825	3,90
7.	Sugio	Sugio	8.974	5,12
8.	Kedungpring	Kedungpring	8.573	4,89
9.	Modo	Mojorejo	8.170	4,66
10.	Babat	Bedahan	6.459	3,69
11.	Pucuk	Pucuk	4.538	2,59
12.	Sukodadi	Sukodadi	4.748	2,71
13.	Lamongan	Lamongan	4.094	2,34
14.	Tikung	Bakalanpule	5.542	2,16
15.	Sarirejo	Dermolemahbang	4.887	2,79
16.	Deket	Deketwetan	4.395	2,51
17.	Glagah	Glagah	5.002	2,85
18.	Karangbinangun	Sambopinggir	4.726	2,70
19.	Turi	Sukoanyar	5.250	3,00
20.	Kalitengah	Dibee	3.695	2,11
21.	Karanggeneng	Karanggeneng	4.074	2,33
22.	Sekaran	Bulutengger	5.405	3,08
23.	Maduran	Maduran	3.278	1,87
24.	Laren	Gampangsejati	9.411	5,37
25.	Solokuro	Payaman	9.487	5,41

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
26.	Paciran	Paciran	5.681	3,24
27.	Brondong	Brondong	8.072	4,61
Jumlah			175.221	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6°51’54”-7°23’6” Lintang Selatan dan berada di antara 112°4’41”-112°33’12” Bujur Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
- b) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
- c) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- d) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gresik



Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan
 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

2.1.1.2 Kondisi Kawasan

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut:

- a) Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro
- b) Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat,

Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio

- c) Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Topografi/ketinggian adalah kondisi ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0-186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo yaitu:

1. Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun sebetulnya merupakan suatu depresi (cekungan) yang tertutup oleh endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada Zone Kendeng dan Rembang. Sejarah geologi Kabupaten Lamongan diperkirakan dimulai kurang lebih 37 juta Tahun yang lalu (Kala Oligosen). Saat itu wilayah Kabupaten Lamongan masih berupa lautan (bagian dari Cekungan Jawa Timur). Selanjutnya terjadi proses sedimentasi secara berurutan ke atas berupa penghamparan batuan sedimentasi laut yang kaya unsur karbonatan. Proses ini berlangsung hingga kurang lebih 19 juta Tahun (hingga Kala Polisen).

Pada kurang lebih 1,8 juta Tahun yang lalu terjadi aktifitas tektonik (Orogenesa Plio-Pleistosen) yang menyebabkan terangkatnya Kabupaten Lamongan muncul ke permukaan laut. Jenis batuan yang ada di Kabupaten

Lamongan sebagai berikut : Aluvial seluas 2.422,01 ha, Aluvium dan Endapan Koastal seluas 67.280,03 ha, Formasi Kalipucang seluas 8.121,16 ha, Formasi Lidah seluas 6.294,25 ha, Formasi Pucangan seluas 12.273,89 ha, Formasi Tambakromo seluas 30.660,10 ha, Formasi Lengkong seluas 10.119,28 ha, Anggota Bawah Formasi Tuban seluas 1.022,50 ha, Anggota Napal Formasi Kujang seluas 789,65 ha, Anggota Tengah Formasi Kujang seluas 12.390,10 ha, Anggota Batugamping Prupuh Formasi Kunjung seluas 530,71 ha, Anggota Atas Formasi Kunjung seluas 517,11 ha, Formasi Kalibeng seluas 9.429,20 ha, Formasi Klitik seluas 328,79 ha, Formasi Mundu seluas 11.608,06 ha, Formasi Sonde seluas 1.433,90 ha.

2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai air dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir pada sebagian wilayah. Namun sebaliknya pada saat musim kemarau, di sebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata $531,61 \text{ m}^3/\text{bulan}$ (debit maksimum $1.758,46 \text{ m}^3$ dan debit minimum $19,58 \text{ m}^3$) yang bermata air di Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah), Kali Blawi sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan. Waduk di Kabupaten Lamongan berjumlah 33 Waduk dengan luas keseluruhan 2.326 Ha dan volume $51.093.192 \text{ m}^3$.

Keberadaan waduk di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah seluas 20.960 Ha utamanya lahan sawah berpengairan teknis dan $\frac{1}{2}$ teknis, sehingga keberadaan waduk sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Waduk yang paling besar di Kabupaten Lamongan adalah waduk Gondang yang berada di Kecamatan Sugio dengan luas 660 Ha dan kapasitas volume sebesar $23.712.500 \text{ m}^3$. Di Kabupaten Lamongan juga terdapat rawa sebagai penampungan air. Jumlah rawa di Kabupaten Lamongan sebanyak 11 rawa dengan luas keseluruhan 6.878 Ha dan kapasitas volumenya sebesar $59.743.500 \text{ m}^3$. Rawa juga sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk kegiatan pertanian. Rawa yang ada di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah berpengairan sederhana seluas 9.934 Ha. Rawa terluas di Kabupaten Lamongan adalah waduk Jabung dengan luas 4.968 Ha dan volume $37.660.000 \text{ m}^3$.

2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh kondisi suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, tekanan udara, dan jumlah curah hujan serta kondisi penyinaran matahari sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2 Kondisi Suhu dan Kelembaban Udara Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Min	Maks	Rata-Rata	Min	Maks	Rata-Rata
Januari	22,40	33,40	27,96	64,00	98,00	84,93
Februari	23,90	32,40	27,88	68,00	98,00	86,06
Maret	24,00	33,60	28,24	62,00	99,00	84,21
April	24,70	33,30	28,33	66,00	98,00	83,95
Mei	23,50	32,80	28,72	69,00	98,00	83,32
Juni	24,00	31,40	28,72	64,00	96,00	77,60
Juli	24,70	31,10	28,19	62,00	92,00	76,84
Agustus	24,20	31,40	28,28	63,00	97,00	77,69
September	25,10	32,80	28,97	62,00	93,00	76,64
Oktober	23,80	32,70	28,75	60,00	95,00	79,19
November	23,50	33,20	28,40	65,00	98,00	83,16
Desember	22,90	32,50	27,44	66,00	98,00	85,95

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, jika suhu udara maksimum di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 berada di antara 31,10°C-33,60°C, yang mana tertinggi terjadi di bulan Maret dan suhu minimum berada pada 22,40°C-25,10°C. Kemudian untuk kondisi kelembaban udara maksimum pada angka 92,00%-99,00% dan tertinggi terjadi pada bulan Maret serta kondisi minimum pada angka 60,00%-69,00% yang terendah terjadi di bulan Oktober.

Tabel II.3 Kondisi Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Tahun 2020

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Maks	Rata-Rata	Min	Maks	Rata-Rata
Januari	0,00	8,75	1,73	1005,00	1013,70	1009,01
Februari	0,00	12,35	1,60	1005,10	1013,30	1009,74
Maret	0,00	5,66	1,14	1005,70	1013,40	1009,30
April	0,00	6,17	1,33	1005,50	1013,40	1009,43
Mei	0,00	7,20	2,15	1004,10	1013,30	1008,98
Juni	0,00	8,75	3,33	1006,00	1014,10	1009,56
Juli	1,03	8,23	3,56	1006,20	1011,90	1009,12
Agustus	0,00	8,75	3,85	1006,20	1013,20	1009,59
September	0,00	9,26	3,19	1005,70	1012,70	1009,42
Oktober	0,00	7,72	2,52	1004,40	1011,80	1008,50
November	0,00	6,69	1,67	1004,80	1012,90	1008,57
Desember	0,00	9,77	2,22	1004,00	1010,80	1007,43

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2021

Selanjutnya terkait dengan kondisi kecepatan angin dan tekanan udara di Kabupaten Lamongan tahun 2020 berdasarkan tabel di atas, kecepatan angin maksimum berkisar pada 5,66-12,35m/det dan tertinggi pada bulan Februari serta kecepatan angin minimum pada angka 0,00-1,03m/det. Sedangkan untuk kondisi tekanan udara, maksimum antara 1010,80-1014,10mb yang tertinggi terjadi di bulan Juni dan kondisi minimum antara 1004,00-1006,20mb yang terendah terjadi pada bulan Desember.

Tabel II.4 Kondisi Jumlah Curah dan Hari Hujan serta Penyinaran Matahari Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	589,90	24	4,56
Februari	400,00	24	4,54
Maret	163,80	19	6,43
April	235,60	23	6,11
Mei	298,80	21	5,60
Juni	115,40	10	7,68
Juli	51,80	10	7,76
Agustus	19,70	6	8,97
September	2,00	5	8,72
Oktober	84,50	12	7,26
November	239,70	17	6,10
Desember	543,10	27	3,07

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2021

Tabel di atas menunjukkan jika jumlah curah hujan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 589,90mm dan terendah di bulan September yaitu 2,00mm. Kemudian untuk jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 27 hari, dan paling sedikit pada bulan September sebanyak 5 hari. Kondisi penyinaran matahari tertinggi sebesar 8,97% di bulan Agustus, dan terendah sebesar 3,07% pada bulan Desember.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan atau wilayah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 dapat diamati pada rincian tabel berikut ini:

Tabel II.5 Luas Kabupaten Lamongan Berdasarkan Penggunaan Lahan

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
A.	Rencana Kawasan Lindung	
1.	Kawasan Hutan Lindung	
a)	Kawasan Hutan Lindung	255,28
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	
a)	Sempadan Pantai	43
b)	Sempadan Sungai	570
c)	Sempadan Waduk	83
3.	Kawasan Lindung Geologi	
a)	Kawasan Cagar Alam Geologi	
	Kawasan Keunikan Bentang Alam	6
4.	Kawasan Ekosistem Mangrove	
a)	Kawasan Hutan Mangrove	84
B.	Rencana Kawasan Budidaya	
1.	Kawasan Hutan Produksi	31.437,57
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	
a)	Kawasan Tanaman Pangan	53.384
b)	Kawasan Hortikultura	10.509
c)	Kawasan Perkebunan	29.618
3.	Kawasan Peruntukan Perikanan	
a)	Kawasan Perikanan Budidaya	6.407
b)	Kawasan Perikanan Tangkap	43
4.	Kawasan Peruntukan Industri	7.419

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
5.	Kawasan Pariwisata	63
6.	Kawasan Permukiman	
	a) Kawasan Permukiman Perkotaan	13.898
	b) Kawasan Permukiman Perdesaan	16.365
7.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	5
8.	Kawasan Transportasi	153
9.	Kawasan Peruntukan Lainnya	
	a) Sungai	913
	b) Waduk	1.730
	c) Rawa	2.234
	JUMLAH	1.752.21

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan digunakan sebagai kawasan LP2B seluas 45.841,00 Ha, selanjutnya ada kawasan pertanian lahan kering seluas 38.683,76 Ha. Kemudian juga terdapat kawasan hutan produksi seluas 33.191,32 Ha, sedangkan luas kawasan untuk permukiman adalah 27.414,38 Ha. Luas lahan lainnya diperuntukkan sebagaimana yang tersaji dalam tabel di atas.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan meliputi kawasan rawan banjir, gelombang pasang, kebakaran, kekeringan, tanah longsor dan gempa bumi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali). Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi diseluruh kecamatan akibat luapan Sungai Bengawan Solo, luapan Kali Lamongan, dan anak-anak sungai lainnya karena curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan, kurangnya areal resapan serta daya tampung sungai yang semakin berkurang karena adanya sedimentasi dan sampah. Berikut sajian tabel yang berkaitan dengan kawasan rawan bencana banjir di daerah Kabupaten Lamongan:

Tabel II.6 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	1.013,96	3.928,70	25,8
2	Bluluk	686,74	5.799,93	11,8
3	Ngimbang	1.613,34	10.006,02	16,1
4	Sambeng	5.716,23	15.078,34	37,9
5	Mantup	636,66	9.123,19	7,0
6	Kembangbahu	2.423,13	6.825,07	35,5
7	Sugio	4.464,43	8.974,19	49,7
8	Kedungpring	3.798,40	8.572,74	44,3

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
9	Modo	3.328,88	8.169,76	40,7
10	Babat	3.988,16	6.459,43	61,7
11	Pucuk	3.589,94	4.538,49	79,1
12	Sukodadi	4.116,32	4.747,56	86,7
13	Lamongan	4.032,56	4.093,53	98,5
14	Tikung	1.942,79	5.541,58	35,1
15	Sarirejo	1.504,43	4.886,96	30,8
16	Deket	4.320,54	4.395,15	98,3
17	Glagah	5.001,24	5.001,53	100,0
18	Karangbinangun	4.714,88	4.726,21	99,8
19	Turi	5.185,75	5.250,09	98,8
20	Kalitengah	3.676,19	3.694,60	99,5
21	Karanggeneng	4.016,09	4.073,99	98,6
22	Sekaran	4.394,90	5.404,96	81,3
23	Maduran	3.133,10	3.277,68	95,6
24	Laren	6.066,41	9.411,28	64,5
25	Solokuro	453,98	9.486,89	4,8
26	Paciran	454,89	5.681,33	8,0
27	Brondong	772,48	8.071,51	9,6
Jumlah		85.046,42	175.220,72	48,5

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

b. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang merupakan suatu kawasan yang potensial dilanda gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, juga berpotensi kuat dalam menimbulkan bencana alam. Gelombang pasang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan pada kawasan desa-desa yang berada di kawasan pesisir, seperti:

- 1) Kecamatan Brondong, meliputi Desa Labuhan, Desa Lohgung, Desa Sedayulawas dan Kelurahan Brondong
- 2) Kecamatan Paciran, meliputi Desa Banjarwati, Desa Drajat, Desa Kandangsemangkon, Desa Kemantren, Desa Kranji, Desa Paciran, Desa Sidokelar, Desa Tlogosadang, Desa Tunggul, Desa Blimbing, Desa Weru, Desa Sidokumpul, Desa Waru Lor dan Desa Paloh

Berikut disajikan tabel luas wilayah berdasarkan kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kabupaten Lamongan:

Tabel II.7 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	0	3.928,70	0
2	Bluluk	0	5.799,93	0
3	Ngimbang	0	10.006,02	0
4	Sambeng	0	15.078,34	0
5	Mantup	0	9.123,19	0
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0
7	Sugio	0	8.974,19	0
8	Kedungpring	0	8.572,74	0

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
9	Modo	0	8.169,76	0
10	Babat	0	6.459,43	0
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	0	5.001,53	0
18	Karangbinangun	0	4.726,21	0
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	0	3.694,60	0
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0
22	Sekaran	0	5.404,96	0
23	Maduran	0	3.277,68	0
24	Laren	0	9.411,28	0
25	Solokuro	0	9.486,89	0
26	Paciran	4.147,10	5.681,33	73,00
27	Brondong	2.318,76	8.071,51	1,32
Jumlah		6.465,86	175.220,72	1,32

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

c. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor merupakan suatu kawasan yang berpotensi dilanda jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Lamongan terjadi pada desa-desa yang berada disepanjang daerah Sungai Bengawan Solo, meliputi:

- 1) Kecamatan Babat, mencakup Desa Bedahan, Desa Kebalanpelang, Desa Trepén, Desa Truni, Kelurahan Babat dan Kelurahan Banaran
- 2) Kecamatan Glagah, mencakup Desa Jatirenggo, Desa Karangturi, Desa Konang dan Desa Meluwur
- 3) Kecamatan Kali Tengah, mencakup Desa Butungan, Desa Canditunggal, Desa Kalitengah, Desa Kediren, Desa Kuluran, Desa Pengangsalan serta Desa Sugihwaras
- 4) Kecamatan Karangbinangun, mencakup Desa Banjarejo, Desa Banyuurip, Desa Bogobabadan, Desa Gawerejo, Desa Karangbinangun, Desa Kuro, Desa Palangan, Desa Watangpanjang serta Desa Windu
- 5) Kecamatan Karanggeneng, mencakup Desa Jagran, Desa Karanggeneng, Desa Karangwungu, Desa Mertani, Desa Prijekngablag, Desa Sumberwudi dan Desa Tracal
- 6) Kecamatan Laren, mencakup Desa Bulubrangsi, Desa Bulutigo, Desa Centini, Desa Duri Kulon, Desa Gampangsejati, Desa Godog,

Desa Karangtawar, Desa Karangwungu Lor, Desa Keduyung, Desa Laren, Desa Mojoasem, Desa Pasenggrahan, Desa Pelangwot, Desa Siser dan Desa Tamanprijek

- 7) Kecamatan Maduran, mencakup Desa Blumbang, Desa Brumbun, Desa Duri Wetan, Desa Gedangan, Desa Jangkungsomo, Desa Klagensrampat, Desa Maduran, Desa Pangean, Desa Pangkatrejo, Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Siwuran dan Desa Taji
- 8) Kecamatan Sekaran, mencakup Desa Besur, Desa Kendal, Desa Keting dan Desa Titik

Berikut disajikan tabel luas wilayah berdasarkan kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Lamongan:

Tabel II.8 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	0	3.928,70	0
2	Bluluk	0	5.799,93	0
3	Ngimbang	0	10.006,02	0
4	Sambeng	0	15.078,34	0
5	Mantup	0	9.123,19	0
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0
7	Sugio	0	8.974,19	0
8	Kedungpring	0	8.572,74	0
9	Modo	0	8.169,76	0
10	Babat	1.336,12	6.459,43	20,68
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	732	5.001,53	14,64
18	Karangbinangun	1.772,36	4.726,21	37,50
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	1.149,80	3.694,60	31,12
21	Karanggeneng	1.356,30	4.073,99	33,29
22	Sekaran	596,05	5.404,96	11,03
23	Maduran	2.294,68	3.277,68	70,01
24	Laren	5.313,33	9.411,28	56,46
25	Solokuro	0	9.486,89	0
26	Paciran	0	5.681,33	0
27	Brondong	0	8.071,51	0
Jumlah		14.550,64	175.220,72	8,30

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

d. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan adalah suatu kawasan yang berpotensi untuk dilanda kekeringan, karena ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kawasan rawan bencana

kekeringan di Kabupaten Lamongan terjadi di semua kecamatan yang terbagi menjadi kawasan rawan bencana kekeringan sedang dan kawasan rawan bencana kekeringan tinggi seperti rincian dalam tabel berikut:

Tabel II.9 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Sedang (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tinggi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
1	Sukorame	0	3.928,70	3.928,70
2	Bluluk	0	5.799,93	5.799,93
3	Ngimbang	0	10.006,02	10.006,02
4	Sambeng	2.901,19	12.177,16	15.078,34
5	Mantup	9.123,19	0	9.123,19
6	Kembangbahu	6.825,07	0	6.825,07
7	Sugio	5.183,27	3.790,92	8.974,19
8	Kedungpring	0	8.572,74	8.572,74
9	Modo	0	8.169,76	8.169,76
10	Babat	4.944,33	1.515,11	6.459,43
11	Pucuk	4.538,49	0	4.538,49
12	Sukodadi	4.747,56	0	4.747,56
13	Lamongan	4.093,53	0	4.093,53
14	Tikung	5.541,58	0	5.541,58
15	Sarirejo	4.886,96	0	4.886,96
16	Deket	4.395,15	0	4.395,15
17	Glagah	5.001,53	0	5.001,53
18	Karangbinangun	4.726,21	0	4.726,21
19	Turi	5.250,09	0	5.250,09
20	Kalitengah	3.694,60	0	3.694,60
21	Karanggeneng	4.073,99	0	4.073,99
22	Sekaran	5.404,96	0	5.404,96
23	Maduran	3.277,68	0	3.277,68
24	Laren	9.411,28	0	9.411,28
25	Solokuro	9.486,89	0	9.486,89
26	Paciran	5.681,33	0	5.681,33
27	Brondong	8.071,51	0	8.071,51
Jumlah		121.260,39	53.960,33	175.220,72

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

e. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kabupaten Lamongan terutama terjadi pada kawasan hutan, baik kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung. Berikut disajikan uraian tabel terkait luas wilayah kawasan bencana kebakaran yang melanda di Kabupaten Lamongan:

Tabel II.10 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	1.340,91	3.928,70	34,13
2	Bluluk	2.340,40	5.799,93	40,35
3	Ngimbang	3.974,02	10.006,02	39,72
4	Sambeng	9.039,25	15.078,34	59,95

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)
5	Mantup	2.425,63	9.123,19	26,59
6	Kembangbahu	10,94	6.825,07	0,16
7	Sugio	1.423,35	8.974,19	15,86
8	Kedungpring	1.481,37	8.572,74	17,28
9	Modo	1.504,39	8.169,76	18,41
10	Babat	0	6.459,43	0
11	Pucuk	0	4.538,49	0
12	Sukodadi	0	4.747,56	0
13	Lamongan	0	4.093,53	0
14	Tikung	0	5.541,58	0
15	Sarirejo	0	4.886,96	0
16	Deket	0	4.395,15	0
17	Glagah	0	5.001,53	0
18	Karangbinangun	0	4.726,21	0
19	Turi	0	5.250,09	0
20	Kalitengah	0	3.694,60	0
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0
22	Sekaran	0	5.404,96	0
23	Maduran	0	3.277,68	0
24	Laren	2.603,59	9.411,28	27,66
25	Solokuro	2.983,47	9.486,89	31,45
26	Paciran	108,72	5.681,33	1,91
27	Brondong	2.456,00	8.071,51	30,43
Jumlah		31.692,04	175.220,72	18,09

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

f. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan dengan tingkat kerentanan sangat rendah, rendah sampai dengan menengah, seperti pada tabel berikut:

Tabel II.11 Luas Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Gempa Bumi				Luas Wilayah (Ha)
		IV MMI (sangat rendah)	V-VI MMI (rendah)	VII-VIII (menengah)	>VIII (tinggi)	
1	Sukorame	0	3.686,39	242,32	0	3.928,70
2	Bluluk	0	4.515,39	1.284,53	0	5.799,93
3	Ngimbang	0	10.006,02	0	0	10.006,02
4	Sambeng	0	14.869,58	208,77	0	15.078,34
5	Mantup	0	8.767,67	355,52	0	9.123,19
6	Kembangbahu	0	6.825,07	0	0	6.825,07
7	Sugio	0	8.974,19	0	0	8.974,19
8	Kedungpring	0	7.883,53	689,21	0	8.572,74
9	Modo	0	5.687,45	2.482,31	0	8.169,76
10	Babat	0	1.773,39	4.686,04	0	6.459,43
11	Pucuk	0	3.564,43	974,06	0	4.538,49
12	Sukodadi	0	4.747,56	0	0	4.747,56
13	Lamongan	185,43	3.908,10	0	0	4.093,53
14	Tikung	1.897,71	3.643,87	0	0	5.541,58
15	Sarirejo	4.289,46	597,5	0	0	4.886,96
16	Deket	106,41	3.138,55	1.150,19	0	4.395,15

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Gempa Bumi				Luas Wilayah (Ha)
		IV MMI (sangat rendah)	V-VI MMI (rendah)	VII-VIII (menengah)	>VIII (tinggi)	
17	Glagah	2.240,60	2.665,16	95,78	0	5.001,53
18	Karangbinang	33,95	4.544,36	147,9	0	4.726,21
19	Turi	0	4.603,99	646,1	0	5.250,09
20	Kalitengah	0	3.694,60	0	0	3.694,60
21	Karanggeneng	0	4.073,99	0	0	4.073,99
22	Sekaran	0	3.694,60	2.357,58	0	5.404,96
23	Maduran	0	2.879,34	398,34	0	3.277,68
24	Laren	92,93	6.938,51	2.380,55	0	9.411,28
25	Solokuro	5.303,07	4.183,82	0	0	9.486,89
26	Paciran	5.672,76	8,56	0	0	5.681,33
27	Brondong	1.738,90	6.294,07	38,54	0	8.071,51
Jumlah		21.560,52	135.522,47	18.137,74	0	175.220,72
Persentase (%)		12,31	77,36	10,33	0	100

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

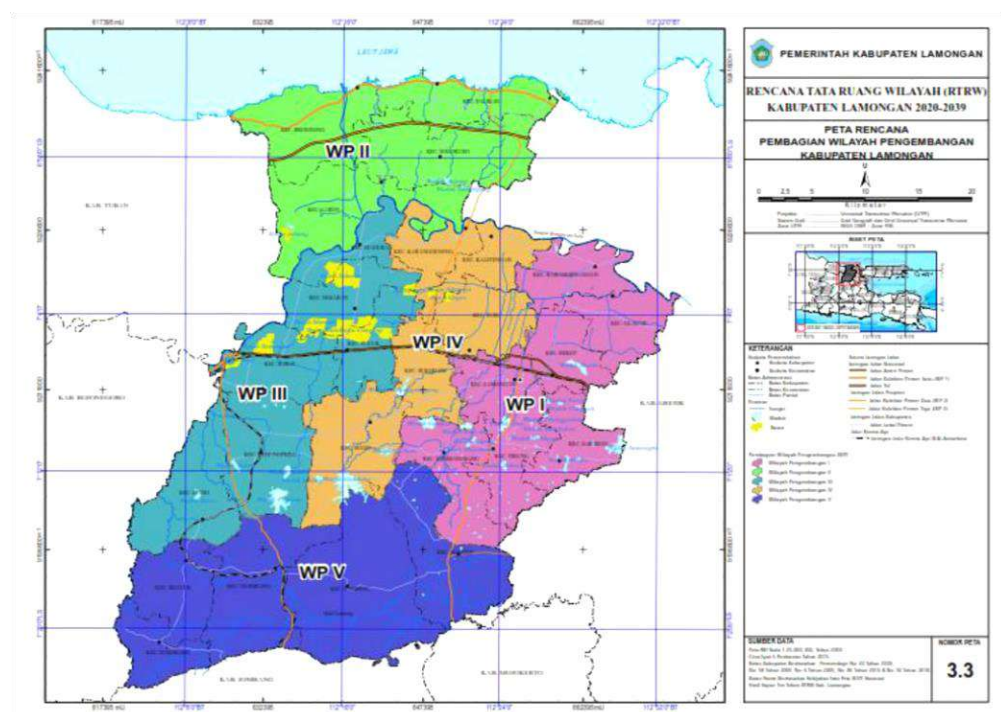
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten diwujudkan melalui rencana pengembangan perdesaan dan perkotaan. Pengembangan kawasan perdesaan memperhatikan kondisi permukiman perdesaan yang memiliki keberagaman yang tinggi, ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kota Lamongan. Pola ruang seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam. Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan di Kecamatan Ngimbang dan minapolitan di Kecamatan Brondong, Paciran dan Glagah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan serta sentra bahan baku pangan. Dalam pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Lamongan diarahkan sebagai simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dibedakan menjadi:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN), adalah Perkotaan Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusilo.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Paciran - Brondong, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud meliputi Perkotaan Sukorame, Bluluk, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Pucuk, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokuro.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL meliputi wilayah Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup, Desa Deketagung

Kecamatan Sugio, Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng, Desa Centini Kecamatan Laren, Desa Weru Kecamatan Paciran.

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan pusat kegiatan perkotaan masing-masing. Dalam lingkup Kabupaten Lamongan, Kota Lamongan menjadi pusat bagi wilayah pengembangan (WP) Lamongan. Setiap perkotaan yang termasuk dalam PKN dan PKL akan menjadi pusat wilayah pengembangan (WP). Berdasarkan sistem perwilayahan tersebut, maka Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 kecamatan dibagi menjadi lima wilayah pengembangan (WP), atas dasar orientasi pergerakan terhadap pusat wilayah pengembangan (WP), tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah pengembangan (WP), kesamaan terhadap potensi wilayah, mengurangi kesenjangan wilayah dan karakter penduduk. Berikut disajikan peta mengenai gambaran pengembangan wilayah di Kabupaten Lamongan:



Gambar II.2 Peta Pengembangan Wilayah Kabupaten Lamongan
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Selanjutnya terkait dengan sistem jaringan, secara keseluruhan pengembangan prasarana akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Lamongan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan prasarana lingkungan. Berkaitan dengan kebijakan strategis pengembangan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan pembangunan pada beberapa sektor sebagai berikut:

- a) Sektor Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah maka perlu dilakukan revitalisasi pertanian, perkebunan dan juga perikanan.
- b) Sektor Pariwisata, meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu meningkatkan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah

melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

- c) Sektor Industri, pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri di daerah diharapkan tumbuh dan berkembang, industri-industri yang berbasis pada bahan baku produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada di daerah dengan tetap menjaga kelanjutan pembangunan.

Terkait pola ruang di dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Lamongan terdiri dari:

a) Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan Peruntukan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain. Rencana kawasan peruntukan lindung meliputi:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung yang terdapat di daerah Kecamatan Sugio, Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Bluluk.
- 2) Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk.
- 3) Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan keunikan bentang alam, seperti Goa Maharani dan Zoo yang berada di Kecamatan Paciran, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, berupa kawasan imbuhan air tanah yang berada di daerah:

(a) Kecamatan Kembangbahu	(l) Kecamatan Glagah
(b) Kecamatan Sugio	(m) Kecamatan Karangbinangun
(c) Kecamatan Kedungpring	(n) Kecamatan Kalitengah
(d) Kecamatan Modo	(o) Kecamatan Karanggeneng
(e) Kecamatan Babat	(p) Kecamatan Sekaran
(f) Kecamatan Pucuk	(q) Kecamatan Maduran
(g) Kecamatan Sukodadi	(r) Kecamatan Laren
(h) Kecamatan Lamongan	(s) Kecamatan Selokuro
(i) Kecamatan Tikung	(t) Kecamatan Paciran
(j) Kecamatan Sarirejo	(u) Kecamatan Brondong
(k) Kecamatan Deket	
- 4) Kawasan rawan bencana, adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana. Kawasan rawan bencana meliputi:
 - (a) Kawasan Rawan Bencana Banjir
 - (b) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang



- (c) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan
- (d) Kawasan Rawan Bencana Kekeringan
- (e) Kawasan Rawan Bencana Longsor
- (f) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- 5) Kawasan cagar budaya, merupakan satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan cagar budaya meliputi:
 - (a) Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran
 - (b) Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran
 - (c) Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran
 - (d) Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan
 - (e) Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran
 - (f) Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang
 - (g) Desa Balun di Kecamatan Turi
 - (h) Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan
 - (i) Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong
 - (j) Situs Candi Pataan di Kecamatan Sambeng
 - (k) Kawasan cagar budaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- 6) Kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - (a) Kawasan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Paciran
 - (b) Kawasan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Brondong

b) Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya merupakan suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan budidaya ini meliputi;

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan, berupa kawasan hutan produksi tetap dikelola oleh KPH Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang, tersebar di daerah:

(a) Kecamatan Sukorame	(h) Kecamatan Kedungpring
(b) Kecamatan Bluluk	(i) Kecamatan Modo
(c) Kecamatan Ngimbang	(j) Kecamatan Laren
(d) Kecamatan Sambeng	(k) Kecamatan Solokuro
(e) Kecamatan Mantup	(l) Kecamatan Paciran
(f) Kecamatan Kembangbahu	(m) Kecamatan Brondong.
(g) Kecamatan Sugio	
- 2) Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi:
 - (a) Kawasan tanaman pangan, meliputi:
 - (1) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di daerah:

Kecamatan Kembangbahu	Kecamatan Kedungpring
Kecamatan Sugio	Kecamatan Modo

Kecamatan Babat	Kecamatan Karangbinangun
Kecamatan Pucuk	Kecamatan Turi
Kecamatan Sukodadi	Kecamatan Kalitengah
Kecamatan Lamongan	Kecamatan Karanggeneng
Kecamatan Tikung	Kecamatan Sekaran
Kecamatan Sarirejo	Kecamatan Maduran
Kecamatan Deket	Kecamatan Laren
Kecamatan Glagah	Kecamatan Solokuro.

(2) Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tersebar di daerah:

Kecamatan Sukorame	Kecamatan Lamongan
Kecamatan Bluluk	Kecamatan Tikung
Kecamatan Ngimbang	Kecamatan Sarirejo
Kecamatan Sambeng	Kecamatan Deket
Kecamatan Mantup	Kecamatan Glagah
Kecamatan Kembangbahu	Kecamatan Turi
Kecamatan Kedungpring	Kecamatan Laren
Kecamatan Modo	Kecamatan Solokuro
	Kecamatan Paciran
	Kecamatan Brondong

(b) Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan

(c) Kawasan perkebunan tersebar di daerah:

Kecamatan Babat	Kecamatan Modo
Kecamatan Bluluk	Kecamatan Ngimbang
Kecamatan Kedungpring	Kecamatan Sambeng
Kecamatan Kembangbahu	Kecamatan Sarirejo
Kecamatan Mantup	Kecamatan Sugio
	Kecamatan Sukorame
	Kecamatan Tikung

(d) Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan di daerah Kabupaten Lamongan

3) Kawasan perikanan, merupakan suatu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan, yang meliputi perikanan tangkap berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran. Sedangkan perikanan budidaya meliputi Perikanan Budidaya Air Payau dan/atau Tambak tersebar di Kecamatan Pucuk, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Turi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Sedangkan Perikanan Budidaya Air Tawar tersebar di seluruh kecamatan.

4) Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan

peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Kawasan pertambangan meliputi:

(a) Kawasan Pertambangan Mineral meliputi:

- (1) Pertambangan Mineral Bukan Logam, tersebar di Kecamatan Brondong, Solokuro, Babat, Ngimbang, Sugio, Mantup, Modo, Bluluk, Sukorame, Kembangbahu dan Sambeng
- (2) Pertambangan Mineral Batuan, tersebar di Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Babat, Ngimbang, Sugio, Mantup, Modo, Bluluk, Sukorame, Kembangbahu dan Sambeng

(b) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di seluruh wilayah kecamatan.

5) Kawasan peruntukan industri bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

(a) Kawasan Peruntukan Industri berada di Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro, Koridor Jalan Arteri Primer (Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Babat), Koridor Jalan Kolektor Primer (Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Mantup dan Kecamatan Modo)

(b) Kawasan Sentra Industri berupa industri rumah tangga, diarahkan di seluruh kecamatan bagi industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran, sedangkan bagi industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukkan industri

6) Kawasan pariwisata, adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata. Kawasan pariwisata tersebar di seluruh kecamatan.

7) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8) Kawasan pertahanan dan keamanan wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

(a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan di Kecamatan Lamongan

(b) Kompi A Yon Zipur 5 di Kecamatan Babat

(c) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan

(d) Kepolisian Resor di Kecamatan Lamongan

- (e) Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan
- 9) Kawasan Transportasi yang meliputi Pelabuhan, Stasiun dan Terminal.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sebanyak 1.377.143 jiwa penduduk. Mayoritas penduduk bertempat tinggal di Kecamatan Lamongan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 17,20 jiwa per ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 70.442 ribu penduduk dan luas wilayahnya 4.093,53 ha. Berikut disajikan dalam rincian tabel terkait dengan jumlah penduduk per kecamatan, persentase penduduk, luas wilayah beserta tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020:

Tabel II.12 Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
Sukorame	21.697	1.58%	3.928,70	5,52
Bluluk	23.039	1.67%	5.799,93	3,97
Ngimbang	49.008	3.56%	10.006,02	4,89
Sambeng	53.447	3.88%	15.078,34	3,54
Mantup	47.280	3.43%	9.123,19	5,18
Kembangbahu	50.812	3.69%	6.825,07	7,44
Suglo	63.236	4.59%	8.974,19	7,04
Kedungpring	61.969	4.50%	8.572,74	7,22
Modo	50.667	3.68%	8.169,76	6,20
Babat	90.763	6.59%	6.459,43	14,05
Pucuk	48.883	3.55%	4.538,49	10,77
Sukodadi	59.174	4.30%	4.747,56	12,46
Lamongan	70.442	5.12%	4.093,53	17,20
Tikung	46.523	3.38%	5.541,58	8,39
Sarirejo	26.087	1.89%	4.886,96	5,33
Deket	45.193	3.28%	4.395,15	10,28
Glagah	42.794	3.11%	5.001,53	8,55
Karangbinangun	41.466	3.01%	4.726,21	8,77
Turi	55.522	4.03%	5.250,09	10,57
Kalitengah	36.959	2.68%	3.694,60	10,01
Karanggeneng	44.459	3.23%	4.073,99	10,91
Sekaran	44.364	3.22%	5.404,96	8,20
Maduran	34.507	2.51%	3.277,68	10,52
Laren	48.527	3.52%	9.411,28	5,15
Solokuro	48.847	3.55%	9.486,89	5,14
Paciran	96.902	7.04%	5.681,33	17,05
Brondong	74.576	5.42%	8.071,51	9,23
Kabupaten Lamongan	1.377.143	100.000	175.220,72	7.85

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020

Persentase penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan kelompok umur (10 tahunan) dan jenis kelamin di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.13 Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 9	14,10	12,66	13,36
10 – 19	16,23	14,68	15,43
20 – 29	13,25	12,96	13,10
30 – 39	13,32	13,87	13,60
40 – 49	15,12	15,46	15,30
50 -59	14,52	14,81	14,67
60 +	13,46	15,56	14,54
Kabupaten Lamongan	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020

Selanjutnya, kondisi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan selama periode 5 (lima) tahun dalam kondisi yang fluktuatif. Akan tetapi jika dilihat pada jumlah penduduk setiap tahun, kondisinya mengalami kenaikan secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan, meskipun jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahun, belum tentu angka laju pertumbuhan juga akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Tabel II.14 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.354.119	1.360.987	1.361.312	1.373.390	1.377.143
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,50%	0,50%	0,02%	0,88%	0,27%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung dapat dihitung berdasarkan pada fungsi atau tujuan yang akan diukur berkaitan dengan aspek ekonomi, demografi dan sebagainya, maupun berdasarkan pada tipologi media yang akan dikaji seperti lahan, hutan, air, dan sebagainya. Berkaitan dengan aspek demografis yang telah diuraikan di atas, terdapat daya dukung dan daya tampung demografis yang menyesuaikan dengan kondisi daerah. Daya dukung demografis merupakan suatu kemampuan untuk mendistribusikan penduduk ke suatu daerah tertentu. Daya dukung demografis ini berhubungan dengan ketersediaan lahan. Untuk melihat apakah luas lahan yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, maka dapat digunakan perhitungan daya dukung demografis. Berikut disajikan daya dukung dan daya tampung demografis di setiap kecamatan Kabupaten Lamongan:

Tabel II.15 Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan (Ha/Jiwa)	Standar Kebutuhan Lahan per Jiwa (Ha/Jiwa)	Daya Tampung (Jiwa)	Defisit / Surplus (Jiwa)	Indikator
1	Sukorame	0,18	0,04	105.400	83.729	Cukup
2	Bluluk	0,25	0,04	145.938	122.832	Sangat Tinggi
3	Ngimbang	0,20	0,08	118.704	69.696	Cukup
4	Sambeng	0,29	0,09	166.262	113.535	Tinggi
5	Mantup	0,19	0,08	113.349	66.554	Cukup
6	Kembangbahu	0,14	0,09	79.118	28.964	Rendah
7	Sugio	0,14	0,05	187.226	124.157	Sangat Tinggi
8	Kedungpring	0,14	0,05	180.070	117.428	Tinggi
9	Modo	0,16	0,04	209.195	157.809	Sangat Tinggi
10	Babat	0,07	0,07	92.082	-219	Sangat Rendah
11	Pucuk	0,09	0,09	53.001	3.216	Sangat Rendah
12	Sukodadi	0,08	0,04	108.033	50.210	Rendah
13	Lamongan	0,06	0,05	77.481	7.964	Sangat Rendah
14	Tikung	0,12	0,08	70.066	24.083	Rendah
15	Sarirejo	0,20	0,09	53.793	28.835	Rendah
16	Deket	0,10	0,08	58.036	14.006	Sangat Rendah
17	Glagah	0,12	0,07	70.003	28.464	Rendah
18	Karangbinangun	0,12	0,07	67.939	27.494	Rendah
19	Turi	0,10	0,04	127.283	73.010	Cukup
20	Kalitengah	0,10	0,06	59.889	24.022	Rendah
21	Karanggeneng	0,09	0,08	54.199	10.497	Sangat Rendah
22	Sekaran	0,11	0,08	65.343	17.252	Rendah
23	Maduran	0,09	0,06	52.246	15.772	Rendah
24	Laren	0,18	0,09	106.455	55.056	Cukup
25	Selokuro	0,20	0,08	114.773	66.716	Cukup
26	Paciran	0,06	0,07	76.434	-21.369	Sangat Rendah
27	Brondong	0,10	0,06	137.886	60.863	Cukup
Jumlah		0,14	0,07	101.859	50.762,02	Cukup

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum daya tampung demografis di Kabupaten Lamongan dalam kategori “**Cukup**”. Hanya untuk Kecamatan Babat, Pucuk, Lamongan, Deket, Karanggeneng dan Paciran memiliki daya tampung “**Sangat Rendah**”. Daya dukung untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan dalam kondisi yang surplus, kecuali di Kecamatan Babat dan Kecamatan Paciran yang memiliki kategori defisit untuk daya tampung demografisnya.

Selain pada aspek demografis, daya dukung dan daya tampung juga berkaitan dengan daya dukung lahan pertanian, daya dukung lahan permukiman, daya dukung fungsi lindung, daya dukung air, jasa ekosistem fungsi penyediaan (penyediaan bahan pangan, air bersih, bahan bakar, serta dan genetik), jasa ekosistem fungsi pengaturan (pengaturan iklim, tata air dan banjir, pengolahan dan pengurai limbah, pemeliharaan kualitas udara, pemeliharaan pemurnian air, pengendalian hama dan penyakit, serta penyerbukan alami), jasa ekosistem fungsi pendukung (pendukung biodiversitas, pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, siklus hara, serta produksi primer), dan juga jasa ekosistem fungsi budaya

(fungsi tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika alam). Berikut disajikan dalam tabel untuk rinciannya:

Tabel II.16 Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung Tahun 2020

No.	Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung	Hasil Analisis
1.	Daya tampung demografis	Daya dukung demografis adalah suatu kemampuan untuk mendistribusikan penduduk ke suatu daerah tertentu. Daya dukung demografis ini berhubungan dengan ketersediaan lahan yang ada. Daya dukung lahan Kabupaten Lamongan mencapai 0,14 ha/jiwa, sedangkan untuk daya tampungnya mencapai 101.859 jiwa. Secara umum daya tampung demografis di Kabupaten Lamongan termasuk pada kategori “Cukup” dengan angka 50.762, akan tetapi untuk wilayah Kecamatan Babat, Pucuk, Lamongan, Deket, Karanggeneng dan Paciran memiliki daya tampung “Sangat Rendah”.
2.	Daya dukung lahan pertanian	Daya dukung lahan pertanian merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kaitannya dengan tanaman pangan. Wilayah yang mampu swasembada pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM) penduduk sebesar 2.600 kalori/ orang/ hari atau setara dengan 265 kg beras/ orang/ tahun. Selanjutnya untuk wilayah yang mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk yang tergantung pada tanaman pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam taraf yang layak yaitu setara dengan 650 kg beras/ orang/ tahun atau 2,466 kali KFM. Terkait dengan daya dukung lahan pertanian, secara umum Kabupaten Lamongan termasuk dalam Kelas I dengan nilai 2,93, yang artinya Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang mampu swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sedangkan wilayah di Kabupaten Lamongan yang belum mampu swasembada pangan adalah Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.
3.	Daya dukung lahan permukiman	Daya dukung lahan permukiman diartikan sebagai suatu bentuk kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Secara umum, daya dukung kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan telah “Memenuhi” dengan nilai daya dukung permukiman mencapai 21,41 kapita/jiwa namun termasuk dalam indikator “Rendah”. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan seperti Kecamatan Sugio, Kedungpring, Babat, Pucuk, Sukodadi, Karangbinangun, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, MaduranLaren, Paciran dan Brondong termasuk dalam indikator “Sangat Rendah”.
4.	Daya dukung fungsi lindung	Daya dukung fungsi lindung (DDL) memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai dengan 1 (maksimal). Sehingga jika semakin mendekati nilai 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Secara umum daya dukung lahan fungsi lindung Kabupaten Lamongan bernilai 0,45 atau berindikator

No.	Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung	Hasil Analisis
		“Sedang”. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Sambeng bernilai 0,56 atau berindikator “Sangat Baik”, dan Kecamatan Paciran bernilai 0,24 atau berindikator “Sangat Rendah”.
5.	Daya dukung air	Daya dukung air ditentukan dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air di suatu wilayah. Perbandingan antara kondisi ketersediaan air dengan kebutuhan air di Kabupaten Lamongan menjadi dasar dalam penetapan status daya dukung lingkungan. Secara umum daya dukung air di Kabupaten Lamongan termasuk pada status“Terlampauai” dengan nilai 0,23, serta keseluruhan wilayah kecamatan di Kabupaten Lamongan juga masuk dalam status terlampauai.
6.	Jasa ekosistem fungsi penyediaan	a. Jasa ekosistem penyedia bahan pangan, di Kabupaten Lamongan mencakup kategori “Sangat Tinggi” (41%) di seluruh kecamatan, “Tinggi” (32%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (18%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Karangbinangun, “Rendah” (5%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (3%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. b. Jasa ekosistem penyedia air bersih, di Kabupaten Lamongan meliputi kategori “Sangat Tinggi” (44%) di seluruh kecamatan, “Tinggi” (3%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Modo, Glagah dan Karangbinangun, “Sedang” (25%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (21%) di seluruh kecamatan, serta “Sangat Rendah” (7%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sukodado, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. c. Jasa ekosistem penyedia bahan bakar, di Kabupaten Lamongan meliputi kategori “Sangat Tinggi” (8%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tikung, dan Sarirejo, “Tinggi” (13%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tikung dan Sarirejo, “Sedang” (47%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (28%) di seluruh kecamatan, dan kategori “Sangat Rendah” (4%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. d. Jasa ekosistem penyedia serat, di Kabupaten Lamongan mencakup kategori “Sangat Tinggi” (9%) kecuali di Kecamatan Kembangbahu, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran dan Maduran, “Tinggi” (15%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tikung dan Sarirejo, “Sedang” (65%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (3%) kecuali di Kecamatan Sukorame, Bluluk, Kembangbahu dan Brondong, serta kategori “Sangat Rendah”(8%) di seluruh kecamatan. e. Jasa ekosistem penyedia genetik, di Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”

No.	Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung	Hasil Analisis
		(10%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tikung dan Sarirejo, “Tinggi” (42%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (2%) kecuali di Kecamatan Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Tikung, Sarirejo, Turi dan Karanggeneng, “Rendah” (43%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (3%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren.
7.	Jasa ekosistem fungsi pengaturan	a. Jasa ekosistem pengaturan iklim, di Kabupaten Lamongan meliputi “Sangat Tinggi” (0%) hanya di Kecamatan Sukorame, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (6%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (74%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (10%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ngimbang dan Kembangbahu dan juga “Sangat Rendah” (10%) di seluruh kecamatan. b. Jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, di Kabupaten Lamongan meliputi kategori “Sangat Tinggi” (31%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Paciran, “Tinggi” (25%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (26%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (13%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (5%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. c. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pengurai limbah, di Kabupaten Lamongan terdiri dari kategori “Sangat Tinggi” (31%) di seluruh kecamatan, “Tinggi” (25%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (26%) kecuali di Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Maduran dan Solokuro, “Rendah” (13%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (5%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, dan Laren. d. Jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara, di Kabupaten Lamongan mencakup kategori “Sangat Tinggi” (0%) hanya di Kecamatan Sukorame, “Tinggi” (15%) kecuali di kecamatan Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Sarirejo, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran dan Maduran, “Sedang” (34%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (43%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (8%) di seluruh kecamatan. e. Jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan pemurnian air, di Kabupaten Lamongan meliputi kategori “Sangat Tinggi” (2%) hanya di Kecamatan Deket, Glagah, Karangbinangun, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (43%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (19%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (26%) di seluruh kecamatan, serta “Sangat Rendah” (2%) di seluruh kecamatan.

No.	Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung	Hasil Analisis
		f. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama dan penyakit, di Kabupaten Lamongan mencakup dalam kategori seperti berikut: “Sangat Tinggi” (4%) hanya di Kecamatan Deket, Glagah, Karangbinangun, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (45%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (15%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (33%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Brondong, serta kategori “Sangat Rendah” (3%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. g. Jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami, di Kabupaten Lamongan mencakup dalam kategori “Sangat Tinggi” (0%) hanya di Kecamatan Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (5%) hanya di Kecamatan Sukorame, Deket, Glagah, Karangbinangun, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Sedang” (38%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Deket, “Rendah” (47%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Brondong dan kategori “Sangat Rendah” (10%) di seluruh kecamatan.
8.	Jasa ekosistem fungsi pendukung	a. Jasa ekosistem fungsi pendukung biodiversitas yang ada di Kabupaten Lamongan mencakup dalam kategori berikut: “Sangat Tinggi” (2%) di seluruh kecamatan, “Tinggi” (9%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (22%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (62%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (9%) di seluruh kecamatan. b. Jasa ekosistem fungsi pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, di Kabupaten Lamongan mencakup kategori “Sangat Tinggi” (1%) hanya di Kecamatan Sukorame, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (19%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Deket dan Glagah, “Sedang” (64%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (6%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sukorame, Bluluk dan Sukodadi, serta kategori “Sangat Rendah” (19%) di seluruh kecamatan. c. Jasa ekosistem fungsi pendukung siklus hara, di Kabupaten Lamongan terdiri dari kategori “Sangat Tinggi” (7%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tikung dan Sarirejo, “Tinggi” (21%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (39%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (30%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (3%) kecuali di Kecamatan Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. d. Jasa ekosistem pendukung produksi primer, di Kabupaten Lamongan terdiri dari kategori “Sangat Tinggi” (1%) hanya di Kecamatan Deket, Glagah, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (49%) di seluruh kecamatan, “Sedang” (17%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (30%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (3%) kecuali di Kecamatan

No.	Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung	Hasil Analisis
		Sukodadi, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren dan Brondong.
9.	Jasa ekosistem fungsi budaya	a. Jasa ekosistem fungsi tempat tinggal dan ruang hidup, di Kabupaten Lamongan terdiri dari kategori “Sangat Tinggi” (1%) hanya di Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Tinggi” (19%) hanya di Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong, “Sedang” (64%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (6%) di seluruh kecamatan, serta kategori “Sangat Rendah” (10%) di seluruh kecamatan. b. Jasa ekosistem fungsi rekreasi dan ekowisata, di Kabupaten Lamongan terdiri dari kategori: “Sangat Tinggi” (1%) kecuali di Kecamatan Sukorame, Bluluk, Mantup, Kembangbahu, Kedungpring, Sarirejo, Glagah, Karangbinangun dan Solokuro, “Tinggi” (8%) kecuali di Kecamatan Tikung dan Sarirejo, “Sedang” (28%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kembangbahu, “Rendah” (34%) di seluruh kecamatan dan juga “Sangat Rendah” (29%) kecuali di Kecamatan Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren. c. Jasa ekosistem fungsi estetika alam, di Kabupaten Lamongan terdiri dari kategori “Sangat Tinggi” (0%) hanya di Kecamatan Ngimbang, Sambeng, Sugio dan Kedungpring, “Tinggi” (2%) di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tikung, Sarirejo, Paciran dan Brondong, “Sedang” (47%) di seluruh kecamatan, “Rendah” (38%) kecuali di Kecamatan Turi, serta kategori “Sangat Rendah” (13%) di seluruh kecamatan.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan, 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

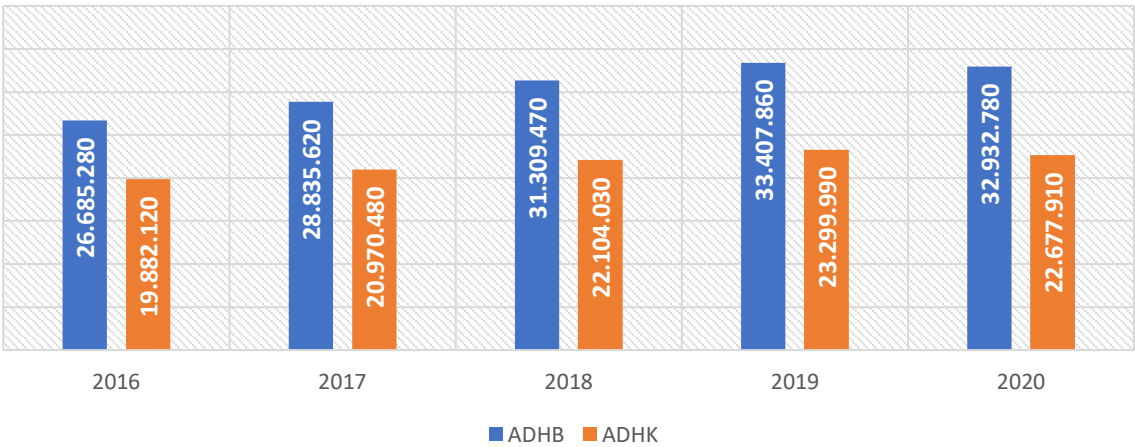
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan

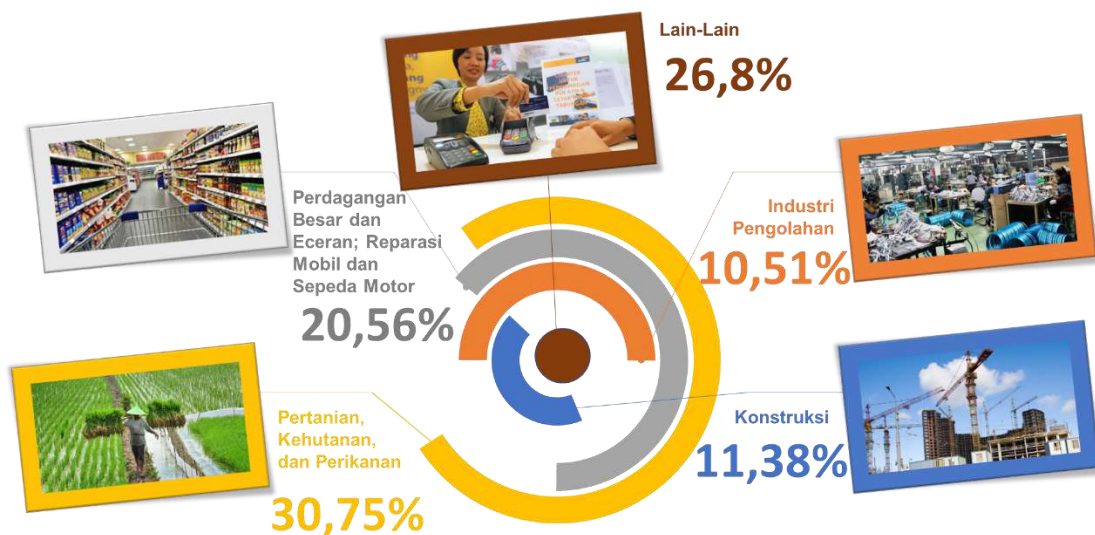
ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 31.707.260.000.000,- menjadi Rp. 39.169.590.000.000,- pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 23,54 persen. Sedangkan PDRB ADHK juga mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 23.623.790.000.000,- menjadi Rp. 26.972.650.000.000,-. pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 14,18 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi pandemi sehingga berdampak terhadap perlambatan perekonomian akibat dari menurunnya kinerja lapangan usaha terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Adapun Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK sebagaimana grafik dibawah ini.



Gambar II.3 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) (dalam Juta) Kabupaten lamongan tahun 2016-2020
 Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Perkembangan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Lamongan yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Jawa Timur. Kontribusi tersebut terus meningkat dimana pada tahun 2016 sebesar 1,7 persen terhadap perekonomian Jawa Timur menjadi 2,11 persen pada tahun 2020. Namun demikian kontribusi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi kabupaten sekitar Lamongan.

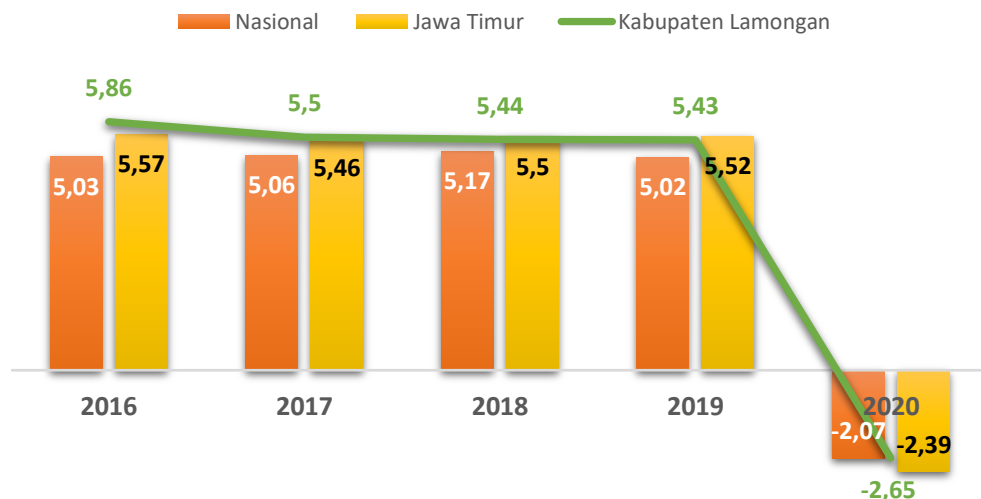


Gambar II.4 Empat Besar Sektor Degan Kontribusi Terbesar Terhadap Perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, Data diolah, 2020

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada di atas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 8.519.446.900.000 dengan presentase sebesar 30,75%. Terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedah motor sebesar Rp. 5.176.003.500.000 dengan presentase 20,56%. sektor konstruksi sebesar Rp.2.926.121.800.000 dengan presentase 11,51%. Dan Sektor industri sebesar Rp. 2.851.540.600.000 dengan presentase 10,51%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami trend yang melambat. Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86% ,secara berurutan turun 2017 sebesar 5,50%, 2018 sebesar 5,44%, 2019 sebesar 5,43% dan pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 2,65% yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Covid-19 telah memberikan dampak terhadap pelemahan ekonomi internasional, nasional dan regional, diantaranya adalah penurunan kinerja ekspor-impor yang telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar II.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan Nasional tahun 2016-2020 (Satuan Persentase)

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, Data diolah, 2020

Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh melambat/ minusnya pertumbuhan lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK. Adapun Pertumbuhan perlapangan usaha dampak dari pandemi sebagai berikut :

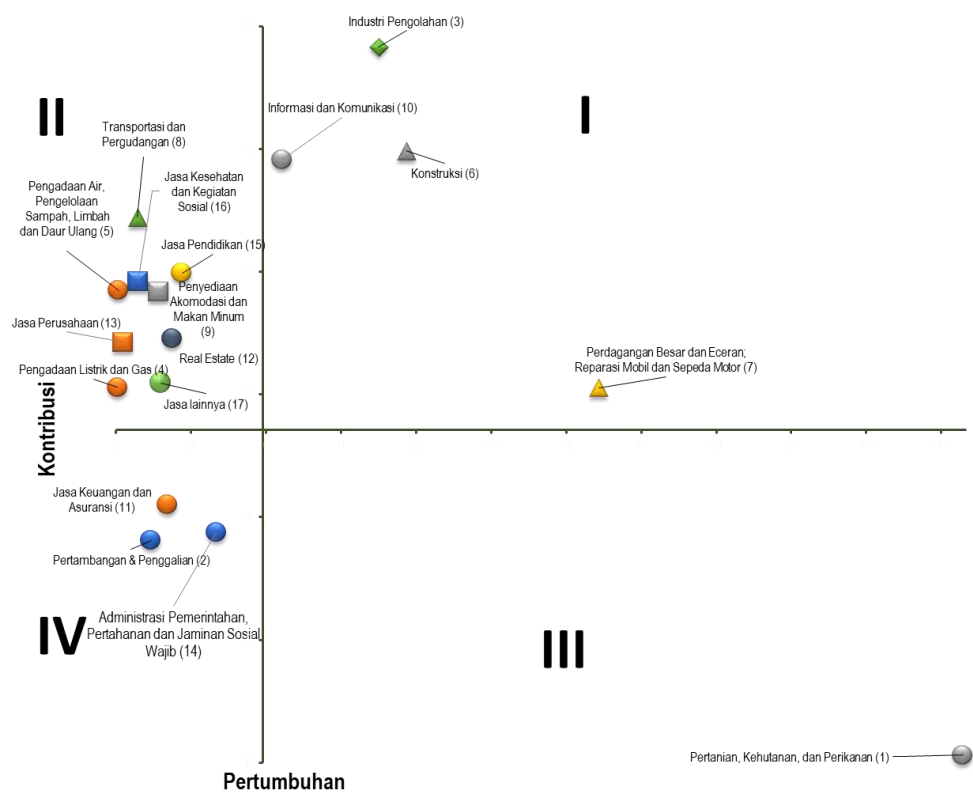
Tabel II.17 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 (Satuan Persentase)

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	1,69	-2,33	0,12	-0,16
Pertambangan dan Penggalian	3,07	6,77	9,18	3,62	-6,57
Industri Pengolahan	8,7	11,24	27,4	11,66	-2,08
Pengadaan Listrik dan Gas	8,95	5,66	6,04	6,12	-1,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	7,68	5,18	7,7	4,26
Konstruksi	6,34	8,75	7,34	9,97	-7,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	6,74	6,8	6,11	-9,15
Transportasi dan Pergudangan	8,66	8,16	9,25	8,89	-6,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,84	12,75	9,73	7,68	-8,33
Informasi dan Komunikasi	7,04	8,75	7,83	9,83	7,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	4,27	4,8	4,2	-0,04
Real Estate	5,95	7,72	8,16	6,91	2,98
Jasa Perusahaan	5,77	5,12	8,11	6,85	-6,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	2,98	4,63	3,75	-0,06
Jasa Pendidikan	6,4	6,27	7,62	7,98	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,26	7,95	8,72	7,84	8,74
Jasa lainnya	3,35	4,96	4,9	6,19	-14,77

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB	5,86	5,5	5,44	5,43	-2,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2020

Dari data di atas, Lapangan usaha yang pertumbuhannya tetap **positif**, meliputi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,26), sektor Informasi dan Komunikasi (7,81), sector Real Estate (2,98), sektor Jasa Pendidikan (2,83), dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,74). Guna melihat posisi masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap perekonomian maka diperlukan analisa klassen. Analisis klassen dibawah menunjukkan kinerja sektor-sektor perekonomian dalam 4 tipologi atau kuadran. Kuadran I menunjukkan sektor yang prima, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah. Kuadran II menunjukkan Sektor Potensial yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah. Kuadran III menunjukkan Sektor Berkembang yaitu Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi. Kuadran IV menunjukkan Sektor Terbelakang yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah. Berdasarkan analisa klassen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.6 Analisis Klassen Pertumbuhan sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2020

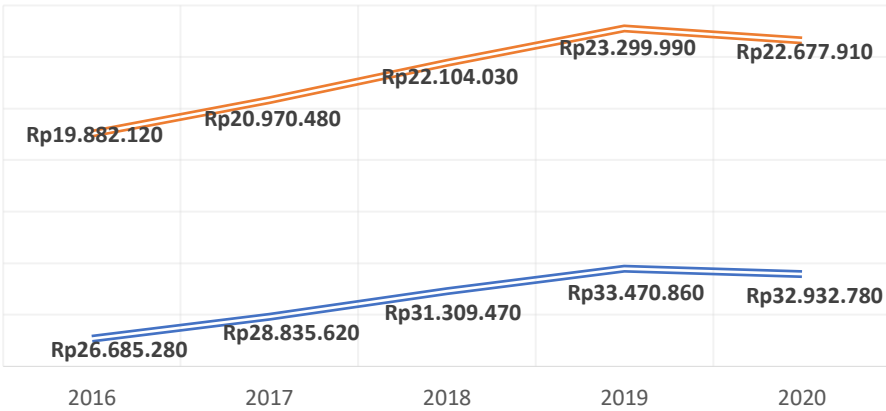
Kuadran I antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Konstruksi. **Kuadran II** antara lain Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Sektor Informasi dan

Komunikasi, Sektor Real Estat, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Lainnya, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. **Kuadran III** yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan **Kuadran IV** antara lain Sektor Pertambangan & Penggalian, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Gambaran kuadran menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tinggi namun Pertumbuhan yang rendah. Yang artinya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih perlu dikembangkan, karena merupakan lokomotif perekonomian masyarakat. Sedangkan sektor yang prima adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Konstruksi. Dengan struktur semacam ini, maka sektor yang masuk prima menjadi penopang perekonomian.

2.2.1.2 PDRB Perkapita

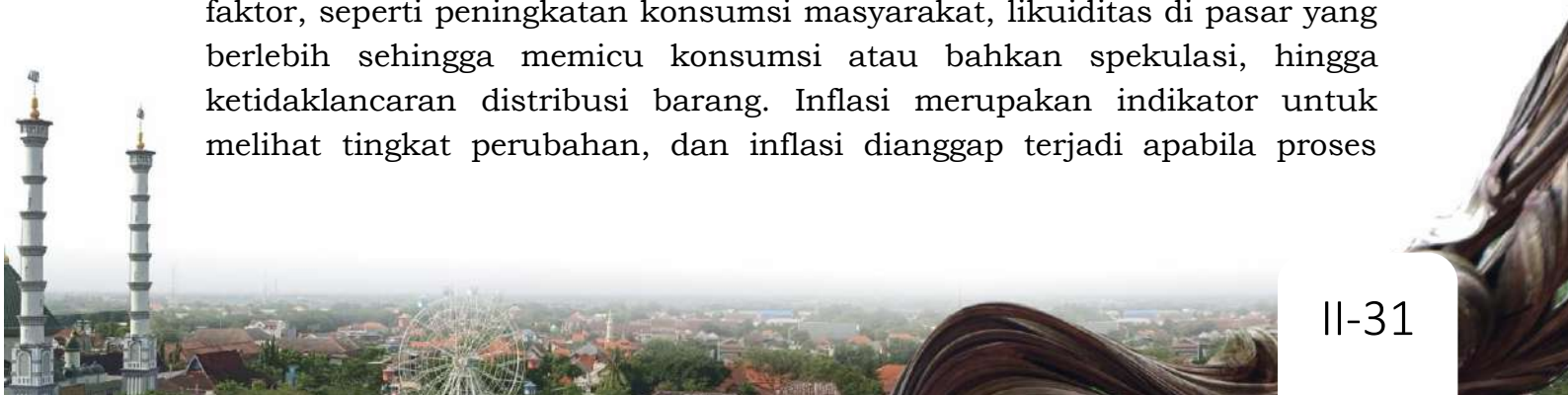
Indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah/wilayah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Lamongan selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 PDRB perkapita mengalami penurunan karena adanya pandemic covid19. Adapun perkembangan PDRB Per Kapita Sebagaimana tabel dibawah ini:



Gambar II.7 PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan. Data diolah, 2020

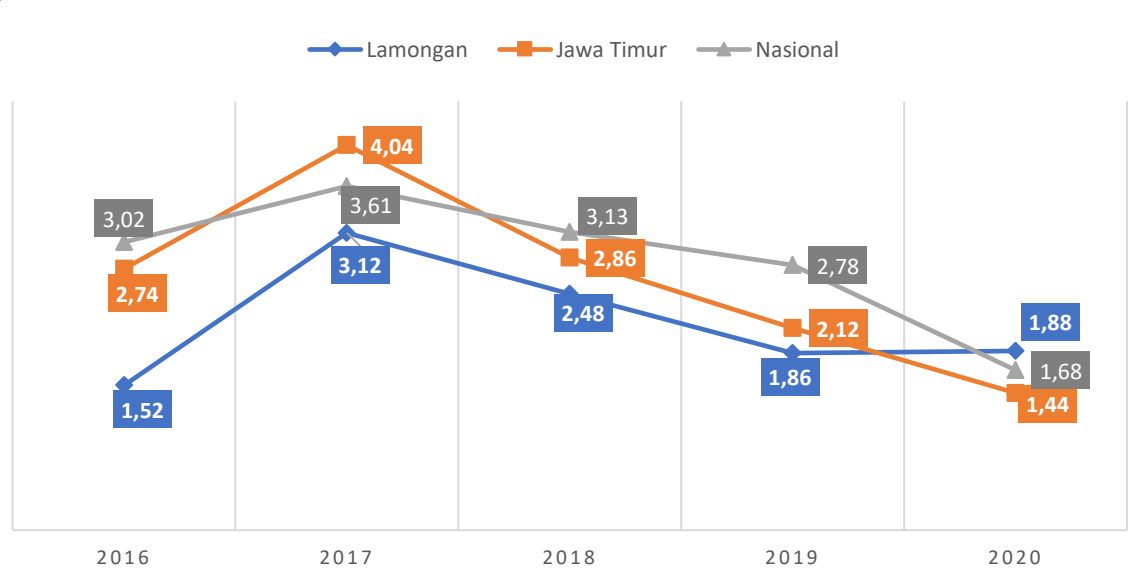
2.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses



kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks Harga Konsumen (IHK) dan Deflator PDB. Penyebab inflasi ada 3 yaitu demand, biaya produksi dan kombinasi.

Data pada grafik diatas menunjukkan tingkat inflasi Kabupaten Lamongan dalam kategori ringan, dimana laju inflasi dalam setiap tahun masih berada dibawah 10 %. Inflasi Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir fluktuatif namun terkendali, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 % dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,52 %.



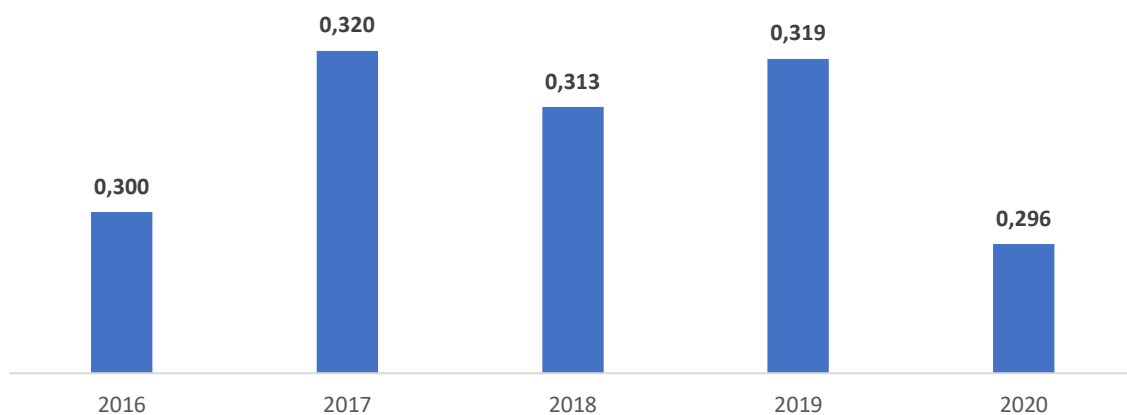
Gambar II.8 Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori “rendah”, nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori “moderat”, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Indeks Gini Kabupaten Lamongan dalam lima tahun berturut-turut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 dan 2019 indeks ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori moderat/sedang, akan tetapi pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan mengalami perbaikan dan masuk kategori rendah.



Gambar II.9 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

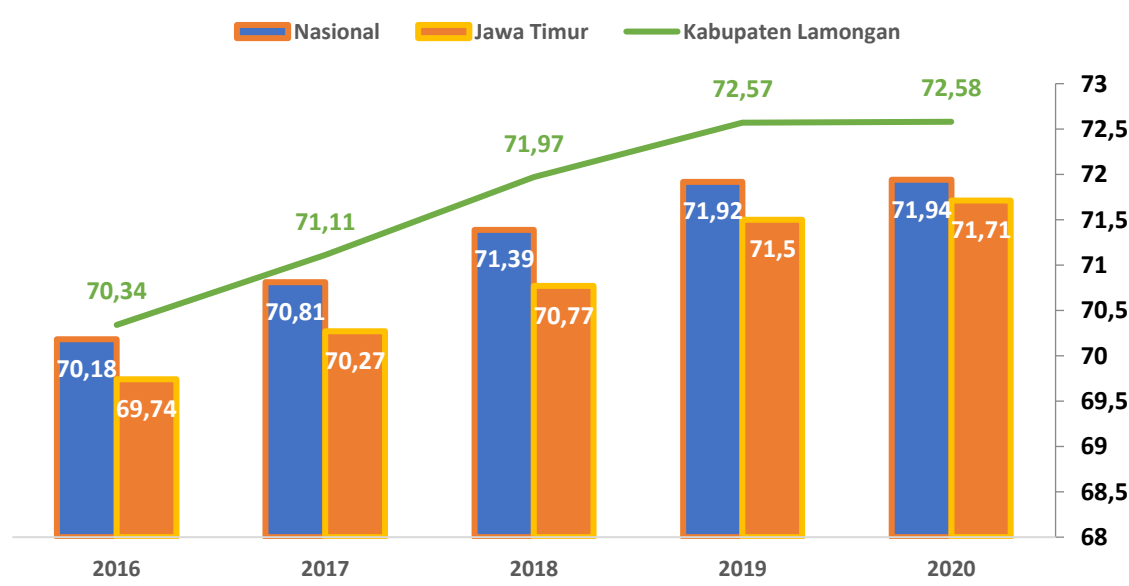
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data diolah, 2020

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 kondisinya lebih baik dibandingkan dengan Nasional (september) sebesar 0,385, Provinsi Jawa Timur sebesar 0,366. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya kondisi ketimpangan Lamongan juga masih lebih baik.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

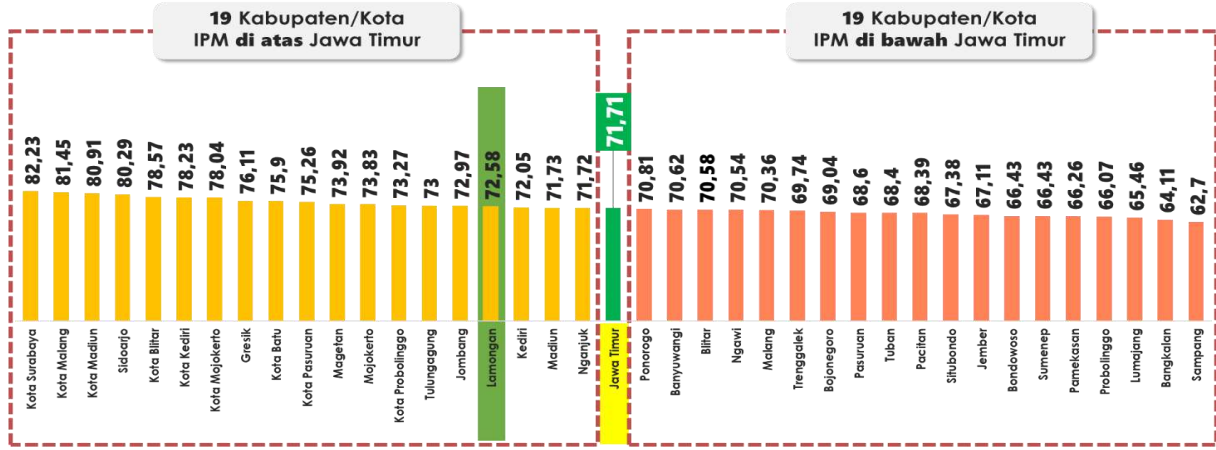
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Lamongan diatas rata-rata IPM jawa Timur dan Nasional. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. IPM kabupaten Lamongan selama lima tahun sejak 2016 terus meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 70,34 menjadi 72,58 atau meningkat 2,24. Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan terus meningkat dan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas SDM baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat. Adapun Perkembangan IPM Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan Nasional sebagaimana grafik dibawah ini:



Gambar II.10 Indeks Pembangunan Manusia Kab Lamongan Tahun 2016 - 2020
 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

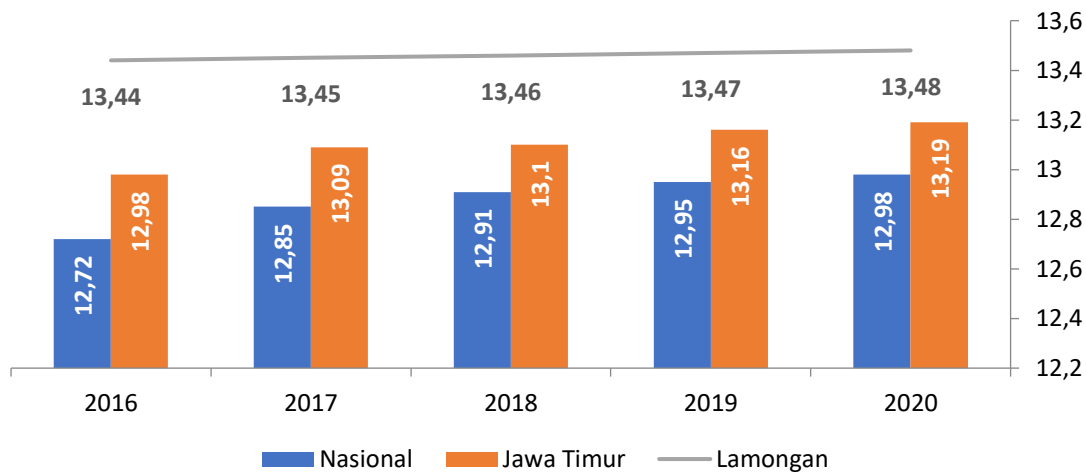
Dari 38 kabupaten Kota di Jawa Timur, pada tahun 2020 IPM Kabupaten Lamongan berada pada posisi 16 dan masuk kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM lamongan masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, Jombang dan Mojokerto. Adapun Nilai IPM Kabupaten Kota di Jawa Timur secara lengkap sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar II.11 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2020
 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

2.2.2.1.1 Harapan Lama Sekolah

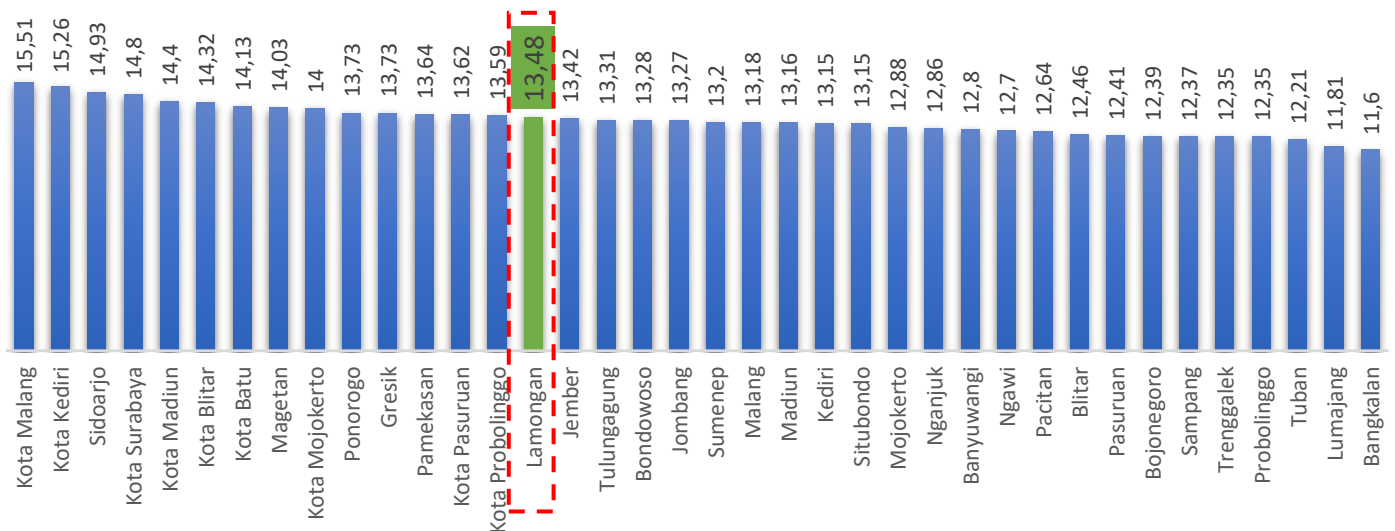
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memang menunjukkan kemajuan. Pada tahun 2016 HLS Kabupaten Lamongan berada pada angka 13,44, kemudian di tahun 2017 jumlahnya menjadi sebesar 13,45. Pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 13,46 tahun lalu berlanjut pada tahun 2019 menjadi sebesar 13,47 tahun dan pada tahun 2020 HLS Kabupaten Lamongan berjumlah sebesar 13,48 tahun.



Gambar II.12 Harapan Lama Sekolah Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Kabupaten Lamongan telah mencapai 13,48 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma strata 2. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Lamongan. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.



Gambar II.13 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

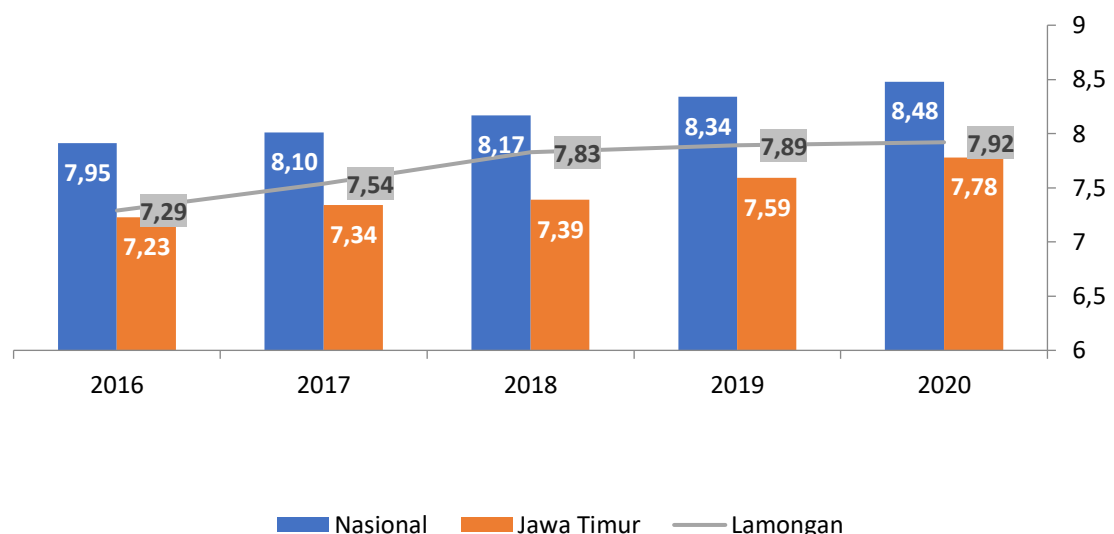
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 berada pada posisi kelima belas dengan angka HLS nya sebesar 13,48, diatas rata-rata HLS Jawa Timur. Sementara dari perbandingan, jumlah HLS yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan lebih besar satu peringkat di atas perolehan Kabupaten Jember dan di bawah satu peringkat dari Kota Probolinggo. Angka harapan lama sekolah terjadi flat karena:

- Secara Rill sebenarnya pendidikan masyarakat Lamongan sudah membaik dari tahun ke tahun, khususnya untuk anak usia 7 tahun ke depan berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan tinggi walaupun saat ini masih setara D2.
- Masyarakat Lamongan yang mengakses pendidikan tinggi di luar Kabupaten Lamongan dalam penghitungan angka harapan lama sekolah di dikeluarkan dari rumah tangganya, begitu juga dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi yang bekerja di luar Lamongan juga dikeluarkan dari anggota rumah tangganya (ART)).

2.2.2.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

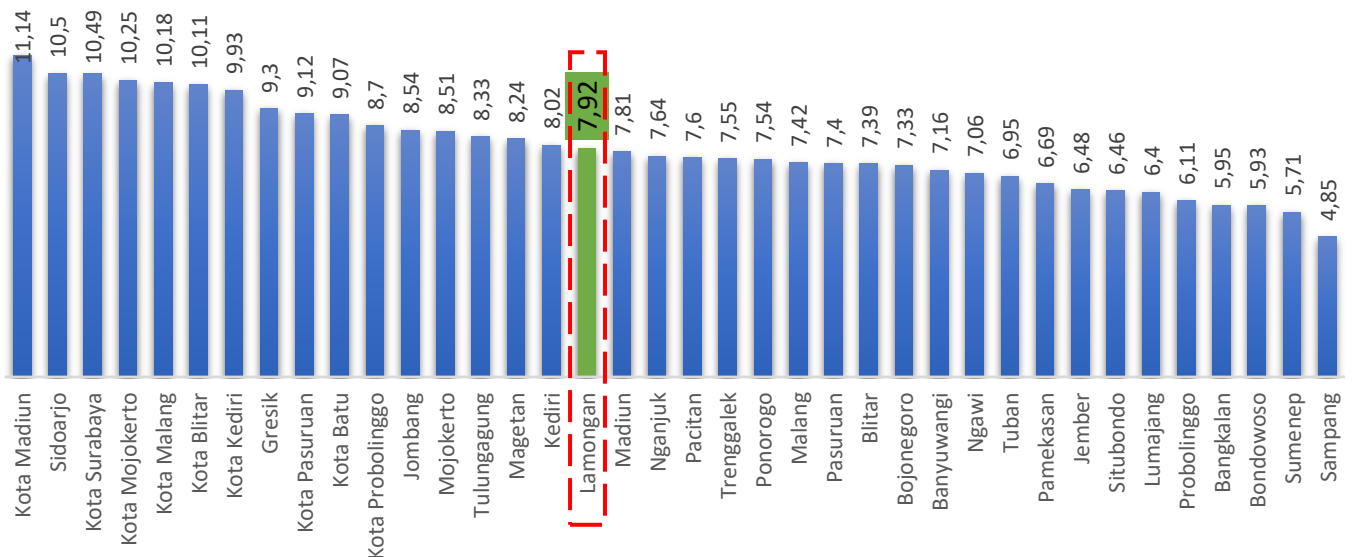
Angka Rata-Rata Lama Sekolah siswa atau *Means Years of Schooling (MYS)* dapat dipahami dan dijelaskan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamongan tahun 2020 mencapai 7,92 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas VII (SMP kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II).



Gambar II.14 angka rata-rata lama sekolah Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2020

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki tren capaian yang positif, namun demikian capaian angka rata-rata lama sekolah ini masih belum menyentuh angka wajib belajar 9 tahun dan masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur.



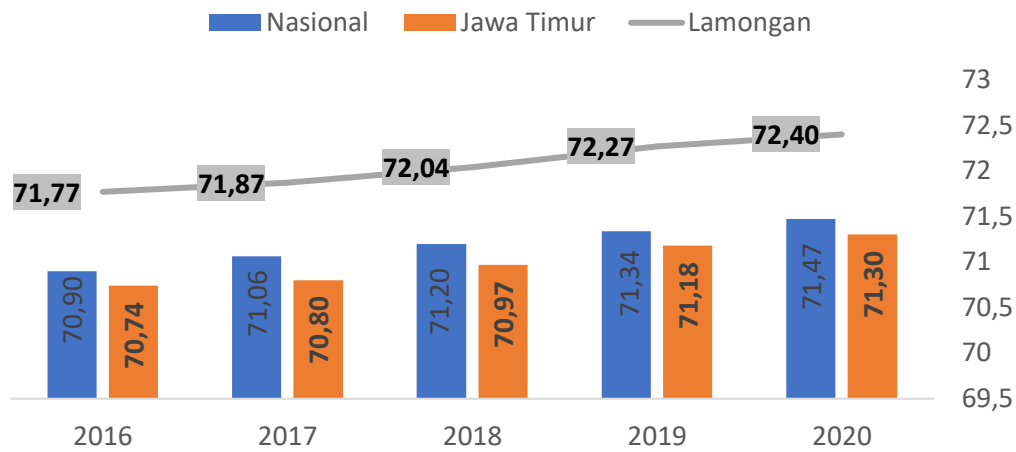
Gambar II.15 rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2020

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamongan secara pemeringkatan di Jawa Timur Tahun 2020 menduduki peringkat ke 17 dengan angka sebesar 7,92% yang berada di atas perolehan Kabupaten Madiun dan dibawah satu peringkat dari Kabupaten Kediri. Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, secara rill untuk pendidikan penduduk Lamongan usia 25 tahun – 60 tahun sudah baik sejalan dengan adanya program wajar 12 tahun, program pendidikan kesetaraan dan fasilitas pendidikan tinggi di Lamongan sebagaimana penghitungan angka harapan lama sekolah maka untuk penduduk Lamongan yang berusia di atas 25 tahun yang berpendidikan tinggi dan bekerja di luar Lamongan untuk penghitungan angka rata-rata lama sekolah di keluarkan dari anggota rumah tangga (ART).

2.2.2.1.3 Angka Harapan Hidup

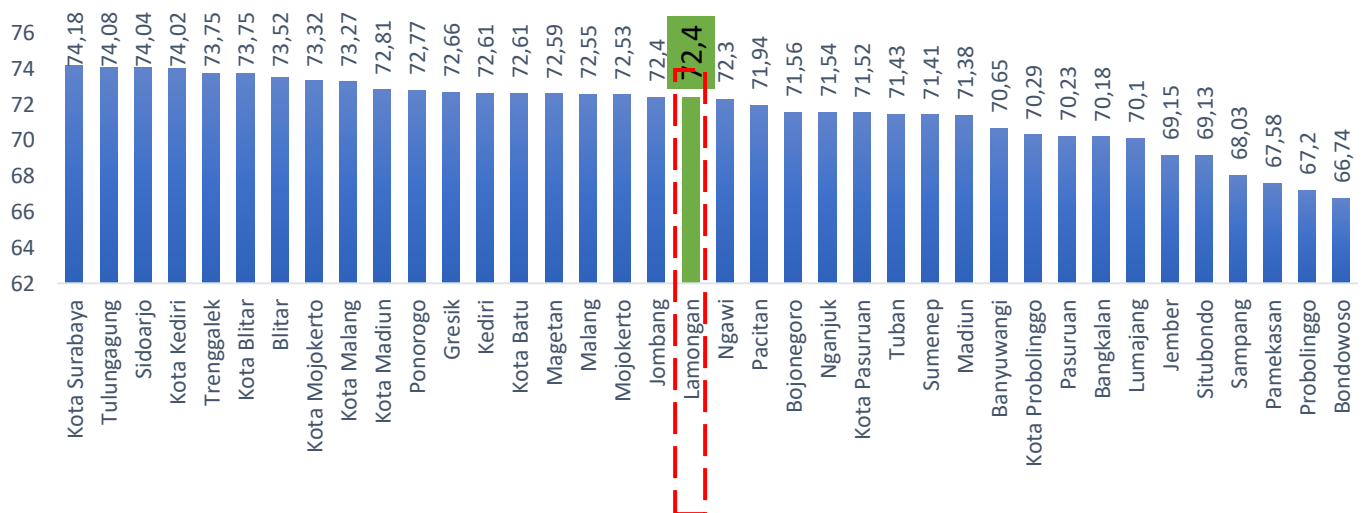
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan instrumen yang dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan pada masyarakat secara umum. Indeks Kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lamongan.



Gambar II.16 Angka Harapan Hidup (Ahh) Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur, 2020

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lamongan terus meningkat, hal ini menggambarkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Lamongan terus membaik. Peningkatan usia harapan hidup yang mencapai 72,40 tahun menjadi indikasi bahwa peningkatan layanan kesehatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Lamongan. Berdasarkan data grafik diatas menunjukkan perbandingan AHH Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 masih berada diatas angka provinsi yaitu sebesar 72,40 sedangkan jika dibandingkan dengan AHH nasional di tahun 2020 yang berada diangka 71,47 masih berada diatas angka nasional.



II.17 Angka Harapan Hidup (Ahh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

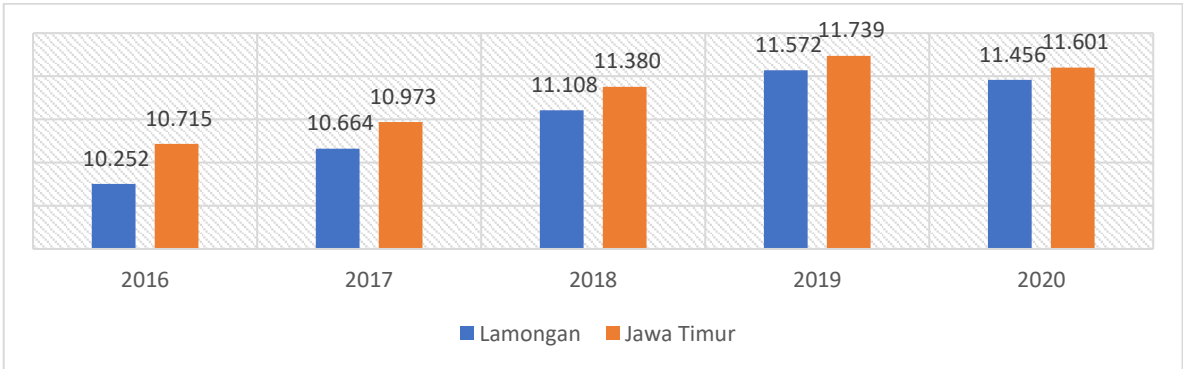
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2020

Posisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 menempati posisi ke 19 dalam lingkup kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur. Secara pemeringkatan dalam hal ini Kabupaten Lamongan berada di atas perolehan Kabupaten Ngawi dan satu peringkat di bawah Kabupaten Jombang.

2.2.2.1.4 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pengeluaran per orang atau per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya baik dalam bentuk barang atau jasa. Semakin tinggi pengeluaran per kapita menggambarkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk.

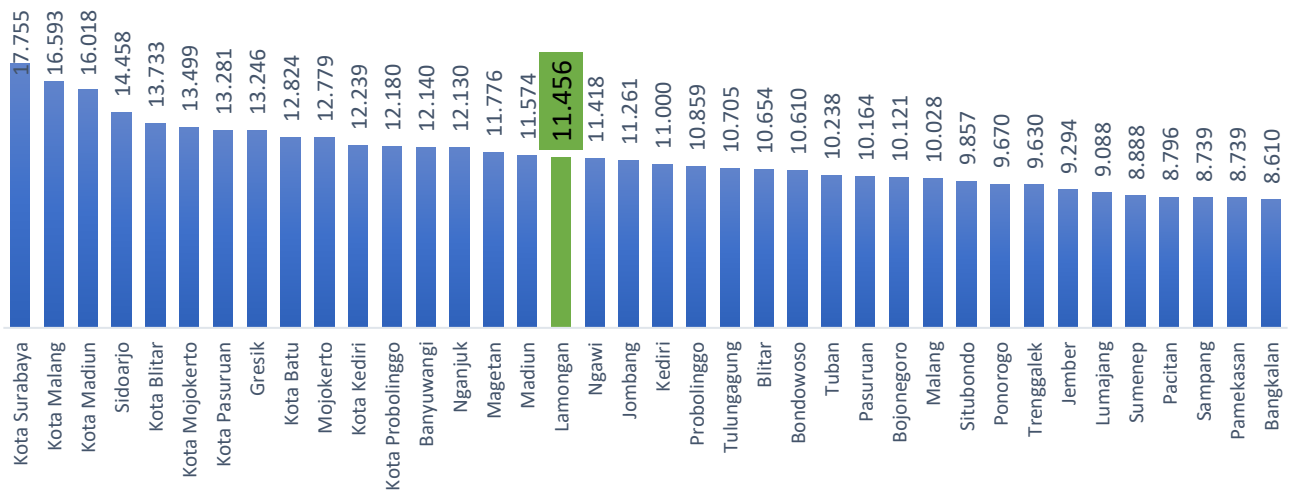
Dalam lima tahun terakhir pengeluaran perkapita Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.252.000,- meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 11.456.000,-. Pengeluaran perkapita pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2020. Untuk memutus rantai pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengambil kebijakan WFH (work from home), SFH (School From Home) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dampak dari kebijakan tersebut memang menjadikan perekonomian sedikit melambat. Namun demikian, kebijakan itu merupakan cara yang paling efektif untuk memulihkan ekonomi hingga pandemi menurun. Diperkirakan pada tahun 2021, pengeluaran per kapita akan kembali mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita sebagaimana pada grafik dibawah ini.



Gambar II.18 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (satuan ribuan rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, Data Diolah, 2020

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lamongan diantara kabupaten Kota di Jawa Timur berada pada posisi 17 Posisi tersebut berada di atas jumlah pengeluaran per Kabupaten Ngawi dan di bawah pengeluaran per kapita milik Kabupaten Madiun.



Gambar II.19 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 (Rp. 000)

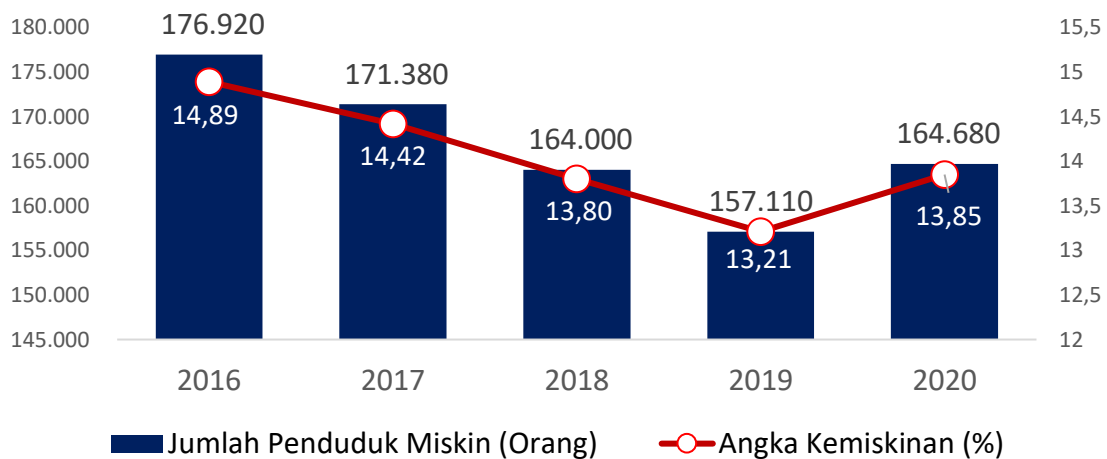
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Data Diolah, 2020

2.2.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Tahun 2016 sebesar Rp. 321,002 /Kapita / bulan
2. Tahun 2017 sebesar Rp. 335.783 /Kapita / bulan
3. Tahun 2018 sebesar Rp. 360.444 /Kapita / bulan
4. Tahun 2019 sebesar Rp. 380.220 /Kapita / bulan
5. Tahun 2020 sebesar Rp. 397.980 /Kapita / bulan

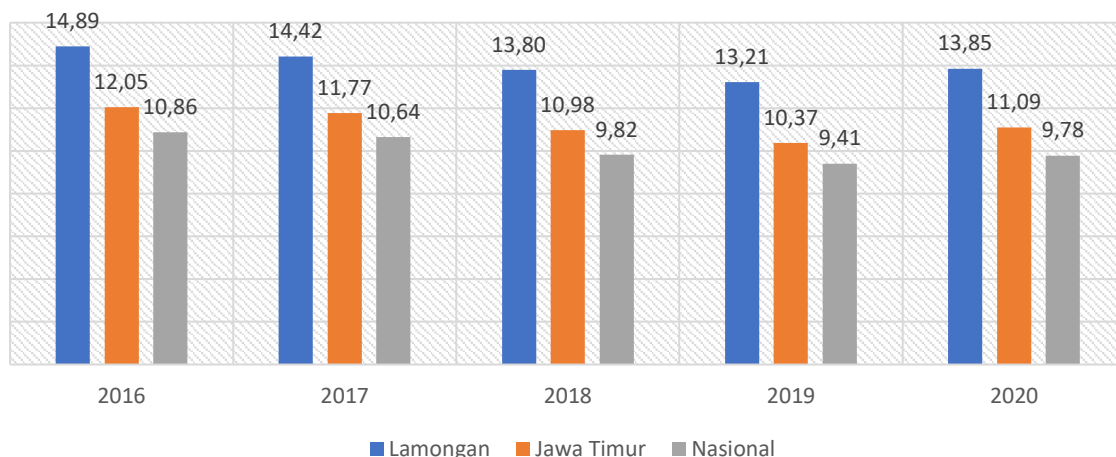
Kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun trendnya terus menurun baik dari persentase/angka kemiskinan maupun dari sisi jumlah penduduk miskinnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan sebesar 176.920 orang atau 14,89%. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan sebesar 164.680 orang atau 13,85%. Jadi selama lima tahun jumlah penduduk miskin turun sebanyak 12.240 orang.



Gambar II.20 Perkembangan Penduduk Miskin Dan Angka Kemiskinan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, Data Diolah, 2020

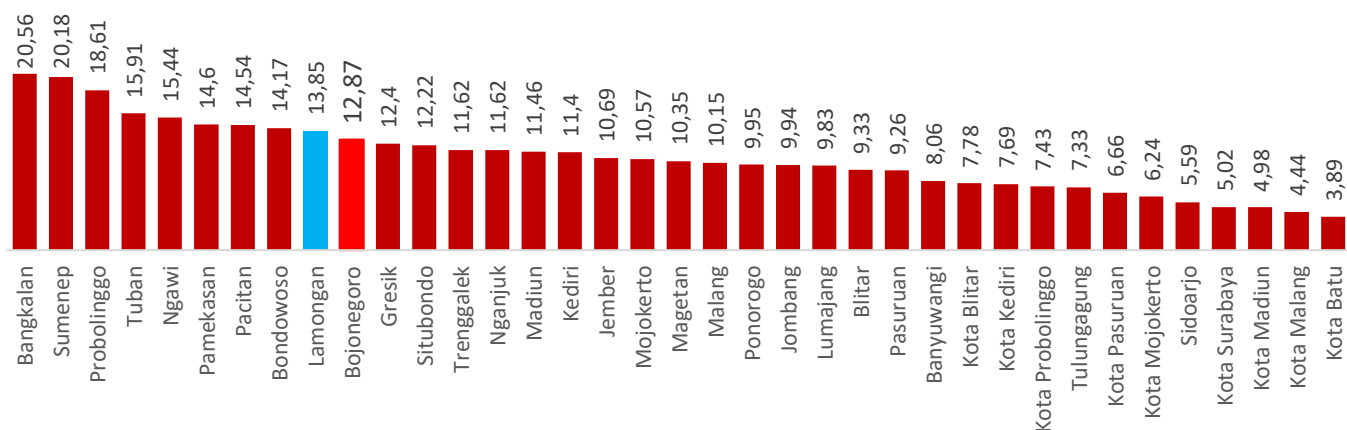
Meskipun memiliki trend angka kemiskinan yang menurun setiap tahunnya, namun persentase kemiskinan di Kabupaten Lamongan di atas rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana dalam grafik berikut:



Gambar II.21 Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, Data Diolah, 2020

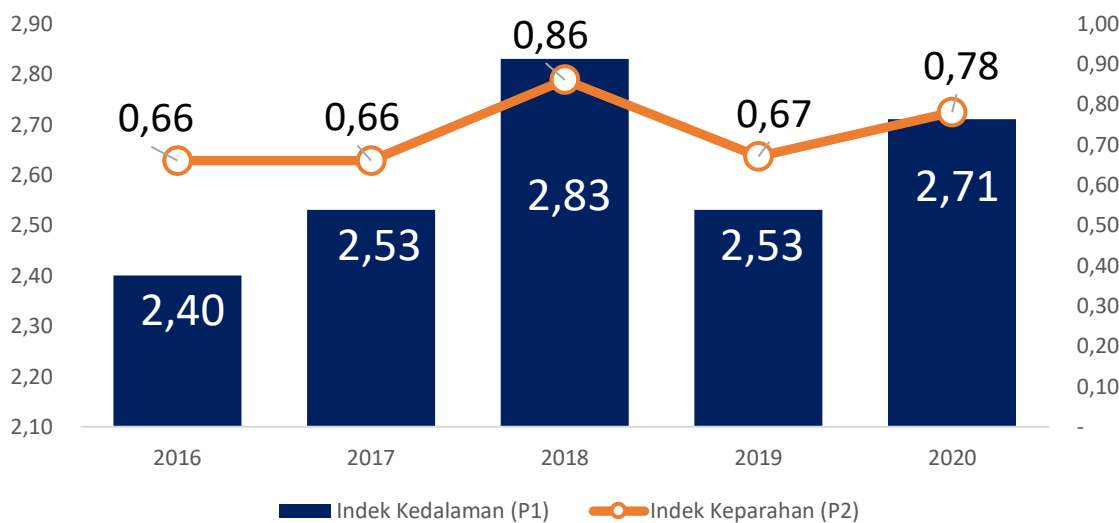
Selain Kabupaten Lamongan, beberapa kabupaten yang masih memiliki persentase angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, Ngawi, Pamekasan, Pacitan, Bondowoso, Bojonegoro, Gresik, Situbondo, Trenggalek, Nganjuk, Madiun dan Kediri.



Gambar II.22 Persentase Angka Kemiskinan Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2020

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahannya (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar II.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin memang berkurang, tetapi masih banyak penduduk miskin yang rerata pengeluarannya masih relatif jauh dari garis kemiskinan. Demikian juga pada indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan ketimpangan rerata pengeluaran penduduk miskin tidak banyak berubah masih konsisten pada sekitar angka 0,66 – 0,78.

2.2.3 Fokus Seni Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Konsep pelestarian dapat dilihat sebagai suatu kerangka tindakan, yang dalam pengertian paling sempit berarti suatu tindakan pengamanan, perlindungan, pemeliharaan dan perawatan. Dalam pengertian yang lebih luas, pelestarian dapat berupa tindakan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan atau manajemen suatu satuan organisme kehidupan baik berupa lingkungan alami seperti kawasan cagar budaya, maupun lingkungan binaan seperti wilayah perkotaan, perkampungan atau pedesaan.

Cagar budaya yang dilestarikan adalah warisan budaya bersifat kebendaan di darat dan di air yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan kemudian atas cagar budaya tersebut dilakukan tindakan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan atau manajemen. Sedangkan yang dimaksud dengan Seni yang berprestasi adalah suatu karya seni atau Grup Kesenian yang berprestasi dalam kompetisi baik skala Lokal/Regional/Nasional.

Tabel II.18 Perkembangan Seni Dan Budaya Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Benda Cagar Budaya yang ada	95	95	95	95	95
2	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	57	59	61	63	66
3	Jumlah Seni	189	189	189	189	189
4	Seni yang berprestasi	34	38	41	43	45

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Lamongan, 2020

Penambahan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya tindakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Tren peningkatan untuk kelompok seni yang berprestasi dan dibina Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan dikarenakan ikut berpartisipasi dan berprestasi dalam festival-festival karya seni Lokal/Regional/Nasional. Pada tahun 2019 kelompok seni yang dibina Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan mengikuti 2 Festival seni, yaitu Festival Karya Tari Tingkat Jawa Timur dan mendapatkan Prestasi atas kategori juara 10 Penyaji Unggulan dan Juara 3 Penata Rias Busana Terbaik, sedangkan di Specta Night Carnival Jawa Timur di situbondo juga mendapatkan prestasi atas kategori juara 10 Penyaji Unggulan.

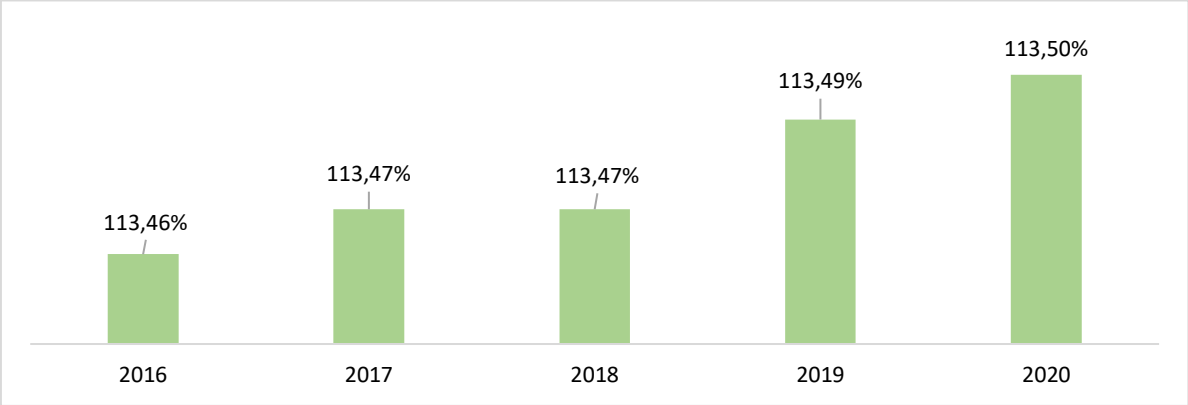
2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar

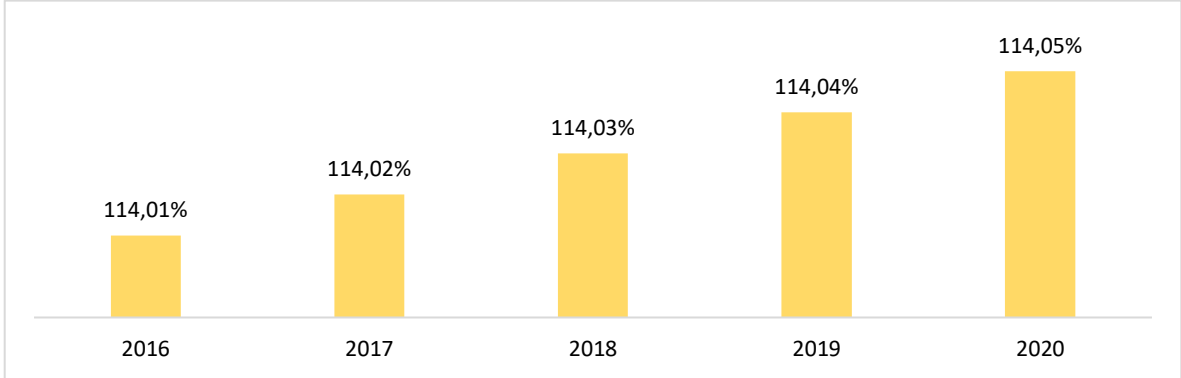
Angka Partisipasi kasar (APK) dapat dipahami sebagai suatu perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut adalah capaian APK SD/MI di Kabupaten Lamongan



Gambar II.24 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami tren capaian yang meningkat. Pada tahun 2016 APK jenjang SD/MI yakni 113,46% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 113,50%. Peningkatan tersebut juga terjadi pada APK untuk jenjang SMP/MTS pada tahun 2016-2020.



Gambar II.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

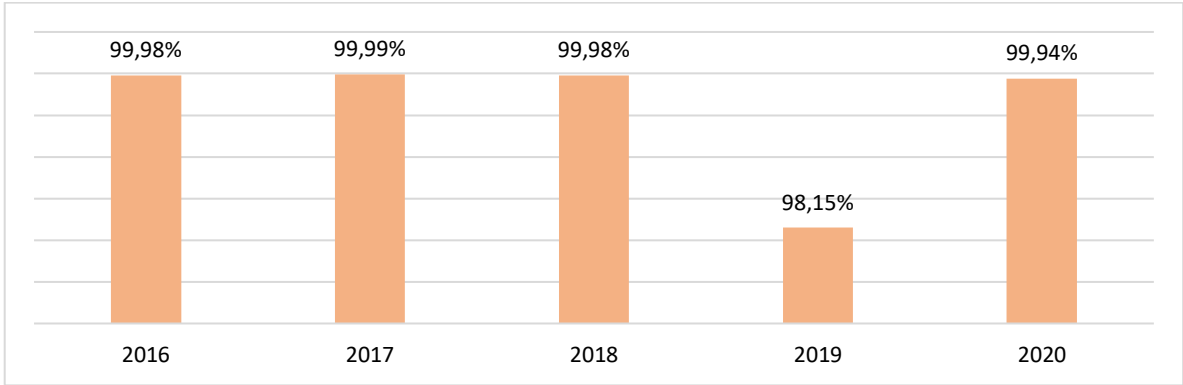
Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat mengalami tren peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase APK pada jenjang ini yakni 114,01% dan mengalami peningkatan menjadi 114,05% pada tahun 2020.

Terjadinya kenaikan APK yang relatif kecil dari tahun ke tahun diakibatkan adanya fasilitas pendidikan dari jenjang pendidikan Dasar baik SD maupun SMP yang relatif mencukupi untuk melayani penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan, disamping itu juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan yang relatif kecil, bahkan masyarakat Lamongan cenderung lebih cepat sekolah sebelum usia yang telah ditentukan pada jenjang pendidikannya, sedangkan kenaikan APK pada jenjang pendidikan menengah didukung oleh adanya program wajar 12 tahun, pemberian beasiswa melalui program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga tidak mampu dan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPP) oleh Provinsi Jawa Timur.

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni

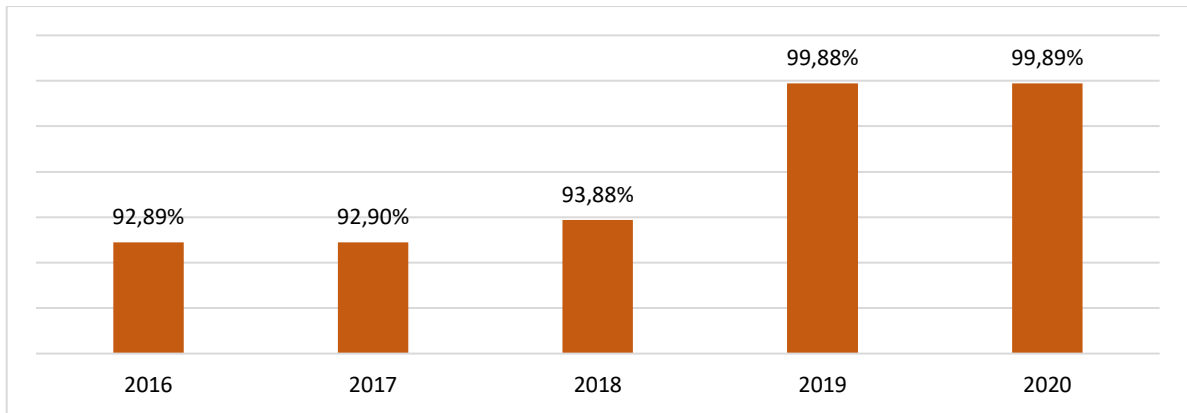
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah instrumen perbandingan antara jumlah murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Asumsi yang digunakan adalah ketika perolehan skor APM semakin tinggi menandakan bila banyak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Capaian APM jenjang SD/MI di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

Tren capaian APM SD/MI cukup fluktuatif, namun tingkat persentase tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masih mendekati nilai ideal, yakni 100%. Terjadinya penurunan angka partisipasi murni pendidikan jenjang SD/MI dikarenakan banyak anak-anak yang masuk sekolah sebelum usia 7 tahun sehingga mempengaruhi terhadap capaian angka partisipasi murni pada dua tahun terakhir. Sementara perolehan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda dengan gambaran jenjang sebelumnya namun relatif meningkat.

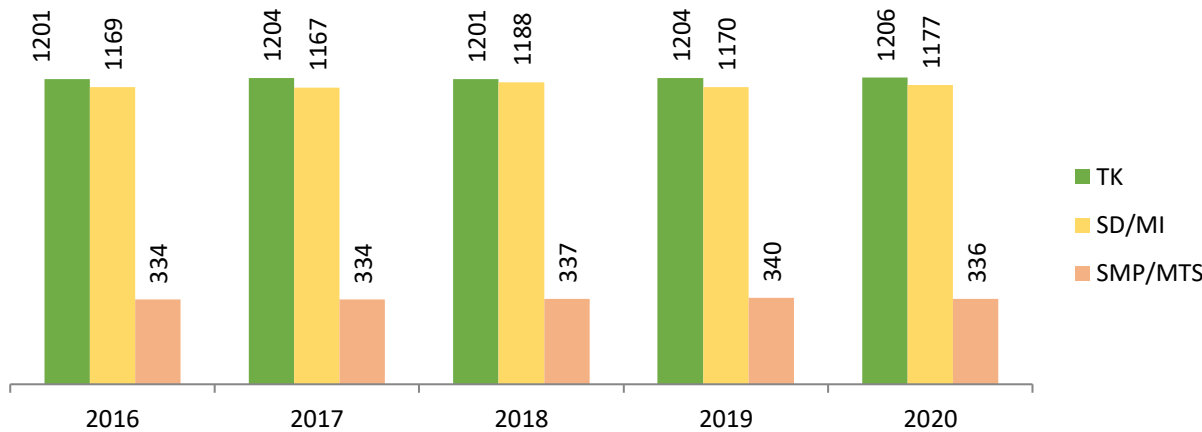


Gambar II.27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2016-2020
 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

Pada tahun 2016, terlihat APM pada jenjang SMP/MTs Kabupaten Lamongan 92,89% mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 99,89% pada tahun 2020. Kenaikan angka partisipasi murni jenjang SMP diakibatkan adanya program pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu sehingga tidak ada SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTS dan adanya kebijakan Zero DO atau tidak ada siswa yang tidak naik kelas.

2.3.1.1.3 Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk seluruh masyarakat. Di Kabupaten Lamongan terdapat beberapa jenis sarana pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni TK, SD, dan SMP.



Gambar II.28 Ketersediaan Sarana Pendidikan tahun 2016-2020
 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Lamongan dalam rentang tahun 2016-2020 terlihat didominasi oleh jenis pendidikan TK. Pada tahun 2020 jumlah keseluruhan sarana pendidikan yang tersedia adalah sebanyak 2.719 lembaga. Terjadinya kenaikan sarana pendidikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya pendirian lembaga pendidikan baru baik jenjang PAUD, maupun pendidikan Dasar. Sedangkan jika terjadi penurunan terhadap fasilitas pendidikan karena adanya lembaga pendidikan yang tidak dilanjutkan izin operasionalnya disebabkan adanya kebijakan *regrouping* maupun penutupan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

2.3.1.1.4 Kondisi Ruang Kelas

Tabel II.19 Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016-2020

Kondisi	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	SD	387	423	435	136	798
	SMP	178	213	204	89	339
	SMA	113	77	111	30	302
	SMK	220	235	283	198	326
Rusak Ringan	SD	2677	2722	2452	2162	1239
	SMP	888	836	763	976	463
	SMA	447	475	472	522	186
	SMK	429	460	444	518	325
Rusak Berat	SD	447	393	634	653	548
	SMP	248	264	267	195	332
	SMA	40	78	35	44	64
	SMK	71	68	62	62	55

Sumber: Dokumen Neraca Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

Kondisi ruang kelas pada tingkat SD di Kabupaten Lamongan yang berkondisi baik pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dari 136 menjadi 798 hal ini sama halnya juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Kondisi ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat pada tahun 2020 terbanyak pada jenjang pendidikan SD. Kondisi ruang kelas yang baik mengalami penurunan dari tahun ke tahun terutama jenjang Sekolah Dasar karena bangunan gedung SD rata-rata dibangun tahun 70-an yang biasa dikenal dengan sebutan (Inpres) sehingga usia bangunan yang relatif sudah tua. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Lamongan setiap tahun telah melakukan rehabilitasi bangunan ruang kelas dalam rangka menjaga kualitas dan daya tahan bangunan sehingga tetap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar.

2.3.1.1.5 Rasio Guru dan Siswa

Rasio pendidikan guru dan siswa menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru dan siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien. Adapun rasio guru dan siswa di Kabupaten Lamonga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.20 Rasio Guru dan Siswa Tahun 2016-2019

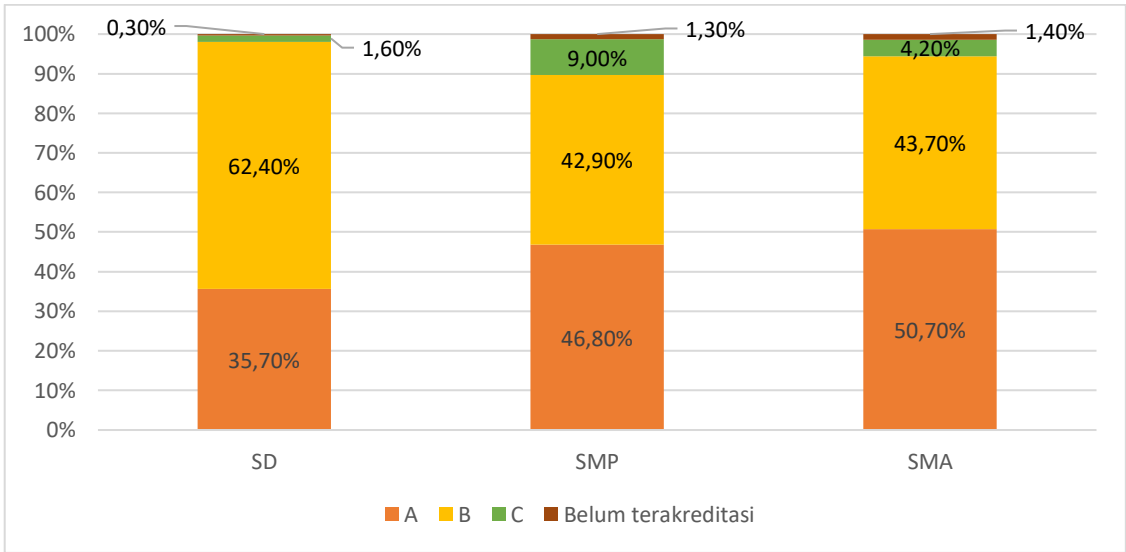
	2016	2017	2018	2019
Rasio Pendidikan				
SD	1:10	1:9	1:12	1:11
SMP	1:13	1:11	1:12	1:13
SMA	1:13	1:13	1:14	1:14
SMK	1:13	1:12	1:13	1:13

Sumber: Dokumen Neraca Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2019

Fenomena yang mempengaruhi rasio perbandingan antara jumlah siswa dan guru di Kabupaten Lamongan yakni adanya gerakan pembatasan jumlah anak bagi penduduk yang sudah berumah tangga, sehingga rata-rata jumlah siswa yang bersekolah SD adalah 2/3 (sepertiga) dari jumlah lembaga SD di Kabupaten Lamongan dan hal ini berada di bawah kondisi normal. Selain itu tidak seimbangnya antara jumlah guru dan siswa juga disebabkan oleh ketersediaan lembaga pendidikan tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan untuk rasio guru dibanding siswa pada pendidikan menengah antara SMA 1:14 dibanding SMK hanya 1:13, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat Kabupaten Lamongan untuk memilih layanan pendidikan menengah bagi putra putrinya pada sekolah menengah umum bukan sekolah menengah kejuruan.

2.3.1.1.6 Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan hasil evaluasi kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada saat ini masih terdapat sekolah di Kabupaten Lamongan yang terakreditasi C dan B. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan capaian akreditasi sekolah. Adapun perbandingan akreditasi setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.29 Akreditasi Sekolah di Kabupaten Lamongan tahun 2019
Sumber: Dokumen Neraca Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2019

2.3.1.1.7 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Tersertifikasi

Kualitas pelayanan pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh kualifikasi tenaga pendidik dan banyaknya jumlah pendidik yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi.

Tabel II.21 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Tersertifikasi Tahun 2020

	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kualifikasi Pendidik						
>D4/S1	72,3%	95,5%	98%	98,4%	96,5%	95,7%
< D4/S1	27,7%	4,5%	2,0%	1,6%	3,5%	4,3%
Pendidik Tersertifikasi						

Sudah Tersertifikasi	67,9%	49,0%	59,9%	57,1%	36,2%	35,7%
Belum Tersertifikasi	32,1%	51,0%	40,1%	42,9%	63,9%	64,3%

Sumber: Dokumen Neraca Pendidikan Kabupaten Lamongan 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidik yang memiliki pendidikan >D4/S1 pada tahun 2020 terbanyak pada jenjang pendidikan SMA. Sedangkan pendidik dengan kualifikasi dibawah D4/S1 terbanyak pada jenjang pendidikan PAUD dan masih terdapat pendidik yang belum tersertifikasi khususnya pada jenjang pendidikan SLB. Kualifikasi pendidikan bagi tenaga pendidik dari tahun ke tahun di Kabupaten Lamongan sudah baik. Penurunan yang terjadi pada 2 tahun terakhir dikarenakan adanya kekurangan guru yang berstatus PNS karena purna tugas, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tenaga penndidik, pemerintah Kabupaten Lamoangan melakukan rekrutmen tenaga pendidik honorer yang kualifikasinya ada yang di bawah standart yang telah ditentukan.

2.3.1.1.8 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dasar oleh pemerintah daerah yakni capaian pelaksanaan SPM. Adapun capaian indikator SPM urusan pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel II.22 Capaian Pelaksanaan Indikator SPM Pada Urusan Pendidikan

		2020	
No.	Indikator	Target	Capaian
Pendidikan Anak Usia Dini			
1.	20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA	75 %	98,51%
2.	90% guru layak mendidik TK/RA (berkualifikasi)	45 %	81,16%
3.	90% TK/RA memiliki sarana prasarana belaiar/ bermain	70 %	100%
4.	60% TK/RA menerapkan MBS	75 %	100%
5.	Presentase anak usia 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	50 %	10,22%
6.	Presentase anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur nonformal	25 %	1,50%
7.	Presentase Guru PAUD jalur nonformal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	30 %	73,91%
Pelayanan Pendidikan Dasar			
1.	Presentase anak yang naik kelas	100 %	100%

No.	Indikator	2020	
		Target	Capaian
2.	Presentase anak yang lulus	100 %	100%
3.	Presentase Siswa yang melanjutkan ke SMP/ MTs	90 %	100%
4.	Presentase Ketersediaan Guru SD dan SMP yang mencukupi terhadap rombongan belajar	75 %	68,77%
5.	Presentase Guru yang layak mengajar	90 %	93,24%
6.	Presentase kebutuhan guru di kabupaten	75 %	97,24%
7.	Presentase Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	100 %	100%
8.	Presentase Penerapan manajemen berbasis sekolah	100 %	100%
9.	Presentase Ketersediaan tenaga kependidikan non guru	75 %	81,32%
10.	Presentase Tenaga pengajar SD adalah lulusan PGSD/D2 atau yang sederajat	5 %	2,25%
Pelayanan Pendidikan Kesetaraan			
1.	Presentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang	1 %	10,63%
2.	Presentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	60 %	2,51%
3.	Presentase Kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang dibinasecara terus menerus	50 %	25,16%
4.	Presentase lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	30 %	76,97%
5.	Presentase Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperlukan	50 %	23,51%
6.	Presentase Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursuskursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	100 %	100%
7.	Presentase peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	100 %	94,95%
8.	Presentase kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	60 %	41,03%
9.	Presentase Tersedianya data dasar kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperbarui terus menerus	100 %	41,03%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM masih membutuhkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya masih belum mampu memenuhi target tahun 2020. Sebagai contoh indikator yang belum mencapai target adalah Presentase anak usia 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat dan beberapa indikator yang lain. Oleh karena itu diperlukan beberapa kebijakan untuk percepatan pencapaian target indikator SPM pada lima tahun yang akan datang.

2.3.1.1.9 Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Pada Urusan Pendidikan

Capaian indikator SDG’s pada urusan Pendidikan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.23 Capaian Indikator SDG’s Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	99,98%	98,14%	98,15%	98,15%	99,94%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	92,89%	99,87%	99,88%	99,88%	99,89%
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	76,00%	80,00%	78,00%	81,00%	78,85%
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	76,00%	80,00%	81,00%	89,00%	73,80%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	114,45%	113,46%	113,98%	92,21%	110,21%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	127,97%	128,47%	128,48%	109,00	110,00%
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,79 tahun	7,54 tahun	7,83 tahun	7,89 tahun	7,92 tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	73,36%	96,00%	90,00%	73,01%	69,70%
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100%	100%	100%	100%	100%
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	47,00%	61,75%	63,35%	68,45%	60,59%

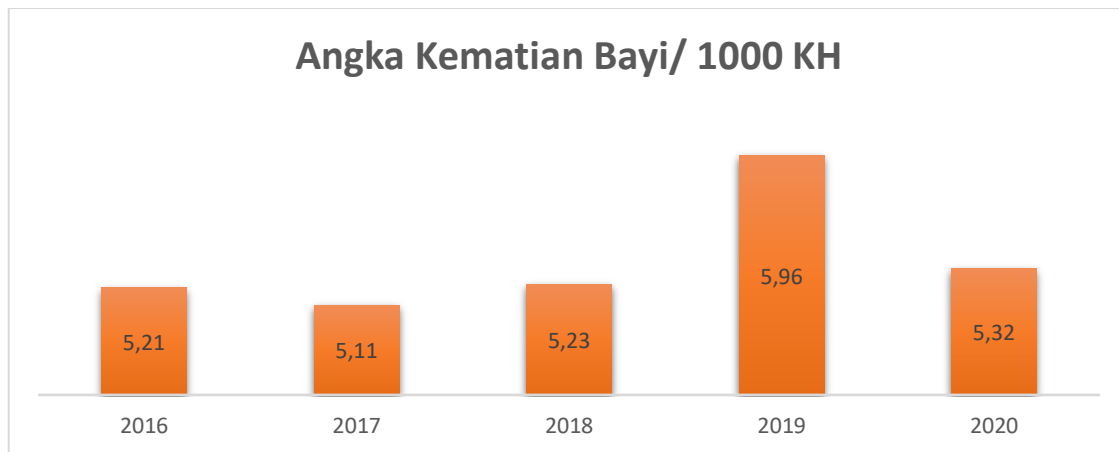
Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat difahami bahawa indikator urusan pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) di Kabupaten Lamongan secara umum capaiannya telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Lamongan agar indikator SDG’s tersebut capaiannya pada lima tahun kedepan terus mengalami peningkatan, sehingga memberikan dampak yang positif pada kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada beberapa indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, seperti indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B; Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat; Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun; Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dipahami sebagai jumlah banyaknya kematian bayi usia 0 dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. dengan kata lain, AKB juga dapat disebut sebagai peluang bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sebagai indikator AKB mencerminkan suatu keadaan derajat kesehatan di masyarakat. Hal ini disebabkan bayi yang lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua si bayi dan sangat erat kaitanya dengan status sosial orang tua si bayi. Kondisi AKB di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.30 Angka Kematian Bayi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

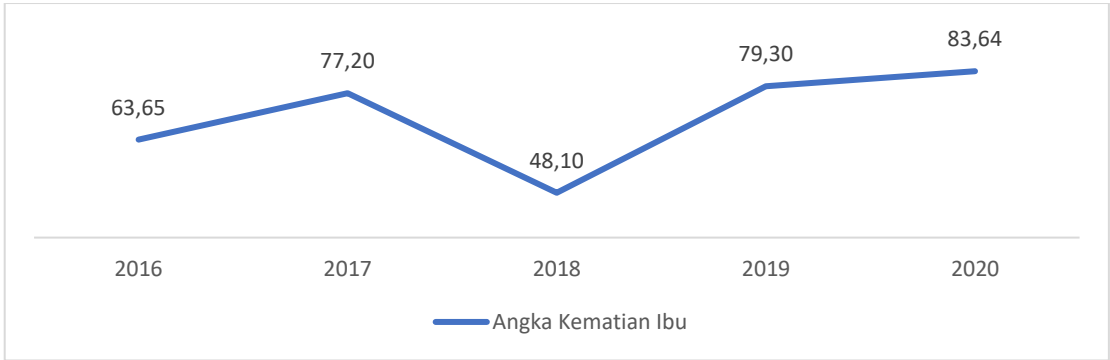
sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lamongan sebanyak 90 kasus mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni 89 kasus. Namun secara persentase mengalami kenaikan menjadi 5,32% per 1000 kelahiran hidup, dikarenakan jumlah bayi lahir hidup mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 17.283 menjadi 16.739 di tahun 2020.

Salah satu faktor yang menyebabkan Angka kematian bayi tinggi antara lain Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, sepsis, kelainan bawaan pada bayi, pneumonia. Berbagai upaya sudah dilaksanakan untuk meminimalisir Angka kematian bayi, antara lain dengan memberikan pelayanan dokter spesialis obgyn ke puskesmas sebagai salah satu cara untuk mendeteksi janin dalam kandungan apabila terdapat kelainan, pemberian makanan tambahan juga diberikan kepada ibu hamil kurang energi kronis sehingga diharapkan nutrisi janin dalam kandungan dapat tercukupi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan kematian bayi diantaranya yaitu dengan melakukan pembelajaran kasus kematian bayi/neonatal, peningkatan kompetensi petugas dengan review Asuhan Persalinan Normal (APN), rooming desk.

2.3.1.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dipahami sebagai jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam rentang waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lainnya, seperti kecelakaan. Kondisi AKI di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

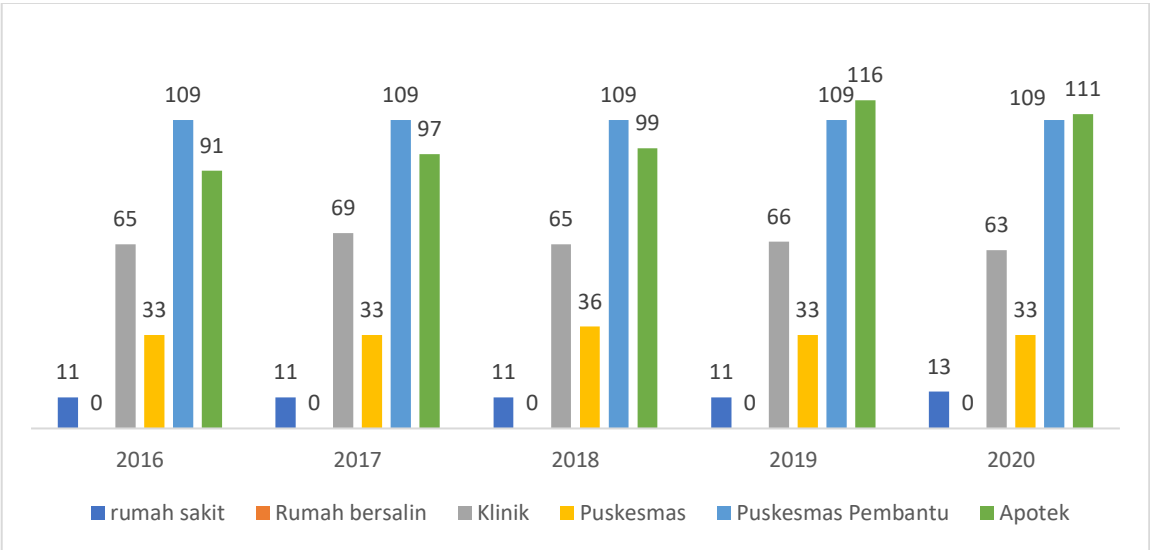


Gambar II.31 Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000) Tahun 2016-2020
 sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kasus kematian ibu sebanyak 11 kasus atau 63,65% per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 14 kasus atau 83,64% per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan AKI tinggi adalah hipertensi, pendarahan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kematian ibu sama dengan upaya penurunan kematian pada bayi, yakni melaksanakan kelas ibu hamil, pendampingan ibu hamil resti (resiko tinggi), pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil, pertolongan persalinan di Puskesmas dengan tim.

2.3.1.2.3 Ketersediaan Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang terdapat di Kabupaten Lamongan terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek. Berikut data jumlah sarana kesehatan pada tahun 2016-2020.



Gambar II.32 Ketersediaan Sarana Kesehatan Tahun 2016-2020
 sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan selama lima tahun terakhir menunjukkan jumlah yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sarana kesehatan yang tersedia yakni 309 tempat, kemudian meningkat menjadi 329 tempat di tahun 2020. Peningkatan jumlah sarana kesehatan karena adanya pemberian izin akses layanan dan pembangunan, sedangkan penurunan terjadi karena ada

beberapa sarana kesehatan yang tidak memperpanjang izin operasi yang telah habis.

Di Kabupaten Lamongan juga terdapat sarana kesehatan yakni rumah sakit dan puskesmas yang telah memenuhi standard pelayanan berdasarkan hasil akreditasi. Adanya rumah sakit dan puskesmas yang telah terakreditasi tentunya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan sehingga dapat menunjang kualitas hidup sehat masyarakat. Perkembangan rumah sakit dan puskesmas yang memenuhi standar tertuang pada tabel di bawah ini:

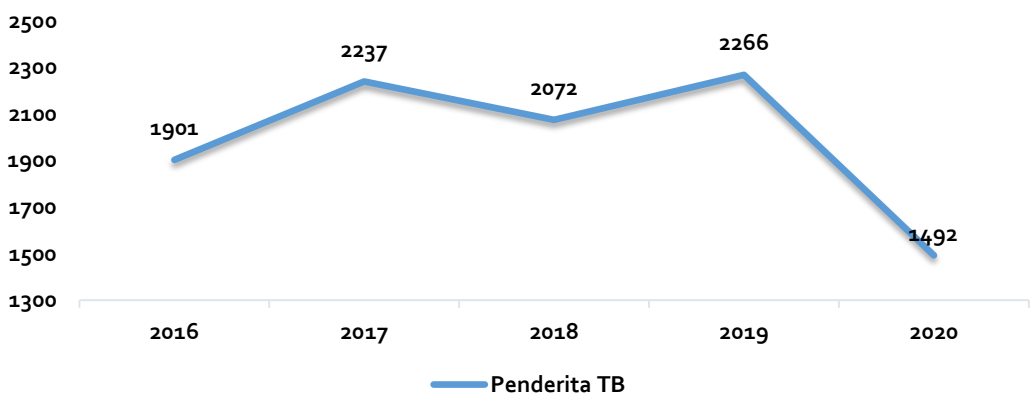
Tabel II.24 Jumlah Puskesmas Dan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah	
	Rumah Sakit	Puskesmas
2016	11	33
2017	11	33
2018	11	33
2019	11	33
2020	13	33

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

2.3.1.2.4 Penderita Tuberculosis (TB)

Temuan penyakit TB pada Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki tren fluktuatif tapi jika dilihat dari jumlah kasusnya selalu bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah kasus mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



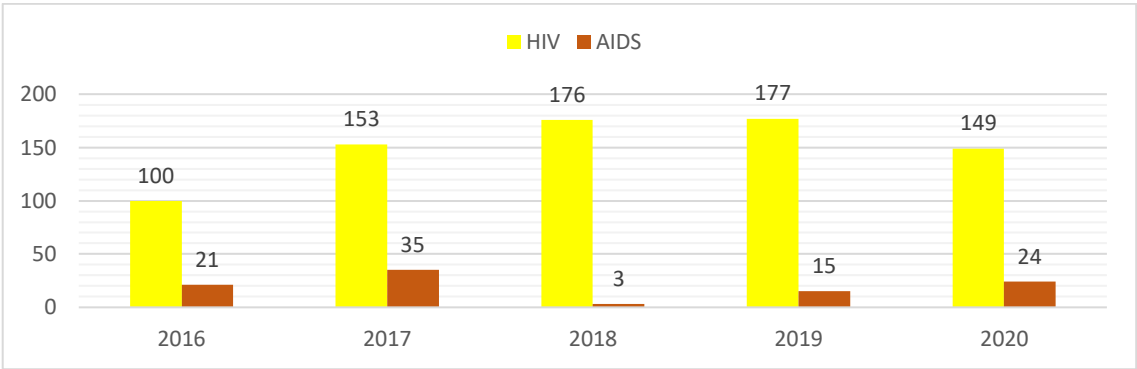
Gambar II.33 Temuan Kasus Penyakit TB Tahun 2016-2020

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Menurunnya penderita TB di tahun 2020 disebabkan investigasi kontak yang belum optimal dikarenakan belum terdapatnya penemuan kasus aktif di tempat khusus (pondok, sekolah, lapas, pabrik, dll) serta adanya pandemi sehingga masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan dan menolak untuk dikunjungi oleh tenaga kesehatan. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan penderita TB diantaranya yaitu dengan melakukan investigasi kontak 1.15 (pencarian penderita 1 penderita 15 KK) melalui kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Kepala dan petugas Puskesmas dengan mengikutsertakan petugas di desa dan bekerjasama dengan kader Yabhisa (Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera).

2.3.1.2.5 Temuan kasus HIV/AIDS

Virus HIV atau yang merupakan kependekan dari *human immunodeficiency virus* merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Pada umumnya penderita HIV akan mudah diserang berbagai macam penyakit infeksi (infeksi oportunistik) karena menurunnya daya tahan tubuh akibat serangan virus ini. Infeksi dari virus HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Jumlah temuan kasusnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.34 Temuan Kasus HIV/AIDS TAHUN 2016-2020
sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Diagram grafik di atas menunjukkan bahwa temuan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016 hingga 2020 cenderung flukutatif. Terjadinya peningkatan temuan penderita HIV di tahun 2016 hingga 2019 disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan penularah HIV sehingga penyebaran sulit dicegah. Sedangkan di tahun 2020 HIV positif menurun dikarenakan pelacakan kasus baru sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan untuk kasus AIDS menurun di empat tahun terakhir karena perawatan terhadap HIV positif terus ditekankan dalam kondisi ARV (Antiretroviral). Peningkatan kasus AIDS di tahun 2020 karena pendampingan terhadap ODHA tidak dapat dilakukan dengan maksimal dikarenakan terjadi pandemi Covid-19. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penularan HIV/AIDS yakni terus menekan cakupan capaian testing dan mempertahankan pasien-pasien dalam pengobatan serta menghilangkan pasien LFU (Loss Follow Up atau putus obat).

2.3.1.2.6 Persentase Masyarakat Ikut Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu wujud dari Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berikut merupakan persentase masyarakat Kabupaten Lamongan yang ikut jaminan kesehatan pada tahun 2016-2020.

Tabel II.25 Persentase Masyarakat yang Ikut Jaminan Kesehatan Tahun 2016-2020

Tahun	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran	BPJS Kesehatan Non- Penerima Bantuan Iuran

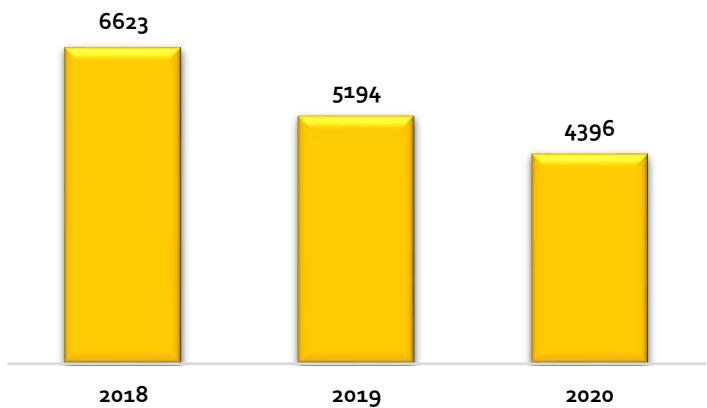
2016	50,08	12,51
2017	50,53	15,36
2018	30,64	10,95
2019	44,13	16,00
2020	58,25	25,90

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase masyarakat di Kabupaten Lamongan yang mengikuti jaminan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlahnya semakin meningkat. Pada kategori penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, di tahun 2016 berjumlah 50,08%, kemudian jumlah ini meningkat menjadi 58,25% pada tahun 2020. Sementara itu, pada ketegori BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran, jumlahnya lebih sedikit dari kategori penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran namun perkembangan menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Lamongan untuk ikut berpartisipasi pada program jaminan kesehatan nasional cukup tinggi.

2.3.1.2.7 Angka Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang. Kondisi stunting di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar II.35 Angka Balita Stunting Tahun 2018-2020

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Secara umum kasus balita stunting yang ada di Kabupaten Lamongan jumlahnya masih tinggi walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan. Tren penurunan pada kasus balita stunting tersebut kemudian menandakan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan gizi balita. Stunting dapat dicegah melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan kemudian dilanjutkan dengan MPASI. Orang tua juga diharapkan membawa balitanya secara rutin ke Posyandu,

memenuhi kebutuhan air bersih, meningkatkan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Adapun kegiatan yang telah di laksanakan di Kabupaten Lamongan antara lain: (1) Pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK); (2) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); (3) Program desa peduli gizi balita di desa lokus stunting; (4) Program cooking class; (5) Program FERA yaitu pemberian tablet tambah darah untuk rematri tiap hari rabu; (6) Program perubahan perilaku melalui EMO DEMO, PMBA; (7) Peningkatan SDM petugas kesehatan melalui pelatihan teknis standart pertumbuhan balita dan konselor menyusui; dan (8) Penyediaan alat antropometri kit di tiap desa.

2.3.1.2.8 Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan

Balita gizi buruk atau mal nutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.26 Jumlah Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan
2016	120	120
2017	111	111
2018	94	94
2019	154	154
2020	214	214

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah balita yang mengalami gizi buruk cenderung fluktuatif dan trendnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah kasusnya meningkat hingga 214 orang balita. Hal ini di karenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan posyandu tidak maksimal. Kendatipun demikian pemerintah selama ini telah memberikan layanan secara maksimal kepada penderita gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan maupun edukasi tentang kesehatan balita.

2.3.1.2.9 Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan dengan strata Purnama dan Mandiri. Perbandingan antara jumlah posyandu dengan posyandu yang aktif di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.27 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif
2016	1742	1384

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif
2017	1744	1412
2018	1744	1459
2019	1744	1495
2020	1745	1366

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah Posyandu dan posyandu aktif di Kabupaten Lamongan cenderung mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan menjadi 78,03% atau 1.366 dari jumlah total posyandu 1.745 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak posyandu yang berstrata Purnama dan Mandiri turun sehingga jumlah posyandu aktif juga mengalami penurunan.

2.3.1.2.10 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dasar oleh pemerintah daerah yakni capaian pelaksanaan SPM. Adapun capaian indikator SPM urusan kesehatan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel II.28 Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

Indikator	2020	
	Target	Capaian
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	96,04
Jumlah Semua Ibu Bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1th	100	100,57
Jumlah Semua bayi baru lahir yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1th	100	100,01
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100,02
Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	100
Jumlah warga negara usia 15-59 th yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu 1th yang sama	100	76,04
Jumlah semua penduduk berusia 60 th keatas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	100	84,77
Jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi diabeten melitus nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	100	97,64
Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100	78,89
Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	100	82,41
Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	N/A

Presentasi estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi	100	97,89%
Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100	N/A

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Lamongan sudah baik. Semua capaian indikatornya sudah melebihi 50% target yang telah ditetapkan secara nasional. Beberapa indikator yang masih belum mencapai target daerah, diantaranya adalah indikator Ibu Hamil mendapat pelayanan, angka capaiannya masih 96,04%. Pelayanan kesehatan pada jumlah warga negara usia 15-59 th yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu 1th yang sama capaian masih 76,04%, Pelayanan kesehatan pada jumlah semua penduduk berusia 60 th keatas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun capaiannya masih 84,77%. Pelayanan kepada orang terduga TB dan HIV capaian masing-masing yaitu 78,89% dan 82,41%. Namun ada juga indikator yang capaiannya sudah melebihi target 100% yakni pelayanan terhadap kesehatan ibu dan bayi yaitu indikator jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1th capaiannya 100,57%, jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1th capaiannya 100,01%, Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar capaiannya 100,02%. Kondisi tersebut menggambarkan bahawa selama ini pemerintah Kabupaten Lamongan sangat peduli terhadap layanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi.

2.3.1.2.11 Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Kesehatan

Capaian indikator SDG’s pada urusan Kesehatan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.29 Capaian SDG’s Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	54,32%	57,2%	66,47%	71,05%	73,86%
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	105,63%	105,22%	106,56%	105,34%	105,77%
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	4,73%	4,1%	5,26%	6,87%	7,44%
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	0%	0%	10,17%	7,65%	7,10%

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	4,73%	4,10%	5,26%	6,87%	0,54%
Prevalensi anemia padaibu hamil.	10,59%	21,21%	20,66%	26,07%	24,47%
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	73,30%	73,30%	78,48%	78,70%	0
Angka Kematian Ibu (AKI).	63,60 per 100 ribu kelahiran hidup	77,20 per 100 ribu kelahiran hidup	48,09 per 100 ribu kelahiran hidup	79,03 per 100 ribu kelahiran hidup	83,63 per 100 ribu kelahiran hidup
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	99,90%	100,00%	100,02%	100,60%	N/a
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99,90%	100,00%	100,02%	100,60%	N/a
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,23 Per 1000 kelahiran hidup	0,41 Per 1000 kelahiran hidup	0,54 Per 1000 kelahiran hidup	0,18 Per 1000 kelahiran hidup	0,23 Per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3,24 Per 1000 kelahiran hidup	4,81 Per 1000 kelahiran hidup	4,20 Per 1000 kelahiran hidup	4,68 Per 1000 kelahiran hidup	4,54 Per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5,21 Per 1000 kelahiran hidup	5,10 Per 1000 kelahiran hidup	5,23 Per 1000 kelahiran hidup	5,90 Per 1000 kelahiran hidup	5,31 Per 1000 kelahiran hidup
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	94,3%	94,94%	95,99%	95,57%	96,62%
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	N/a

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	140,39 Per 100 ribu penduduk	174,65 Per 100 ribu penduduk	152,21 Per 100 ribu penduduk	164,99 Per 100 ribu penduduk	N/a
Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,81 Per 1000 orang	1,03 Per 1000 orang	0,15 Per 1000 orang	0,44 Per 1000 orang	N/a
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0,01 Per 100 ribu penduduk	0,01 Per 100 ribu penduduk	0,00 Per 100 ribu penduduk	0,00 Per 100 ribu penduduk	N/a
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	56%	54%	N/a	9%	N/a
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0,83 Per 10.000 penduduk	0,40 Per 10.000 penduduk	0,52 Per 10.000 penduduk	0,78 Per 10.000 penduduk	N/a
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	56	54	N/a	20	N/a
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	22,74%	25,34%	25,85%	25,19%	N/a
Prevalensi tekanan darah tinggi.	28,84%	16,14%	17,80%%	23,64	N/a
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0%	18,64%	0,95%	26,95%	11,77%
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	N/a	N/a	N/a	N/a	72%
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	N/a	33 PKM	33 PKM	33 PKM	33 PKM
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Unmet need pelayanan kesehatan.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	735.557 jiwa	778.485 jiwa	904.864 jiwa	975.794 jiwa	1.014.386 jiwa
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN).	54,32%	57,2%	66,47%	71,05%	73,86%
Proporsi kematian akibat keracunan.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	22,74%	25,34%	25,85%	25,19%	N/a
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	N/a	89,15%	94,46%	100%	100%
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0,15 Per 1000 penduduk	0,20 Per 1000 penduduk	0,24 Per 1000 penduduk	0,23 Per 1000 penduduk	0,45 Per 1000 penduduk
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	474	474	474	474	474
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	474	474	474	474	474

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data capaian SDG's di atas dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan Bidang Kesehatan sudah baik. Namun ada beberapa indikator yang masih belum mencapai target nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 diantaranya adalah indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita, prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe, kejadian malaria per 1000 orang, jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta). Namun disamping itu, capaian kinerja pemerintah Lamongan dalam memperhatikan kesehatan ibu dan bayi sudah baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah mencapai target yaitu Presentase umur 12-23 bulan yg menerima imunisasi dasar lengkap, prevalensi anemia pada ibu hamil, presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, Angka kematian ibu, Proposi perempuan yang melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan terlatih dan mendapat fasilitas kesehatan. Selain dari kesehatan ibu dan bayi, Kabupaten Lamongan juga mendukung tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, hal ini dilihat dari Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yang sudah mencapai 100%. Meskipun sudah baik, Kabupaten Lamongan

juga perlu memperhatikan mengenai penanganan penyakit yang menyebar di masyarakat. Dengan begitu maka standar kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan dapat semakin meningkat.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ukuran keberhasilan pemerintah Kabupaten Lamongan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat berdasarkan indikator pada tabel berikut:

Tabel II.30 Capaian Kinerja Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,8	77,14	78,16	79,56	80,83
2	Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks	N/A	81,2	82,11	84,67	84,31
3	Indeks Infrastruktur Jembatan	Indeks	N/A	81,55	82,33	83,00	83,30
4	Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi	Indeks	N/A	74,84	75,32	75,80	76,43
5	Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman	Indeks	N/A	72,02	74,22	74,27	79,30
6	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen (%)	89,88	90,71	90,62	92,38	92,93
7	Persentase jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik	Persen (%)	79,18	83,64	88,24	91,84	93,35
8	Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen (%)	76,33	76,43	78,60	77,60	78,91
9	Persentase Jembatan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik	Persen (%)	N/A	87,74	91,51	94,35	95,28
10	Persentase pengguna air bersih (perpipaan)	Persen (%)	40,96	42,28	43,00	44,78	48,02
11	Persentase Rumah tangga bersanitasi	Persen	49,85	49,89	50,23	50,35	50,47
12	Jumlah IPLT	Jml	N/A	1	1	1	1
13	Jumlah IMB yang dikeluarkan	Jumlah	667	555	553	508	481

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase rencana detail tata ruang yang tersusun	Persen (%)	Na	Na	107,14	100,00	104,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2020

Pembangunan infrastruktur yang maju, ketersediaan pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur dan kesenjangan serta ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah merupakan permasalahan utama yang perlu terus dicarikan solusinya. Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah. Indeks infrastruktur sendiri di Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu dari 66,8 menjadi 80,83 atau meningkat 14,03 poin. Kondisi ini menunjukkan semakin meratanya infrastruktur di Kabupaten Lamongan yang di tujukan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Selanjutnya, merujuk pada tabel di atas dapat difahami bahwa capaian untuk Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik merupakan representasi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan infrastruktur. Tahun 2017 merupakan periode awal Indeks Infrastruktur Jalan dengan angka realisasinya 81,2 yang artinya masuk kategori ‘baik’. Indeks ini kemudian konsisten meningkat hingga akhirnya menyentuh angka 84,31 pada tahun 2020. Sedangkan untuk Indeks Infrastruktur Jembatan juga mengalami *trend* peningkatan walaupun tidak signifikan dimana Indeks Infrastruktur Jalan memulai periode dengan angka 81,55, yang artinya masuk kategori ‘baik’. Indeks ini kemudian konsisten meningkat hingga akhirnya menyentuh 83,3 di tahun 2020.

Jembatan merupakan penghubung antar ruas jalan yang berfungsi untuk kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat, jika kondisi jembatan dan jalan dalam keadaan baik maka mobilitas masyarakat akan lancar yang manfaat bagi masyarakat setempat dan dapat menumbuhkan aktifitas ekonomi maupun sosial budaya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini telah menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

Komitmen pemerintah terhadap kualitas infrastruktur di Kabupaten Lamongan juga ditunjukkan dengan capaian Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi Kabupaten Lamongan yang mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut. Dimulai dari tahun 2017 Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi adalah 74,84 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 76,43. Kondisi ini dipengaruhi adanya pemeliharaan rutin dan berkala yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap ketersediaan saluran irigasi. Namun persoalan ketersediaan air irigasi secara merata harus terus ditingkatkan dalam rangka memberikan dukungan pada proses produksi disektor pertanian.

Sedangkan untuk Infrastruktur Permukiman kinerja pemerintah dilihat dari capaian indeks Infrastruktur Permukiman. Indeks tersebut dibentuk dari komponen rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Pergerakan Indeks Infrastruktur Permukiman konsisten meningkat. Berada di angka 72,02 pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 79,3. Peningkatan kinerja tersebut dikarenakan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui berbagai program untuk penanganan kawasan permukiman. Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus meningkatkan indeks infrastruktur permukiman dengan mengurangi luasan kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang lebih baik.

Indikator persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik sepanjang tahun 2016-2020 capaiannya walaupun fluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2016 realisasinya 89,88% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 92,93%. Selanjutnya untuk indikator persentase jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik juga menunjukkan peningkatan secara konsisten. Dimulai dari tahun 2016 persentase realisasinya yakni 79,18% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 93,35%. Baik jalan kabupaten ataupun jalan poros desa strategis mengalami peningkatan dalam kondisi baik dikarenakan hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perawatan kualitas Jalan setiap tahunnya.

Kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik terlihat fluktuasi walaupun kecenderungannya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2016 persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik adalah 76,33% dan pada tahun 2020 realisasinya mengalami peningkatan menjadi 78,91%. Sedangkan untuk indikator Persentase jembatan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik realisasinya secara umum menunjukkan adanya peningkatan secara konsisten. Dimulai dari tahun 2017 realisasinya 87,74% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 95,28%. Baik Jembatan kabupaten ataupun Jembatan poros desa strategis mengalami peningkatan dalam kondisi baik dikarenakan hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perawatan kualitas Jembatan setiap tahunnya.

Peningkatan realisasi untuk keempat indikator di atas dikarenakan adanya upaya pemeliharaan rutin dan berkala serta adanya rehabilitasi jalan yang selalu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Harapannya dengan kondisi jalan yang baik maka dapat menunjang kelancaran mobilitas arus ekonomi masyarakat desa. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah untuk pemeliharaan rutin dan berkala serta

peremajaan terhadap jembatan oleh pemerintah. Selain itu adanya pembangunan jalan poros desa dengan kondisi baik turut andil dalam kelancaran mobilitas arus ekonomi masyarakat desa khususnya dalam penghubungan antar wilayah atau antar desa. Kendatipun demikian jika melihat persentase capaiannya masih perlu terus ditingkatkan karena belum semua jalan dan jembatan di Kabupaten Lamongan pada saat ini dalam kondisi baik. Selain itu persoalan kerusakan jalan dan jembatan masih menjadi salah satu isu yang berkembang di masyarakat dan memerlukan penanganan dari pemerintah.

Indikator selanjutnya yakni persentase pengguna air bersih. Kinerja pemerintah daerah dilihat dari perbandingan antara persentase masyarakat yang terlayani air bersih perpipaan PDAM dan yang terlayani non PDAM. Secara umum realisasi indikator ini selama tahun 2016-2020 konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentasenya adalah 40,96 % lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 48,02%. Peningkatan realisasi indikator ini dikarenakan adanya dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi, melalui sinergi tersebut dapat memperlancar dan mempercepat implementasi program penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun persentase tersebut walaupun mengalami peningkatan masih perlu terus ditingkatkan agar sasaran penerima manfaatnya bisa lebih banyak lagi.

Rumah tangga bersanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Perkembangan kinerja pada indikator rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 konsisten meningkat setiap tahun. Dimulai dengan persentase 49,85% di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 50,47% pada tahun 2020, jika di rata-rata peningkatan /pertumbuhan yang terjadi sebesar 0,30-0,50%. Kendatipun demikian perlu adanya perhatian bagi pemerintah untuk memberikan stimulus guna mencapai peningkatan maksimal pada indikator ini, mengingat ketersediaan sanitasi pada rumah tangga merupakan salah satu faktor guna mendukung kebersihan lingkungan dan menuju rumah tangga yang sehat.

Selanjutnya untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja). Jumlah IPLT yang dimiliki Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 baru 1 unit sehingga perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya kehadiran IPLT mengingat lumpur tinja tidak boleh langsung di buang ke badan air, dikarenakan mengandung pencemar organik yang tinggi.

Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sepanjang tahun 2016-2020 cenderung flutuasi. Pada tahun 2016 sebanyak 667 IMB yang dikeluarkan. Sedangkan pada tahun 2020 hanya 481 IMB yang dikeluarkan. Penurunan jumlah tersebut

dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan pengaruh pada pembangunan gedung maupun perumahan di Kabupaten Lamongan.

Persentase rencana detail tata ruang yang tersusun merupakan indikator terakhir pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Sepanjang tahun 2018-2020 Persentase rencana detail tata ruang yang tersusun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Persentasenya adalah 107,14 lalu. Sedangkan pada tahun 2020 persentasenya adalah 104,63.

2.3.1.3.10 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dasar oleh pemerintah daerah yakni capaian pelaksanaan SPM. Adapun capaian indikator SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel II.31 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	2020	
	Target	Capaian
Persentase tersedianya air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	100%
Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	71,6%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamongan yang perlu ditingkatkan yakni layanan untuk pengolahan air limbah domestik (sanitasi) karena belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan dukungan semua pihak untuk percepatan dan perluasan pelayanan sanitasi di Kabupaten Lamongan.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 3 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Lamongan pada indikator-indikator tersebut:

Tabel II.32 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Permukiman Kumuh yang ditangani	Persen	31,83	35,81	50,05	56,84	82,94
2	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Persen	86,28	86,37	86,57	86,85	87
3	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	78,17	85,83	89,97	91,39	94,93

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2020

Berdasarkan data indikator diatas, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh indentic digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Penanganan terhadap pemukiman kumuh di kabupaten Lamongan sudah sangat baik, pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2016 sebesar 31,83% dan tahun 2020 telah mencapai 82,94%. Capaian indikator tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penanganan pemukiman kumuh. Sedangkan indikator lain yang masih berkaitan adalah Persentase Rumah Tidak layak Huni yang tertangani.

Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seiring dengan penanganan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni di Kabupaten Lamongan secara umum telah memenuhi kriteria rumah layak huni. Terbukti dengan capaian Persentase Rumah Tidak layak Huni yang tertangani tahun 2016 tercapai 86,28% meningkat menjadi 87% yang artinya 87% rumah tidak layak huni telah tertangani. Tentu penanganan pemukiman kumuh tidak dapat lepas dari penanganan rumah tidak layak huni, sehingga keduanya saling mempengaruhi.

Indikator lain terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Jika dilihat dari kinerjanya, Perumahan yang sudah dilengkapi PSU telah tertangani dengan baik. 94,93% kawasan perumahan telah di lengkapi dengan PSU yang artinya kualitas pemukiman di Kabupaten Lamongan sudah tergolong sangat baik.

2.3.1.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dasar oleh pemerintah daerah yakni capaian pelaksanaan SPM. Adapun capaian indikator SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel II.33 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	2020	
	Target	Capaian
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan yang masih belum terlaksana yakni indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada kegiatan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap rumah atau tempat tinggal masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur dikawasan permukiman.

2.3.1.4.5 Capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator SDG's pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.34 Capaian SDG'S Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

INDIKATOR KINERJA	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	40,96%	42,28%	43%	44,78%	53,94%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2020

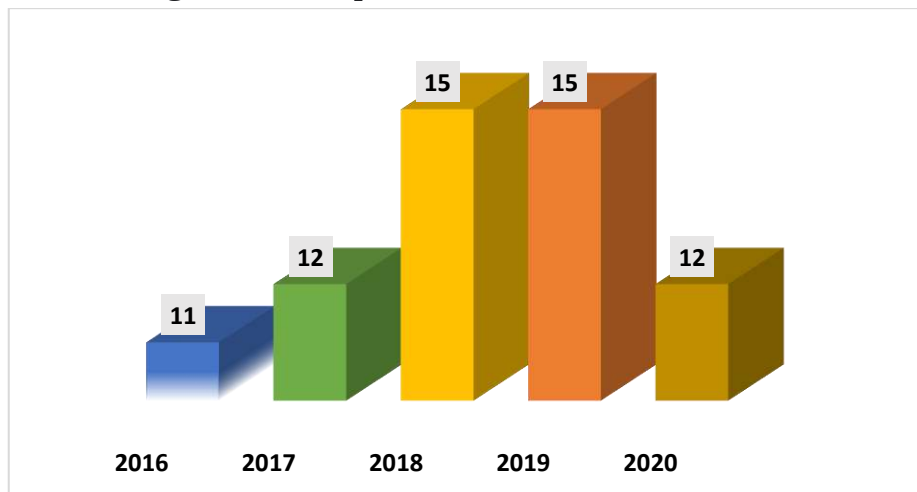
2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

11-71

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

2.3.1.5.1 Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu hal yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi, akan tetapi dapat dilakukan pencegahan dan penanganan untuk menghindarinya. Begitu halnya dengan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penanganan konflik sosial dengan cara deteksi dini dan pendalaman terhadap latar belakang serta para pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Tindakan selanjutnya yakni melakukan mediasi. Melalui dua tindakan tersebut selama 5 (lima) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil melakukan penanganan konflik sosial yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya dalam persentase capaian sebesar 100%. Berikut perkembangan jumlah konflik sosial di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016-2020:

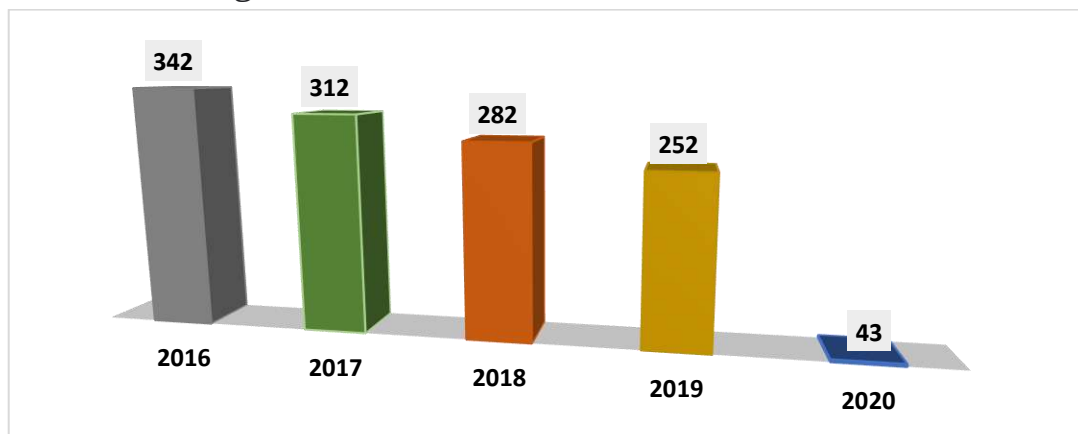


Gambar II.36 Jumlah Konflik Sosial Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, 2020

2.3.1.5.2 Penegakan Pelanggaran Perda

Penegakan pelanggaran Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dengan capaiannya selama periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



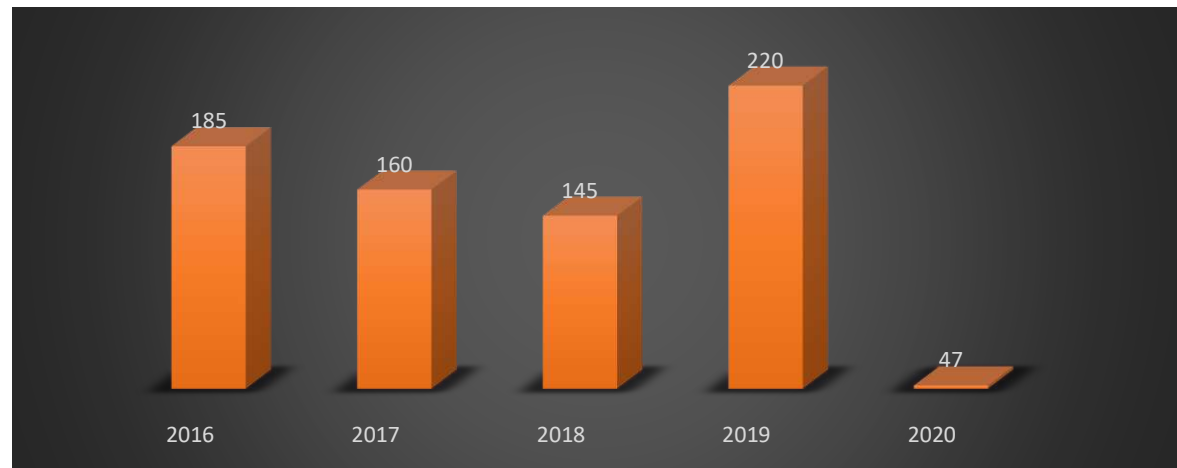
Gambar II.37 Jumlah Penegakan Pelanggaran Perda Tahun 2016-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran Perda yang dilakukan masyarakat selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan secara signifikan. Jika di tahun 2016 terjadi sebanyak 342 pelanggaran Perda, pada tahun 2020 hanya 43 pelanggaran Perda. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut Kabupaten Lamongan berhasil melakukan penegakan pelanggaran Perda yang ditangani dalam ruang lingkup wilayahnya dalam persentase capaian sebesar 100%. Pada tahun 2020 walaupun masa pandemi Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugas patroli penegakan Perda di wilayah Kabupaten Lamongan bersama dengan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Lamongan.

2.3.1.5.3 Gangguan Trantibum

Selama periode tahun 2016-2020 jumlah gangguan trantibum yang terjadi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi yang fluktuatif seperti pada grafik berikut:



Gambar II.38 Jumlah Gangguan Trantibum Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, 2020

Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 185 gangguan trantibum, kemudian menurun menjadi 47 gangguan trantibum pada tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut Kabupaten Lamongan berhasil melakukan penanganan terhadap gangguan trantibum dalam ruang lingkup wilayahnya dengan persentase capaian sebesar 100%.

2.3.1.5.4 Desa Tangguh Bencana

Desa tangguh bencana merupakan representasi kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mitigasi bencana. Selama periode tahun 2016-2020, jumlah desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang signifikan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.35 Jumlah dan Persentase Desa Tangguh Bencana Tahun 2016-2020

Capaian Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana
2016	4	7,04%
2017	16	23,94%
2018	28	40,85%
2019	43	60,56%
2020	54	76,05%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, 2020

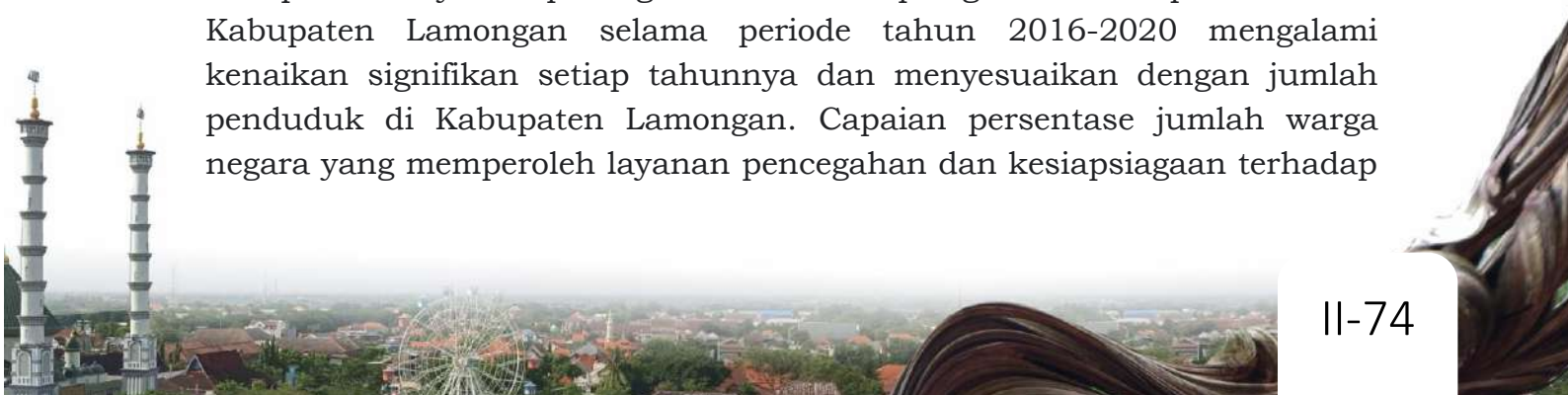
2.3.1.5.5 Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana



Year	Number of Employees
2016	1.149.710
2017	1.153.803
2018	1.157.500
2019	1.160.677
2020	1.280.512

Gambar II.39 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

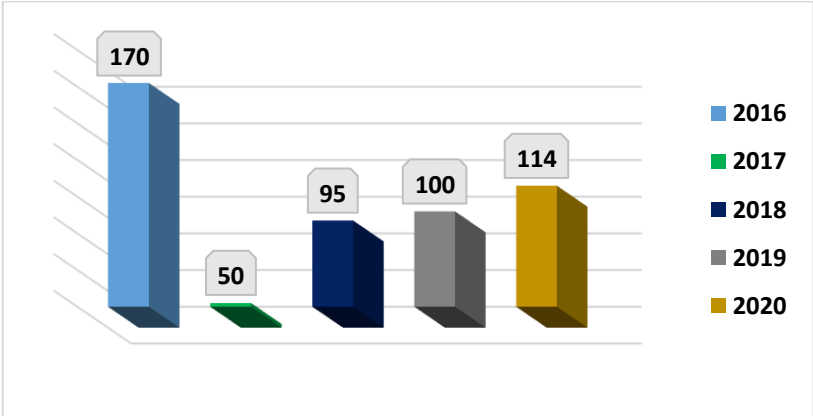
Grafik di atas menunjukkan jika jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya dan menyesuaikan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan. Capaian persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap



bencana di Kabupaten Lamongan mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 berturut-turut dalam angka 100%.

2.3.1.5.7 Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Bencana merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terduga. Hal ini yang membuat timbulnya korban jiwa maupun harta benda setelah terjadinya bencana. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan selama ini telah memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban pada saat pra, kejadian dan pasca bencana. Selama periode tahun 2016-2020 banyaknya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar II.40 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2016-2020
 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat diketahui jika banyaknya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016-2020 dalam kondisi fluktuatif. Secara persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun berturut-turut yakni 100%.

2.3.1.5.8 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dasar oleh pemerintah daerah yakni capaian pelaksanaan SPM. Adapun capaian indikator SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel II.36 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No.	Indikator	2020	
		Target	Capaian
1.	Persentase penanganan kebakaran di Kabupaten Lamongan	100%	100%
2.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	50 kasus	14 kasus
3.	Jumlah dan kualitas barang/jasa	10 kasus	10 kasus
4.	Jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia	220 anggota	224 anggota
5.	Jumlah dan kualitas personil sumber daya manusia	66 anggota	66 anggota
6.	Jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia	268 anggota	268 anggota
7.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
8.	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
9.	Persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa capaian dari indikator SPM pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mayoritas telah mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat indikator yang telah melebihi target. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target yakni indikator jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran). Oleh karena itu perlu komitmen pemerintah daerah dan dukungan semua stakeholder agar pada tahun yang akan datang semua indikator SPM di atas bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.3.1.5.9 Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator SDG’s pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.37 Capaian Indikator SDG’s Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	n/a	167,36	139,55	125,33	n/a

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	13.834.078 .000	2.225.164.758	89.414.517 .213	44.426.464 .050	n/a
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	n/a	12 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	10 dokumen
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	n/a	6,64%	27,81%	14,22%	n/a
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	n/a	n/a	1 buah	2 buah	2 buah
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	n/a	n/a	n/a	2528,56	n/a
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 1 tahun terakhir	n/a	5 kasus	n/a	n/a	n/a
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	n/a	158 kasus	n/a	n/a	n/a
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	-	-	-	-	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu perhatian dari pemerintah daerah pada tahun yang akan datang karena belum mencapai target nasional, yakni indikator Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan indikator yang sudah memenuhi target. Selanjutnya untuk indikator Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 1 tahun terakhir, dan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir termasuk pada indikator yang belum mencapai target.

2.3.1.6 Sosial

Terdapat 2 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada aspek sosial. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Lamongan pada dua indikator tersebut:

Tabel II.38 Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Aspek Sosial Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	146.177	142.500	138.799	134.295	129.419
2	Presentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	2.37	2.52	2.60	3.24	3.63

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, 2020

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masalah yang menghambat seseorang untuk melaksanakan fungsi sosial, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan seperti terjadinya bencana dan lain sebagainya. Jumlah PMKS di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 ada 146.177 jiwa yang mengalami masalah kesejahteraan sosial kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 129.419 jiwa. Terjadinya penurunan jumlah PMKS yang tajam pada tahun 2020 dikarenakan pada masa Pandemi Covid-19 pemerintah Kabupaten Lamongan memperluas sasaran dan jumlah penerima bantuan sosial. Dengan adanya penurunan secara jumlah PMKS pada setiap tahunnya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penanganan PMKS sudah efektif dan harus dioptimalkan lagi pada tahun kedepannya supaya tren penurunan jumlah PMKS terus terjadi.

Jika dilihat dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial atau meningkat kapasitasnya pertumbuhan persentasenya mengalami kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2016 presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 2,37% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 3,63%. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penanganan PMKS agar meningkat kapasitasnya yakni memberikan bantuan Kube Fakmis dan Kube Paca untuk penyandang disabilitas. Pemerintah daerah harus meneruskan tren positif ini ditahun selanjutnya supaya kenaikan presentase PMKS yang memperoleh bantuan terus meningkat.

2.3.1.6.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Urusan Sosial merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan

di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dasar oleh pemerintah daerah yakni capaian pelaksanaan SPM. Adapun capaian indikator SPM urusan Sosial di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel II.39 Capaian SPM Urusan Sosial di Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No	Sasaran Indikator Spm Bidang Sosial	2020	
		Target	Capaian
1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
2.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas pemerintah Kabupaten Lamongan telah berhasil mencapai target pada semua indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang sosial yakni 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat konsen dan maksimal dalam menjalankan SPM pada bidang sosial dan dampaknya tentu telah dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

2.3.1.6.4 Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Sosial

Capaian indikator SDG’s pada urusan Sosial di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.40 Capaian Indikator SDG’s Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	9,97%	9,88%	9,80%	9,72%	8,94%
2	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0,97%	7,46%	11,51%	10,98%	10.48%
3	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	14,89%	14,42%	13,80%	13,31%	n/a

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok					
4	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas secara umum kinerja pemerintah kabupaten Lamongan sudah cukup bagus, walaupun jika dilihat realisasi masing-masing indikator setia tahunnya masih fluktuasi. Pemerintah perlu meningkatkan kembali capaian pada beberapa indikator agar bisa mencapai target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara nasional.

2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga kerja

Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada aspek tenaga kerja. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Lamongan pada urusan Ketenagakerjaan:

Tabel II.41 Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja	2.662	2.800	2.910	2.950	2.710
	Laki Laki	1.222	1.693	1.684	1.344	1.356
	Perempuan	1.440	1.107	1.226	1.606	1.354
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,11	68,55	68,02	68,89	70.81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,56	4,12	3,17	4,00	5,13
4	Persentase Penduduk yang Bekerja	n/a	95,88	96,83	95,99	94,87

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, 2020

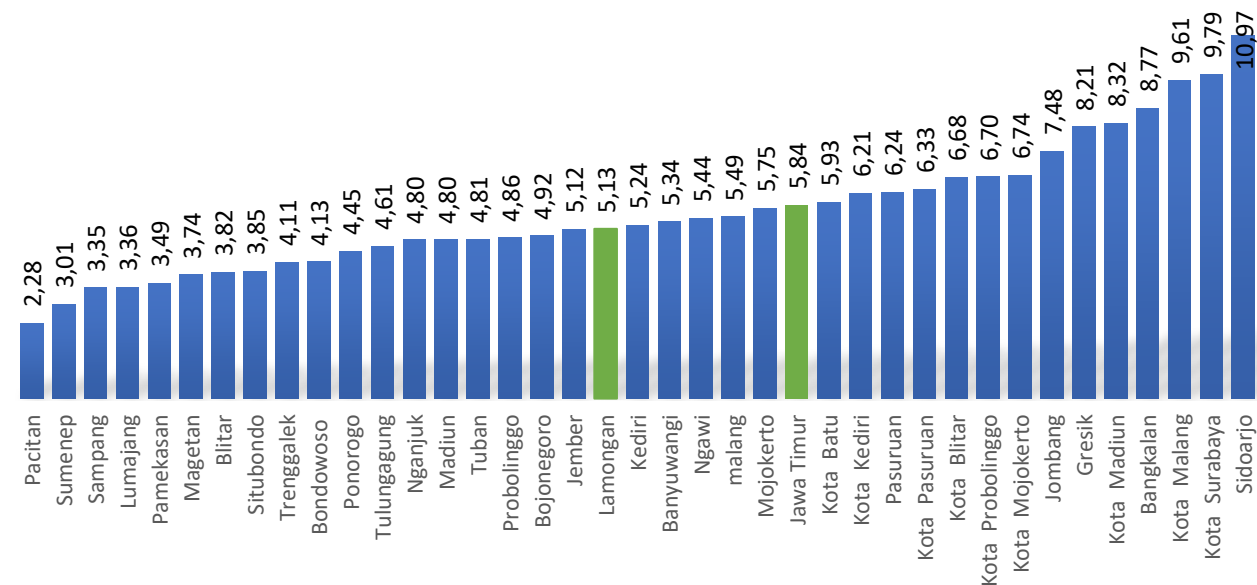
Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak penduduk usia kerja yang tidak bisa melamar pekerjaan. Selaian itu bursa kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan kegiatan sosial baik dilinngkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang mengukur jumlah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yang mana merupakan penduduk dengan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Pertumbuhan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja setiap

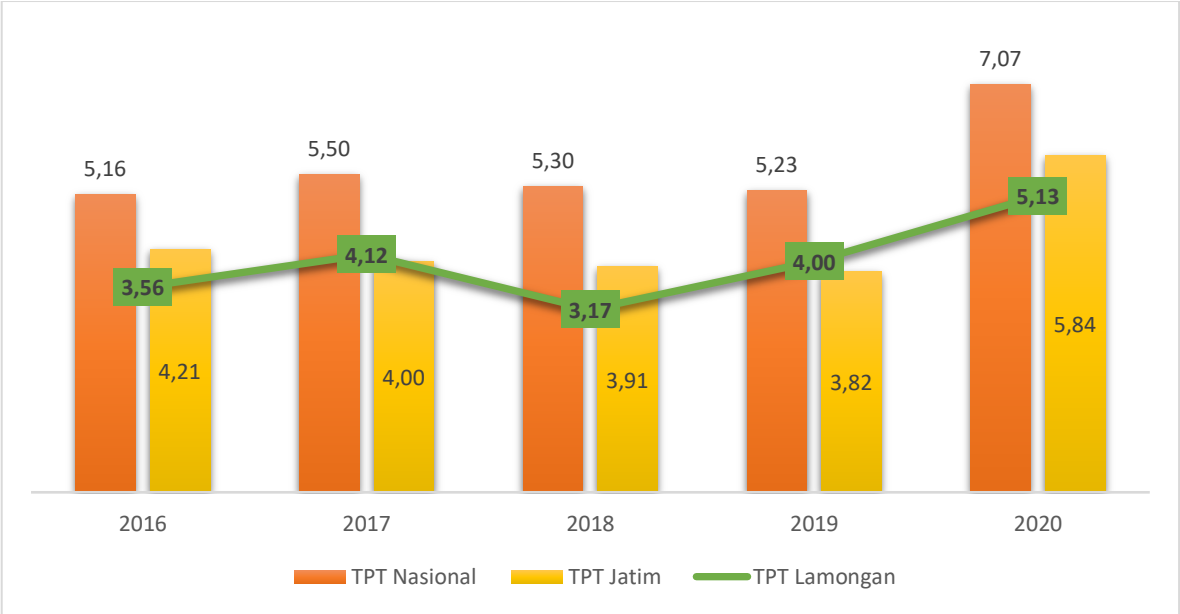
tahun mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,11%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 70,81%. TPAK mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh tingginya usia kerja dan angkatan kerja.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang mengukur persentase jumlah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Pada tabel diatas dapat difahami tingkat pengangguran terbuka 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di 3 tahun terakhir. Peningkatan TPT dikarenakan banyaknya lulusan SMK/SMA yang tidak mendapatkan pekerjaan karena lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi. Oleh karenanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka TPT adalah mengadakan kegiatan pelatihan untuk bisa melakukan usaha mandiri, dilakukan *link and match* jurusan yang ada di SMK dengan kebutuhan di dunia industri, kemitraan dengan perusahaan formal dan dilakukan pemagangan langsung ke perusahaan serta mendapatkan sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2020, peningkatan TPT dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya PHK besar-besaran.

Selanjutnya, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, TPT Kabupaten Lamongan tahun 2020 berada di urutan ke 19, dibawah Provinsi Jawa Timur. Tahun 2020 TPT Kabupaten Lamongan sebesar 5,13 sedangkan Jawa Timur 5,84, angka TPT Kabupaten Lamongan pun berada di bawah angka Nasional. TPT berada di bawah angka Nasional menadi lumrah karena merupakan agregat seluruh Provinsi dan Kab/Kota, namun jika TPT berada di bawah angka provinsi maish merupakan capaian yang cukup baik yang menunjukkan daya saing ketenagakerjaan masih tinggi. Perbandingan antara TPT Kabupaten Lamongan dengan daerah lain, provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.41 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020



Gambar II.42 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, Diolah

Persentase penduduk yang bekerja merupakan indikator yang mengukur jumlah penduduk yang mendapatkan pekerjaan dibidangnya masing-masing. Pertumbuhan persentase penduduk yang bekerja setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan menurun walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2017 persentase penduduk yang bekerja sebesar 95,88%. kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 94,87%. Oleh sebab itu perlu upaya dari pemerintah agar pertumbuhan penduduk yang bekerja bisa semakin meningkat setiap tahunnya.

2.3.2.1.4
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Tenaga Kerja

Capaian indikator SDG’s pada urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.42 Capaian SDG’S Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

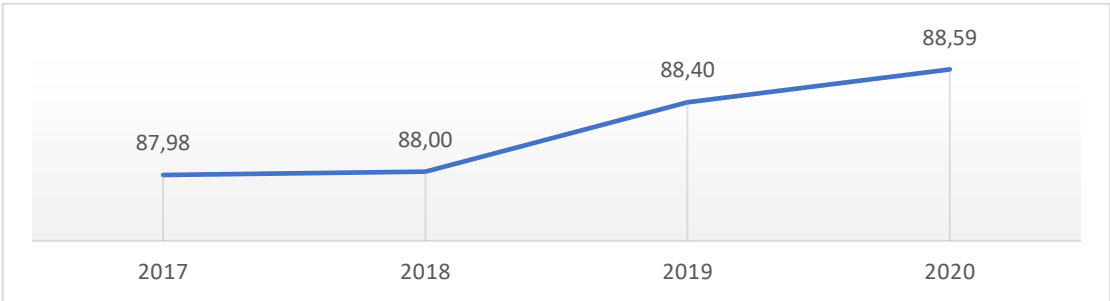
Indikator Kinerja	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	15.965	16.625	17.360	18.205	N/A

Sumber : KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan menurun walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2016 proporsinya adalah sebesar 15.965. kemudian mengalami peningkatan sampai pada tahun 2020 yaitu menjadi 18.205. sehingga jika dilihat dari angka tersebut masih belum mencapai target yaitu 62,4 Juta pekerja formal dan 3,5 Juta pekerja informal.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada aspek pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. IPG merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian di Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020:



Gambar II.43 Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas, pergerakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) konsisten meningkat. Berada di angka 87.98 pada tahun 2017 dan berada diangka 88.59 pada tahun 2020. Perlu upaya dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Indeks pembangunan gender agar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Selanjutnya kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dapat dilihat melalui capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel II.43 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	68.10	67.95	74.37	73.93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pergerakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2017 sebesar 68,10 lalu pada tahun 2020 mengalami indeksnya sebesar 73,93. disebabkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pemerintah selama ini sangat konsen dalam pemberdayaan gender, berbagai program pemberdayaan telah dilakukan dan melibatkan perempuan pada berbagai proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah perempuan di parlemen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.44 Keterwakilan Perempuan di PARLEMEN tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen	Jumlah keterwakilan laki - laki dalam parlemen
1	2016	9	41
2	2017	9	41
3	2018	9	41
4	2019	12	38
5	2020	12	38

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen lebih rendah dibandingkan dengan jumlah keterwakilan laki – laki dalam parlemen. Namun secara jumlah mengalami peningkatan pada tahun 2020. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran jumlah pegawai perempuan yang memiliki Jabatan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.45 Pegawai Perempuan Yang Menempati Jabatan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Eselon II		Eselon III		Eselon IV	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2016	-	-	-	-	-	-
2	2017	38	3	185	40	546	260
3	2018	34	3	179	55	513	225
4	2019	38	4	179	55	477	271
5	2020	31	5	165	54	443	262

Sumber: *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2020*

Peran perempuan dalam pemerintahan dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi pejabat struktural mulai dari eselon IV hingga eselon II. Pada tahun 2017 perbandingan banyaknya perempuan dan laki laki pada jabatan Eselon II, III, IV secara berturut turut adalah 3 : 38, 40 : 185, 260 : 546. Lalu di tahun 2018 perbandingan banyaknya perempuan dan laki laki pada jabatan Eselon II, III, IV secara berturut turut adalah 3 : 34, 55 : 179, 225 : 513. Pada tahun 2019 perbandingan banyaknya perempuan dan laki laki pada jabatan Eselon II, III, IV secara berturut turut adalah 4 : 38, 55 : 179, 271 : 477. Dan akhirnya pada tahun 2020 perbandingan banyaknya perempuan dan laki laki pada jabatan Eselon II, III, IV secara berturut turut adalah 5 : 31, 54 : 165, 262 : 443. Terdapat peningkatan jumlah pegawai perempuan yang menempati jabatan (eselon) pada setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Lamongan selain konsen pada isu Gender juga konsen pada perlindungan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten Layak Anak (KLA).

Kinerja pemerintah pada perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.46 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kasus kekerasan perempuan	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan
1	2016	-	-	-	-
2	2017	22	9	23	10
3	2018	21	8	31	14
4	2019	10	5	21	23
5	2020	8	3	24	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk jumlah kasus kekerasan perempuan dimulai tahun 2017 berjumlah 22 dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020. Untuk jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dimulai pada tahun 2017 berjumlah 9 dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 8 kasus lalu di tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penurunan kasus menjadi 8 dan 3 kasus. Untuk jumlah kasus kekerasan anak dimulai pada tahun 2017 berjumlah 23 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 24. Lalu untuk jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan dimulai tahun 2017 berjumlah 10 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 20 kasus.

Pergerakan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan, Hal ini dikarenakan program kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah berjalan secara optimal sehingga memiliki dampak yang positif terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan pada kekerasan kasus terhadap anak mengalami kenaikan yang disebabkan karena faktor ekonomi yang menurun di masa pandemi ini yang berdampak pada tingginya angka kekerasan terhadap anak, selain itu penyebab meningkatnya angka kekerasan adalah kemajuan teknologi pada saat ini yang mempengaruhi pergaulan terhadap anak dan juga peran pendidikan agama yang semakin berkurang dalam pendidikan formal. Adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu kesadaran dan keberanian pihak korban untuk melaporkan ke pihak yang berwenang sehingga pelaporan kasus kekerasan meningkat. Selain persoalan kekerasan pada anak dan perempuan, pernikahan dini bagi anak juga menjadi isu yang perlu ditangani dengan baik. Berikut adalah gambaran pernikahan dini atau perkawinan anak di Kabupaten Lamongan.

Tabel II.47 Perkembangan Perkawinan Anak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah perkawinan anak
1	2016	N/A

No	Tahun	Jumlah perkawinan anak
2	2017	20
3	2018	36
4	2019	95
5	2020	415

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dimulai pada tahun 2017 jumlah perkawinan anak sebanyak 20 dan pada tahun 2020 yaitu sejumlah 415 perkawinan anak. Penyebab meningkatnya angka perkawinan karena kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah. Selain itu, Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya dispensasi yang diberikan kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun sehingga mengakibatkan kenaikan yang signifikan terhadap perkawinan usia anak.

2.3.2.2.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian indikator SDG’s pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.48 Capaian SDG’S Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	99,90%	100%	100,02%	100,6%	N/A
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	0	0	1	3	4
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	N/A	0%	0%	0%	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	N/A	0,02%	0,03%	0,02%	N/A
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	N/A	0%	0%	0%	N/A

Indikator Kinerja	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	N/A	90,91%	57,95%	82,00%	N/A
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	29,52 tahun	29,96 tahun	29,73 tahun	30,34 tahun	29,86 tahun
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	18,75%	18%	18%	18,75%	N/A
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	N/A	0,03%	0,03%	0,03%	N/A
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	N/A	23%	29%	21%	24%
Prevalensi kekerasan terhadap anak	N/A	23%	29%	21%	24%
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	12%	10%	14%	4%	N/A

Sumber : KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data SDG’s pada tabel diatas indikator yang capaiannya masih mengalami stagnasi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar pada tahun-tahun yang akan datang bisa mengalami peningkatan. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada indikator yang realisasinya belum mencapai target nasional, diantaranya adalah Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan, Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir, Prevalensi kekerasan terhadap anak, Proporsi perempuan dan laki-

laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mempertahankan kinerja indikator yang telah mencapai target nasional.

2.3.2.3 Pangan

Terdapat 4 (Empat) indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada aspek pangan yakni sebagai berikut:

Tabel II.49 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pangan Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	0,18	0,16	0,16	0,16
2	Ketersediaan Pangan					
	- Beras	599.673	607.280	610.718	620.994	654.726
	- Jagung	308.519	490.558	484.704	535.299	488.431
	- Kedelai	27.164	20.272	20.138	11.517	7.997
	- Kacang Tanah	5.890	7.406	7.139	6.438	9.179
	- Kacang hijau	5.879	9.277	4.096	6.066	7.449
	- Ubi Kayu	33.502	28.189	19.029	22.657	39.045
	- Ubi Jalar	804	299	1.245	155	1.120
	- Daging	26.440	30.273	30.283	30.283	37.693
	- Telur	1.658	2.296	2.329	2.329	4.682
	- Ikan	27.665	109.617	112.180	115.775	118.615
3	Skor PPH Konsumsi	83,5	85,2	86,1	87,2	87,8
4	Skor PPH Ketersediaan	N/A	89,1	99,1	99,2	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan, 2020

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang mengukur mengenai persentase jumlah makanan pokok yang tersedia di dalam daerah. Merujuk pada tabel diatas pertumbuhan Indeks Ketahanan pangan mengalami perbaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Lamongan dikategorikan sebagai daerah “Sangat Tahan Pangan”. Upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai IKP tetap stabil dan tetap pada kategori “Sangat Tahan Pangan” yakni: pertama, Memaksimalkan jumlah produksi dan ketersediaan komoditas terutama padi dan jagung yang merupakan porsi utama dari kebutuhan kalori harian. Kedua, Mengoptimalkan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jalan dan akses listrik pada seluruh daerah di Kabupaten Lamongan sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah/pemberian, pinjaman, dan bantuan keuangan. Ketiga, Lebih memperhatikan kesehatan masyarakat dengan cara mempermudah akses air bersih serta menyediakan lebih banyak fasilitas kesehatan sehingga akan lebih mudah untuk dijangkau.

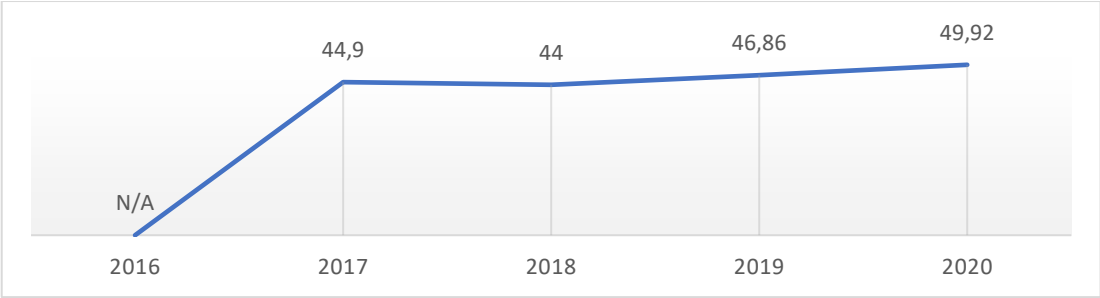
Selanjutnya terkait ketersediaan pangan, pertumbuhannya sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan produksi serta tingginya bahan pangan yang dibawa keluar wilayah

Kabupaten Lamongan. Penurunan produksi dapat disebabkan adanya pengurangan lahan, gagal panen, dan adanya pergeseran komoditas tanam. Selain itu indikator yang menggambarkan kondisi pangan di Lamongan yakni Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP). Pola Pangan Harapan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal. Secara umum pergerakan persentase pada indikator ini menunjukkan adanya peningkatan secara konsisten baik skor PPH Konsumsi maupun Ketersediaan.

Untuk Skor PPH Konsumsi Dimulai dari tahun 2016 Skor PPH Konsumsi adalah 83,5 dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang skornya adalah 87,8. Kondisi ini dipengaruhi adanya semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi dan masyarakat lebih menyadari pentingnya pangan yang berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Skor PPH Konsumsi pada th 2019-2020 stagnan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya dapat disebabkan karena jenis pangan yang dikonsumsi yang tidak terlalu beragam dan masih seragam dengan tahun sebelumnya karena keterbatasan aktivitas di luar (covid 19). Oleh karenanya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali skor PPH konsumsi seperti: Sosialisasi pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Pemanfaatan pekarangan (Penanaman berbagai macam bibit sayur dan buah-buahan) serta disinergikan dengan dengan budidaya perikanan air tawar dan Pemberian bantuan berupa beras dan minyak (pada daerah rawan pangan dengan tingkat konsumsi rendah). Untuk Skor PPH Ketersediaan yang dimulai dari tahun 2017 Skor PPH Ketersediaan adalah 89,1 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 99,2. Peningkatan Skor PPH ketersediaan disebabkan karena meningkatnya jumlah kelompok pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang. Penyumbang ketersediaan terbesar adalah kelompok padi-padian dan penyumbang ketersediaan terbesar kedua adalah kelompok gula yang juga merupakan sumber energi. Untuk meningkatkan skor PPH ketersediaan perlu dilakukan seperti meningkatkan produksi kelompok pangan terutama yang menjadi sumber bahan pokok dan meningkatkan produksi kelompok pangan yang banyak mengalami penurunan.

2.3.2.4 Pertanian

Pada urusan Pertanian indikator yang dijadikan ukuran kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat. Indikator ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan realisasi sebagai berikut:



Gambar II.44 Pergerakan Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas, Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat di Kabupaten Lamongan meningkat secara konsisten. Namun pergerakan peningkatannya masih cenderung lambat. Pada tahun 2016 persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 44.45%. Kemudian meningkat menjadi 49,72% pada tahun 2020. Meskipun kenaikan cukup tajam di tahun 2020, namun perlu adanya peningkatan kinerja pada periode pembangunan ke depan dalam rangka penyelamatan aset negara.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Terdapat 3 (tiga) indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada aspek lingkungan hidup. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Lamongan pada indikator-indikator tersebut:

Tabel II.50 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,55	64,20	66,22	67,93	72,67
2.	Penanganan Sampah	20,48	22,09	72.54 %	77 %	75 %
3	Pengurangan Sampah	14,92	14,79	18.01 %	20.12 %	22.25 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2020

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Capaian IKLH Kabupaten Lamongan setiap tahunnya mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kualitas udara dan peningkatan kesadaran masyarakat akan upaya pengelolaan lingkungan. Pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dimulai tahun 2016 angkanya adalah 60,55 dan tahun 2020 menjadi 72,67. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengelola kualitas lingkungan hidup dengan baik setiap tahunnya terlihat dari adanya peningkatan tersebut.

Untuk kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam aspek penanganan sampah sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami

peningkatan yang sangat tinggi yakni mencapai 75% pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan telah meberikan layanan penanganan sampah pada masyarakat dengan baik. Sedangkan untuk pengurangan sampah kecenderungannya fluktuatif dimulai tahun 2016 angkanya adalah 14,79 dan tahun 2020 menjadi 22,25. Kendatipun demikian sampah yang dapat diolah atau diaur ulang masih perlu dioptimalkan. Pemerintah masih perlu upaya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar Kabupaten Lamongan bisa menjadi kabupaten ramah lingkungan.

2.3.2.5.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Lingkungan Hidup

Capaian indikator SDG’s pada urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.51 Capaian SDG's Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

INDIKATOR KINERJA	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	N/A	N/A	73%	80%	N/A
Jumlah kota hijau Yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Ada	Ada	Ada	ada	Ada
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	N/A	4.622,00 ha	7.393,80 ha	7.763,00 ha	-
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	2,05 ton	2,63 ton	3,32 ton	4,28 ton	4,89 ton
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	0,0166 Ton	0,0142 ton	0,0147 ton	0,0155 ton	0,0165 ton
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	52,38%	55,20%	56,60%	87,99%	57,67%
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	N/A	N/A	351,56 ha	421,87 ha	N/A
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Ada	Ada	Ada	ada	Ada
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	61,76	63,33	65,29	66,67	68,18

Sumber : KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian SDG’S bidang Lingkungan Hidup, rata-rata indikatornya mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Kendatipun demikian sebagian besar indikator tersebut belum mencapai target nasional dan hanya indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani yang telah mencapai target. Selain itu masih terdapat indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten

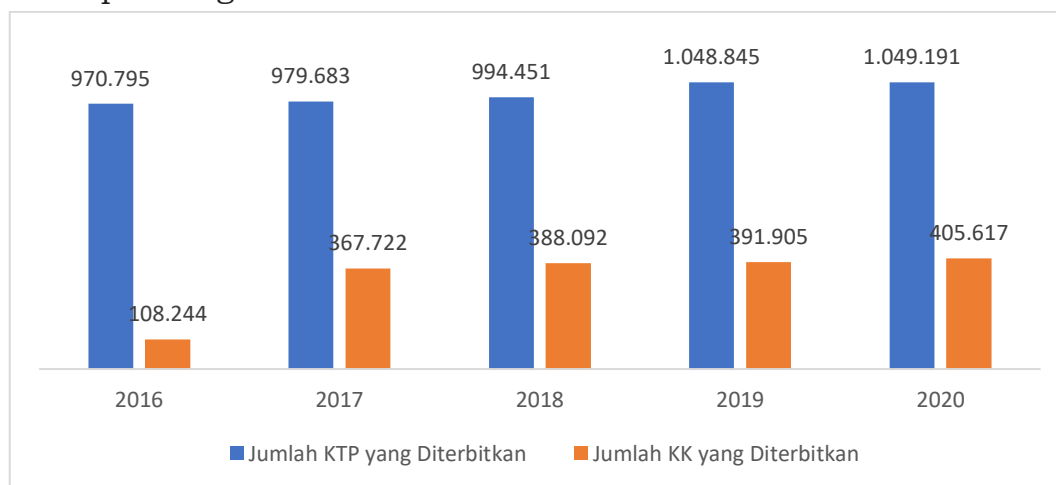
Lamongan, sehingga perlu mendapatkan perhatian agar bisa terlaksana dan mencapai target selama periodesasi RPJMD ini.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Lamongan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni:

2.3.2.6.1 Jumlah KTP dan KK yang Diterbitkan

Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan merupakan gambaran jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang memiliki KTP dan keluarga yang telah memiliki Kartu keluarga pada periode waktu tertentu. Berikut pergerakan jumlah KTP dan KK yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:



Gambar II.45 Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020

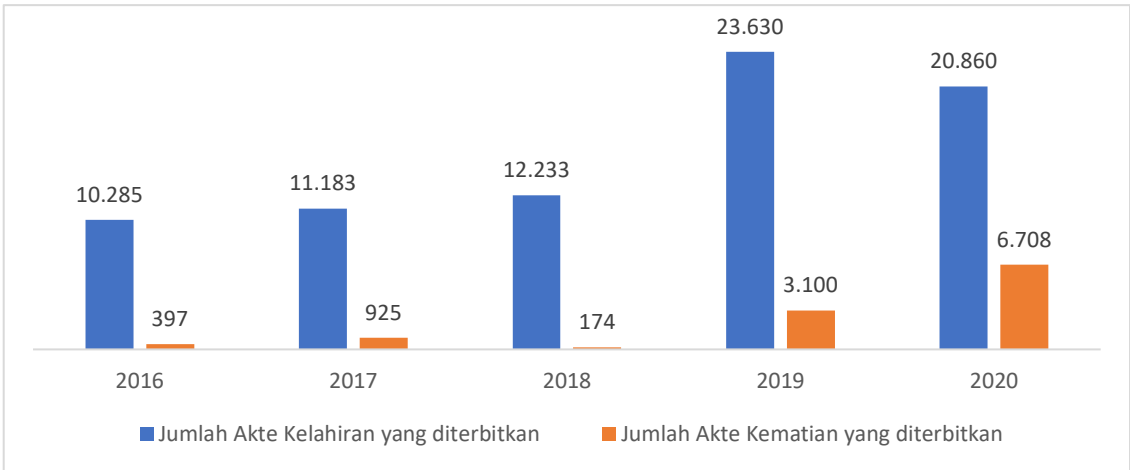
Berdasarkan grafik di atas, jumlah KTP dan KK yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah KTP yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan adalah sejumlah 970.795. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1.049.191. Adanya peningkatan ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu: Pemerintah telah melaksanakan upaya pendekatan pelayanan rekam KTP Elektronik dengan kegiatan jemput bola GEMILANG (Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Langsung) di 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan target semua wajib KTP harus memiliki KTP Elektronik. Pelayanan Perekaman Jemput Bola di Sekolah dan organisasi sektor publik maupun swasta. Pelayanan Penerbitan KTP-elektronik di Hari Minggu pada kegiatan MINCE (Minggu Ceria) di alun-alun, dan juga Pelayanan Hari Sabtu. Pelayanan Online via Whatsapp dan layanan 3 in 1. Hardware dan software sarana prasarana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik sudah memadai dan selalu dipantau kondisinya sehingga program pendekatan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan terlaksana dengan baik dan lancar. Peningkatan kualitas berupa kemampuan dan ketrampilan SDM di pelayanan serta penambahan personil dengan

perekrutan tenaga teknis yang ditempatkan di kecamatan- kecamatan sehingga pelayanan masyarakat lebih mudah dan dekat.

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah KK yang diterbitkan, pada tahun 2016 jumlah KK yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan adalah sejumlah 108.244. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 405.617. Peningkatan terjadi dikarenakan pemerintah berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan cukup dilakukan di kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurusnya. Selain itu juga kegiatan sosialisasi layanan administrasi kependudukan yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Kemudian juga melayani pelayanan online via Whatsapp dan layanan 3 in 1 yang diikuti dengan peningkatan kualitas SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penguatan pada sarana prasarana yang terkait pelayanan pada masyarakat.

2.3.2.6.2 Jumlah Akte Kelahiran dan Kematian yang Diterbitkan

Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Gambar II.46 Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian Yang Diterbitkan Tahun 2016-2020

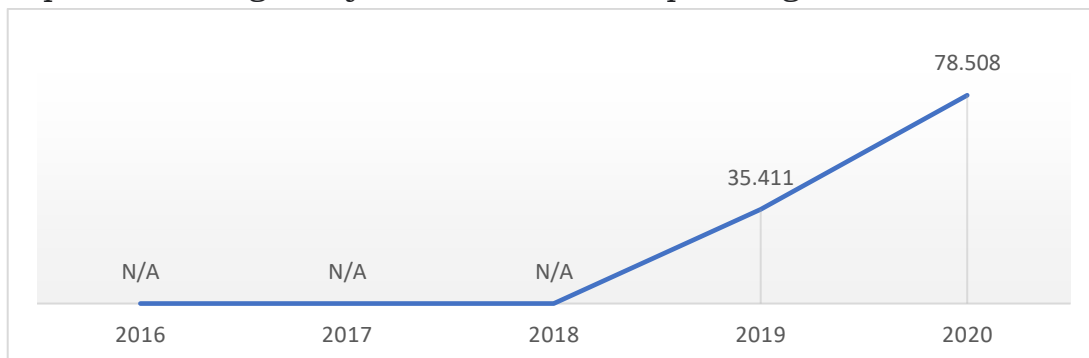
Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas jumlah Akte Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah Akte Kelahiran yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan adalah sejumlah 10.285 dan pada tahun 2020 menjadi 20.860. Sedangkan untuk jumlah Akte Kematian pada tahun 2016 yang diterbitkan sejumlah 397 dokumen mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6.708. Adanya peningkatan ini karena pemerintah terus meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan diantaranya persyaratan pengurusan akte kelahiran, pentingnya kepemilikan akte kelahiran dan peraturan-peraturan baru yang memudahkan dalam pengurusan akte kelahiran, dilaksanakannya kegiatan pembinaan kepada aparat di tingkat Kecamatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur pembuatan dokumen

pencatatan sipil, dan dilaksanakannya kegiatan jemput bola penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kecamatan serta dilaksanakannya program 3 in 1 dalam proses penerbitan dokumen kependudukan secara Online. Sedangkan penurunan Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan secara langsung Ke Desa/ Kecamatan mengalami hambatan.

2.3.2.6.3 Jumlah KIA yang Diterbitkan

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. Berikut pergerakan jumlah KIA yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:



Gambar II.47 Jumlah KIA Yang Diterbitkan Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas Jumlah KIA yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Jumlah KIA yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 35.411 mengalami peningkatan menjadi 78.508 pada tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan didukung oleh adanya program 3 in 1 dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dan Pelayanan Online.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang diperoleh setiap tahunnya. Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat Indikator yang dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa yang mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan

mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan Implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Dalam menetapkan skor didasarkan hasil FGD Analitical Hierarchy Process (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian diransformasikan menjadi sebuah indeks. Berikut ini perkembangan status desa di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020:

Tabel II.52 Status IDM Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	2016	2	226	213	20	1
2	2017	1	217	220	20	4
3	2018	0	76	347	34	5
4	2019	0	42	328	81	11
5	2020	0	0	324	122	16

Sumber: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020

Berdasarkan data di atas status desa di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan dana desa mampu menjadi stimulus desa dalam menjaga potensi serta kemampuan desa yang mensejahterakan masyarakat, sehingga pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Namun jika dilihat dari jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri capainnya sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Lamongan, atau setara dengan 3,5 persen dari total desa 462. Adapun persebaran status desa pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.53 Status IDM Setiap Kecamatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No	Kecamatan	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Lamongan	0	0	8	2	2
2	Turi	0	0	11	8	0
3	Deket	0	0	12	5	0
4	Tikung	0	0	6	7	0
5	Kembangbahu	0	0	16	2	0
6	Mantup	0	0	6	9	0

No	Kecamatan	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
7	Sambeng	0	0	21	1	0
8	Ngimbang	0	0	18	1	0
9	Bluluk	0	0	1	7	1
10	Sukorame	0	0	8	1	0
11	Modo	0	0	15	2	0
12	Babat	0	0	16	5	0
13	Kedungpring	0	0	17	6	0
14	Sugio	0	0	18	2	1
15	Sukodadi	0	0	13	7	0
16	Pucuk	0	0	11	6	0
17	Sekaran	0	0	8	11	2
18	Maduran	0	0	15	2	0
19	Laren	0	0	14	6	0
20	Brondong	0	0	2	6	1
21	Paciran	0	0	0	10	6
22	Solokuro	0	0	4	6	0
23	Karanggeneng	0	0	14	1	3
24	Kalitengah	0	0	18	2	0
25	Karangbinangun	0	0	19	2	0
26	Glagah	0	0	27	2	0
27	Sarirejo	0	0	6	3	0

Sumber: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020

Upaya peningkatan status desa IDM ini terus dilakukan melalui program maupun kegiatan seperti: penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa serta optimalisasi keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). Adapun persentase BUMDESA yang aktif di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TABEL II.54 PERSENTASE BUMDES AKTIF

No.	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perkembangan Bumdes Aktif	0,87	Na	na	2,16	2,16

Sumber: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Persentase Bumdes Aktif pada tahun 2016 adalah sebesar 0,87 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 2,16. Peningkatan disebabkan karena adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk Pengembangan BUMDes secara berkala.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mengetahui keberhasilan dan kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan pada aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka pada tabel di bawah ini disajikan 2 indikator sebagai tolak ukur kinerja pemerintah.

Tabel II.55 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020

No.	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Wanita Usia 15-49 Menggunakan Alat KB	79,02	80,11	79,86	79,40	79,30
2	Cakupan Pasangan Usia Subur	284.482	289.471	297.654	304.987	300.159

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, 2020

Wanita Usia 15-49 menggunakan alat KB merupakan jumlah Wanita yang menggunakan alata KB guna mengontrol laju pertumbuhan jumlah penduduk. Wanita usia subur dengan rentan umur 15-49 tahun yang menggunakan KB di Kabupaten Lamongan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 80,11% peresentase Wanita usia subur yang menggunakan alat KB hingga tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,81% menjadi 79,30%. Penurunan terjadi karena ada masyarakat yang menghentikan program KB dan ada pula masyarakat yang tidak mau mengikuti program KB. Dengan adanya kendala tersebut diharapkan perangkat daerah terus melakukan sosialisai tentang pentingnya mengikuti program KB guna mengontrol pengendalian penduduk di Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk cakupan pasangan usia subur merupakan jumlah pasangan subur yang terdaftar dalam pengendalian penduduk. Cakupan usia subur diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan. Kinerja pada indikator ini secara umummengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2019 mencapai sebanyak 304.987 pasangan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 300.159 pasangan usia subur di Kabupaten Lamongan. Penurunan cakupan usia subur ini mengalami penurunan seiringan dengan menurunnya data yang masuk dalam perangkat daerah karena adanya pandemic covid-19 sehingga pendataan mengalami kendala dan pasangan usia subur mengalami penurunan dalam datanya.

2.3.2.9 Perhubungan

Pada urusan Perhubungan terdapat 3 indikator yang menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan. Adapun capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.56 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah uji KIR angkutan umum	Jumlah	14.258	13.945	14.208	14.187	12.376
2	Penerangan Jalan Umum	%	60,56	63,56	67,47	69,80	74,34
3	Prasarana Jalan	%	35,71	39,27	60,70	84,50	85

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Lamongan, 2020

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum cenderung menurun dari tahun 2018 jumlah uji KIR yang dilaksanakan sebanyak 14.208 pengujian, mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 menjadi 12.376 pengujian ujian KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada kendaraan yang beroperasi di wilayah pemerintahan Kabupaten Lamongan. Penurunan ini tentu dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan mobilisasi orang serta kendaraan di batasi sehingga kendaraan yang melakukan uji KIR juga mengalami penurunan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan indikator Presentase penerangan jalan umum (PJU) adalah presentase dari panjang jalan yang ada di Kabupaten Lamongan yang sudah ada fasilitas lampu atau sejenisnya yang digunakan untuk penerangan jalan. Penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang sangat penting untuk penerangan pengguna jalan umum dan menjaga keselamatan pengendara di Kabupaten Lamongan. Pada indikator ini kinerja dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sudah sangat bagus terbukti pada tahun 2016 sebanyak 60,56% konsisten mengalami kenaikan sehingga menjadi 74,34% pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menunjukkan kinerja yang positif dalam penyediaan prasarana jalan. Perhitungan prasarana jalan adalah presentase dari luas jalan Kabupaten yang terpenuhi alat kelengkapannya seperti Rambu, Marka, CCTV, TL, WL. Pada tahun 2016 hanya 35,71% prasarana jalan yang terpasang di jalan kabupaten, kemudian mengalami kenaikan menjadi 85% pada tahun 2020. Keberadaan sarana prasana jalan sangat penting dalam rangka menjaga keselamatan pengguna jalan dan melatih kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kinerja tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan komitmen dalam memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, khususnya jalan kabupaten.

2.3.2.9.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Perhubungan

Capaian indikator SDG’s pada urusan perhubungan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.57 Capaian Kinerja SDG’s Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalur Kereta Api	35,57 KM	35,57 KM	35,57 KM	35,57 KM	35,57 KM
2	Jumlah Dermaga Penyeberangan	1 dermaga	1 dermaga	1 dermaga	1 dermaga	1 dermaga

Sumber : KLHS Kabupaten Lamongan Tahun 2020

Berdasarkan data capaian SDG’s di atas ada dua indikator urusan perhubungan dalam capaian data SDG’s, indikator panjang jalur kereta api dan jumlah dermaga penyebrangan, kedua indikator ditargetkan meningkat namun pada setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan sehingga kedua indikator belum mencapai target nasional.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program dapat membantu masyarakat dalam menampung informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah serta cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing. Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada capaian tiga indikator seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel II.58 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	92	60	68	100	80
2	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah	34.686	37.500	41.065	53.921	69.870
3	Nilai SKM unit-unit layanan kominfo	81,47	81,69	82,09	80,77	80,91

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2020

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat berperan penting guna mensukseskan e-government. Pada indikator ini capaian pemerintah secara jumlah sarannya mengalami kondisi yang fluktuatif bahkan pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini penyebabnya juga dikarenakan pandemi covid-19 dan ada beberapa kelompok yang sudah tidak aktif lagi. Jumlah

pengunjung website pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 ada 34.686 orang yang mengunjungi website pemerintah daerah dan menjadi 69.870 orang pada tahun 2020. Peningkatan terjadi dikarenakan adanya kebijakan WFH dampak dari adanya pandemi covid-19. Dalam rangka memudahkan akses informasi kepada masyarakat, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan sarana untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui website pemerintah daerah. Selanjutntya untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit-Unit Layanan KOMINFO dapat diketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Diperlukan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan bisa semakin tinggi.

2.3.2.10.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator SDG’s pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel II.59 Capaian Kinerja SDG’s Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	23,25	29,28%	66,03%	n/a	n/a

Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data capain SDG’s urusan komunikasi dan informatika dengan indikator Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan diperdesaan, pada setiap tahunnya mengalami peningkatan namun peningkatan itu belum mencapai target yang ditentukan secara nasional. Sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah agar capaian indikator ini bisa mencapai target secara nasional pada masa periodesasi RPJMD.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Terdapat 6 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Lamongan pada aspek koperasi, usaha kecil, dan menengah yakni sebagai berikut:

Tabel II.60 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro	30.089	231.159	228.124	229.818	229.221
2	Jumlah Usaha Kecil	20.025	21.227	24.262	22.568	23.165

3	Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)	8,21	8,41	9,61	8,94	9,81
4	Jumlah Koperasi Aktif	844	927	1027	1046	1075
5	Jumlah Koperasi Sehat	32	167	282	407	457
6	Koprasi Berkualitas (%)	53,53	55,50	56,41	62,00	62,33

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah usaha mikro di Kabupaten Lamongan cenderung naik setiap tahunnya terbukti pada tahun 2016 sebanyak 30.089 unit usaha mikro sampai dengan 2019 meningkat drastis menjadi 229.818 unit usaha mikro yang berjalan di Kabupaten Lamongan, peningkatan ini tentu sangat bagus guna peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat namun pada tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan mengalami penurunan sebanyak 607 unit usaha mikro. Hal tersebut dikarenakan pandemi covid-19 memberi dampak pada pertumbuhan di sektor ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil yakni usaha yang satu tingkat lebih tinggi dari usaha mikro dengan capaian kinerjanya cenderung fluktuatif atau tidak stabil di setiap tahunnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan status jenis usaha masyarakat yang didaftarkan. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2018 kinerjanya konsisten mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 dan 2020 secara jumlah mengalami penurunan. Sedangkan secara persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil cenderung fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan capaiannya tergantung pada kondisi jumlah usaha mikro dan jumlah usaha kecil setiap tahunnya di Kabupaten Lamongan.

Adapun untuk jumlah koperasi aktif dan Sehat sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya dan merupakan capaian yang positif bagi pemerintah Kabupaten Lamongan. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 844 unit kemudian pada tahun 2020 mencapai 1075 unit. Kemudian pada indikator jumlah koperasi sehat juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya pada tahun 2016 sebanyak 32 koperasi sehat kemudian pada tahun 2020 sudah mencapai 457 koperasi sehat di Kabupaten Lamongan. Selain itu di Kabupaten Lamongan juga terdapat koperasi berkualitas dan secara persentase dari total koperasi yang ada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 53% kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 62,33%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan kesadaran serta peningkatan pemahaman pelaku koperasi dan anggotanya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Kondisi ini juga sebanding dengan peningkatan jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Lamongan. Koperasi berkualitas di hitung dari perbandingan antara koperasi yang beroperasi di Kabupaten Lamongan dengan koperasi yang memenuhi kriteria menjadi atau memperoleh predikat koperasi berkualitas di Kabupaten Lamongan.

2.3.2.11.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian indikator SDG’s pada urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.61 Capaian Indikator SDG’s Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	14,6%	15,74%	18,21%	18,32%	22,14%
2	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredi.	70,47%	82,17%	76,86%	66,33%	n/a
3	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah Industri	15.828	16.230	16.563	16.875	17.212
4	Proporsi Industri Kecil dengan pinjaman atau kredit	31 IKm	23 IKM	20 IKM	16 IKM	16 IKM

Sumber : KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data SDG’s urusan Koperasi dan Usaha Mikro (UM) terdapat 4 indikator dan capaiannya walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi jika dibandingkan dengan target nasional masih belum mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Lamongan agar pada tahun yang akan datang capaiannya bisa memenuhi target nasional sebagai komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Terdapat dua indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada aspek penanaman modal. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Lamongan:

Tabel II.62 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor (PMDN/PMA)	1.543	1.298	1.396	1.021	3.015
2	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp 6.530.291.- 019.486	Rp 2.245.254.- 297.401	Rp 2.276.743.- 378.043	Rp 1.832.296.- 923.156	Rp 2.573.470.- 168.398

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab Lamongan, 2020

Jumlah investor di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Secara jumlah memang terlihat ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Salah satu penyebab kenaikan jumlah investor pada tahun 2020 walaupun masa pandemi covid 19 karena adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha dalam rangka mendapatkan legalitas dari pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengakses program atau kegiatan dari pemerintah. Semakin banyak investor yang masuk maka akan semakin baik dalam membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lamongan.

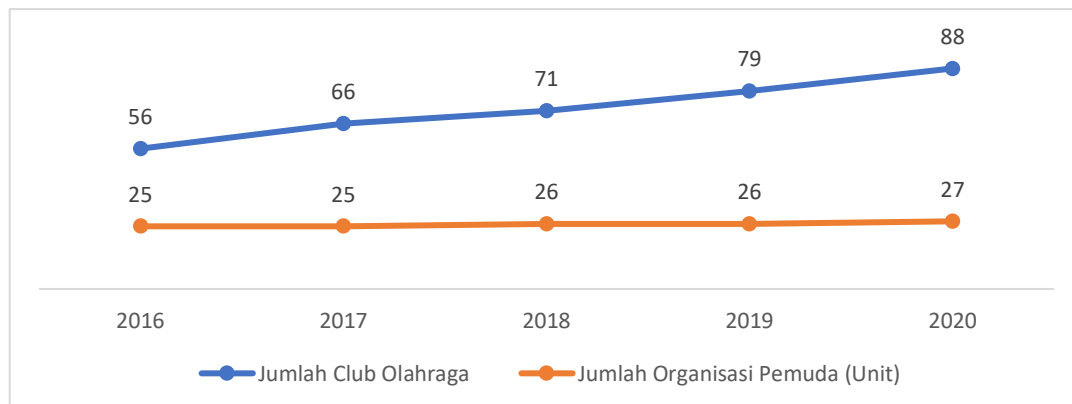
Sedangkan jika dilihat dari jumlah nilai investasi, pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Pertumbuhan jumlah nilai investasi berskala nasional dipengaruhi oleh banyaknya investor dengan jumlah banyaknya investor yang masuk di Kabupaten Lamongan. Jumlah nilai investasi mengalami fluktuatif mengikuti jumlah investor yang masuk di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data di atas capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016. Tingginya angka realisasi investasi pada tahun 2016 dikarenakan adanya pembangunan pabrik gula di Kabupaten Lamongan yang nilai investasinya sangat tinggi dan hanya terjadi pada tahun 2016 saja sehingga capaian nilai realisasi investasinya mengalami fluktuatif. Pemerintah dengan segala upayanya pada tahun 2020 walaupun terjadi pandemi Covid-19 tetap menjaga agar jumlah nilai investasi yang masuk di Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan. Sehingga jumlah nilai investasi pada tahun 2020 tumbuh menjadi Rp 2.573.470.168.398.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Lamongan pada aspek kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari capaian indikator berikut ini:

2.3.2.13.1 Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Organisasi Pemuda

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan yang diukur dari perkembangan jumlah klub olahraga dan jumlah organisasi pemuda sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



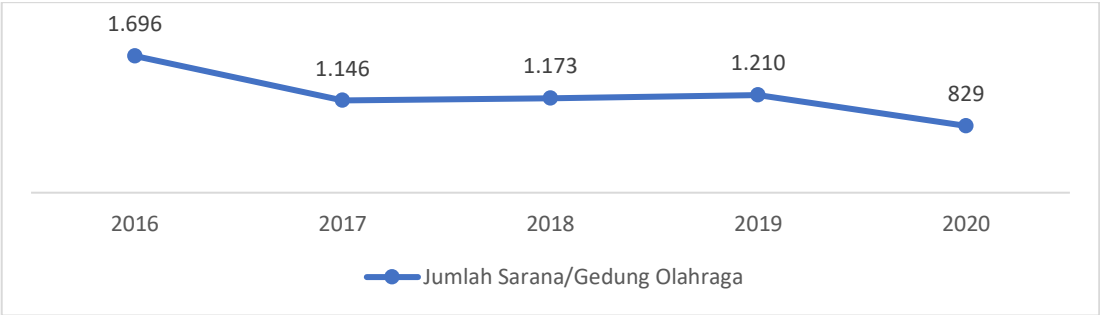
Gambar II.48 Indikator Jumlah Club Olahraga dan Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lamongan, 2020

Grafik di atas menunjukka bawah jumlah club olahraga dan organisasi pemuda di kabupaten Lamongan di Kabupaten Lamongan cenderung mengalami kenaikan. Untuk indikator jumlah club olahraga yang semula pada tahun 2016 sebanyak 56 club menjadi 88 club olahraga di kabupaten Lamongan pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi aktifitas club olahraga di Kabupaten Lamongan. Sedangkan jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Lamongan yang semula 25 lembaga pada tahun 2016 mengalami penambahan jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh pemerintah, sehingga pada tahun 2020 terdapat 27 organisasi pemuda di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pemerintah perlu menodorong partisipasi pemuda dalam pembangunan baik secara individu maupun dalam organisasi kepemudaan.

2.3.2.13.2 Jumlah Sarana/Gedung Olahraga

Jumlah sarana/ gedung olahraga merupakan indikator penunjang untuk para atlet yang sedang di latih atau yang sedang melaksanakan pemusatan latihan serta untuk memfasilitasi aktifitas olahraga bagi masyarakat dalam rangka mendukung prilaku hidup sehat bagi masyarakat. Jumlah sarana/gedung olahraga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

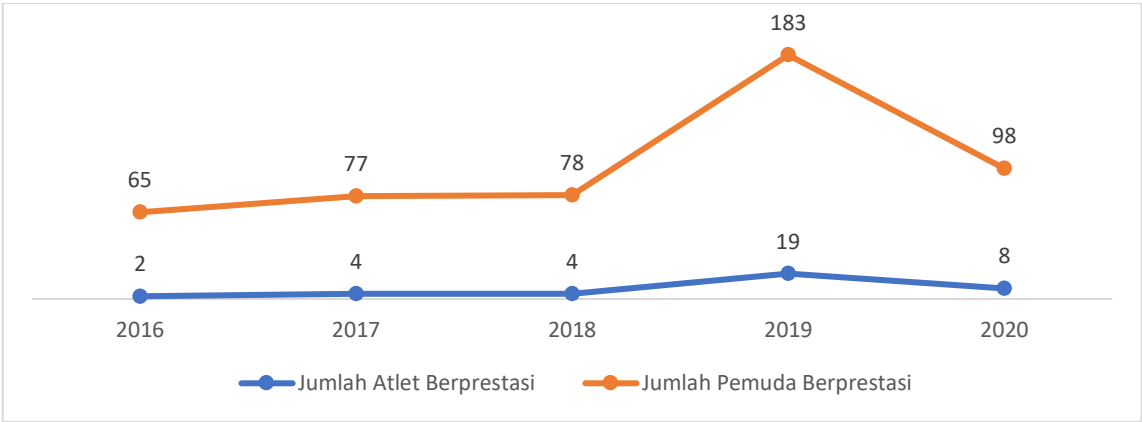


Gambar II.49 Jumlah Sarana/Gedung Olahraga tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lamongan, 2020

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan Jumlah Sarana/Gedung olahraga relatif fluktuatif. Pada tahun 2016 sebanyak 1.696 unit gedung atau sarana olahraga kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 hanya 829 gedung/ sarana olahraga yang aktif dikarenakan dampak dari covid-19 sehingga banyak sarana olahraga yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

2.3.2.13.3 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Pemuda Berprestasi

Indikator ini merupakan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam peningkatan prestasi atlet berbakat dan pemuda di Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar II.50 Indikator Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Pemuda Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lamongan, 2020

Pertumbuhan jumlah Atlet dan Pemuda Berprestasi sepanjang tahun 2016-2020 trendnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu tak luput dari dukungan pemerintah daerah yang mendukung segala kegiatan atlet dan pengembangan kapasitas kepemudaan. Jumlah atlet yang berprestasi mengalmiai peningkatan yang semula pada tahun 2016 hanya 2 atlet kemudian pada tahun 2019 menjadi 19 atlet yang berprestasi. Hal ini tentunya dikarenakan pada saat itu ada PORPROV VI sehingga adanya ajang untuk meraih prestasi, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan sepinya event olahraga yang dikarenakan dampak dari covid-19 sehingga jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 8 atlet. Sedangkan jumlah pemuda berprestasi juga cenderung fluktuatif walaupun trendnya meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya 98 pemuda yang berprestasi. Sehingga perlu memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas dan prestasi kepemudaan.

2.3.2.14 Statistik

Tujuan dari pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Hal ini mengacu pada undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 yang mensyaratkan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data mengenai statistik yang menjadi acuan dalam undang-undang tersebut. Data statistik yang dimaksud adalah data yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Data statistik sendiri merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, sehingga dapat dikategorikan data yang dapat menentukan arah kebijakan pembangunan. Selain itu, data statistik menjadi indikator dalam melakukan evaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa

kinerja dalam waktu yang telah berjalan yang memerlukan indikator kualitatif dan kuantitatif.

2.3.2.14.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Statistik

Capaian indikator SDG’s pada urusan Statistik di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.63 Capaian Indikator SDG’s Bidang Statistik Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	n/a	n/a	n/a	30,96 per 100 ribu penduduk	n/a
2	Rata-Rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadbang	23,25%	29,28%	66,03%	n/a	n/a
4	Proporsi Individu yang menguasai telepon genggam	57,13%	54,70%	88,73%	n/a	n/a

Sumber : KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas kinerja pemerintah daerah pada indikator SDG’s urusan Statistik secara keseluruhan belum mencapai target karena minimnya ketersediaan data sehingga tidak bisa dianalisis dengan target secara nasional. Perlu dorongan dan komitmen pemerintah agar pada tahun yang akan datang data pada keempat indikator tersebut bisa tersedia dengan baik.

2.3.2.15 Kebudayaan

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, berikut disajikan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah pemerintah Kabupaten Lamongan pada urusan kebudayaan sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020:

Tabel II.64 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Seni, Budaya Lokal Dan Benda/Situs Cagar Yang Dilestarikan	91	96	102	102	111
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventaris	16	20	41	43	43
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	60	61	61	63	63
4	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	36	36	36	36	36
5	Jumlah penyelenggaraan festival dan event seni dan budaya	6	6	6	6	7

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan, 2020

Indikator pertama merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan jumlah seni, budaya lokal dan benda/situs cagar yang dilestarikan setiap tahunnya. Pada indikator ini pemerintah daerah sangat memberikan perhatian dan komitmen untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang dapat menjadi ciri khas di Kabupaten Lamongan. Secara jumlah pemerintah telah melestarikan sebanyak 91 unit pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2020 jumlah seni, budaya lokal dan benda/situs cagar alam yang dilestarikan sebanyak 111. Terkait karya budaya yang di revitalisasi dan inventaris oleh pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2016 hanya bisa menginventarisir dan merevitalisasi 16 karya budaya sedangkan pada tahun 2020 bisa mencapai 43 karya. Capaian kinerja tersebut sebagai upaya pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjaga dan melestarikan karya-karya asilil Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya terkait jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016 sampai 2020 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2016 cagar budaya yang dirawat sebanyak 60 situs, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 63 situs. Kenaikan tersebut, dikarenakan pemerintah daerah yang terus berupaya dan berkomitmen untuk mengelola potensi cagar budaya yang bisa dirawat secara aman yang terletak di Kabupaten Lamongan. Setelah dikelola maka Situs dan Kawasan Cagar Budaya harus dilestarikan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah benda situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 36 Unit.

Selain benda situs dan cagar budaya pemerintah juga menyelenggarakan festival dan event seni dan kebudayaan dalam rangka menjaga kelestarian seni dan kebudayaan di Kabupaten Lamongan. Kinerja pemerintah pada indikator ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya bisa menyelenggarakan 6 kali festival atau event, namun pada tahun 2020 walaupun masa pandemi pemerintah bisa melaksanakan festival sebanyak 7 kali. Kendatipun demikian, secara jumlah sebenarnya masih banyak situs dan kawasan cagar budaya serta kesenian di Kabupaten Lamongan yang bisa dilestarikan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pembangunan kebudayaan.

2.3.2.17 Perpustakaan

Capaian dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah, yakni:

Tabel II.65 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	1.215	2.922	3.255	4.074	4.317
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	208.975	219.842	231.142	243.426	208.975

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan, 2020

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat merupakan indikator kualitas pelayanan perpustakaan daerah di Kabupaten Lamongan. Pada Indikator ini capaiannya konsisten naik setiap tahunnya, semula pada tahun 2016 hanya 1.215 pegawai yang memiliki sertifikat, kemudian pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 4.317 pegawai yang telah bersertifikat. Trend kenaikan ini dikarenakan adanya pelatihan dan sertifikasi untuk memperoleh sertifikat keahlian pada setiap tahunnya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dorongan pemerintah daerah juga perlu terus dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi para pegawai perpustakaan. Adapun jumlah pengunjung perpustakaan daerah kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan drastis. Hanya pada tahun 2020 karena adanya pandemi jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang jumlah pengunjungnya mencapai 243.426 orang, pada tahun 2020 hanya 208.975 orang yang berkunjung di perpustakaan kabupaten Lamongan. Dampak dari pandemi Covid-19 yang membatasi aktifitas sosial masyarakat maka mengharuskan pelayanan publik atau sarana publik membatasi jam pelayanan dan jumlah pengunjung, termasuk di Perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan kembali minat masyarakat maka pada saat ini pemerintah telah beradaptasi dan membuat layanan perpustakaan berbasis digital serta memperbanyak koleksi perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat secara online.

2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Pertanian dan Perkebunan

Data cakupan binaan kelompok petani di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya mencakup 160 binaan kelompok, jumlah tersebut tak bertambah hingga tahun 2020. Konsistensi jumlah Kelompok petani yang dibina dipengaruhi oleh adanya pelatihan, penguatan kelompok dan koordinasi serta pemberian bantuan yang tersebar di 27 kecamatan. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.66 Potensi Kelompok Petani Yang Di Bina Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kelompok yang dibina/tahun
2016	160 Kelompok
2017	160 Kelompok

Tahun	Jumlah Kelompok yang dibina/tahun
2018	160 Kelompok
2019	160 Kelompok
2020	160 Kelompok

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, 2020

Kabupaten Lamongan yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional tidak hanya karena potensi padi yang dihasilkan setiap tahunnya, tetapi didukung juga oleh komoditas unggulan yang lain. Hasil produksi komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.67 Produksi Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun		Padi (TON)	Jagung (TON)	Kedelai (TON)	Tebu (KU)	Tembakau Virginia (TON)	Tembakau Jawa (TON)
2016	Produksi	1.058.077	358.141	21.862	3.081.460	2.027	1.278
	Rata-rata (Ton/ha)	6,6	6,2	1,75	620	945	947
2017	Produksi	1.087.964	571.080	22.498	3.285.780	3.124	4.828
	Rata-rata (Ton/ha)	6,9	8,3	1,99	640	1483	1.470
2018	Produksi	1.094.124	564.265	22.349	3.568.700	1.989,6	6.803,9
	Rata-rata (Ton/ha)	7,1	9,15	1,87	660	1200	1.500
2019	Produksi	1.112.534	623.165	12.782	3.179.930	5.113,35	3.291,87
	Rata-rata (Ton/ha)	7,5	9,5	1,9	650	1300	1.350
2020	Produksi	1.172.965	568.604	8.875	1.977.100	5.257,6	4.491,84
	Rata-rata (Ton/ha)	7,6	9,75	1,87	580	1.350	1.360

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa produksi pada komoditi padi, tebu, tembakau virginia dan tembakau jawa menunjukkan grafik yang cenderung meningkat Sedangkan untuk komoditi kedelai dan jagung terlihat mengalami penurunan. Kondisi menurun pada produksi komoditas kedelai dikarenakan kenaikan harga jual yg kurang kompetitif dengan daerah penghasil kedelai di wilayah basis penghasil kedelai yang lain sehingga banyak petani yang beralih tanam ke komoditas lain. Sedangkan untuk komoditas jagung pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena faktor musim yang menyebabkan kemunduran waktu tanam jagung. Untuk komoditas tebu pada tahun 2020 mengalami penurunan produksi hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen dan ratoon tebu susah lebih dari dua kali. Komoditi dengan produksi tertinggi adalah padi, sehingga besar potensinya bagi pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menjadikan padi sebagai komoditi yang paling unggul untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan.

2.3.3.1.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Pertanian

Capaian indikator SDG’s pada urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.68 Capaian Indikator SDG’s Bidang Pertanian Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020

INDIKATOR	CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	N/a	Rp. 50.635,17	Rp. 58.381,75	Rp. 65.822,49	N/a
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai tambah pertanian Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) selama 3 tahun mengalami peningkatan yang konstan, tertinggi adalah pada tahun 2019 mencapai Rp.65,822,49. Sedangkan untuk data tahun 2020 pada kedua indikator di atas belum diketahui.

2.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan perolehan yang terus meningkat. Produksi perikanan di Kabupaten Lamongan terdiri dari produksi ikan tangkap dan produksi ikan budidaya. Ikan tangkap terdiri dari perairan laut dan PUD (perairan umum darat). Produksi ikan tangkap meningkat dengan konsisten dari tahun 2016 sebanyak 76.139,20 ton sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah tertinggi yaitu 79.819,32 ton. Pada tahun 2016, produksi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan adalah sebesar 127.441,80 ton, mengalami peningkatan pada tahun 2018 139.547,48 ton. Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.69 Produksi Perikanan tahun 2016-2020

Tahun	Produksi Ikan Tangkap	Produksi Ikan Budidaya
2016	76.139,20 ton	51.302,60 ton
2017	76.589, 56 ton	52.371,73 ton
2018	77.829,70 ton	54.146,98 ton
2019	79.315,10 ton	56.910,46 ton

Tahun	Produksi Ikan Tangkap	Produksi Ikan Budidaya
2020	79.819,32 ton	59.728.16 ton

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Kenaikan produksi perikanan setiap tahunnya dikarenakan adanya komitmen dan perhatian pemerintah terhadap para nelayan melalui pemberian bantuan seperti sarana prasana untuk nelayan dan kelompok budidaya ikan, restocking benih ikan serta pembinaan yang terus dilakukan.

Selanjutnya, jumlah produksi yang meningkat juga sebanding dengan nilai produksi perikanan /pengolahan ikan di Kabupaten Lamongan yang juga mengalami peningkatan dalam rentang lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 Nilai produksi perikanan pengolahan ikan tercatat sebesar 86.539,84 ton dan pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 89.179,36 ton. Peningkatan ini terjadi karena adanya program peningkatan nilai tambah olahan seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta promosi dan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk mengajak masyarakat mensukseskan pprogram GEMARIKAN, dengan harapan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk olahan perikanan. Perkembangan nilai tambah produksi disektor perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.70 Nilai Tambah Produksi Perikanan/Pengolahan Ikan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ikan yang di olah	86.539,84 ton	87.688,50 Ton	88.312,34 ton	88.969,19 ton	89.179,36 ton

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Dalam rangka menjaga potensi dan kualitas hasil produksi perikanan, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni memberikan perhatian dan pembinaan kepada kelompok perikanan yang disebut dengan program bina kelompok nelayan. Sasaran atau kelompok yang dibina oleh pemerintah di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya memang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebanyak 14 KUB dan 35 Pokdakan yang mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah, menurun menjadi 6 KUB dan 7 Pokdakan pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan setelah diberlakukannya undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengelolaan wilayah laut di masing-masing wilayahnya. Perkembangan jumlah sasaran cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.71 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap	14 KUB	41 KUB	23 KUB	9 KUB	6 KUB
Perikanan Budidaya	35 POKDAKAN	32 POKDAKAN	44 POKDAKAN	8 POKDAKAN	7 POKDAKAN

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Sebagai daerah yang memiliki kawasan pantai, maka di Kabupaten Lamongan selain memiliki potensi dan produk perikanan, juga memiliki produk garam. Perkembangan hasil produksi garam di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.72 Jumlah produksi garam tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	6.321 ton
2017	28.237 ton
2018	29.939 ton
2019	38.372 ton
2020	7.947,60 ton

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah produksi garam hanya 6.321 ton, hal ini dikarenakan pada saat itu belum ada teknologi rumah prisma bertingkat. Dengan adanya teknologi rumah prisma bertingkat dan pemberian sarana prasarana berupa geo isolator, bangker air tua dan adanya inovasi produksi garam dengan sistem rumah prisma bertingkat, maka petani garam di Kabupaten Lamongan tetap bisa memproduksi garam saat musim penghujan dan bisa memperpendek proses produksi garam. Sehingga produksi garam pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 produksi garam mengalami penurunan, salah satu penyebabnya karena faktor harga dan pabrik garam di Lamongan yang belum bisa membuat produksi garam konsumsi.

2.3.3.3 Perindustrian

Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam urusan perindustrian dapat dilihat dari capaian jumlah industri rumah tangga kecil dan menengah. Secara jumlah industri rumah tangga kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan meningkat secara konsisten. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya pembinaan dan pelatihan serta beralihnya buruh pabrik yang terkena PHK akibat pandemi menjadi wirausaha baru. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.73 Jumlah Industri Rumah Tangga Kecil Dan Menengah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Industri
2016	15.888
2017	16.210
2018	16.543
2019	16.875
2020	17.212

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Lamongan, 2020

2.3.3.3.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Perindustrian

Capaian indikator SDG's pada urusan perindustrian di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.74 Capaian Indikator SDG's Bidang Perindustrian Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	N/a	12,68%	22,13%	21,00%	N/a

Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa porporisi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 21%. Penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah lapangan industri yang pada tahun 2019 juga mengalami penurunan. Sehingga perlu peningkatan capaian pada tahun-tahun selanjutnya agar bisa mencapai target secara nasional.

2.3.3.4 Perdagangan

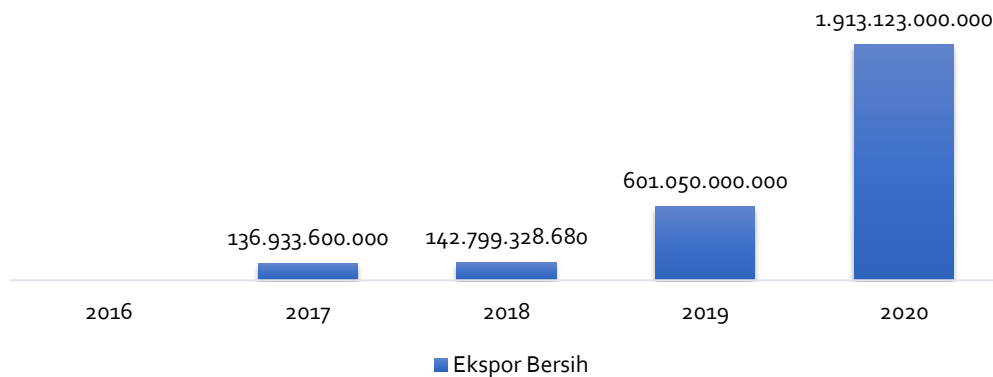
Kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam urusan perdagangan dapat dilihat dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menindak pelanggaran perdagangan yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan biasanya lebih pada kualitas produk yang diperjual belikan, misalnya kemasan tidak memenuhi standar, sudah expired dan timbangan tidak standar. Adapun jumlah pelanggaran perdagangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.75 Jumlah Pelanggaran Perdagangan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perdagangan
2016	N/A
2017	153
2018	291
2019	245
2020	13

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2020

Selanjutnya yakni kinerja perdagangan juga dapat dilihat dari jumlah ekspor bersih perdagangan Kabupaten Lamongan pertahun dalam satuan rupiah selama periode 2016-2020 yang digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II.51 Ekspor Bersih Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan ekspor bersih baru bisa terlihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 1.913.123.000.000. angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang 4 tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 hingga 2020 pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha (UMKM dan IKM) di Kabupaten Lamongan mengembangkan hasil produksinya agar bisa memiliki kualitas ekspor. Selain itu pemerintah juga hadir dengan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para eksportir dalam melakukan ekspor ke berbagai negara.

Sedangkan jumlah masyarakat Kabupaten Lamongan yang berprofesi sebagai pedagang pada tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.76 Jumlah Pedagang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pedagang
2016	39.935
2017	41.539
2018	43.612
2019	43.829
2020	42.180

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah pedagang di Kabupaten Lamongan sejak 5 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Namun pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena adanya dampak pandemi covid-19. Sehingga banyak masyarakat yang awalnya menjadi pedagang beralih pada profesi yang lain. Perhitungan jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dilihat dari jumlah pedagang di dalam pasar dan di luar pasar namun tidak termasuk pedagang kaki lima (PK5). Khusus untuk jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Namun dari keseluruhan jumlah PK5 di Kabupaten Lamongan masih ada yang belum mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Sehingga dalam rangka menjaga keberlangsung PK5 dan meningkatkan kesejahteraan pedagang maka perlu perhatian dari

pemerintah dan perlu dilalukan pembinaan secara merata khususnya bagi yang belum mendapatkan pembinaan. Secara jumlah, PK5 yang belum dibina lebih banyak dibandingkan yang sudah dibina. Perbandingan dan perkembangan secara jumlah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.77 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PKL	Jumlah PKL yang dibina	Jumlah PKL yang belum dibina
2016	674	521	153
2017	2132	582	1550
2018	2753	790	1963
2019	2642	1372	1270
2020	2742	1472	1270

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2020

2.3.3.5 Pariwisata

Kinerja pembangunan pada bidang pariwisata dapat dilihat melalui perkembangan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara serta banyaknya potensi pariwisata yang dikembangkan. Jumlah wisatawan domestik di Kabupaten Lamongan tahun 2016 tercatat sebanyak 2.363.649 orang dan trendnya mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah wisatawan domestik yang datang hanya 1.028.844 orang atau mengalami penurunan dari sebelumnya. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara kecenderungannya mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 45 orang.

Tren peningkatan kunjungan wisata domestik maupun mancanegra di tahun 2016-2019 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) Secara administratif ada penambahan obyek wisata di beberapa desa yang dikelola pihak desa maupun swasta, (2) Masyarakat yang antusias untuk melakukan kegiatan rekreasi, (3) Adanya paket wisata dari biro perjalanan wisata yang ikut mendukung dalam penambahan kunjungan wisatawan; (4) mulai berkembangnya investasi dan industri, sehingga banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.78 Jumlah Wisatawan Tahun 2016-2020

Tahun	Wisatawan domestik	Wisatawan mancanegara
2016	2.363.649	183
2017	2.365.761	282
2018	2.627.866	226
2019	2.769.297	261
2020	1.028.844	45

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Lamongan, 2020

Kabupaten Lamongan memiliki 14 Daya Tarik Wisata pada Tahun 2020, secara spasial/keruangan keempat belas Daya Tarik Wisata tersebut tersebar di 3 Destinasi Pariwisata kabupaten (DPK). Adapun Destinasi Pariwisata kabupaten (DPK) dapat dirinci sebagai berikut:

1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya

DPK Wilayah Utara dan sekitarnya berada di sebelah utara Kabupaten Lamongan yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Laren, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro, dan Kecamatan Paciran. Di Kecamatan Paciran terdapat 7 Daya Tarik Wisata, yaitu (a) Maharani Zoo & Goa, (b) Makam Sendang Duwur, (c) Makam Sunan Drajad, (d) Museum Sunan Drajad, (e) Wisata Bahari Lamongan, (f) Brumbun,(g) Makam Syekh Maulana Ishaq. Daya Tarik Wisata yang terdapat di Kecamatan Brondong, yaitu TPI & Monumen Van Der Wijk, Pantai Kutang dan Wisata Akar Langit Trinil.

2. DPK Wilayah tengah dan sekitarnya

DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya berada di tengah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 14 kecamatan yaitu kecematan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan Kota, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Tikung, Kecamatan Turi, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Babat, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sekaran, dan Kecamatan Maduran. Daya Tarik Wisata di DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya berada di Kecamatan Sekaran, yaitu Agro wisata Besur.
3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya

DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya berada di sebelah selatan DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya yang terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Bluluk, Kecamatan Mantup, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Modo, dan Kecamatan Sugio. Daya Tarik Wisata di DPK Wilayah Selatan terletak di Kecamatan Sugio dan Kecamatan Ngimbang, di Kecamata sugio terdapat Daya Tarik Wisata Waduk Gondang dan Daya Tarik Wisata WEGO, sedangkan di Kecamatan Ngimbang terdapat Daya Tarik Wisata Makam Nyi Andong Sari.

2.3.3.5.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Pariwisata

Capaian indikator SDG’s pada urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.79 Capaian Indikator SDG’s Bidang Pariwisata tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Jumlah wisatawan mancanegara.	183 jiwa	282 jiwa	226 jiwa	261 jiwa	45 jiwa
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2.363.649 jiwa	2.365.761 jiwa	2.627.866 jiwa	2.769.297 jiwa	1.028.844 jiwa

Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp. 872.948.000	Rp. 887.160.000	Rp. 903.719.000	Rp. 929.366.000	Rp. 488.170.500
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	N.a	N/a	N/a	N/a	N/a

Sumber: *KLHS Lamongan Tahun, 2020*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa capaian sektor pariwisata pada tahun 2020 mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari indikator jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik serta jumlah devisa sektor pariwisata yang menurun. Penurunan ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan sektor pariwisata. Sehingga jika dibandingkan dengan target nasional pada Perpres No. 59 Tahun 2017 beberapa indikator belum mencapai target.

2.3.3.6 Transmigrasi

Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) dengan daerah tujuan 5 KK ke UPT Anawua Ds. Rangosania Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, 5 KK ke UPT Simpang Tiga SP 5 Kecamatan Tulung Selatan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan 5 KK ke UPT Bukit Merbau Ds. Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu. Kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 5 KK. Penurunan masih berlanjut di tahun 2018 menjadi 4 KK, namun meningkat di tahun 2019 menjadi 12 KK. Tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 tidak ada pemberangkatan transmigrasi. Tren fluktuatif ini dipengaruhi oleh kuota transmigrasi yang ditentukan dari pemerintah pusat. Dasar penentuan kuota tersebut disesuaikan dengan luas lokasi yang dituju dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perkembangan transmigran Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.80 Jumlah Transmigrasi yang di Berangkatkan Tahun 2016-2020

Jumlah	2016	2017	2018	2019	2020
Transmigrasi yang Diberangkatkan	15 KK	5 KK	4 KK	12 KK	-

Sumber: *Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan, 2020*

2.3.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Indikator kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam aspek

administrasi pemerintahan diantaranya dilihat dari capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel II.81 Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai LPPD
2016	ST
2017	ST
2018	ST
2019	ST
2020	ST

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa LPPD Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir memiliki capaian yang sangat baik. Berdasarkan Kategori penilaian evaluasi LPPD Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2016-2020 menunjukkan capaian yang dengan kategori sangat tinggi. Capaian di atas tentu harapannya dapat dipertahankan oleh Kabupaten Lamongan pada tahun-tahun yang akan datang.

Indikator selanjutnya yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan data dan informasi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian IKM di Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir secara umum telah mencapai peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020 dengan nilai 81,78 jika dibandingkan dengan pada tahun 2019. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengalami peningkatan dan harapannya pemerintah selalu adaptif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.82 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai IKM
2016	79,26
2017	79,76
2018	80,26
2019	80,79
2020	81,78

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lamongan, 2020

Selanjutnya terkait dengan Capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 masih setara dengan nilai B, padahal level tertinggi adalah A. Jika dilihat dari komponen pembentuk indeks di atas, maka kinerja dari komponen hasil telah optimal mencapai 34,67 atau setara 87% dari nilai bobot maksimal 40,00. Namun yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus pemerintah kedepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni peningkatan nilai dari masing-masing komponen pengungkit. Hal ini menjadi sangat penting karena indikator komponennya

merepresentasikan bagaimana kualitas pelaksanaan 8 area perubahan dan reform yang telah dilaksanakan di seluruh perangkat daerah. Secara capaian indikatornya yang paling lemah yakni indikator reform yang hanya 11,44 atau setara dengan 38% dari bobot maksimal 30. Sedangkan pada indikator yang lainnya telah melebihi angka 60%. Capaian masing-masing indikator untuk komponen pengungkit baru 53% dari total bobot yang ditentukan. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pimpinan perangkat daerah agar prinsip dan sasaran reformasi birokrasi bisa diterapkan dengan baik dimasing-masing perangkat daerah dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan. Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.83 Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No	Indikator	Bobot	Realisasi 2020
A	Komponen Penungkit		
1	Pemenuhan	20,00	14,17
2	Hasil antara area perubahan	10,00	6,020
3	Reform	30,00	11,44
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,63
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,61
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,42
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,140
	Total Komponen Hasil	40,00	34,67
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	66,30

Sumber: Kemenpan RB, 2020

2.3.4.1.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Administrasi Pemerintahan

Capaian indikator SDG’s pada urusan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.84 Capaian Indikator SDG’s Administrasi Pemerintahan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	Ada	ada	ada	Ada

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	Ada	ada	ada	Ada
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	N/a	N/a	63,22%	65,02%	N/a
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Indikator administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) di Kabupaten Lamongan secara umum telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lamongan dan serra telah mencapai target nasional.

2.3.4.2 Keuangan

Manajemen pengelolaan keuangan dan aset merupakan salah satu aspek penting dalam kelancaran pembangunan pada tiap daerah. Oleh karena itu akuntabilitas penggunaan anggaran dan aset dalam rangka mewujudkan pembangunan harus dikelola dengan baik. Berdasarkan kewenangan perundang-undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Lamongan dengan memberikan Opini atas laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.85 Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Opini BPK
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan akuntabilitas penggunaan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016

hingga tahun 2020 mendapat nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan penilaian atau opini WTP dari BPK yakni: (1) Melakukan Rekonsiliasi setiap Bulan pada seluruh Perangkat Daerah dan BLUD; (2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; (3) Berkoordinasi dengan Bidang Aset guna menyesuaikan permasalahan Aset Tetap; (4) Melakukan kerjasama sengan kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BLUD; (4) Memanfaatkan aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan (5) Melakukan sinergi dengan seluruh Perangkat Daerah terutama Inspektorat untuk menyelesaikan temuan audit dari tahun sebelumnya.

2.3.4.2.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Keuangan Daerah

Capaian indikator SDG’s pada bidang keuangan daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.86 Capaian Indikator SDG’s Bidang Keuangan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	N/a	N/a	Kes : 17,24	Kes : 10,3	N/a
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	8,07%	8,08%	7,78%	7,70%	N/a
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,36%	0,41%	0,35%	0,36%	N/a
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	4,11%	5,20%	4,59%	5,04%	N/a
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Rp. 1.564.767.930	Rp. 971.339.900	Rp. 1.445.496.000	Rp. 1.482.148.900	Rp. 177.437.600

Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Indikator urusan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Lamongan secara umum telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya sehingga perlu dipertahankan dan pemerintah perlu memberikan perhatian terkait ketersediaan data agar pada tahun-tahun selanjutnya kinerjanya bisa diukur dengan target nasional.

2.3.4.3 Pengawasan

Pengawasan berkaitan dengan menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan serta menjaga stabilitas pemerintah yang disiplin dan taat terhadap undang-undang. Wujud dari urusan pengawasan dimanifestasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Dalam penilaian predikat SAKIP terdapat beberapa kriteria yang harus dipastikan terlaksana di pemerintah daerah dengan baik. Kriteria yang dimaksud adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Adapun capaian SAKIP di Kabupaten Lamongan adalah:

Tabel II.87 Nilai SAKIP Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai SAKIP
2016	B
2017	BB
2018	A
2019	A
2020	A

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2020

Selain SAKIP, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan APIP sebagai salah satu indikator penilaian. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan lembaga, pemerintah daerah sebagai stakeholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Mengingat, terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan. Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 telah memperoleh level 3 dalam pencapaian APIP. Level tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dimana pada 4 tahun tersebut Kabupaten Lamongan berada pada level 2. Capaian APIP Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.88 Level APIP Tahun 2016-2020

Tahun	LEVEL APIP
2016	Level 2
2017	Level 2
2018	Level 2
2019	Level 2

2020

Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lamongan, 2020

2.3.4.3.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Bidang Pengawasan

Capaian indikator SDG’s pada bidang pengawasan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.89 Capaian Indikator SDG’s Pengawasan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	60,86 (B)	70,96 (BB)	80,04 (A)	80,12 (A)	80,05 (A)

Sumber: KLHS Kabupaten Lamongan, 2020

Indikator urusan pengawasan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) di Kabupaten Lamongan secara umum telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun untuk indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator yang perlu dipenuhi ketersediaan datanya oleh pemerintah.

2.3.4.4 Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya PNS yang pensiun setiap tahunnya (rata-rata 500 orang) tetapi tidak diimbangi dengan penerimaan calon PNS. Adanya Kebijakan moratorium PNS oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari moratorium ini untuk mereview bezetting dan penataan PNS, rightsizing kelembagaan dan tatalaksana, serta mengatur anggaran (budgeting) pemerintah. Namun mulai akhir Tahun 2018 telah dilaksanakan kembali penerimaan CPNS sehingga diharapkan kebutuhan formasi CPNS dapat dipenuhi sesuai Analisi jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel II.90 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin		Jumlah	Satuan
	Laki-Laki	Perempuan		
2016	5.718	4.543	10.261	Orang
2017	5.372	4.451	9.823	Orang
2018	4.902	4.210	9.112	Orang
2019	4.725	4.434	9.159	Orang

Tahun	Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin		Jumlah	Satuan
	Laki-Laki	Perempuan		
2020	4.347	4.234	8.581	Orang

Sumber: SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah PNS dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan jenis kelamin laki-laki rata-rata sebesar 53,29% dari jumlah rata-rata PNS. Sedangkan PNS perempuan rata-rata sebesar 46,71%. Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.91 Jumlah PNS berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020

TAHUN	JENJANG ESELON														
	II					III					IV				
	JML ES. II	L	%	P	%	JML ES. III	L	%	P	%	JML ES. IV	L	%	P	%
2017	41	3	92,68%	38	92,68%	225	185	82,22%	40	17,78%	806	546	67,74%	260	32,26%
2018	37	3	91,89%	34	91,89%	234	179	76,50%	55	23,50%	738	513	69,51%	225	30,49%
2019	42	4	90,48%	38	90,48%	234	179	76,50%	55	23,50%	748	477	63,77%	271	36,23%
2020	36	5	86,11%	31	86,11%	219	165	75,34%	54	24,66%	705	443	62,84%	262	37,16%
			90,29%		9,71%			77,64%		22,36%			65,97%		34,03%

Sumber: SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2020

Dari rata-rata Persentase PNS jabatan Struktural/ Eselon, laki-laki lebih besar daripada PNS perempuan, dengan perbandingan yaitu Eselon II (L=90,3% dan P=9,7%) Eselon III (L=77,6% dan P=22,4%), dan Eselon IV (L=65,97% dan P=34,03%). Selanjutnya untuk profil PNS berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.92 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2020

TAHUN	PNS MENURUT GOLONGAN				JUMLAH	SATUAN
	I	II	III	IV		
2016	151	2.041	4.389	3.680	10.261	Orang
2017	122	1.746	4.452	3.503	9.823	Orang
2018	92	1.400	4.324	3.296	9.112	Orang
2019	85	1.369	4.719	2.986	9.159	Orang
2020	70	1.163	4.550	2.798	8.581	Orang

Sumber: SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah PNS golongan III dan IV lebih besar dibandingkan dengan PNS golongan I dan II, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu penerimaan CPNS lebih banyak didominasi oleh Sarjana atau formasi golongan III. Besarnya keinginan PNS untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga berpengaruh pada kenaikan pangkat dan golongan

yang dimiliki. Sedangkan PNS berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.93 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2016-2020

JUMLAH PNS MENURUT JABATAN											
TAHUN	ESELON							PELAKSANA	FUNGSIONAL	JUMLAH	SATUAN
	II		III		IV		JUMLAH ESELON				
	a	b	a	B	a	b					
2016	1	31	69	110	580	105	896	2.377	6.988	10.261	Orang
2017	1	40	89	150	735	111	1126	2.026	6.671	9.823	Orang
2018	1	36	82	152	623	115	1009	1.912	6.191	9.112	Orang
2019	1	41	82	152	621	126	1023	1.727	6.409	9.159	Orang
2020	0	35	79	139	590	115	958	1.566	6.057	8.581	Orang
Persentase rata-rata jumlah jabatan							10,72%	20,38%	68,90%		

Sumber: SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah PNS berdasarkan jabatan struktural rata-rata sebesar 10,72%, jabatan pelaksana rata-rata sebesar 20,38% dan jabatan fungsional rata-rata sebesar 68,90% dari rata-rata jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Adapun jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.94 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016-2020

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN											
TAHUN	SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	S.1/ D-IV	S.2	S.3	JUMLAH	SATUAN
2016	80	137	1.436	54	249	875	6.146	1.282	2	10.261	Orang
2017	69	122	1.332	52	223	898	5.886	1.239	2	9.823	Orang
2018	48	90	1.271	20	205	826	5.523	1.127	2	9.112	Orang
2019	40	80	1.146	20	176	906	5.705	1.084	2	9.159	Orang
2020	33	67	1.043	19	158	869	5.266	1.125	1	8.581	Orang
	0,57%	1,04%	13,23%	0,34%	2,14%	9,35	60,82%	12,48%	0,02%		

Sumber: SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2020

Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan SD rata-rata sebesar 0,57%, SLTP rata-rata sebesar 1,04%, SMU rata-rata sebesar 13,23%, D.I rata-rata sebesar 0,34%, D.II rata-rata sebesar 2,14%, D.III rata-rata sebesar 9,35%, S.1/D.IV rata-rata sebesar 60,82%, S.2 rata-rata sebesar 12,48% dan S.3 rata-rata sebesar 0,02% dari rata-rata jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan selain diukur dari tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan juga diukur melalui profesionalitas aparaturnya atau yang bisa disebut dengan Indeks Profesionalitas ASN. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.95 Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020

Tahun	Nilai Indeks
2017	87,29
2018	87,39
2019	87,76
2020	60,68

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Kepegawaian Nasional, 2020

Dari hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2017 sampai dengan 2019 menggunakan variabel dan sampling data yang berbeda dengan tahun 2020. Tahun 2017 sampai dengan 2019 pengukuran indeks profesionalitas ASN berdasarkan Buku Panduan Menghitung Dan Mengukur Indeks Profesionalitas ASN yang diterbitkan oleh BKN tahun 2017. Sedangkan variabel Kompetensi Gap merupakan variabel komposit yang dapat diurai menjadi 4 sub variabel yaitu (a) kesesuaian pendidikan dengan jabatan yang dimiliki; (b) kesesuaian data pelatihan dengan jabatan yang diduduki; (c) kesesuaian pengalaman jabatan yang pernah diduduki oleh pejabat yang bersangkutan dan (d) kesesuaian diklat kepemimpinan yang dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan yang sedang diduduki. Untuk sampling pengukuran indeks ini menggunakan sampling data PNS pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya karena ada perbedaan metode dan sistem pengukuran indeks profesionalitas ASN. Pada tahun 2020 pengukurannya didasarkan pada Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Untuk range nilai pengkategorian tingkat profesionalitas sendiri terbagi dalam kategori: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60). Sehingga berdasarkan capaian pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa indeks Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Lamongan masih berkategori rendah, sehingga perlu upaya dan kerjasama semua aparatur dalam rangka meningkatkan status Indeks Profesionalitas ASN pada lima tahun yang akan datang.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator yang dapat berguna untuk melihat kondisi tingkat kesejahteraan para petani. Nilai tukar petani dihitung berdasarkan pada rasio harga yang diterima oleh para petani, terhadap harga yang harus dibayar para petani. Secara sederhana, konsep ini dapat dikatakan sebagai sebuah gambaran mengenai daya beli pendapatan petani di suatu daerah. Berikut pergerakan indikator nilai tukar petani di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016-2020:

Tabel II.96 Nilai Tukar Petani Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ib (Indeks Bayar)	n/a	131,15	136,05	141,17	135,62
It (Indeks Terima)	n/a	137,26	142,46	146,81	142,19
Nilai Tukar Petani	n/a	104,66	104,71	104,00	104,84

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan Kabupaten Lamongan, 2020

Nilai tukar petani Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 trendnya walaupun mengalami kenaikan tetapi cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani harus terus mengalami perbaikan. Pencapaian NTP ini harus terus dijaga dan tentunya perlu didukung dengan berbagai kebijakan dan program yang relevan agar stabilitas dapat terjaga dan peningkatan dapat ditingkatkan. Perkembangan NTP ini sangat dipengaruhi oleh indeks yang diterima petani (it) maupun indeks yang dibayar petani (ib). Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh beberapa sektor yang mencakup:

- a) Nilai Tukar Petani (NTP) sektor tanaman pangan
- b) Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan
- c) Nilai Tukar Petani (NTP) sektor holtikultura
- d) Nilai Tukar Petani (NTP) sektor peternakan
- e) Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perikanan

Berikut data nilai tukar petani di Kabupaten Lamongan dari beberapa sektor terkait selama tahun 2017 hingga tahun 2020:

Tabel II.97 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Sektoral Tahun 2017-2020

Bidang	Capaian Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tanaman Pangan	101,21	99,97	96,57	100,04
Holtikultura	106,6	105,45	103,13	100,20
Perkebunan	106,25	110,97	111,98	100,42
Peternakan	104,05	108,84	109,56	104,43
Perikanan	116,64	116,81	126,28	119,14
NTP Kabupaten	104,66	104,71	104	104,84

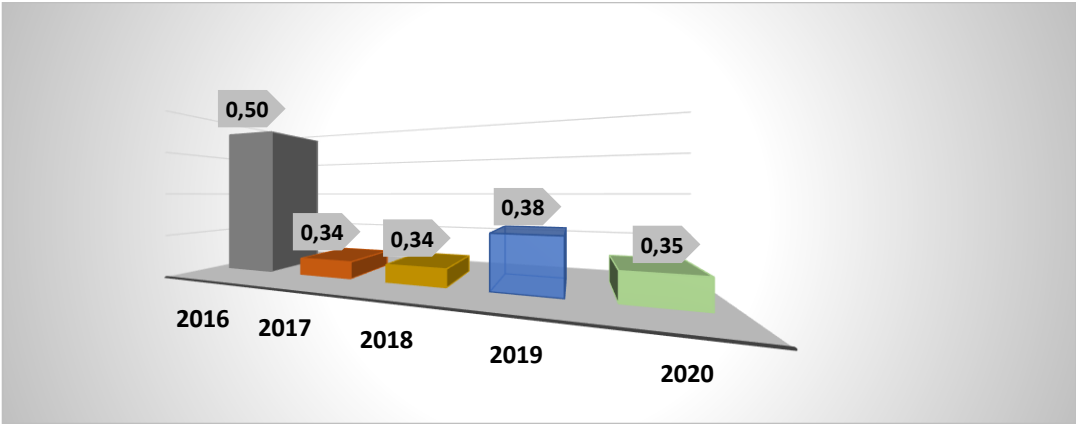
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontributor dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lamongan terdiri dari sektor perikanan, peternakan, hortikultura dan perkebunan dengan nilai NTP diatas rata-rata NTP Kabupaten. Untuk Sektor tanaman pangan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 nilai NTP rata-rata dibawah NTP kabupaten. Hal ini sangat dipengaruhi oleh stagnasi harga komoditas pangan terutama beras dan jagung yang dikendalikan oleh pemerintah dan cenderung politis/sensitif terhadap isu, disisi lain indeks yang dibayar mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya indeks harga kelompok konsumsi rumah tangga serta indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Perhubungan

Rasio kinerja jaringan jalan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan kondisi kinerja jalan yang ada di Kabupaten Lamongan dalam setiap tahunnya. Berikut perkembangan rasio kinerja jaringan jalan yang ada di Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga tahun 2020:

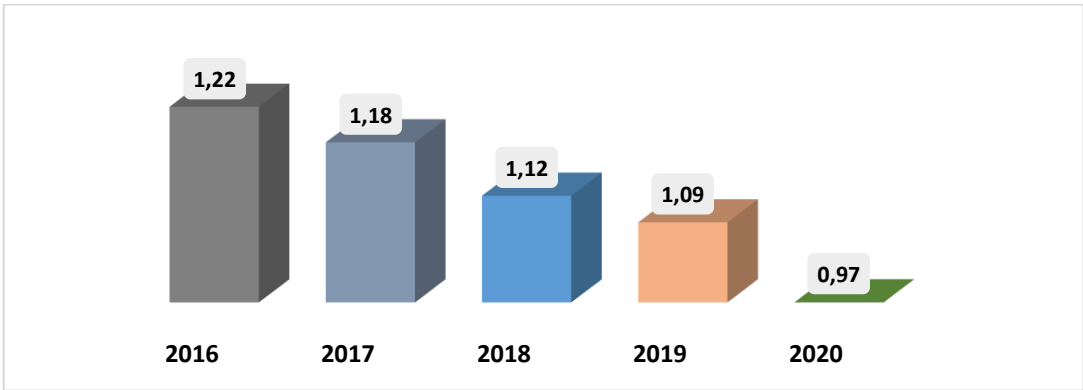


Gambar II.52 Rasio Kinerja Jaringan Jalan Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2020

Grafik di atas menunjukkan jika rasio kinerja jaringan jalan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, sehingga kinerjanya adalah positif. Hal tersebut dikarenakan secara definisi operasional, jika rasio kinerja jaringan jalan semakin menurun, maka kinerjanya dianggap semakin baik (negasi). Diketahui pada tahun 2016 rasio kinerja jaringan jalan Kabupaten Lamongan mencapai angka 0,50 yang kemudian turun menjadi 0,35 pada tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi menurunnya angka rasio kinerja jaringan jalan di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, sehingga ada pembatasan aktifitas masyarakat dan kendaraan bermotor melalui kebijakan pemerintah yang menerapkan peraturan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sealanjutnya terkait dengan kapasitas jalan di Kabupaten Lamongan dapat diukur melalui capaian indikator rasio panjang jalan perjumlah kendaraan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut menunjukkan mengenai

kemampuan/kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.53 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jika kapasitas jalan Kabupaten Lamongan semakin menurun seiring dengan jumlah kendaraan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi hal ini belum diimbangi dengan adanya penambahan ruas/panjang jalan. Diketahui jika pada tahun 2016 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 1.22, kemudian tahun 2020 menjadi 0.97. Hal ini menandakan jika dari tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Lamongan semakin kecil setiap tahunnya. Pembangunan panjang jalan yang dilakukan di Kabupaten Lamongan belum bisa seimbang dengan jumlah kendaraan, seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang melewati akses jalan di Kabupaten Lamongan.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Lama Proses Perijinan Usaha

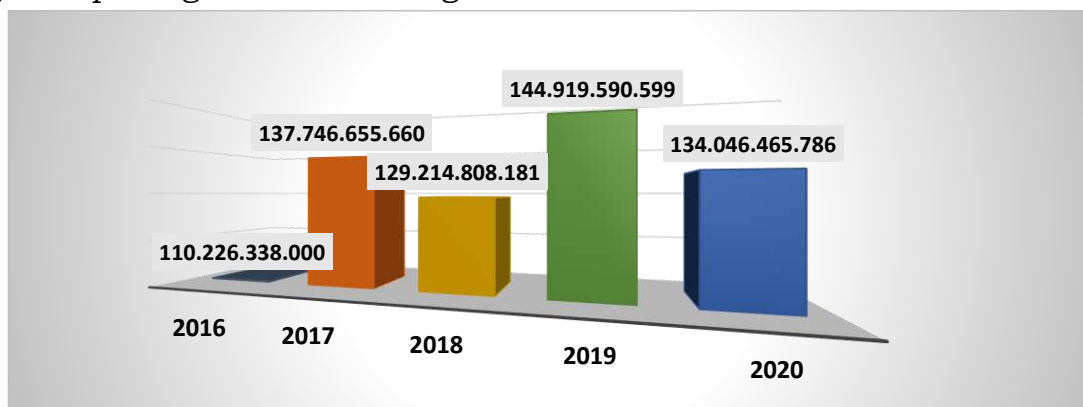
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), merupakan jenis surat ijin yang secara khusus diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku bisnis untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan, tanpa melihat besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh seseorang tersebut. Sedangkan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, adalah dokumen peresmian untuk melakukan registrasi perusahaan, TDP tidak diperuntukkan bagi usaha perorangan yang berskala kecil. Terkait dengan lama proses perijinan usaha/SIUP TDP, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada saat ini telah berupaya untuk memberikan jangka waktu yang pasti dalam pengurusan perizinan. Namun lama atau cepatnya proses perijinan usaha disesuaikan dengan masing-masing standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan jenis ijin usaha yang diminta dan diurus oleh masyarakat. Sehingga lama proses perijinan jenis usaha satu dengan jenis usaha lainnya akan berbeda sesuai dengan standar masing-masing.

2.4.3.2 Jumlah Dan Jenis Pajak serta Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor penting dalam masuknya investor di suatu daerah. Kabupaten Lamongan memiliki 11 (sebelas) macam pajak daerah dan 12 (dua belas) macam retribusi daerah di tahun 2020. Hal ini mengartikan jika Kabupaten Lamongan memberikan aturan pajak dan juga tarif retribusi daerah pada masing-masing usaha yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun jenis macam pajak daerah di Kabupaten Lamongan antara lain:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Air Tanah
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan jenis pajak di atas, maka pendapatan asli daerah dari pajak dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.54 Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

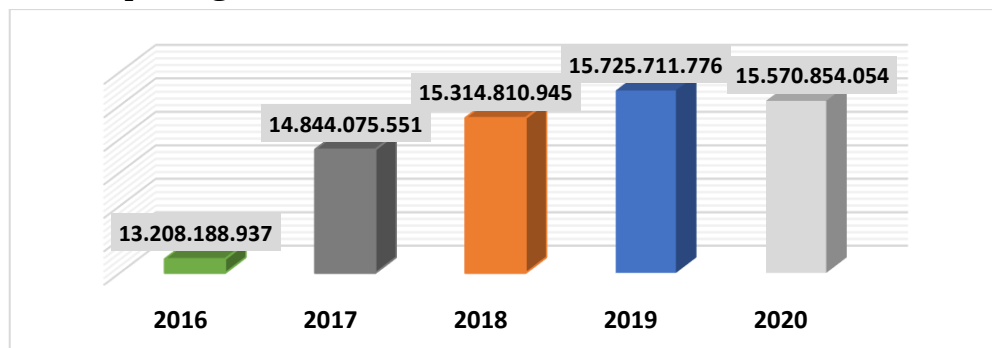
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2020

Pendapatan dari pajak daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi fluktuatif. Pendapatan pajak daerah tertinggi didapatkan sebesar Rp.144.919.590.599 pada tahun 2019 dan terendah sebesar Rp.110.226.338.000 pada tahun 2016. Dari 11 (sebelas) macam pajak daerah Kabupaten Lamongan, yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pajak penerangan jalan (sebesar Rp.34.816.474.000 tahun 2016, Rp.42.260.948.000 pada tahun 2017, Rp.50.978.342.973 di tahun 2018, Rp.54.291.410.108 di tahun 2019, dan Rp.53.431.745.254 pada tahun 2020) dan yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak sarang burung walet (sebesar Rp.18.000.000 di tahun 2016 dan tahun 2017, Rp.18.322.000 di tahun 2018, Rp.18.000.000 pada tahun 2019 dan Rp.9.600.000 di tahun 2020).

Selain pajak, pendapatan asli daerah juga bersumber dari retribusi daerah yang mencakup duabelas aspek yakni:

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Hasil dari retribusi daerah sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



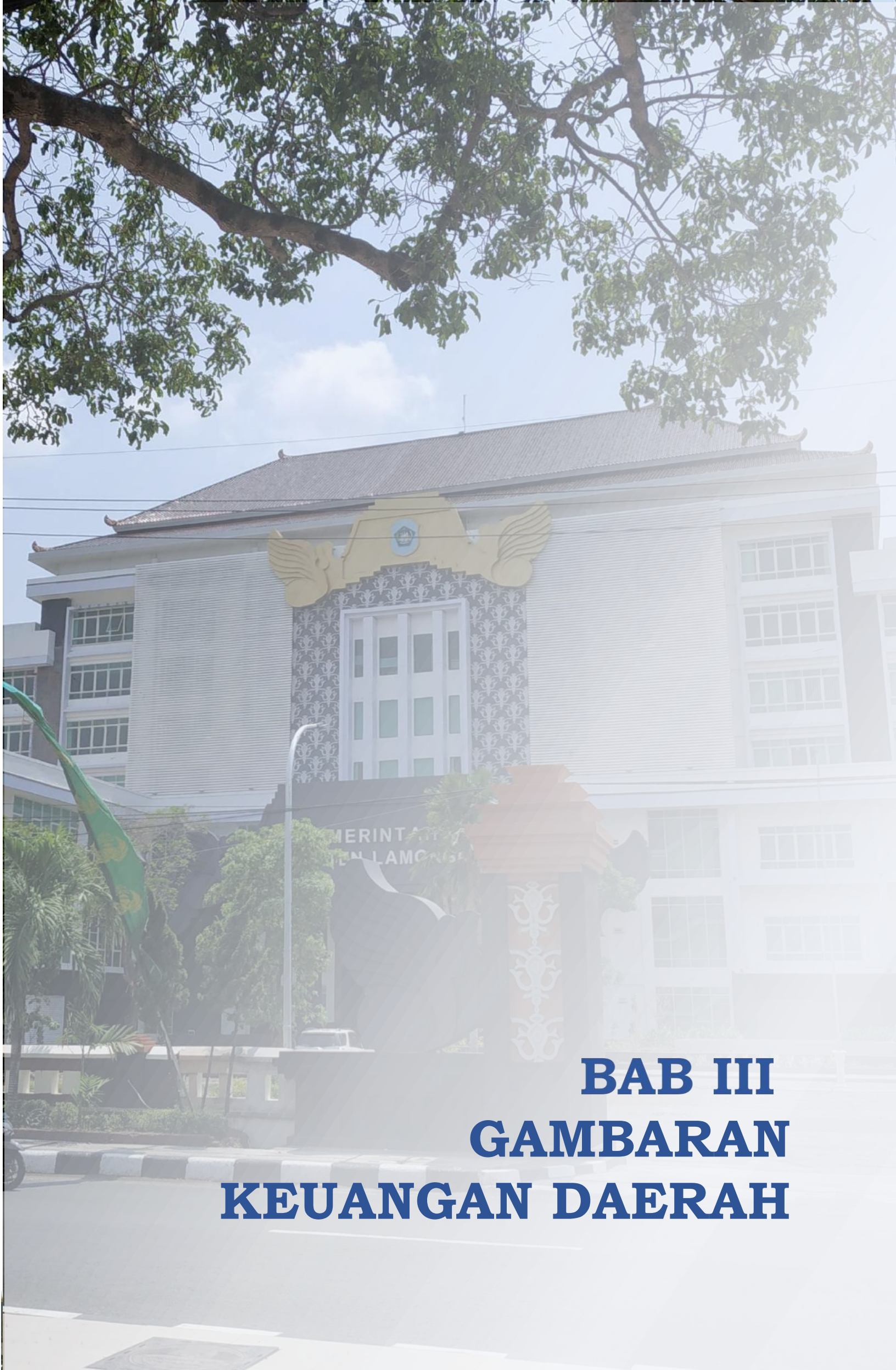
Gambar II.55 Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan grafik di atas pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 hingga tahun 2020 secara garis besar mengalami peningkatan. Pendapatan retribusi daerah tertinggi didapatkan sebesar Rp.15.725.711.776 di tahun 2019 dan terendah sebesar Rp.13.208.188.937 pada tahun 2016. Dari 12 (duabelas) macam retribusi daerah Kabupaten Lamongan, yang memberikan kontribusi tertinggi adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (sebesar Rp.7.477.041.000 di tahun 2016, Rp.7.763.336.000 pada tahun 2017, Rp.8.160.505.500 di tahun 2018, Rp.8.476.238.000 pada tahun 2019 dan sebesar Rp.7.906.543.000 di tahun 2020), dan yang memberikan kontribusi terendah adalah retribusi terminal (sebesar Rp.130.107.000 di tahun 2016, Rp.54.010.800 pada tahun 2017, Rp.53.856.500 di tahun 2018, Rp.52.580.000 pada tahun 2019 dan sebesar Rp.29.037.000 di tahun 2020).

2.4.3.3 Jumlah Perda/Perbup Yang Mendukung Iklim Usaha

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mendukung iklim usaha yang baik, telah menetapkan peraturan untuk tata kelola investasi serta memberikan kepastian hukum kepada investor yakni Peraturan

Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) dan Peraturan Daerah tentang penanaman modal. Tersedianya peraturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha pada saat melakukan usaha di lingkup wilayah Kabupaten Lamongan. Dengan demikian iklim usaha di Kabupaten Lamongan dapat berkembang dengan baik.



BAB III

GAMBARAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah.

Secara umum realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terutama didominasi oleh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Berikut merupakan rekapitulasi Realisasi Kinerja Pelaksanaan APBD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020

Tabel III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2.719.031.205.756,84	2.716.042.671.044,82	2.811.062.543.333,02	2.864.496.711.416,86	2.838.272.211.782,49	1,09
1,1	Pendapatan Asli Daerah	403.474.462.147,33	429.200.063.876,82	436.595.179.671,02	472.002.823.163,86	481.752.331.399,49	4,57
1.1.1	Pajak daerah	114.982.290.275,30	142.025.801.530,00	129.214.808.181,09	144.919.590.599,91	134.046.465.786,00	4,79
1.1.2	Retribusi daerah	27.118.546.726,20	30.574.992.331,00	15.341.144.945,00	15.725.711.776,00	15.570.854.054,00	-8,89
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	22.454.128.197,68	23.093.187.443,58	24.670.103.722,00	26.463.305.205,72	11.584.041.643,40	-9,82
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	238.919.496.948,15	233.506.082.572,24	267.369.122.822,93	284.894.215.582,23	320.550.969.916,09	7,83
1,2	Dana Perimbangan	1.708.680.363.941,00	1.594.775.221.094,00	1.700.714.352.575,00	1.669.265.105.739,00	1.542.723.757.256,00	-2,36
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	98.267.648.141,00	75.480.934.027,00	124.753.022.135,00	114.472.399.493,00	112.200.869.038,00	7,97
1.2.2	Dana alokasi umum	1.166.655.654.000,00	1.146.161.266.000,00	1.146.161.266.000,00	1.183.848.580.000,00	1.098.971.379.000,00	-1,41
1.2.3	Dana alokasi khusus	443.757.061.800,00	373.133.021.067,00	429.800.064.440,00	370.944.126.246,00	331.551.509.218,00	-6,26
1,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	606.876.379.668,51	692.067.386.074,00	673.753.011.087,00	723.228.782.514,00	813.796.123.127,00	7,81
1.3.1	Hibah	33.798.834.668,51	85.107.080.000,00	84.455.746.491,00	103.207.316.060,00	103.310.987.694,00	43,34
1.3.2	Dana darurat						0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	136.756.685.000,00	164.449.090.074,00	161.752.209.596,00	190.481.612.454,00	159.384.800.433,00	5,01
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	320.856.510.000,00	392.498.316.000,00	365.099.755.000,00	411.847.235.000,00	489.117.206.000,00	11,73
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	115.464.350.000,00	50.012.900.000,00	62.445.300.000,00	17.692.619.000,00	61.983.129.000,00	36,71
2	BELANJA	2.796.049.237.222,66	2.729.589.182.635,60	2.813.870.872.928,02	2.738.849.607.350,46	2.823.137.926.114,77	0,27
2,1	Belanja Tidak Langsung	1.650.015.258.239,00	1.619.390.905.772,10	1.600.633.510.745,00	1.613.354.490.766,00	1.775.858.044.244,00	1,96

2.1.1	Belanja Pegawai	1.041.327.725.076,00	930.778.901.712,00	911.862.349.369,00	885.798.555.508,00	916.077.483.287,00	-3,02
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0
2.1.4	Belanja Hibah	111.801.261.857,00	135.754.089.577,00	148.469.410.000,00	141.259.870.000,00	213.635.551.200,00	105
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.798.600.000,00	17.156.540.000,00	21.419.540.000,00	13.552.240.000,00	11.992.500.000,00	-54,2
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.595.199.501,00	1.590.394.800,00	1.681.968.970,00	1.721.683.488,00	1.514.378.515,00	-1,06
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	466.492.471.805,00	534.110.979.683,10	517.200.242.406,00	571.022.141.770,00	602.179.795.800,00	6,80
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	30.458.335.442,00	0
2,2	Belanja Langsung	1.146.033.978.983,66	1.110.198.276.863,50	1.213.237.362.183,02	1.125.495.116.584,46	1.047.279.881.870,77	-1,71
2.2.1	Belanja Pegawai	42.270.992.893,00	50.145.182.011,00	59.188.829.097,00	18.923.196.626,00	79.772.273.047,00	17,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	487.263.264.117,66	554.831.505.267,50	622.237.184.927,98	588.173.319.658,60	642.147.830.990,36	7,58
2.2.3	Belanja Modal	616.499.721.973,00	505.221.589.585,00	531.811.348.158,04	518.398.600.299,86	325.359.777.833,41	-13,56
3	PEMBIAYAAN	147.330.406.946,11	64.842.975.480,29	46.144.463.889,51	41.187.753.267,51	36.321.860.938,77	-26,76
3,1	Penerimaan Pembiayaan	214.085.401.614,62	96.392.975.480,29	74.644.463.889,51	64.912.753.267,51	43.196.860.938,77	-31,02
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	189.685.401.614,62	70.312.355.480,29	50.296.463.889,51	43.227.321.267,51	30.127.893.188,77	-33,94
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	26.080.620.000,00	-	-	-	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	31.700.000,00	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	24.400.000.000,00	-	-	-	13.037.267.750,00	0

3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya	-	-	24.348.000.000,00	21.685.432.000,00		-25,41
3.1.8	Koreksi SILPA	-	-	-	-	-	0
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	66.754.994.668,51	31.550.000.000,00	28.500.000.000,00	23.725.000.000,00	6.875.000.000,00	-37,86
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	66.698.834.668,51	31.550.000.000,00	28.500.000.000,00	23.725.000.000,00	6.875.000.000,00	-37,54
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	56.160.000,00	-	-	-	-	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000.000,00	-	-	-	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2020, Data Diolah

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Pendapatan

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dalam setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) sebesar 1,09%. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tercatat sebesar Rp 2.719.031.205.756,84. Pada tahun 2017 mengalami penurunan 0,11% atau sebesar Rp 2.716.042.671.044,82. Pada tahun 2018 pendapatan daerah Kabupaten Lamongan kembali mengalami pertumbuhan 3,50% atau sebesar Rp 2.811.062.543.333,02. Sedangkan pada tahun 2019 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 1,90% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,92%, sehingga realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 sebesar Rp 2.864.496.416,86 dan tahun 2020 sebesar Rp 2.838,272.211.782,49.

Pendapatan Daerah sangat penting bagi pemerintah untuk menunjang pembangunan daerah guna membiayai program dan kegiatan daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp 119.241.006.025,65 atau sebesar 4,39% dari Rp 2.719.031.205.756,84 pada tahun 2016 menjadi Rp 2.838,272.211.782,49 pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 4,57% kemudian lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami peningkatan sebesar 7,81%. Namun dana perimbangan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan sebesar 2,36%.

Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 hingga 2020 didominasi oleh Dana Perimbangan yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 54,35%, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi sebesar 28,67% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata memiliki proporsi sebesar 16,97%. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap Dana Perimbangan masih sangat tinggi, sehingga dimasa mendatang perlu adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal sehingga komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan menjadi semakin besar dalam setiap tahunnya. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi terjadinya penurunan Dana Perimbangan, khususnya DAU.

Bila melihat pada jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 hingga 2020 cenderung menunjukkan adanya peningkatan dalam setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 4,57%. Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi pajak daerah sebesar 12,15% , retribusi daerah sebesar 2,51% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 7,27%.

Realisasi Dana Perimbangan secara garis besar mengalami kecenderungan yang menurun pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 2,36%. Pada tahun 2016 realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten Lamongan sebesar Rp 1.708.680.363.941,00, dan tahun 2017 mengalami penurunan 6,67% sehingga menjadi Rp 1.594.775.221.094,00. Pada tahun 2018 realisasi Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan 6,64% dengan realisasi sebesar Rp 1.700.714.352.575,00. Pada tahun 2019 menunjukkan penurunan sebesar 1,85% dengan realisasi Rp 1.669.265.105.739,00. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan 7,58% menjadi Rp 1.542.723.757.256,00.

Untuk realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Lamongan dalam setiap tahun menunjukkan adanya fluktuasi, dimana rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016 hingga 2020 tercatat sebesar 7,81%. Selama tahun 2016 hingga 2020 pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2020, sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2016 jumlah realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Lamongan tercatat sebanyak Rp 606.876.379.668,51, sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 14,04% sehingga jumlah realisasi tercatat menjadi Rp 692.067.386.074,00. Terjadinya peningkatan realisasi pada tahun 2017 lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,65% sehingga jumlah

realisasinya adalah Rp 673.753.011.087,00 sedangkan pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif sebesar 7,34%, sehingga jumlah realisasi pada tahun 2019 mencapai Rp 723.228.782.514,00. Pada tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya peningkatan realisasi pada dana penyesuaian dan otonomi khusus serta Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, maka realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Lamongan Kembali mengalami pertumbuhan sebesar 12,52% sehingga jumlah realisasi yang tercatat pada tahun tersebut mencapai Rp 813.796.123.127,00. Untuk mengetahui data secara lebih rinci terkait dengan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel III.1.

3.1.1.2 Belanja

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dalam setiap tahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016 hingga 2020 sebesar 0,27%. Pertumbuhan Belanja Daerah yang mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2020. Pada tahun 2016 jumlah realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Rp 2.796.049.237.222,66. Pada tahun 2017 realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan 2,38% dengan realisasi sebesar Rp 2.729.589.182.635,60. Pada tahun 2018 realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan 3,09% dengan realisasi sebesar Rp 2.813.870.872.928,02. Pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan 2,19%, dengan realisasi sebesar Rp 2.875.512.218.177,60. Sedangkan pada tahun 2020 total realisasi belanja sebesar Rp 2.823.137.926.114,77.

Bila melihat pada komposisi realisasi Belanja Daerah dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) Belanja Daerah Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung yang rata-rata mencapai 58,85%. Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel III.1.

3.1.1.3 Pembiayaan

Analisis pembiayaan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi pembiayaan memiliki perbedaan yang signifikan dengan upaya perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pembiayaan bermaksud untuk menutup kekurangan (defisit) antara pendapatan dengan belanja pada tahun tersebut. Asumsi yang digunakan adalah pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka *equilibrium* yakni Rp 0,-. Sesuai dengan tujuan dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SILPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai *saving* yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SILPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/ pelaksanaan belanja yang kurang baik.

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 26,76%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 31,02%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 37,86%. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 214.085.401.614,62, sedangkan tahun 2017 jumlah realisasi sebesar Rp 96.392.975.480,29. Untuk tahun 2018 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 74.644.463.889,51 dan tahun 2019 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 64.912.753.267,51. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 43.165.160.938,77. Pada struktur penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 hingga 2020 ditunjang oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang memiliki rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan 33,94%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat diketahui setiap tahunnya selama 2016-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebanyak Rp 189.685.401.614,62 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp 70.312.355.480,29. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 yakni Rp 50.296.463.889,51. Pada tahun 2019

mengalami penurunan sebesar Rp 43.227.321.267,51. Pada tahun 2020 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) kembali mengalami penurunan sebesar 30,30% sehingga menjadi Rp 30.127.893.188,77. Selain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada pos penerimaan pembiayaan juga terdapat Penerimaan Piutang Daerah pada tahun 2016 sejumlah Rp 24.400.000.000,00. Kemudian pada tahun 2017 terdapat pos Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 26.080.620.000,00. Sedangkan pada tahun 2018-2020 jumlah penerimaan pembiayaan memperoleh tambahan dari adanya realisasi Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya. Pada tahun 2018 realisasi Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya sebesar Rp 24.348.000.000,00. Kemudian pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 21.685.432.000,00 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga realisasinya menjadi Rp 13.037.267.750,00.

Bila melihat pada pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 terdapat realisasi 2 (dua) komponen, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebanyak Rp 66.698.834.668,51 dan komponen Pembayaran Pokok Utang sebanyak Rp 56.160.000,00. Kemudian pada tahun 2017 juga terdapat realisasi 2 (dua) komponen pengeluaran pembiayaan, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebanyak Rp 31.550.000.000,00 dan realisasi komponen Pemberian Pinjaman Daerah sebanyak Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2018-2020 hanya terdapat 1 jenis realisasi pengeluaran pembiayaan, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 28.500.000.000,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 23.725.000.000,00 kemudian pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp 6.875.000.000,00.

3.1.2 Neraca Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah selain dilihat dari pendapatan juga dapat dilihat dari neraca daerah. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi: aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasi pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Berdasarkan peraturan (PP) tersebut kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Keberadaan neraca daerah Kabupaten Lamongan dari sisi nilai aset, kewajiban dan ekuitas mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya.

Neraca daerah menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari aset, uang, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Selama 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan aset lancar mengalami penurunan 15,12% sedangkan aset tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,35%. Sementara investasi jangka panjang rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,29% dan total aset daerah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,45%. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Lamongan juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 45,81%.

Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Lamongan 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	250.962.092.265	227.054.794.754	202.925.785.576	236.226.021.155	102.160.814.722	-15,12
1.1.1.	Kas	70.334.782.765	50.022.558.476	43.227.321.268	30.172.246.507	51.424.446.606	-0,56
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	Rp0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	151.825.091.869,64	152.419.198.849	152.511.604.159	196.095.494.742	34.485.043.543	-13,35
1.1.4.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	-11.958.038.348,33	-11.883.571.082,89	-4.005.220.529,54	-33,46
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	Persediaan	28.802.217.630,12	24.613.037.428,00	19.144.898.497,47	21.841.850.988,74	20.256.545.102,13	-7,48
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	750.523.105.596	762.417.459.383	772.921.053.004	771.477.714.298	758.942.312.644	0,29
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	9.104.250.000	9.104.250.000	7.313.250.000	7.015.000.000	995.000.000	-27,39
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	741.418.855.596	753.313.209.383	765.607.803.004	764.462.714.298	757.947.312.644	0,56
1.3.	ASET TETAP	2.925.686.198.550	3.152.543.807.318	3.995.938.049.982	4.263.875.379.795	4.442.257.451.268	11,35
1.3.1.	Tanah	777.525.688.900,00	767.788.761.742,00	1.379.714.809.137,59	1.380.445.485.002,59	1.438.806.815.502,59	20,68
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	622.356.883.623,00	683.399.400.427,00	819.788.642.538,01	941.358.043.528,01	1.151.559.148.967,13	16,73
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.070.986.836.150,40	1.110.431.204.794,40	1.178.904.745.151,18	1.532.715.681.020,43	1.577.310.492.929,28	10,69
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.084.219.940.680,00	2.347.547.478.647,00	2.546.571.234.105,50	2.682.322.797.650,15	2.764.928.951.001,40	7,38
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	33.152.220.047,00	45.753.556.174,00	43.252.038.438,00	53.391.154.116,00	59.215.256.420,00	16,72
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.198.172.650,00	46.766.099.345,00	132.706.937.120,61	7.262.772.266,85	0,00	134,73
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-1.669.753.543.500,06	-	-2.105.000.356.509,14	-	-	-

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.4.	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	ASET LAINNYA	9.753.056.811	26.454.330.481	87.066.100.880	88.177.947.456	90.026.864.463	100,93
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	97.250.043,49	129.700.043,49	129.700.043,49	207.039.016,64	352.355.837,64	40,80
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00	0,00
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	4.950.252.110,00	5.740.114.110,00	7.002.321.310,00	8.253.845.010,00	8.671.760.790,00	15,22
1.5.5.	Aset Lain-lain	8.098.748.553,00	63.089.741.312,09	41.440.751.328,00	45.131.910.534,55	43.150.321.181,55	69,26
	Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud	-3.393.193.895,00	-4.073.850.685,21	-5.099.621.821,04	-6.032.119.917,51	-6.942.559.255,09	19,65
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-14.450.786.385,86	-17.426.463.592,41	-13.248.750.496,55	-1,69
	JUMLAH ASET	3.936.924.453.223	4.168.470.391.937	5.058.850.989.441	5.359.757.062.703	5.393.387.443.097	8,45
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.920.410.805	22.075.097.748	30.286.487.323	48.027.536.476	61.897.591.704	45,81
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,76
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.403.265.241,42	1.660.651.664,66	2.154.925.170,18	2.113.522.653,75	1.815.235.566,16	8,02
2.1.6.	Utang Belanja	12.494.718.279,00	20.414.437.083,00	28.131.562.153,00	43.969.799.852,00	58.147.495.485,43	47,43
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	22.427.284,89	9.000,00	0,00	1.944.213.970,00	1.934.860.652,00	-25,11
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	13.920.410.805	22.075.097.748	30.286.487.323	48.027.536.476	61.897.591.704	45,81
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	3.923.004.042.418	4.146.395.294.189	5.028.564.502.117,79	5.311.729.526.228	5.331.489.851.394	8,24
3.1.1.	Ekuitas	3.923.004.042.417,81	4.146.395.294.189,09	5.028.564.502.117,79	5.311.729.526.227,58	5.331.489.851.393,62	8,24
	JUMLAH EKUITAS	3.923.004.042.418	4.146.395.294.189	5.028.564.502.117,79	5.311.729.526.228	5.331.489.851.394	8,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.936.924.453.223	4.168.470.391.937	5.058.850.989.441	5.359.757.062.703	5.393.387.443.097	8,45

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Lamongan 2016-2020

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang disajikan dalam neraca daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.2.1 Aset Daerah

Keberadaan aset Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,45%, dimana pada tahun 2016 jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mencapai Rp 3.936.924.453.223 sedangkan pada tahun 2019 tercatat Rp 5.359.757.062.703. Dan hingga akhir tahun 2020 total aset Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah Rp 5.393.387.443.097. Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan pada dasarnya terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Rata-rata pertumbuhan aset lancar pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 15,12%, dan pada tahun 2020 memiliki nilai mencapai Rp 102.160.814.722. Investasi jangka panjang pada rentang tahun yang sama memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29% dengan nilai pada tahun 2020 mencapai Rp 758.942.312.644. Nilai aset tetap pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 4.442.257.451.268 dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 11,35 %. Sedangkan untuk aset lainnya pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 100,93%, dimana nilai aset lainnya pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 9.753.056.811 dan pada tahun 2020 memiliki nilai mencapai Rp 90.026.864.463.

Lebih spesifik terkait aset daerah, dengan memperhatikan pada komposisi yang ada, maka sebagian besar dari aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam setiap tahunnya adalah berupa aset tetap, dengan proporsi pada tahun 2020 yang mencapai 82,36% dan sebagian besar dalam bentuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Gedung dan Bangunan. Untuk aset lancar di Kabupaten Lamongan sebagian besar berbentuk Kas dan Piutang Pendapatan dengan proporsi pada tahun 2020 masing-masing mencapai 50,34% dan 33,76%. Sedangkan untuk aset lainnya sebanyak 1,67% dalam bentuk aset lain-lain.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 45,81%, dimana pada tahun 2016 jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 13.920.410.805 sedangkan pada tahun 2020 meningkat

sebesar Rp 61.897.591.704. Keseluruhan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah Kewajiban Jangka Pendek, yaitu dalam bentuk pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya.

Bila melihat pada perkembangan nilai kewajiban yang dimiliki dalam setiap tahunnya, maka pada tahun 2016 sampai dengan 2020 nilai secara konsisten meningkat,. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2019 yang masing-masing mencapai 58,58%. Secara spesifik, peningkatan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan secara nominal lebih disebabkan oleh adanya peningkatan utang belanja dalam 5 tahun terakhir, sedangkan secara komposisi keberadaan utang belanja di Kabupaten Lamongan lebih dominan dibandingkan dengan jenis kewajiban lainnya. Selain itu peningkatan pada utang jangka pendapatan dibayar dimuka juga turut memicu peningkatan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020.

3.1.2.3 Ekuitas

Nilai ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 3.923.004.042.418 sedangkan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sehingga nilainya mencapai Rp 5.331.489.851.394. Kondisi tersebut memiliki arti bahwa nilai aset yang tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban pada tahun 2020 masih sebesar Rp 5.331.489.851.394 dengan rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 8,24%. Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yang disajikan dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

3.1.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan.

Berikut disajikan data hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020.

Tabel III.3 Nilai Rasio Liquiditas Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Rasio Likuiditas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	18,03	10,29	6,70	4,92	1,65
2	Rasio <i>Quick</i>	15,96	9,17	6,07	4,46	1,32

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan data rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan yang selalu mengalami penurunan. Keberadaan nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Lamongan secara umum dalam 5 tahun terakhir masih berada di atas angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar memiliki kategori yang masih baik. Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Pada tahun 2020 kemampuan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 1,65 kali atau 1 kali, dan nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 4,92 kali atau 4 kali, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknyanya mengalami penurunan, namun masih tetap berada pada posisi yang masih baik.

Selain rasio lancar, kondisi rasio *quick* menunjukkan pola penurunan yang sama dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 nilai rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari 15,96 menjadi 69,17. Pada tahun 2018 nilai rasio *quick* Kembali mengalami penurunan sehingga tercatat sebesar 6,07, sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi 4,46. Pada tahun 2020 nilai rasio *quick* kembali mengalami penurunan menjadi 1,32. Pada rasio *quick*, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya. Rasio *quick*

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) juga menunjukkan kondisi yang masih baik, dimana nilainya masih berada di atas 1, meskipun pada tahun 2020 nilainya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid (aset lancar setelah dikurangi nilai persediaannya) masih cukup baik, dengan kemampuan sebesar 1,32 atau 1 kali

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

3.1.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.

Keberadaan rasio solvabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam setiap tahunnya mengalami pola kenaikan. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kondisi rasio solvabilitas selama tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4 Nilai Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Rasio Solvabilitas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0035	0,0053	0,0060	0,0090	0,0115
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0035	0,0053	0,0060	0,0090	0,0116

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Lamongan 2016-2020 (Data Diolah)

Rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan secara umum masih sangat kecil, yaitu jauh berada di bawah 0,5. Pada tahun 2016 nilai rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar 0,0035, dimana pada tahun 2017 angka rasionya mengalami peningkatan sebesar 0,0053. Selanjutnya di tahun 2018 meningkat sebesar

0,0060, yang kemudian kembali mengalami peningkatan di 2019 sebesar 0,0090. Terjadinya kenaikan rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2019 pada dasarnya perlu menjadi perhatian. Pada akhir tahun 2020 angka rasio hutang terhadap aset kembali meningkat menjadi 0,0115. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam keadaan yang sehat, dimana persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 masih kecil, yaitu sebesar 1,15%.

Melihat nilai rasio hutang terhadap modal pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan yang sama yang mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 nilai rasio hutang terhadap modal tetap sebesar 0,0035. Pada tahun 2017 nilai rasio hutang terhadap modal mengalami peningkatan yakni 0,0053, dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,0060. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,0090 dan hingga akhir tahun 2020 nilainya sebesar 0,0116. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai kewajiban dan ekuitas. Bila melihat pada nilai rasio antara tahun 2016 hingga 2020 dapat terlihat bahwa nilai yang dimiliki masih sangat kecil, bahkan masih jauh berada di bawah 0,5, walaupun pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 perbandingan/ proporsi antara nilai hutang dengan ekuitas sebesar 1,16%. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Lamongan hingga saat ini tidak bergantung pada hutang, dimana nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki. Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal yang dimiliki menunjukkan bahwa kondisi keuangan semakin mandiri.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Pendapatan

Sumber pendapatan terbanyak Kabupaten Lamongan berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2016 - 2020 mencapai 67,80% dari total pendapatan daerah. Lebih spesifiknya, pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan proporsi rata-rata tahun 2012 - 2020 mencapai 48,09% dari total pendapatan daerah. Dari hal tersebut dapat

dipahami bahwa Kabupaten Lamongan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, mengindikasikan bahwa Kabupaten Lamongan telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kabupaten Lamongan dapat tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5 Rasio Pendapatan Kabupaten Lamongan 2016-2020

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	14,84%	15,80%	15,53%	16,76%	16,97%	15,98%
1.1.1	Pajak Daerah	4,23%	5,23%	4,60%	5,14%	4,72%	4,78%
1.1.2	Retribusi Daerah	1,00%	1,13%	0,55%	0,56%	0,55%	0,76%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,83%	0,85%	0,88%	0,94%	0,41%	0,78%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8,79%	8,60%	9,51%	10,11%	11,29%	9,66%
1.2	Dana Perimbangan	62,84%	58,72%	60,50%	59,26%	54,35%	59,13%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	3,61%	2,78%	4,44%	4,06%	3,95%	3,77%
1.2.2	Dana alokasi umum	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.3	Dana alokasi khusus	42,91%	42,20%	40,77%	42,02%	38,72%	41,32%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,32%	13,74%	15,29%	13,17%	11,68%	14,04%
1.3.1	Hibah	22,32%	25,48%	23,97%	23,99%	28,67%	24,89%
1.3.2	Dana Darurat	1,24%	3,13%	3,00%	3,00%	3,64%	2,80%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	5,03%	6,05%	5,75%	5,74%	5,62%	5,64%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	11,80%	14,45%	12,99%	14,62%	17,23%	14,22%
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

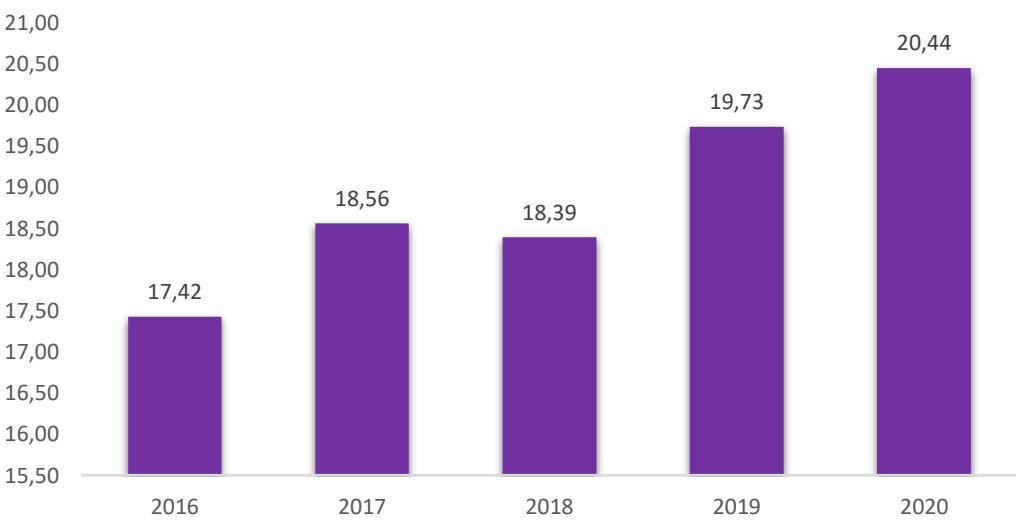
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 mencapai rasio terbesar, yaitu 16,97%. Angka tersebut juga merupakan puncak kenaikan proporsi PAD. Sedangkan untuk posisi Dana Perimbangan, pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan rasio, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2018. Adapun pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 mengalami peningkatan proporsi dari tahun sebelumnya hingga mencapai rasio 28,67%.

Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Fiskal Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Keberhasilan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar III. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

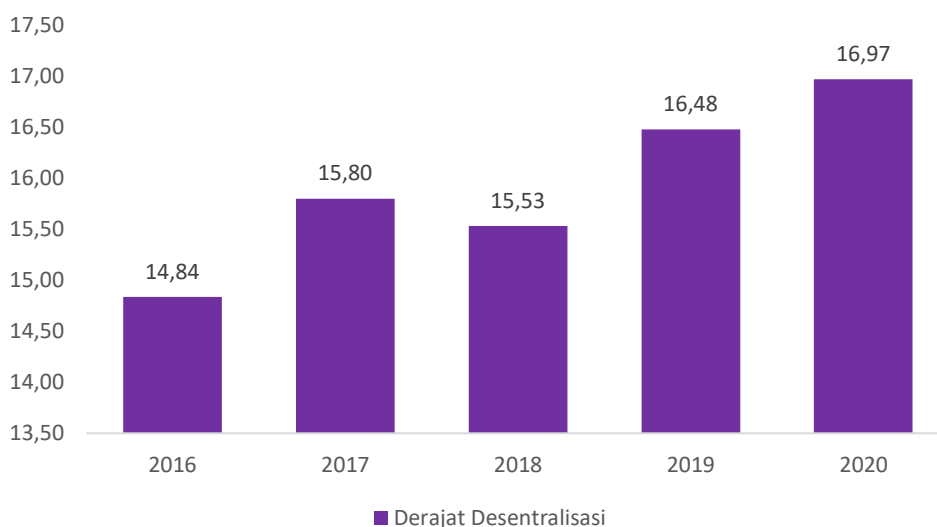
Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih berkisar antara 17,42% hingga 20,44% yang tergolong masih **sangat rendah** sehingga dapat diklasifikasikan dalam pola hubungan **instruktif**. Artinya, Kabupaten Lamongan masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Meskipun mengalami penurunan pada 2018, secara umum rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan mengalami kecenderungan yang meningkat pada 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerahnya, meskipun masih tetap diperlukan usaha yang lebih optimal pada masa mendatang, agar terjadi tren positif pada rasio kemandirian keuangan daerah tersebut. Adapun pedoman untuk melihat pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.6 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar III. 2 Grafik Derajat Desentralisasi

Sumber: LRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020 (diolah)

Pada tahun 2016-2020, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan mengalami tren yang fluktuatif, namun dengan kecenderungan pada kenaikan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2018 hingga mencapai rasio 14,80%, namun capaian tersebut kemudian mengalami peningkatan yang konsisten sampai tahun 2020 hingga mencapai angka 16,97%, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mampu meningkatkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal secara konsisten pada 3 tahun terakhir (2018-2020). Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020 tercatat berada di antara 14,84% sampai 16,97% dan termasuk dalam golongan yang “**kurang**”, Sehingga demikian tetap perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal. Adapun Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersaji pada tabel di bawah ini:

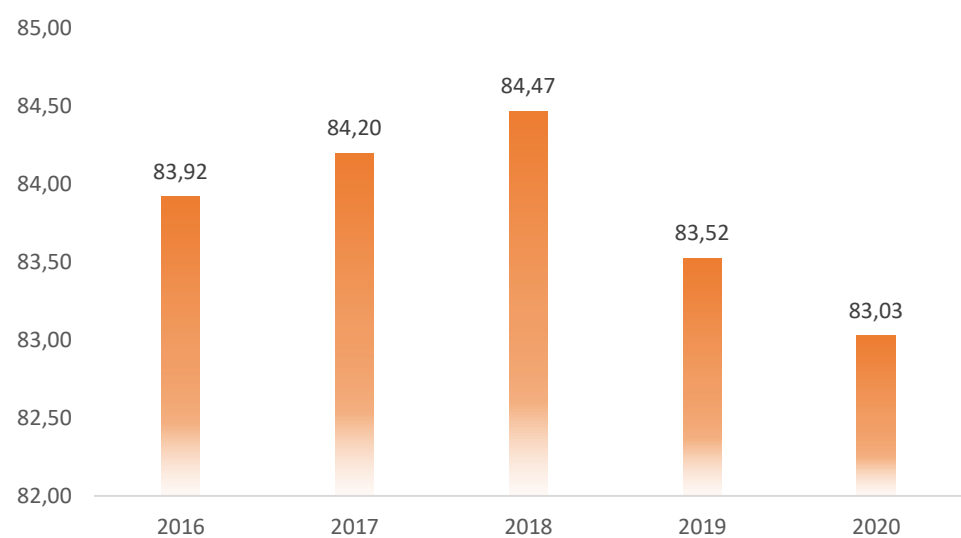
Tabel III.7 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh

pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar III. 3 Rasio Ketergantungan Daerah
 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020 (diolah)

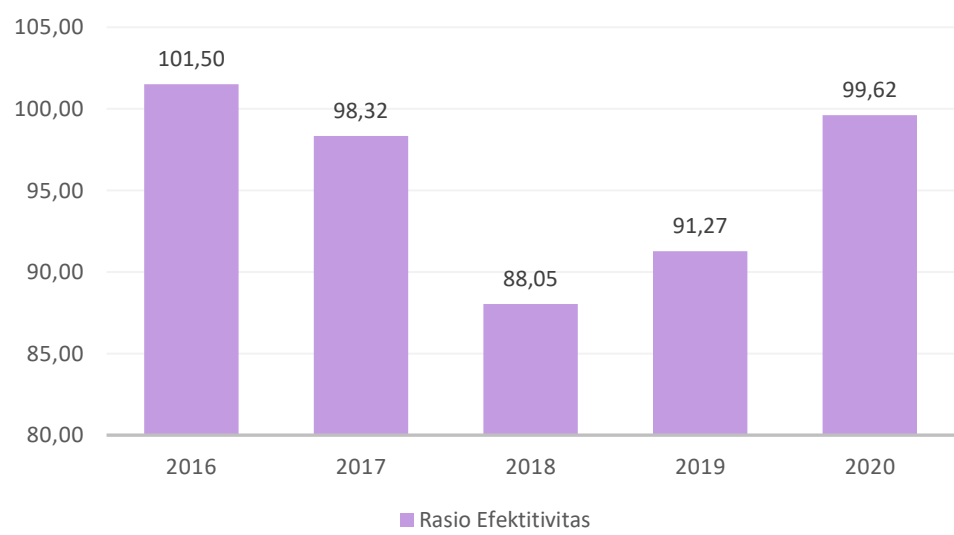
Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lamongan menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2016-2018, hingga mencapai rasio tertinggi sebesar 84,57% pada tahun 2018. Namun rasio ini mengalami penurunan secara konsisten pada 2 tahun berikutnya hingga pada tahun 2020 mencapai angka 83,03%. Penurunan nilai rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah dapat mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun secara tren tahun 2018-2020 cenderung menurun, tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Lamongan masih dalam kategori “**sangat tinggi**”. Adapun kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

4. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar III. 4 Rasio Efektivitas Daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif, dengan tren mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020 meskipun pada kurun tahun 2017-2018 mengalami tren penurunan. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, terutama pada 3 tahun terakhir (2018-2020) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dianggarkan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 berangsur-angsur membaik dengan rasio sebesar 99,62% dan mencapai kriteria “**Efektif**” di tahun 2020. Adapun kriteria penilaian rasio efektivitas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel III.9 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kriteria	
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

3.2.1.2 Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Proporsi Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Tidak Langsung	59,01%	59,33%	56,88%	56,11%	62,90%	59,01%
2.1.1	Belanja Pegawai	37,24%	34,10%	32,41%	30,80%	32,45%	37,24%
2.1.2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Hibah	4,00%	4,97%	5,28%	4,91%	7,57%	4,00%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,03%	0,63%	0,76%	0,47%	0,42%	1,03%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	16,68%	19,57%	18,38%	19,86%	21,33%	16,68%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	0,00%
2.2	Belanja Langsung	40,99%	40,67%	43,12%	43,89%	37,10%	40,99%
2.2.1	Belanja Pegawai	1,51%	1,84%	2,10%	2,41%	2,83%	1,51%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,43%	20,33%	22,11%	24,43%	22,75%	17,43%
2.2.3	Belanja Modal	22,05%	18,51%	18,90%	17,06%	11,52%	22,05%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 - 2020 cenderung fluktuatif. Proporsi rata-rata realisasi belanja terbesar berada pada belanja pegawai (belanja tidak langsung), artinya realisasi belanja pegawai yang tidak berkenaan langsung dengan program dan kegiatan lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Sedangkan proporsi rata-rata realisasi belanja terendah berada pada belanja subsidi. Kemudian untuk menganalisis besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Lamongan selama 2016-2020 diperlukan tabel terpisah yang mendefinisikan total belanja dalam membiayai proses pemerintahan. Tujuannya yakni memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan

kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa data dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel III.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamongan

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	1.759.838.818.068,00	2.862.804.231.891,17	61,47%
2	Tahun Anggaran 2017	1.566.548.142.410,06	2.762.139.182.635,60	56,72%
3	Tahun Anggaran 2018	1.585.073.739.282,04	2.842.370.872.928,02	55,77%
4	Tahun Anggaran 2019	1.546.398.773.266,49	2.899.237.218.177,60	53,34%
5	Tahun Anggaran 2020	1.377.336.910.067,41	2.830.012.926.114,77	48,67%

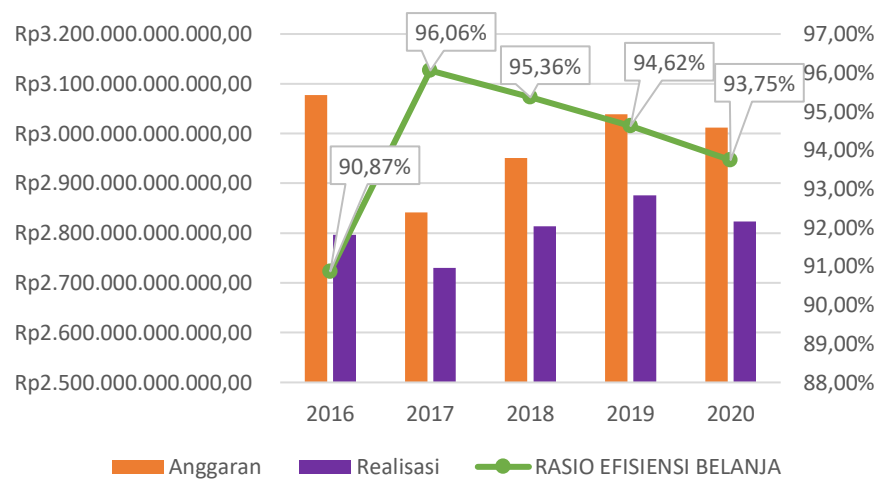
Tabel diatas merupakan proporsi antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran (belanja + pembiayaan). Dimana rerata belanja pemenuhan kebutuhan aparatur berada pada level 55,19% dan sisa 44,81% merupakan pengeluaran pembiayaan yang dapat dimanifestasikan sebagai pencadangan dana, pemberian pinjaman ke daerah, penyertaan modal maupun pembayaran cicilan utang. Hal ini menunjukkan bahwa 55,19% total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur didistribusikan kepada 6 pos yakni a). Belanja Gaji dan Tunjangan; b). Belanja Tambahan Penghasilan; c). Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH; d). Belanja Pemungutan Pajak daerah; e). Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan; f). Insentif Pemungutan Retribusi.

Sementara pada posisi pengeluaran pembiayaan besaran komponen didistribusikan utamanya untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada 7 BUMD Kabupaten Lamongan yakni, Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan; Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan; Perumda Air Minum; Bank Jatim; PT Bumi Lamongan Sejati (WBL); Perumda Pasar dan; PT Lamongan Integrated Shorebase. Secara spesifik, pengelolaan belanja pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian/ serapan realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Lamongan Selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) secara lebih jelas adalah sebagai berikut.



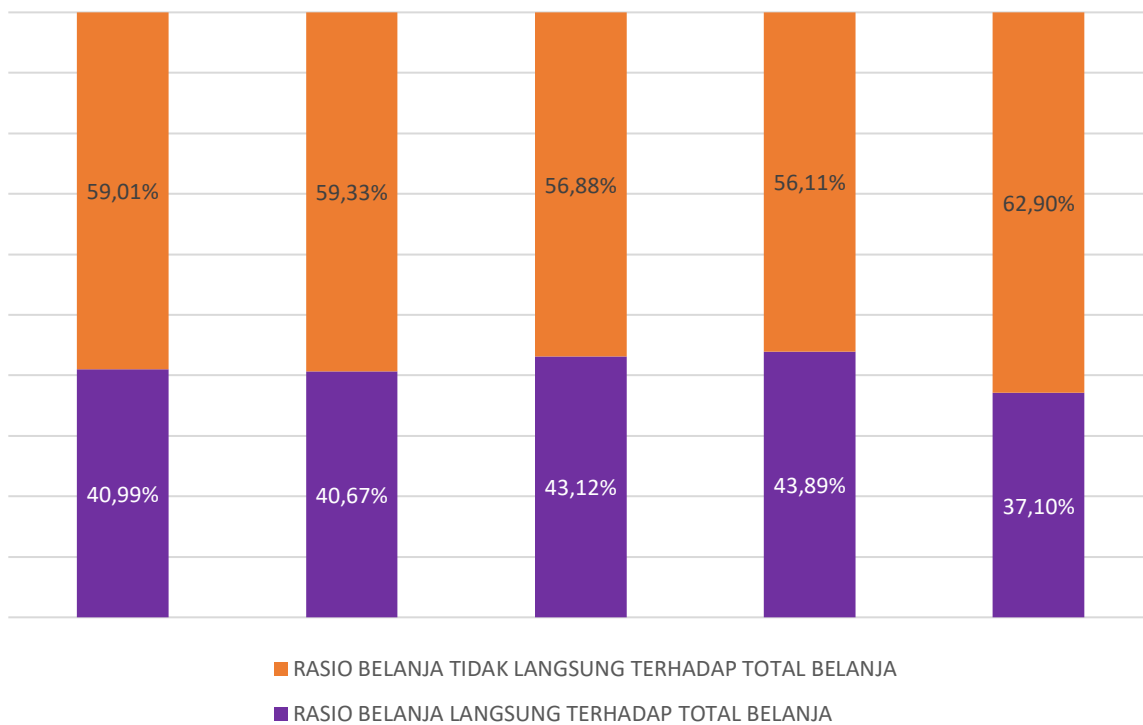
Gambar III. 5 Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Lamongan tidak pernah di bawah 90%, sehingga dapat dikatakan, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Lamongan selama 4 tahun terakhir berjalan secara efisien.

2. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis prorposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja tersaji pada grafik di bawah ini:



Gambar III. 6 Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

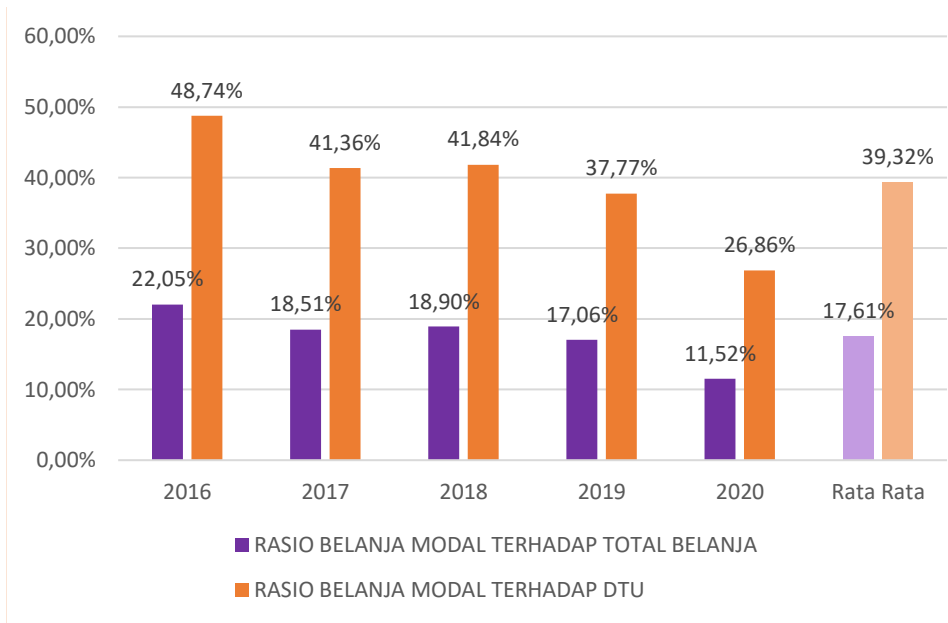
Tren rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja cenderung fluktuatif. Dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja, pemerintah Kabupaten Lamongan lebih banyak dalam bentuk belanja tidak langsung, di mana rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 62,90%, artinya Pemerintah Kabupaten Lamongan hingga saat ini lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan secara langsung. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan program dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah

3. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Dana Transfer Umum

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi

kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hal tersebut diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016.

Adapun rasio belanja modal terhadap total belanja, maupun terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar III. 7 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2020
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

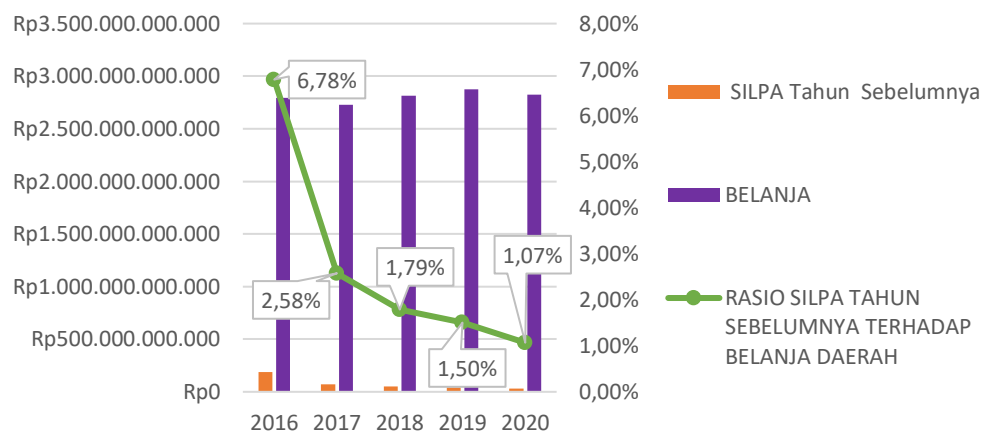
Rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Lamongan cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Namun puncak rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Lamongan terjadi pada tahun 2016, di mana rasionya sebesar 22,05%. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa besar belanja yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan termasuk infrastruktur juga semakin besar. Realisasi belanja modal akan memiliki imbas secara tidak langsung dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bila melihat secara lebih lengkap, nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 - 2020 telah berada di atas ketentuan yang ditetapkan (25%), dengan rata-rata sebesar 39,32%. Pada tahun 2016 nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) Kabupaten Lamongan sebesar 48,74%, nilai rasio belanja modal

terhadap DAU tertinggi yang dicapai Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun terakhir.

4. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar III. 8 Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Data pada grafik di atas menggambarkan tren rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga 2020, di mana nilai rasionya cenderung menurun. Pada tahun 2016 mencapai rasio 6,78%, tahun tersebut merupakan tahun dengan rasio SiLPA tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir (2016-2020), dan kemudian menalami penurunan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai rasio sebesar 1,07% di tahun 2020. Rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah pada tahun menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyerapan SILPA tahun sebelumnya sebagai modal belanja di tahun yang berlaku. Silpa yang terlampau besar mengindikasikan adanya ketidak efektifan penyerapan dana. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Jika kondisinya demikian maka pada tahun-tahun mendatang diperlukan manajemen belanja daerah yang baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

5. Pengeluaran Wajib Mengikat

Pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif. Untuk melihat proporsi secara historis atas belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel III.12 dibawah yang menunjukkan total belanja yang wajib untuk di *spend* untuk membiayai aktivitas aparatur. Nilai rata-rata proporsi belanja aparatur Kabupaten Lamongan di tahun 2016-2020 berkisar rata-rata 55,19%. Angka ini cukup ideal mengingat komponen belanja yang dapat digunakan untuk membiayai belanja dan beban-beban pada angka 44,81%. Tentu strategi yang menjadi prioritas adalah efisiensi pada sektor-sektor pengeluaran wajib untuk dapat meningkatkan jumlah belanja diluar proporsi belanja aparatur.

Tabel III.12 Analisis Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	1.759.838.818.068,00	2.862.804.231.891,17	61,47%
2	Tahun Anggaran 2017	1.566.548.142.410,06	2.762.139.182.635,60	56,72%
3	Tahun Anggaran 2018	1.585.073.739.282,04	2.842.370.872.928,02	55,77%
4	Tahun Anggaran 2019	1.546.398.773.266,49	2.899.237.218.177,60	53,34%
5	Tahun Anggaran 2020	1.377.336.910.067,41	2.830.012.926.114,77	48,67%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Kemudian untuk melihat pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel III.13. Pada tahun 2017 total pengeluaran belanja wajib dan mengikat mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 pengeluaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1.000.079.286.234,00. Pada tahun 2020 pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali mengalami penurunan hingga Rp 796.569.547.510,00. Pengeluaran terbesar terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan, sedangkan pengeluaran paling sedikit terdapat pada Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasi KDH/ WKDH. Adapun pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sampai 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.13 Belanja Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Lamongan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.002.771.052.054,00	864.002.540.869,00	837.983.287.264,00	798.878.609.637,00	794.102.048.995,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasi KDH/WKDH	4.644.920.000,00	6.289.320.000,00	11.944.620.000,00	11.186.100.000,00	953.120.000,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	1.595.199.501,00	1.590.394.800,00	1.681.968.970,00	1.721.683.488,00	1.514.378.515,00
B	Pengeluaran Pembiayaan					
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	56.160.000,00	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	1.009.067.331.555,00	871.882.255.669,00	1.000.079.286.234,00	811.786.393.125,00	796.569.547.510,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah awal yang dilaksanakan terkait dengan analisis tersebut adalah membuat tabel Penutup Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Berdasarkan pada hasil perhitungan selama tahun 2016 hingga 2020, defisit riil terjadi pada tahun 2016 sebanyak Rp 143,773,026,134.33, pada tahun 2020 jumlah defisitnya tercatat surplus Rp 8,259,285,667.72. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi pengeluaran yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menutup defisit riil pada tahun tersebut, secara umum Pemerintah Kabupaten Lamongan menggunakan realisasi penerimaan pembiayaan yang didalamnya meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Bahkan nilai dari realisasi penerimaan pembiayaan tersebut lebih besar, sehingga menghasilkan Sisa lebih pembiayaan anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp 70,312,375,480.29 dan pada tahun 2020 nilai SilPA nya adalah Rp 51,424,446,606.49

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamongan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.719.031.205.757	2.716.042.671.045	2.811.062.543.333	2.864.496.711.417	2.838.272.211.782
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.796.049.237.223	2.729.589.182.636	2.813.870.872.928	2.875.512.218.178	2.823.137.926.115
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	66.754.994.669	32.550.000.000	28.500.000.000	23.725.000.000	6.875.000.000
	Defisit riil	- 143.773.026.134	- 46.096.511.591	- 31.308.329.595	-34.740.506.761	8.259.285.668

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020, Data Diolah

Berdasarkan Tabel III.14, defisit riil anggaran Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp 143.773.026.134 dan pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp 8.259.285.668. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki pengelolaan pengeluaran dan penerimaan yang hampir menyentuh titik equilibrium (*e*) atau dengan kata lain realisasi antara pendapatan dan belanja dinilai berimbang. Sedangkan Komposisi penutup defisit riil anggaran dan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada Tabel III.15 dan Tabel III.16.

Tabel III.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No	Uraian	Proporsi dari total Defisit Riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	132%	153%	161%	124%	365%
2	Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0%	0%	0%	0%	0%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0%	57%	0%	0%	0%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
6	Penerimaan Piutang Daerah	17%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Tabel III.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Jumlah SiLPA	Rp 74.644.463.889		Rp 64.912.753.267		Rp 43.196.860.938	
2	Pelampauan Penerumaan PAD	- 59.064.813.172,32	-79%	- 45.165.888.741,14	-70%	- 1.830.712.717,00	-4%
3	Pelampauan dana Perimbangan	- 6.052.538.425,00	-8%	- 75.780.879.142,00	-	- 133.821.717.816,48	-
4	Pelampauan Penerimaan	- 93.374.265.905,32	-125%	- 133.301.985.769,14	-	- 136.642.481.901,56	-
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat Lainnya	136.612.400.199,83	183%	163.122.613.302,91	378%	188.349.014.076,05	436%
6	Kewajiban Kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0%		0%	20.034.768.322,43	46%
7	Kegiatan lanjutan		0%		0%		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.3 Kerangka Pendanaan

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 hingga 2026. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis *trend* yang didasarkan pada data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan dimasa lalu, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Lamongan diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 hingga 2026, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah *trend* dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis *trend* data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja. Selain menggunakan pertimbangan hasil *trend*, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan perilaku belanja di Kabupaten Lamongan, kebijakan terkait dengan belanja daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi.

Berikut merupakan hasil proyeksi pendapatan, belanja serta Pembiayaan Kabupaten Lamongan 2022-2026 :

Tabel III.17 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	RKPD	Proyeksi				Pertumbuhan
		2022	2023	2024	2025	2026	%
1	PENDAPATAN	Rp 2.901.059.658.100	Rp 2.960.591.239.847	Rp 2.996.474.338.861	Rp 3.033.772.758.552	Rp 3.072.553.416.796	1,45%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 500.025.875.000	Rp 524.325.802.349	Rp 549.834.119.726	Rp 576.611.184.407	Rp 604.720.370.944	4,87%
1.1.1.	Pajak daerah	Rp 145.816.000.000	Rp 153.106.800.000	Rp 160.762.140.000	Rp 168.800.247.000	Rp 177.240.259.350	5,00%
1.1.2.	Retribusi daerah	Rp 17.283.225.000	Rp 17.446.019.849	Rp 17.610.348.101	Rp 17.776.224.201	Rp 17.943.662.727	0,94%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	Rp 27.650.000.000	Rp 29.032.500.000	Rp 30.484.125.000	Rp 32.008.331.250	Rp 33.608.747.813	5,00%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp 309.276.650.000	Rp 324.740.482.500	Rp 340.977.506.625	Rp 358.026.381.956	Rp 375.927.701.054	5,00%
1.2	Pendapatan Transfer	Rp 2.296.536.067.000	Rp 2.331.767.721.398	Rp 2.342.142.503.035	Rp 2.352.663.858.044	Rp 2.363.335.329.752	0,72%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	Rp 2.094.786.067.000	Rp 2.102.994.481.850	Rp 2.111.324.104.269	Rp 2.119.778.142.914	Rp 2.128.359.901.063	0,40%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp 1.691.927.051.000	Rp 1.698.296.170.770	Rp 1.704.777.301.633	Rp 1.711.373.606.266	Rp 1.718.088.341.731	0,38%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	Rp 116.470.659.000	Rp 119.964.778.770	Rp 123.563.722.133	Rp 127.270.633.797	Rp 131.088.752.811	3,00%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 1.150.000.000.000	Rp 1.152.875.000.000	Rp 1.155.757.187.500	Rp 1.158.646.580.469	Rp 1.161.543.196.920	0,25%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 425.456.392.000	Rp 425.456.392.000	Rp 425.456.392.000	Rp 425.456.392.000	Rp 425.456.392.000	0,00%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	Rp 35.000.000.000	Rp 35.000.000.000	Rp 35.000.000.000	Rp 35.000.000.000	Rp 35.000.000.000	0,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1.2.1.4	Dana Keistimewaan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1.2.1.5	Dana Desa	Rp 367.859.016.000	Rp 369.698.311.080	Rp 371.546.802.635	Rp 373.404.536.649	Rp 375.271.559.332	0,50%
1.2.1.6	Dana Penyesuaian		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	Rp 201.750.000.000	Rp 228.773.239.548	Rp 230.818.398.766	Rp 232.885.715.130	Rp 234.975.428.689	4,02%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 186.750.000.000	Rp 188.773.239.548	Rp 190.818.398.766	Rp 192.885.715.130	Rp 194.975.428.689	1,08%

No.	Uraian	RKPD	Proyeksi				Pertumbuhan
		2022	2023	2024	2025	2026	%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Rp 15.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000	41,67%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	0,00%
1.3.1	Hibah	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	Rp 104.497.716.100	0,00%
1.3.2	Dana darurat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1.3.3	Lain-lain pendapatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	BELANJA	Rp 3.183.559.658.100	Rp 2.903.798.612.466	Rp 2.939.001.585.416	Rp 2.975.663.080.253	Rp 3.013.847.270.740	-1,26%
2.1	Belanja Operasi	Rp 1.853.157.605.465	Rp 1.877.602.797.948	Rp 1.911.092.135.683	Rp 1.918.062.329.315	Rp 1.946.603.642.035	1,24%
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 932.796.384.750	Rp 949.849.756.334	Rp 950.672.878.288	Rp 979.643.789.266	Rp 1.002.453.070.847	1,82%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 718.509.950.051	Rp 720.940.242.815	Rp 722.940.242.817	Rp 730.241.176.924	Rp 735.241.176.928	0,58%
2.1.3	Belanja Bunga	Rp 28.000.000.000	Rp 28.000.000.000	Rp 28.000.000.000	Rp 28.000.000.000	Rp 28.000.000.000	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	Rp -					
2.1.5	Belanja Hibah	Rp 162.123.103.664	Rp 165.000.000.000	Rp 195.000.000.000	Rp 165.000.000.000	Rp 165.000.000.000	1,14%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp 11.728.167.000	Rp 13.812.798.799	Rp 14.479.014.578	Rp 15.177.363.125	Rp 15.909.394.260	8,06%
2.2	Belanja Modal	Rp 771.456.314.885	Rp 452.612.604.375	Rp 453.047.668.124	Rp 479.401.206.542	Rp 485.644.842.991	-8,53%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-	
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp 20.000.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000	-6,25%
2.4	Belanja Transfer	Rp 538.945.737.750	Rp 558.583.210.142	Rp 559.861.781.609	Rp 563.199.544.395	Rp 566.598.785.713	1,27%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp 18.961.299.527	Rp 17.055.281.985	Rp 17.837.248.810	Rp 18.657.647.120	Rp 19.518.392.208	0,94%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 519.984.438.223	Rp 541.527.928.157	Rp 542.024.532.799	Rp 544.541.897.275	Rp 547.080.393.505	1,29%
3	PEMBIAYAAN	Rp 282.500.000.000	-Rp 56.792.627.380	-Rp 57.472.753.444	-Rp 58.109.678.298	-Rp 58.706.146.056	-29,19%

No.	Uraian	RKPD	Proyeksi				Pertumbuhan %
		2022	2023	2024	2025	2026	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 355.000.000.000	Rp 15.707.372.620	Rp 15.027.246.556	Rp 14.390.321.702	Rp 13.793.853.944	-27,07%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	0,00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 350.000.000.000	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah		-	-	-	-	
3.1.7	Penerimaan Pembiayaan lainnya		Rp 10.707.372.620	Rp 10.027.246.556	Rp 9.390.321.702	Rp 8.793.853.944	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	0,00%
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 70.000.000.000	Rp 70.000.000.000	Rp 70.000.000.000	Rp 70.000.000.000	Rp 70.000.000.000	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	0,00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-		-	Rp -	Rp -	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Tahun Periode Perencanaan

Hasil proyeksi pendapatan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah diperkirakan sebesar 1,45%, dimana pada tahun 2022 jumlah pendapatan daerah Kabupaten Lamongan diperkirakan sebesar Rp 2.901.059.658.100,00 sedangkan pada tahun 2026 mengalami kenaikan sehingga jumlah pendapatan daerah Kabupaten Lamongan menjadi Rp 3.072.553.416.795,93. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87%, pendapatan transfer diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,72%, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan memiliki nilai yang sama setiap tahun dari tahun 2022 - 2026 yaitu sebesar Rp 104.497.716.100,00.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi pada pajak daerah sebesar 5%, retribusi daerah yang diperkirakan sebesar 0,94%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan yang diperkirakan sebesar 5%, dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 5%. Keberadaan jenis pendapatan pajak daerah memiliki pertumbuhan yang tinggi, mengingat masih memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimasa mendatang. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan dampak yang ditimbulkan adanya COVID-19 di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 tetap mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan sehingga jumlah realisasi yang dihasilkan lebih sedikit dari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena tahun 2021 merupakan fase *recovery* sehingga diasumsikan kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 diperkirakan turun tetapi jika realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Bila melihat pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Pemerintah Pusat telah menetapkan asumsi pertumbuhan yang sangat optimis, yaitu sebesar 4,5%-5,5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2021 (triwulan II) mengalami kontraksi sebesar 1,26%, disisi lain pandemi COVID-19 masih terjadi hingga akhir tahun 2021. Sehingga dengan demikian asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 masih memungkinkan untuk terkontraksi berada dibawah 4,5%. Memperhatikan kemungkinan yang terjadi

serta adanya masa *recovery*, maka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026 diproyeksikan memiliki rata-rata dibawah realisasi yang terjadi selama tahun 2016 - 2020 yang mencapai 9,72%.

Posisi Pendapatan Transfer bila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain diperkirakan memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan selama tahun 2022 - 2026 sebesar 0,72%. Tingkat pertumbuhan tersebut dihasilkan antara lain dengan mempertimbangkan jenis sumber pendapatan pada tahun 2020, khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan secara *mandatory* menyampaikan bahwa kebijakan dana transfer DAU akan mengalami resesi dengan skema statis atau minimum sama dengan anggaran DAU yang dianggarkan pada tahun 2020 hal ini disebabkan jatuhnya produktivitas perekonomian dengan kontraksi 2,49% secara nasional yang mengakibatkan tidak tertutupnya pos-pos anggaran sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Melihat atmosfer keresahan DAU yang tidak akan naik dipastikan bahwa pendapatan transfer khususnya Dana Alokasi Umum diproyeksikan akan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dimaksudkan bahwa posisi pesimis digunakan untuk menyikapi pola anggaran yang konsumtif sehingga pada posisi Angka ini ternyata lebih tinggi maka pemerintah daerah perlu untuk memberikan porsi-porsi anggaran kepada sektor strategis lain.

Kemudian untuk menyikapi Jenis pendapatan transfer, berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 - 2026 transfer pemerintah pusat memiliki rata-rata pertumbuhan diperkirakan sebesar 0,4% dan transfer antar-daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02%. Untuk jenis pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Lamongan diproyeksikan memiliki nilai tetap selama tahun 2022 – 2026 dengan jumlah Rp 104.497.716.100

Bila melihat pada komposisi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026, maka dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar masih diberikan oleh pendapatan transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 78,11%, asumsi pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer hanya sekitar 0.72% dari tahun 2022 - 2026. Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Tahun Periode Perencanaan

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Lamongan diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah *trend* dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis *trend* data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja. Selain menggunakan pertimbangan hasil *trend*, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan perilaku belanja di Kabupaten Lamongan, kebijakan terkait dengan belanja daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi.

Hasil proyeksi belanja daerah Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 - 2026 rata-rata pertumbuhan belanja daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,26%, dimana pada tahun 2022 jumlah proyeksi belanja daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 3.183.559.658.100 sedangkan pada tahun 2026 proyeksi belanja diperkirakan sebesar Rp 3.013.847.270.740,31. Hal itu dikarenakan pada tahun 2022 terdapat tambahan anggaran belanja sebesar Rp 350.000.000.000 yang didapatkan dari pinjaman daerah sehingga mengakibatkan jumlah belanja awal memiliki jumlah paling tinggi dibanding belanja di tahun 2023-2026. Bila mana kita hitung per tahun maka terdapat penurunan total belanja yang cukup signifikan antara tahun 2022 menuju tahun 2023 dengan nilai pertumbuhan -8,79%. Namun untuk tahun 2023 hingga tahun-tahun selanjutnya nilai total belanja daerah mengalami peningkatan.

Pada jenis belanja daerah yang dikelola, belanja operasi pada tahun 2022 - 2026 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,24% sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja modal diperkirakan mengalami penurunan sebesar 8,53%. Penurunan yang terjadi adalah akumulasi tambahan pinjaman yang dijadikan belanja modal infrastruktur sehingga nilai total belanja menjadi lebih tinggi dari tahun-tahun lain. Adapun pos belanja transfer diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28% dari tahun 2022 hingga 2026. Pada pos belanja operasi, belanja pegawai diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,24%, dimana proyeksi pertumbuhan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji berkala dalam setiap tahun, di mana penganggaran belanja

pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Untuk belanja barang dan jasa, hibah, serta belanja bantuan sosial diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 0,58%, 1,14% dan 8,06%. Berdasarkan pola penggunaan keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 dalam pencatatan belanja daerah tidak tercatat penggunaan dana tidak terduga meski dalam pandemi. Disebabkan pos penggunaan dana dialihkan ke pos belanja yang lain sehingga belanja tidak terduga tercatat Rp 0,-

Belanja transfer pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 2,03% dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan komponen belanja bagi hasil sebesar 0,94%. Proyeksi terhadap belanja bagi hasil dilakukan dengan memperhatikan ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan untuk komponen belanja bantuan keuangan diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,08%, yang proyeksi jumlah belanjanya disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari dana perimbangan (selain DAK) dan kenaikan dana parpol berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018. Pada belanja modal perkirakan rata-rata pertumbuhan berada di angka -8,99%. Bila dibandingkan dengan rata-rata realisasi pada tahun 2016 hingga 2020, secara umum Belanja Modal Kabupaten Lamongan mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami tren penurunan dimana nilainya 616,499,721,973.00 pada tahun 2016 dan menjadi 325,359,777,833.41 pada tahun 2020 dengan rata-rata penurunan sebesar -13.56%. hal ini tidak baik bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Lamongan menyangkut aset-aset induk.

Kaidah yang perlu diperhatikan dalam menjaga anggaran belanja yang ideal dan bersifat efektif efisien ialah melihat proporsi anggaran belanja modal yang nilainya semakin meningkat, dimaksudkan belanja yang di spend nantinya dalam pembangunan ialah bersifat riil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga treatment yang perlu diproyeksikan ialah menjaga bahwa standar belanja langsung modal adalah setidaknya <25% dari total dana perimbangan.

Melihat pada komposisi hasil proyeksi masing-masing jenis belanja pada tahun 2022 hingga 2026 dapat diketahui bahwa belanja operasi memiliki proporsi rata-rata sebesar 63,48% dari keseluruhan total belanja, sedangkan proporsi untuk modal sebesar 16,93% dan belanja transfer sebesar 18,64%.

Adapun belanja tidak terduga menjadi komponen dengan rata-rata proporsi terkecil yang diproyeksikan selama 5 tahun ke depan, yaitu sebesar 0,94%. Melihat kecenderungan komposisi belanja Kabupaten Lamongan secara umum masih banyak pada belanja operasi. Komposisi belanja langsung terhadap total belanja selama 5 tahun kedepan diproyeksikan memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dengan nilai proporsi belanja modal ialah diatas >26,58% terhadap Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung yang lebih besar kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk belanja pegawai (pada belanja operasi diproyeksikan memiliki proporsi rata-rata sebesar 32,71% atau telah jauh berada di bawah 50% dibandingkan dengan realisasi yang terjadi selama 5 tahun terakhir yang mencapai 38,3% (Selengkapnya lihat tabel 3.19). Kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada UU APBN, dimana proporsi belanja pegawai tidak boleh melebihi 50% dari APBD.

3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan diperlukan untuk melakukan penutupan anggaran yang dimungkinkan defisit terhadap penutupan belanja yang tidak dapat dicover oleh pendapatan. Adapun dalam pembiayaan terdapat pengeluaran pembiayaan yang dapat bersifat rutin maupun insidental yang tidak dapat dimasukkan kedalam komponen belanja atau pendapatan dan tercatat dalam pembukuan neraca.

Berdasarkan proyeksi pembiayaan Kabupaten Lamongan tahun 2022-2026. Melihat dari pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2022 jumlah pembiayaan sebesar Rp282.500.000.000. Angka pembiayaan ditahun ini relatif tinggi yang disebabkan adanya tambahan penerimaan pembiayaan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 350.000.000.000,-. Dalam upaya membiayai pembangunan program visi dan misi kepala daerah dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah yang relatif rendah Pemerintah Kabupaten Lamongan berinisiatif untuk melakukan alternatif pembiayaan melalui mekanisme hutang. Sedianya, alternatif hutang tersebut efektif dapat digunakan pada tahun 2022 dan pembayaran tenor cicilan hingga tahun 2026 dan dengan tingkat bunga 8%/tahun. Dengan demikian nilai cicilan hutang pokok dibayarkan efektif di tahun 2022 sebesar Rp 70.000.000.000,- beserta beban belanja bunga sebesar Rp 28.000.000.000,-.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan Pilkada pada tahun 2024 tentu menjadi poin tersendiri dalam upaya penganggaran kedepan. Kabupaten Lamongan memilih untuk membentuk anggaran yang dapat dihibahkan terhadap program dalam mendukung pelaksanaan pilkada tanpa mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan melalui Perda. Sehingga akan memudahkan dalam proses pembentukan anggaran program.

Komponen penyebab minusnya pembiayaan disebabkan oleh pos pengeluaran pembiayaan yakni pembayaran cicilan utang pokok atas perencanaan pinjaman dengan mekanisme pembiayaan yang memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Manajemen Kas. Penyertaan modal secara konstan ditargetkan untuk menyuntikan dana kepada BUMD Kabupaten Lamongan dan diharapkan dapat memberikan *feedback* terhadap pembiayaan anggaran Kabupaten Lamongan ke depan

3.3.1.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menciptakan pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Lamongan pada masa pandemi COVID-19 perlu memperhatikan arahan dari pemerintah pusat. Penggunaan APBN untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditujukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Arahan kebijakan nasional yakni :

1. Mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya yang efisien, melalui:
 - a. Penguatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian sumber perpajakan baru.
 - b. Penghapusan Retribusi terkait pelayanan wajib
 - c. Dukungan dalam mendorong kemudahan berusaha
2. Mengembangkan hubungan keuangan pusat dan pemerintah daerah dalam meminimilisir ketimpangan vertikal dan horizontal, melalui:
 - a. Redesain transfer ke Daerah TKD untuk mengurangi ketimpangan, memberikan kepastian kepada daerah, memperkuat tata kelola dan kinerja layanan
 - b. Perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali untuk mendorong pembangunan infrastruktur
 - c. Penerapan skema sinergi pendanaan agar fokus pada penyelesaian program strategis
3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui kebijakan transfer ke daerah, melalui:
 - a. Pengelolaan TKD berbasis kinerja
 - b. TKD digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
 - c. Pengendalian disiplin belanja daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap input, proses, *output* dan *outcome*
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal melalui:
 - a. Penyelarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah
 - b. Mewujudkan sharing *responsibility* pusat dan daerah

- c. Pengendalian defisit APBD
- d. *Refocusing* APBD dalam kondisi tertentu
- e. Penguatan sistem informasi fiskal pusat dan daerah

Sementara Kabupaten Lamongan memiliki arah kebijakan pengelolaan anggaran yang dinamis memperhatikan postur ideal dengan prinsip *prudent* (kehatian-hatian).

1. Penguatan Kedaulatan Penganggaran dari PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Potensi, exit plan yang diharapkan adalah mengkaji ulang Potential Loss yang terjadi baik dari sektor pajak maupun retribusi. Dari sisi retribusi jaga harus mempertimbangkan kebijakan nasional bahwa tidak ada pungutan retribusi bagi pelayanan yang bersifat wajib. Dari sisi pajak me redesign sistem pemungutan pajak dan kaji ulang objek-objek potensial pajak
2. Mencari Alternatif pembiayaan non mainstream seperti Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus yang spesifik pada DAK Fisik terutama pada proyek-proyek major Nasional RPJMN, pemberdayaan Sosial Masyarakat melalui pendanaan CSR maupun membentuk skema hutang serta mandat pembentukan BLUD,
3. Belanja Daerah (*government Spending*) diarahkan untuk belanja didalam daerah Kabupaten Lamongan (affirmasi lokal) dengan maksud meningkatkan gairah perputaran uang. Exit plan tersebut merupakan kebijakan umum yang diterapkan untuk mempercepat perdagangan dan stabilisasi ekonomi
4. Pembelanjaan dana cadangan memperhatikan keseimbangan dengan belanja prioritas daerah
5. Prioritas pembelanjaan dimulai pada tribulan sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan
6. Orientasi percepatan belanja modal diarahkan pada pembelanjaan modal produktif. Orientasi belanja modal lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur penghubung serta pemberian insentif modal kepada pelaku usaha

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 lima tahun kedepan paruh waktu transisi. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total

penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 hingga 2026. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp 1.301.306.334.801. Pada tahun 2023 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan diproyeksikan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai sebesar Rp 1.660.082.626.531. Pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp 1.663.585.874.550 dan pada tahun 2025 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan diproyeksikan mencapai Rp 1.700.494.644.490. Pada tahun 2026 kapasitas Riil tumbuh sebesar Rp 1.728.900.393.832. Pada posisi tahun 2023 ini diharapkan kondisi keadaan perekonomian dan keuangan telah pulih 100%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.18 Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2022-2026

Uraian	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	Rp 2.901.059.658.100	Rp 2.960.591.239.847	Rp 2.996.474.338.861	Rp 3.033.772.758.552	Rp 3.072.553.416.796
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Total Penerimaan	Rp 2.906.059.658.100	Rp 2.965.591.239.847	Rp 3.001.474.338.861	Rp 3.038.772.758.552	Rp 3.077.553.416.796
Belanja Tidak Langsung (Belanja – (Belanja Modal + Belanja Barang dan Jasa)	Rp 1.532.253.323.299	Rp 1.233.008.613.316	Rp 1.265.388.464.311	Rp 1.265.778.114.062	Rp 1.276.153.022.964
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000
Total Pengeluaran	Rp 1.604.753.323.299	Rp 1.305.508.613.316	Rp 1.337.888.464.311	Rp 1.338.278.114.062	Rp 1.348.653.022.964
Kapasitas riil	Rp 1.301.306.334.801	Rp 1.660.082.626.531	Rp 1.663.585.874.550	Rp 1.700.494.644.490	Rp 1.728.900.393.832

Selanjutnya apabila telah diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka proses adalah memastikan alokasi anggaran kedalam prioritas program yang terbagi atas program dibagi atas prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Secara ideal pembagian Program prioritas disusun dengan menghitung total kapasitas riil dengan asumsi bahwa total belanja daerah harus memisahkan kebutuhan belanja wajib dan mengikat seperti gaji dan operasional sehingga kapasitas riil merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja program pembangunan. Berdasarkan amanat Permendagri 86 tahun 2017 kapasitas riil adalah mengurangi pendapatan dengan belanja-belanja bersifat tidak langsung dengan masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 dan pada saat ini telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019. Sehingga perubahan mendasar pada perhitungan kapasitas riil sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 86 tahun 2017 menjadi tidak relevan. Dalam kondisi demikian maka kondisi yang paling mendekati penggunaan kapasitas riil adalah menggunakan total kapasitass belanja dalam alokasi Program Prioritas I yang mengakomodir Belanja Operasional termasuk Gaji serta Program Pelayanan Dasar atau SPM, Program Prioritas II sebagai program atas Visi-Misi Kepala Daerah dan Program Prioritas III sebagai program pendukung. Mengingat rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah bersifat sangat konsensus dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan politis maka perlu dipastikan program-program yang masuk dan dikategorikan kedalam program prioritas kepala daerah, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar serta pelaksanaan urusan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Kabupaten Lamongan 2022-2026

Uraian	Proyeksi Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kapasitas Riil	1.301.306.334.801	1.660.082.626.531	1.663.585.874.550	1.700.494.644.490	1.728.900.393.832
Prioritas I	2.365.406.898.054	2,094,348,708,978	2,119,732,215,331	2,146,165,276,056	2,173,700,576,548
Prioritas II	704.691.427.155	696,325,230,957	704,773,626,523	713,574,298,712	722,735,890,132
Prioritas III	113.461.332.891	113,124,672,531	114,495,743,562	115,923,505,485	117,410,804,060



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual serta memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan dapat diketahui dengan pendekatan “*gap expectation*” yaitu membandingkan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada saat dokumen perencanaan dibuat. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II) dan Keuangan Daerah (Bab III). Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan pada umumnya timbul karena potensi dan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan peluang yang tidak dimanfaatkan. Adapun permasalahan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung stagnan. Disisi yang lain pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata provinsi dan belum merata.
2. Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
3. Rata-rata lama sekolah mengalami stagnasi dan belum mencapai target wajib belajar 9 tahun.
4. Perlu penurunan Angka Kematian Balita dan Ibu, kasus balita stuntin dan gizi buruk serta penanganan penyakit yang menular dan tidak menular.
5. Belum semua jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
6. Belum optimalnya ketersediaan air baku dan akses layanan air bersih.
7. Masih terdapat kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
8. Masih adanya pelanggaran perda dan kejadian konflik sosial.
9. Terdapatnya wilayah yang rawan bencana banjir dan kekeringan.
10. Masih tingginya Angka pengangguran terbuka (TPT)
11. Adanya penurunan produksi tanaman pangan, terutama komoditas jagung dan kedelai, demikian pula untuk komoditas perkebunan terutama tebu.
12. Kesejahteraan petani mengalami stagnasi.
13. Rendahnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) serta masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
14. Masih minimnya desa yang berkategori mandiri.
15. Belum optimalnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

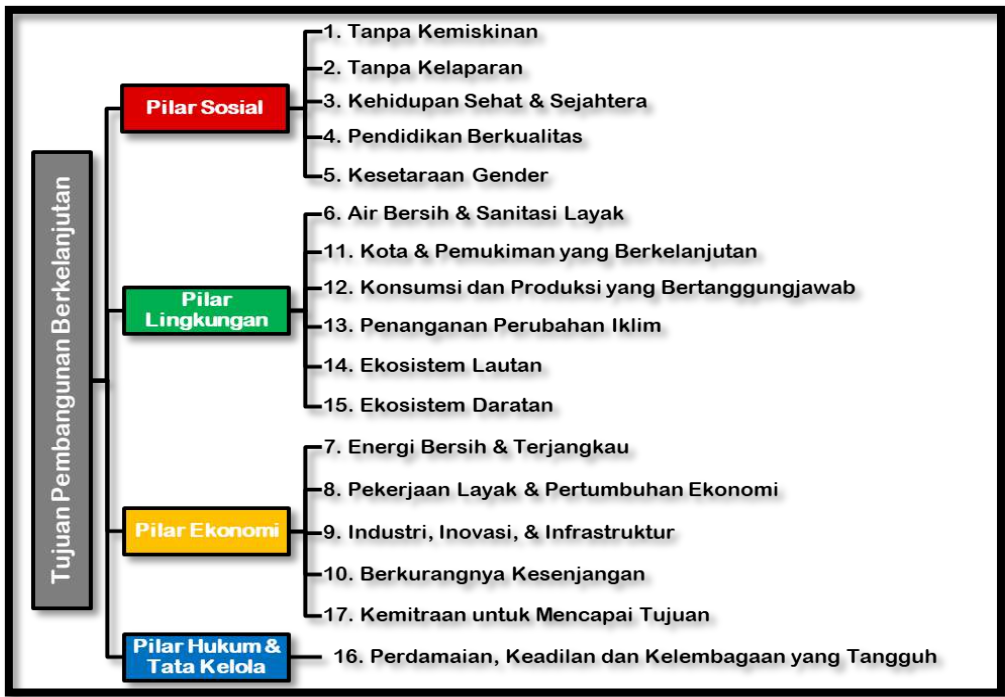
16. Belum semua situs, seni dan budaya terlestarikan serta pengembangan kepariwisataan.
17. Pertumbuhan lapangan usaha perindustrian dan perdagangan kecenderungannya mengalami penurunan. Serta adanya penurunan aksesibilitas usaha mikro terhadap modal usaha pada lembaga keuangan.
18. Realisasi Investasi Fluktuatif
19. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.2. Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDG’S)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, telah menetapkan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan. Tujuan SDG’s memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal serta bisa tercapai pada tahun 2030. Konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar IV.1 Pilar Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Upaya global selama ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) pada tahun 2030 akan terganggu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada

awal tahun 2020 telah menimbulkan krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan laporan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masyarakat dunia dengan kategori miskin yang paling rentan terkena dampak pandemi Covid-19 paling parah. Adanya pandemi COVID-19 yang persebarannya sangat cepat, tidak hanya menjadi krisis di bidang sosial khususnya kesehatan namun juga menyebabkan krisis disemua lini termasuk ekonomi.

Terlepas dari adanya pandemic Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, komitmen atas Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 mengatur perlunya menghubungkan target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD ini, pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan capaian SDGs sebagai bahan pertimbangan untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs dan merumuskan isu strategis RPJMD tahun 2021-2026.

Merujuk pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2021-2026 dapat dianalisis bahwa berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (cross cutting), TPB yang relevan untuk Kabupaten Lamongan sebanyak 16 (enam belas) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan. Sedangkan untuk indikator, hanya 211 indikator yang relevan dari 220 (dua ratus dua puluh) indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten yakni pilar sosial sebanyak 96 indikator, pilar ekonomi sebanyak 56 indikator, pilar lingkungan sebanyak 38 indikator, dan pilar hukum dan tata kelola sebanyak 21 indikator. Berikut merupakan capaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan yang dirumpunkan dari 17 tujuan:

**TABEL IV.1 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 KABUPATEN LAMONGAN 2016-2020**

NO	NAMA TUJUAN	Sudah dilaksanakan dan Telah mencapai target	Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target	Tidak ada Data	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	7	15	0	2	24
2	Tanpa Kelaparan	4	4	0	3	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10	19	0	5	34
4	Pendidikan Berkualitas	5	7	0	1	13
5	Kesetaraan Gender	5	7	0	2	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	10	1	1	16
7	Menjamin akses energi	0	0	2	0	2
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0	16	1	2	19
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	8	1	0	12
10	Berkurangnya Kesenjangan	1	5	0	2	8
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	3	5	3	0	11
12	Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	0	2	2	1	5

NO	NAMA TUJUAN	Sudah dilaksanakan dan Telah mencapai target	Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target	Tidak ada Data	Jumlah Indikator
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1	0	0	2
14	Ekosistem Lautan	Bukan kewenangan kabupaten				
15	Ekosistem daratan	1	3	0	0	4
16	Perdamaian Keadilan Kelembagaan	7	9	3	2	21
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	3	12	0	0	15
TOTAL		54	123	13	21	211

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2021-2026

Data di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator pembangunan berkelanjutan jika disandingkan dengan target pada Perpres No 59/2017 masih terdapat *gap expectation* yang relatif tinggi. Salah satu penyebab gap tersebut yakni kurangnya ketersediaan data yang bisa menjawab indikator SDG`s. Dari total data yang tersedia, hanya 54 indikator atau 26% indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 123 indikator atau 58%, dan yang benar-benar belum dilaksanakan yakni 13 indikator atau 6%. Sedangkan yang tidak ada datanya sehingga tidak bisa diukur gap capainnya yakni 21 indikator atau 10%. Untuk itu tantangan kedepan Kabupaten Lamongan terhadap capaian SDG`s yang paling utama adalah mencukup kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai. Sehingga perlu adanya komitmen agar SDGs diarus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Selain rangka mencapai target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan juga perlu adanya dukungan dan kerjasama antar *stakeholder* pembangunan.

4.2.2 Isu Nasional

4.2.2.1 Percepatan Perekonomian Jawa Timur dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Jawa Timur. Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur yang di dalamnya terdapat Kawasan Gerbang Kertasusila dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kertasusila Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertasusila merupakan rencana jangka menengah dengan jangka

waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2020 - 2024. Sedangkan untuk pembiayaan direncanakan bersumber dari beberapa skema antara lain: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; (c) Badan Usaha Milik Negara; (d) Badan Usaha Milik Daerah; (e) Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; (f) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA); (g) Swasta; dan (h) Sumber pembiayaan lain yang sah.

Dalam rangka mendukung realisasi Rencana Induk Pembangunan Kawasan Gerbang Kertasusila, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan memberikan fasilitas khusus pada program/ proyek yang termasuk dalam daftar program/ proyek yang terdapat pada lampiran dokumen ini. Fasilitas yang diberikan keistimewaan dalam perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan tanah, kandungan lokal, debottlenecking, tata ruang, dan jaminan pemerintah.

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Gerbang Kertasusila diproyeksi sebagai Kawasan ekonomi berbasis industri di Jawa Timur yang meliputi pabrik semen, farmasi, industri makanan dan minuman, serta petrokimia. Selain Lamongan pengembangan juga terpusat di sekitar Wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban. Selain itu Lamongan pada saat ini dan yang akan datang juga diproyeksi sebagai lokasi rumah garam yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi garam. Lamongan juga masuk sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP) non logam di Jawa Timur.

Dari sisi infrastruktur, Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan system jaringan jalan nasional, jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan serta bendungan yang mampu untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru. Provinsi Jawa Timur dilalui oleh beberapa jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional, salah satunya adalah Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Provinsi Jawa Timur yang menghubungkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bagian selatan dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Double Track dan Reaktivasi Jalur KA, Pengembangan Pelabuhan Paciran (Lamongan), hal ini tidak terlepas dari letak geografis Kabupaten Lamongan yang berada dikawasan pantai. Adanya pengembangan Pelabuhan Paciran diharapkan dapat menjadi penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan infrastruktur Provinsi Jawa Timur untuk mendukung percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk percepatan pembangunan di Jawa Timur, Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban dengan fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat capital-intensive serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan hub arus barang dan orang. Untuk pengendalian banjir di Lamongan pemerintah akan melakukan upaya pengendalian banjir

di Kali Lamong, dan Sungai Buntung, serta peningkatan kapasitas tampungan floodway. Sedangkan dari sisi sistem perkotaan, Lamongan sebagai bagian dari Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila mempunyai peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Diperlukan kebijakan untuk percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, melalui program/ kegiatan pengembangan infrastruktur seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda - Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo. Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunnya Klaster Migas dan Kondensat, namun selain itu juga terdapat kegiatan ekonomi lain yang dikemas dalam Program Agropolitan/ Minapolitan meliputi: Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan serta Pengembangan Minapolitan Lamongan.

Selain itu di dalam lampiran Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa terdapat prioritas pembangunan Kawasan Gerbangkertosusila, khususnya untuk Kabupaten Lamongan, diantaranya sebagai berikut:

1. Transportasi Publik di Gerbangkertosusila (Surabaya Regional Railways Line)
2. Pembangunan Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder
3. Peningkatan Jalan Raya Gresik
4. Reaktivasi Jalur Kereta Api Tuban (dengan jalur Babat, Tuban, Merakurak, Jenu)
5. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
6. Pengendalian Banjir Kali Lamong
7. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike
8. Pengembangan KI Brondong - Paciran
9. Pengembangan Pelabuhan Paciran
10. Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan
11. Pembangunan Fly Over Simpang Sebidang Kereta Api di Tambakboyo Kabupaten Lamongan (SYC)
12. Pembangunan drainase Jalan Nasional Arteri Primer (Widang Batas Kota Lamongan, JL. Jagung Suprpto, Batas Kota Lamongan Batas Kab. Gresik, JL. P. B. Sudirman)
13. Rehabilitasi Daerah Irigasi Gondang (Kec. Sugio, Kec. Sukodadi, Kec. Kembangbahu, Kec. Lamongan, Kec. Tikung)
14. Pembangunan SPAM Karangbinangun
15. Percepatan penuntasan Saluran primer Daerah Irigasi Bengawan Jero (Lanjutan saluran primer Intake Babat Barrage)

16. Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Jero (Kec. Pucuk, Kec. Maduran, Kec. Karanggeneng, Kec. Kalitengah, Kec. Turi, Kec. Karangbinangun, Kec. Glagah)
17. Peningkatan SPAM Brondong
18. Pembangunan Waduk Pedes Kec. Sambeng dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong
19. Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer / Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik
20. Peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan
21. Pengembangan Minapolitan Lamongan (Pemberdayaan Kelompok Nelayan)

Dukungan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka percepatan realisasi program strategis nasional yang tertuang di dalam Perpres No 80 Tahun 2019 yakni melalui kebijakan kemudahan dan kepastian perizinan, menyediakan kebutuhan dokumen perencanaan dan mengambil diskresi untuk menyelesaikan masalah atau hambatan untuk percepatan pembangunan serta melakukan penyediaan tanah.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun pertama RPJMN tahun 2019-2024 dijalankan tentu berpengaruh terhadap rencana dan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Terkait realisasi kebijakan nasional yakni Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian Jawa Timur yang di dalamnya terdapat program prioritas pembangunan dan pengembangan potensi di Kabupaten Lamongan juga mengalami pelambatan. Dalam rangka meminimalisir dampak pandemi Covid-19 pemerintah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan dibentuknya Gugus Tugas yaitu: (a) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; (b) mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; (d) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan (e) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Gugus tugas nasional dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholder lintas kementerian dan lembaga. Sedangkan untuk Gugus Tugas di daerah, dipimpin oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota. Bahkan dalam perkembangannya Pembentukan Gugus Tugas tidak hanya di lembaga pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan, namun juga dilakukan untuk sektor swasta. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dikarenakan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) di Indonesia cenderung

terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dukungan dari seluruh stakeholder dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Langkah kedua untuk mengatasi dampak covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bersifat extraordinary melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Mei 2020.

Undang-undang tersebut sebagai bentuk Komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Bahkan pemerintah pada bulan Juli 2020 juga membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Dalam Pepres dijelaskan, komite ini dibentuk dengan menimbang sejumlah hal. Salah satunya karena penanganan Covid-19 tak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional. Covid-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan.

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2020 pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar 579,8 T untuk pemulihan bidang kesehatan, memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, memberikan dukungan kepada UMKM dan pembiayaan Korporasi, memberikan insentif usaha dan pajak serta bantuan untuk pelaksanaan program prioritas nasional. Sedangkan pada tahun 2021 anggaran PEN yang dialokasikan oleh pemerintah mengalami peningkatan menjadi 627,9 T yang diperuntukkan pada sektor Kesehatan sebesar 133,1 T, untuk perlindungan sosial masyarakat sebesar 148,7 T, dukungan terhadap UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar 157,6 T, untuk insentif usaha dan pajak sebesar 47,3 T dan untuk program prioritas nasional atau RPJMN sebesar 141,4 T.

Adanya kebijakan PEN diharapkan mampu mencegah terjadinya gelombang Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan menjadi tumbuh kembali, sehingga program-program prioritas nasional di Kabupaten Lamongan dapat direalisasikan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung PEN dan kebangkitan

ekonomi pada masa pandemi pemerintah Kabupaten Lamongan selain memberikan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahraeraan sosial (PPKS) juga membuat kebijakan untuk kebangkitan UMKM, melalui ajakan “*Ayo Beli Produk Lamongan*”. Memberikan bantuan untuk peningkatan produksi dan memfasilitasi perluasan pemasaran bagi produk UMKM serta pemberian bantuan modal usaha. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 hingga tingkat desa terus dilakukan melalui sosialisasi Menjaga jarak, Mencuci tangan, Memakai masker, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas (5M), Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Melakukan vaksinasi pada masyarakat, serta membentuk sekolah tangguh dalam rangka persiapan sistem pembelajaran tatap muka. Pada era adaptasi baru pemerintah juga telah menerapkan sistem pelayanan pulik berbasis digital.

4.2.3 Isu Regional

4.2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Berkaca terhadap beberapa tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada diatas rata-rata Nasional dengan rata-rata capaian diatas 5%. Sebagai orientasi kesejahteraan masyarakat, seharusnya angka tersebut seharusnya juga berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan antar kelas pendapatan yang direpresentasikan melalui indeks gini. Namun dengan adanya pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi. Hal ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global yang sedang melanda dunia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 berdasarkan data dari BPS Jawa Timur kontraksi 2,39 persen karena masih terdampak pandemi virus corona. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 11,16 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,87 persen. Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada PMTB 4,31 persen, diikuti pengeluaran konsumsi pemerintah 3,18 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 0,83 persen. Hal itu disebabkan sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi covid-19 seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta konstruksi. Untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 26,77 persen, diikuti bidang konstruksi sebesar 4,13 persen. Sebaliknya, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori pertambangan dan penggalian yang mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,92 persen. Hal ini dipicu oleh permintaan komoditas pertambangan seiring pulihnya ekonomi beberapa negara. Sehingga permintaan ekspor migas ke luar negeri meningkat 99 persen.

Secara keseluruhan penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yakni jasa Pendidikan 0,11%, Pertanian 0,09% dan pengadaan air 0%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 terkontraksi 2,39% dan sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,57%. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah -2,65%, Jawa Barat -2,44%, Banten -3,38% dan DI Yogyakarta -2,69 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih baik, namun jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang pertumbuhan ekonominya -2,36 posisi Jawa Timur terkontraksi lebih dalam.

Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur yang mengalami Peningkatan dari 0,402 (2016) ke 0,416 (2017). Kemudian Turun di Tahun 2018 (0,317) dan pada tahun 2019 (0,364) serta tidak mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni tetap berada di angka (0,364) dan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini nasional pada tahun 2020 yakni 0,385. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir efektif dalam menurunkan kesenjangan di Jawa Timur.

Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur dalam 5 Tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengangguran sebesar 839.904 dengan TPT 4,21. Tahun 2017 jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 839.280 dengan TPT 4, tahun 2018 meningkat menjadi 840.000 orang yang menganggur, namun TPT nya menurun menjadi 3,99. Pada tahun 2019 jumlah orang menganggur mengalami peningkatan sebesar 850.000 dengan TPT yang hanya 3,85. Pada tahun 2020 dikarenakan dampak adanya pandemic covid-19 dan pertumbuhan ekonomi global sedang terkontraksi maka angka TPT Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni mencapai 5,84 walaupun jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan menjadi 840.000. Angka capaian kinerja terhadap TPT yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2016-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan angka nasional. Hal ini dikarenakan TPT nasional pada tahun 2020 mencapai 7,07.

Kemiskinan di Jawa Timur jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, maka persentase kemiskinannya mencapai angka 11,09%. Capaian tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Ngawi, Tuban dan Probolinggo yang angka persentase kemiskinannya mencapai angka 15-18%. Sedangkan daerah yang persentase kemiskinannya mencapai 20-22% yakni Sumenep, Bangkalan dan Sampang. Selanjutnya untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 71,71. Namun di Jawa Timur masih terdapat daerah yang capaian IPM nya dibawah 65 atau bisa disebut rendah karena berada di posisi antara 65-60 yakni Kabupaten Lumajang, Bangkalan dan Sampang.

Secara umum, kesimpulan kondisi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan antara pertumbuhan ekonomi, TPT, dan gini ratio memiliki pergerakan yang sama setiap tahunnya. Namun untuk kemiskinan dan IPM pemerintah Provinsi Jawa Timur masih perlu memberikan perhatian

husus kepada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan IPM nya rendah melalui berbagai kebijakan prioritas.

4.2.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan RPJMD. Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD menjelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan hasil analisis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD terdapat isu strategis sebagai berikut:

TABEL IV.2 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis Prioritas KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJMD
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan	1. Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 2. Rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. 3. Rendahnya proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. 4. Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 5. Tingginya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan.	Perlunya Penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1. Tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 2. Tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 3. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 4. Perlunya penurunan kejadian malaria per 1000 orang. 5. Rendahnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. 6. Perlunya penurunan jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 7. Rendahnya jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. 8. Rendahnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). 9. Tingginya persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 10. Tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 11. Tingginya angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 11. Rendahnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 12. Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 13. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 14. Rendahnya proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 15. Rendahnya Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 16. Rendahnya Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Pentingnya Akselerasi Kualitas Layanan Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis Prioritas KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJMD
	17. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 18. Unmet need pelayanan kesehatan. 19. Rendahnya Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 20. Rendahnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 21. Tingginya persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 22. Rendahnya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	1. Rendahnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 2. Rendahnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 3. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 4. Rendahnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 5. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 6. Rendahnya Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 7. Rendahnya Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Pentingnya Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
Tujuan 5 Kestaraan Gender	1. Perlunya peningkatan jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Perlunya penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 3. Perlunya penurunan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 4. Perlunya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 5. Perlunya peningkatan proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 6. Perlunya peningkatan proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 7. Perlunya penurunan unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 8. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 9. Perlunya peningkatan proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Pentingnya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	1. Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2. Rendahnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 3. Rendahnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 4. Rendahnya proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 5. Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6. Rendahnya jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 7. Rendahnya Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 8. Rendahnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. 9. Perlunya peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 10. Rendahnya jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis Prioritas KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJMD
	11. Rendahnya jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 12. Rendahnya yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	
Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	1. Rendahnya laju pertumbuhan PDB per kapita. 2. Rendahnya PDB per kapita. 3. Rendahnya Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 4. Rendahnya proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 5. Rendahnya persentase tenaga kerja formal. 6. Rendahnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 7. Rendahnya persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 8. Rendahnya upah rata-rata per jam pekerja. 9. Tingginya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 10. Tingginya tingkat setengah pengangguran. 11. Rendahnya Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 12. Rendahnya Jumlah wisatawan mancanegara. 13. Rendahnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 14. Rendahnya Jumlah devisa sektor pariwisata. 15. Rendahnya Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	1. Rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 2. Rendahnya Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 3. Tingginya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 4. Rendahnya jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 5. Tingginya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi
Tujuan 12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1. Rendahnya Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 2. Rendahnya Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 3. Rendahnya Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 4. Rendahnya Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 5. Rendahnya Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan
Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	1. Perlunya peningkatan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 2. Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 3. Rendahnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 4. Rendahnya Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. 5. Rendahnya proporsi penduduk terlayani mobile broadband 6. Rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet. 7. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 8. Perlunya peningkatan persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. 9. Perlunya peningkatan jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). 10. Perlunya peningkatan persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	1. Masih tingginya derajat ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. 2. Besarnya tuntutan layanan publik yang Responsif dan Adaptif

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil telaah permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja existing, memperhatikan capaian indikator SDG’s untuk pemenuhan target pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan isu strategis prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta hasil consensus atau kesepakatan antar *stakeholder* dan telah melewati forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan serta pembahasan bersama DPRD, maka rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.3 RUMUSAN ISU STRATEGIS RPJMD

No	Rumusan Isu Strategis
1	Tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata
2	Perlunya penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial
3	Pentingnya akselerasi kualitas Layanan Pendidikan bagi Masyarakat
4	Perlunya mengakselerasi kualitas layanan Kesehatan bagi Masyarakat
5	Pentingnya pendidikan karakter sejak dini dalam rangka menguatkan pemahaman nilai-nilai sosial dan keagamaan
6	Pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi
7	Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
8	Pentingnya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas
9	Besarnya tuntutan layanan publik yang Responsif dan Adaptif
10	Masih tingginya derajat ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi

Isu strategis pertama adalah tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata. Kabupaten Lamongan memiliki potensi sektor UMKM dan Pariwisata yang harus terus dikembangkan karena memiliki trend positif. Pemerintah perlu melakukan upaya strategis dalam pengembangannya, seperti memberi stimulan modal, akses pemasaran dan pelatihan. Sedangkan untuk pengembangan potensi pariwisata strategi yang bisa dikembangkan yakni dengan pendekatan pembangunan integratif, holistik dan tematik. Upaya integrasi antara penumbuhan dan pengembangan UMKM dengan pariwisata yakni menumbuhkan ekonomi kreatif. Selain itu Kabupaten Lamongan yang menjadi lumbung pangan provinsi dan nasional perlu mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi dan peningkatan kapasitas petani.

Sektor perdagangan dan industri khususnya industri pengolahan yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatnya nilai ekspor, sehingga harus terus didukung oleh pemerintah, dengan demikian maka kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Disisi lain, pulihnya perekonomian pasca pandemi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, realisasi investasi yang diikuti dengan semakin banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis kedua yakni Perlunya penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus ditangani secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, hal ini mengingat tingkat kemiskinan yang masih mencapai 13,85 persen pada tahun 2020. Salah satu solusi dalam menekan angka kemiskinan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan jaminan sosial khususnya bagi masyarakat kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan sembako, pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat kurang sejahtera. Pendekatan pemberdayaan diharapkan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Dalam melakukan penanganan kemiskinan, pemerintah harus berdasarkan pada data terpadu yang selalu diperbaharui dan terintegrasi dengan data pemerintah daerah, provinsi dan pusat sehingga bantuan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan PPKS dapat tepat sasaran. Oleh karena itu pendampingan dan pengawasan dalam penanganan kemiskinan sangat diperlukan.

Isu strategis ketiga yaitu Pentingnya akselerasi kualitas Layanan Pendidikan bagi Masyarakat. Persoalan pendidikan di Kabupaten Lamongan yang paling utama yakni rendahnya angka rata-rata lama sekolah bahkan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir yakni setara kelas 2 sekolah menengah pertama atau sederajat. Sedangkan harapan lama sekolah masyarakat telah mencapai jenjang Diploma 2. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasana pendidikan melalui standarisasi akreditasi. Pada era adaptasi baru seperti saat ini pemerintah perlu mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran berbasis digital.

Isu strategis ke empat yakni Perlunya mengakselerasi kualitas layanan Kesehatan bagi Masyarakat. Layanan kesehatan sebagai layanan wajib dasar menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pada era

adaptasi baru. Pemerintah perlu mempersiapkan layanan berbasis digital dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melalui program *home care service* dan peningkatan kualitas sarana kesehatan baik dari level rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Disisi yang lain kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu pemerintah juga perlu terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemahaman tentang program keluarga berencana kepada masyarakat.

Isu strategis ke lima yakni Pentingnya pendidikan karakter sejak dini dalam rangka menguatkan pemahaman nilai-nilai sosial dan keagamaan. Hal tersebut menjadi penting karena sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi global (internet) semakin pesat. Keberadaan internet memberi dampak positif dan negatif bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak dan pelajar. Adanya internet dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan memberikan peluang usaha. Namun dampak negatif dari internet antara lain dapat menjadikan penggunaannya lebih tertutup, mengurangi interaksi sosial yang mengakibatkan perubahan pola hubungan masyarakat dan terkikisnya nilai-nilai budaya dan agama. Oleh karena itu diperlukan pemahaman nilai-nilai sosial dan karakter kebangsaan dan peningkatan pengetahuan agama sejak dini.

Isu strategi ke enam yakni Pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat. Infrastruktur bukan sekedar jalan dan jembatan, tetapi juga ketersediaan air baku, kawasan peruntukan industri yang terkoneksi dengan bahan baku dan pasar, sehingga dapat mendorong investasi masuk dan menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu wilayah strategis pembangunan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Lamongan. Dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan, kemudahan, dan konektifitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur.

Isu strategi ke tujuh yakni Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat berimplikasi pada meningkatnya pencemaran lingkungan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam konteks pembangunan berkelanjutan dimana lingkungan merupakan aspek penting. Oleh karena itu perlu strategi dan kebijakan untuk penanganan pencemaran lingkungan. Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana terutama banjir dan kekeringan. Tentunya perlu mitigasi bencana melalui pemetaan kawasan, pembuatan embung, reboisasi dan pembentukan desa tangguh bencana sehingga dapat meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat.

Isu strategi ke delapan yakni Pentingnya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan PPKS lainnya merupakan layanan sosial yang harus disediakan oleh pemerintah. Upaya keberpihakan dalam konteks pemberdayaan ditujukan untuk menstimulasi kemandirian serta kekuatan ekonomi kelompok tersebut. Terkait isu gender, pemerintah diharapkan fokus pada indikator SDG's, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaannya dalam pembangunan. Adapun terkait disabilitas, isu yang paling mendasar adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya penyediaan sarana publik yang ramah difabel. Pemerintah melalui kebijakan strategisnya dan sebagai bentuk perlindungan anak, maka perlu mendukung terwujudnya Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten layak anak (KLA).

Isu strategis ke sembilan yakni Besarnya tuntutan layanan publik yang responsif dan adaptif. Berubahnya perilaku masyarakat dan era adaptasi baru, menuntut pelayanan disektor pemerintahan untuk lebih cepat, efisien dan akuntabel. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh pemerintah yakni memaksimalkan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik sehingga dapat mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Peningkat pelayanan publik perlu dilakukan pada bidang perizinan, kependudukan dan catatan sipil, layanan pendidikan dan kesehatan. Melalui Reformasi Birokrasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ditengah berbagai tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, dengan demikian pemerintah daerah diharuskan lebih responsif dan adaptif untuk menjawab tantangan yang ada. Harapannya kedepan Kabupaten Lamongan dengan potensi yang dimiliki tidak hanya fokus pada digitalisasi pelayanan publik tapi dapat menerapkan dan mengembangkan *smart city*.

Isu strategis ke sepuluh yakni Masih tingginya derajat ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan analisis derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan kabupaten Lamongan pada dana transfer daerah masih tinggi. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya mengalami stagnan. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis untuk penurunan derajat ketergantungan melalui peningkatan PAD. Pemerintah perlu membuat peta dan data terpadu potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan, hal ini diperlukan seiring dengan berkembangnya usaha. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, pemungutan, pengendalian dan pengawasan terhadap wajib pajak. Disamping itu peran BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan melalui pengembangan usaha BUMD dan penambahan modal usaha.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, RPJPD periode ke 4 tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yakni:

VISI TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni



masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Berdasarkan Visi di atas, maka rumusan Misi dalam RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Misi 1 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.”
- Misi 2 “Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.”
- Misi 3 “Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.”
- Misi 4 “Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.”
- Misi 5 “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.”

Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Lamongan, berikut merupakan linieritas antara isu strategis dengan misi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026:

TABEL V.1 LINEARITAS ISU STRATEGIS DENGAN MISI RPJMD KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN 2021-2026

MISI	ISU STRATEGIS
MISI I Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Tingginya Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata
	Perlunya penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial.
MISI II Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Pentingnya akselerasi Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat
	Pentingnya peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan bagi Masyarakat
	Pentingnya pendidikan karakter sejak dini dalam rangka menguatkan pemahaman nilai-nilai sosial dan keagamaan.
MISI III Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	Pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi
	Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan

MISI	ISU STRATEGIS
MISI IV Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.	Pentingnya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas
MISI V Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Besarnya tuntutan layanan publik yang responsif dan adaptif Masih tingginya derajat ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi

Merujuk pada tabel di atas dapat difahami bahwa terdapat linieritas antara isu strategis dengan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa disusunnya Misi telah memperhatikan permasalahan dan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan prioritas di Kabupaten Lamongan pada lima tahun yang akan datang.

Sedangkan keterkaitan kelima misi tersebut dalam mencapai Visi Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lamongan periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



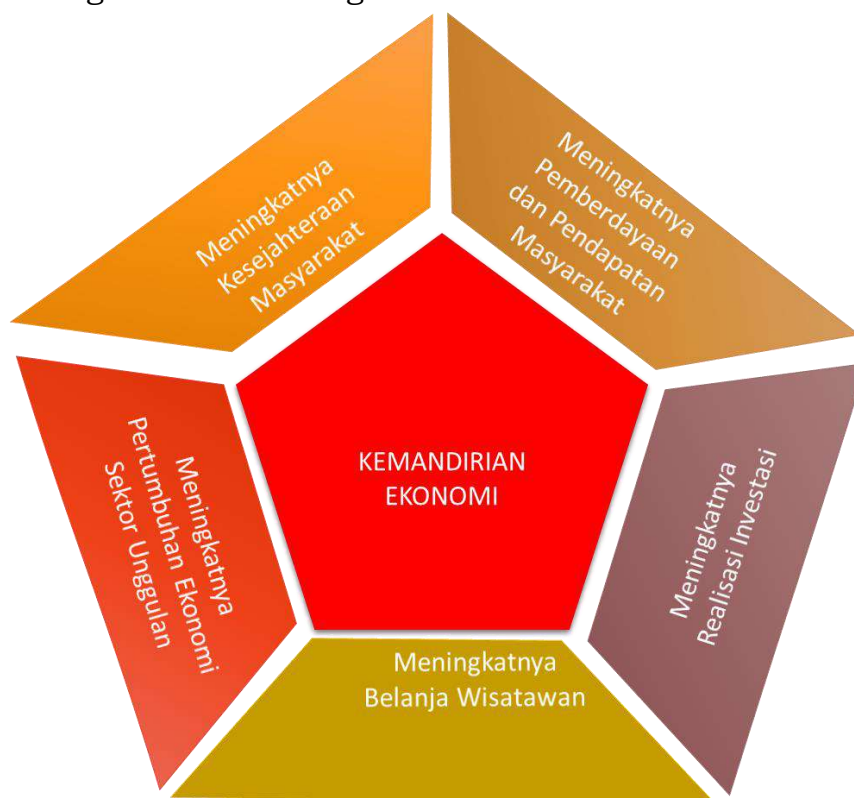
GAMBAR V.1 KETERKAITAN ANTAR MISI DALAM MENCAPAI VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan maka harus terbangun **3 Pilar Utama** terlebih dahulu yaitu Kemandirian Ekonomi (misi 1), SDM unggul dan Berdaya Saing (Misi 2), dan Harmonisasi dan kesejahteraan Sosial (Misi 4). Tercapainya **3 Pilar Utama** tersebut harus di dukung dengan **2 Pondasi Pembangunan**. Pondasi utama adalah terkait dengan misi ke lima yaitu terkait reformasi birokrasi dan fondasi kedua adalah terkait Misi ke tiga yakni ketersediaan dan pemerataan infrastruktur (Infrastruktur dasar dan Infrastrukur Sosial dan Ekonomi).

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026:

➤ **MISI I MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI UNGGULAN DAERAH.**

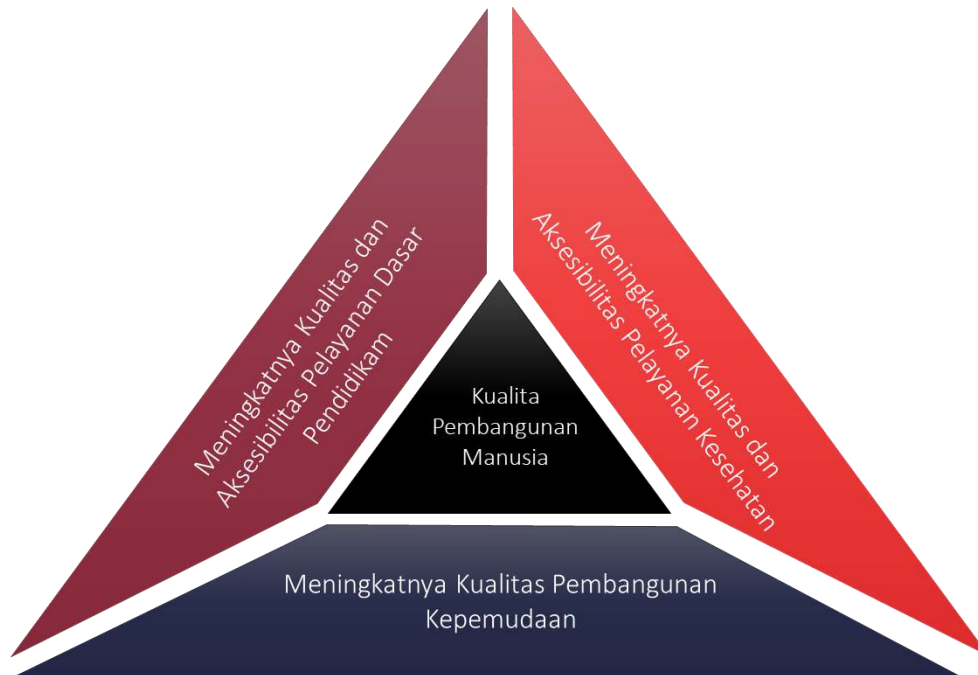
Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi satu digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR V.2 SASARAN MISI I

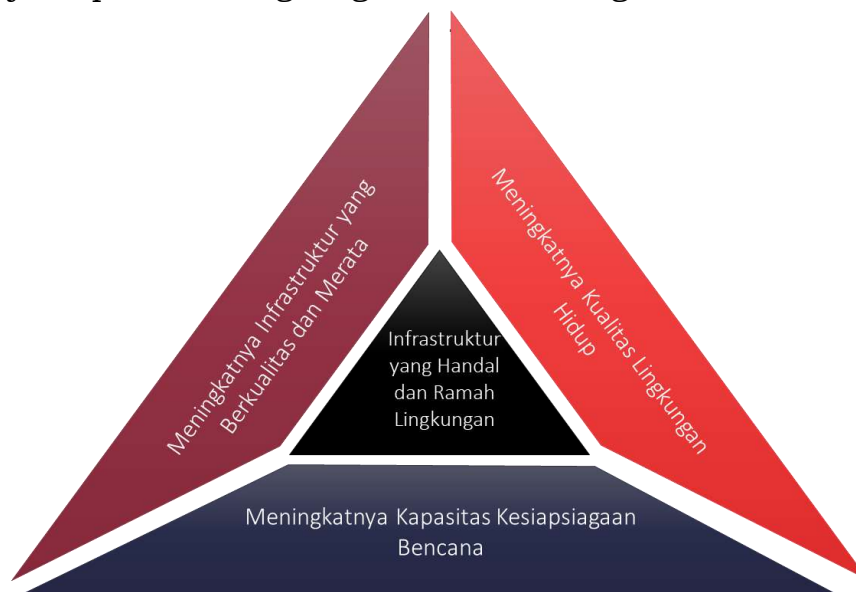
➤ **MISI II MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHKLAK YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN.**

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi dua digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR V.3 SASARAN MISI II**

➤ **MISI III MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

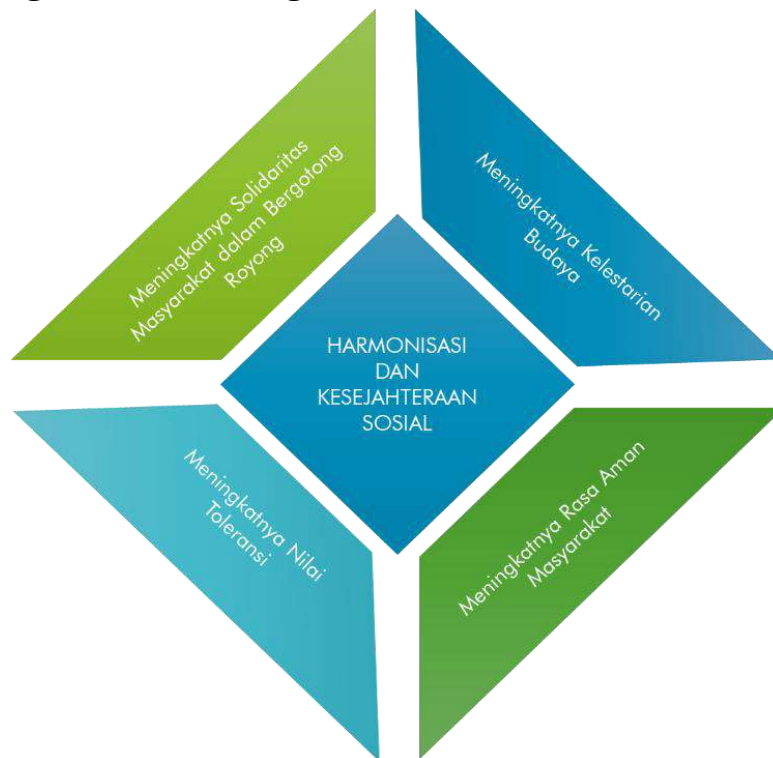
Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi tiga digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR V.4 SASARAN MISI III**

➤ **MISI IV MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM.**

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Reppresentasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial

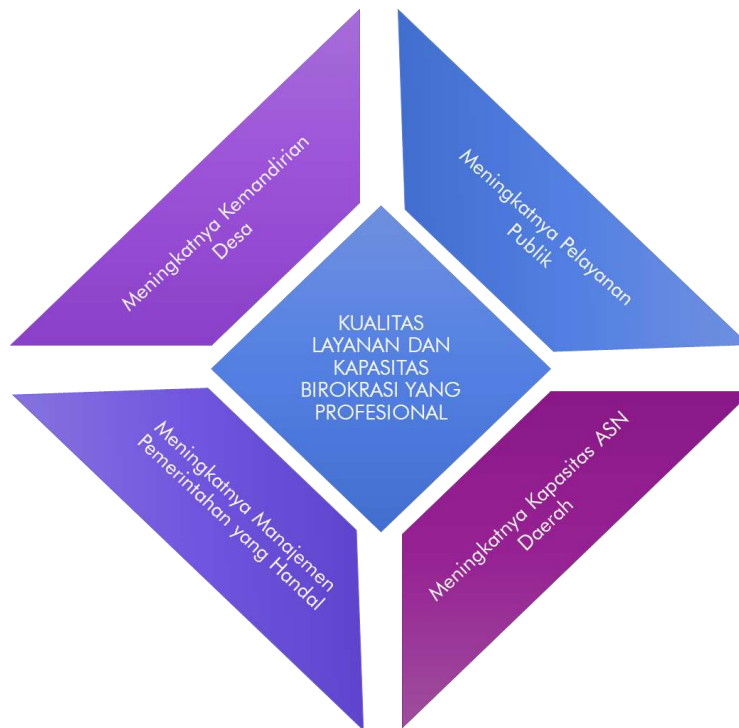
dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi empat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR V.5 SASARAN MISI IV

➤ **MISI V MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI.**

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi Lima digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR V.6 SASARAN MISI V

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk terhadap landasan ideal normatif dalam penyusunan RPJMD yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah *measurable dan tangible*. *Measurable* yakni dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel indikator tujuan dan indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada level indikator sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yakni dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026:

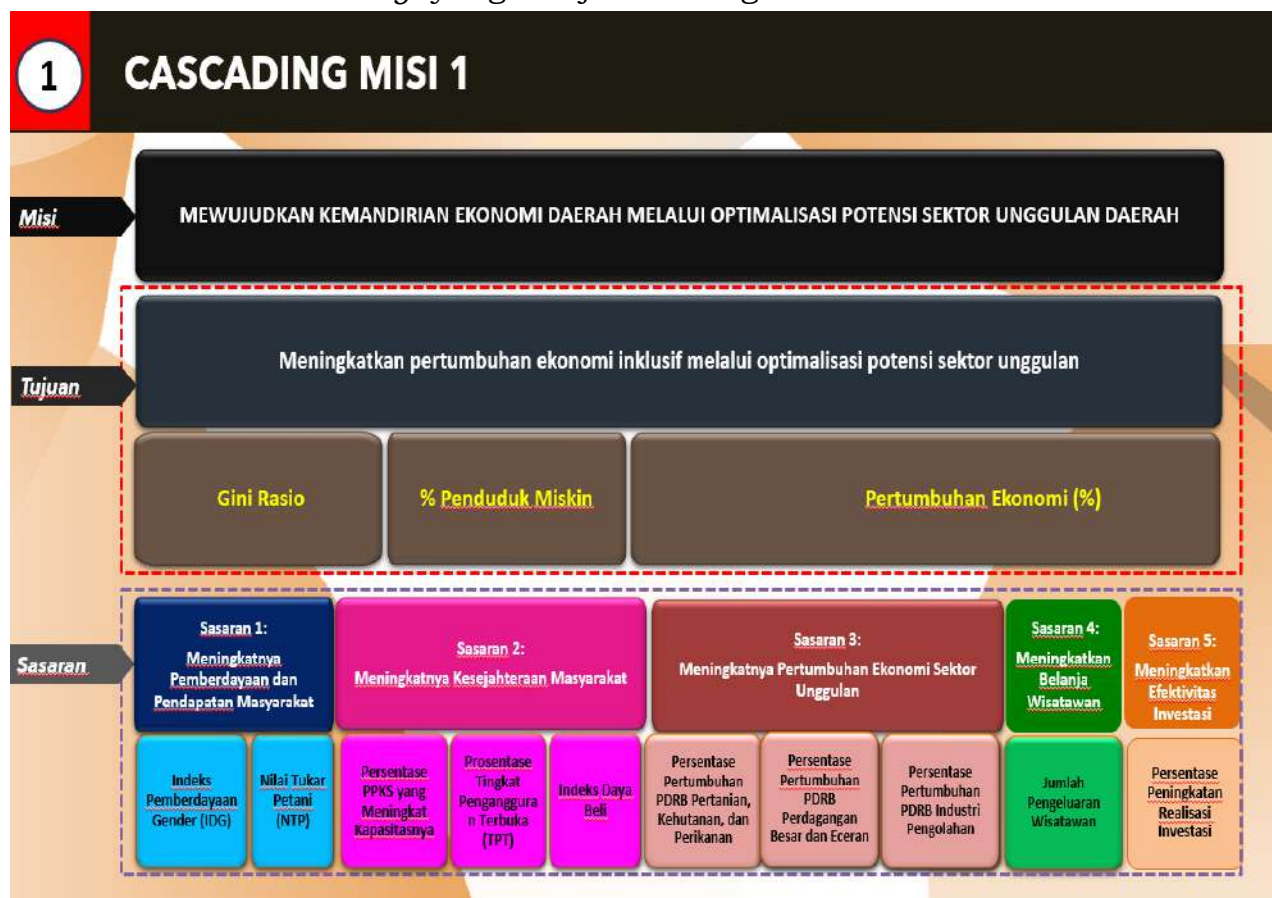
5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.”**, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
4. Meningkatnya Belanja Wisatawan
5. Meningkatnya Realisasi Investasi

Kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.7 CASCADING MISI I

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni **“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.”**, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing** dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan

Kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.8 CASCADING MISI II

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni **“Infrastruktur Handal dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.”**, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana

Kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.9 CASCADING MISI III

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.”, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan toleransi
2. Meningkatnya rasa aman masyarakat
3. Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong royong
4. Meningkatnya Kelestarian Budaya

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.10 CASCADING MISI IV

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi V

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.”, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa**, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif
2. Meningkatnya Kapasitas (ASN) Daerah
3. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal
4. Meningkatnya Kemandirian Desa

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



5

CASCADING MISI 5



GAMBAR V.11 CASCADING MISI V

Merujuk pada gambar cascading di atas, berikut merupakan linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan pada RPJMD Kabupaten.

TABEL V.2 MISI, TUJUAN, DAN INDIKATOR TUJUAN RPJMD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,65	3,55	3,68	4,71	5,33	5,43	5,43
2			Gini Rasio	Indeks	0,294	0,292	0,291	0,29	0,289	0,288	0,288
3			Prosentase Penduduk Miskin	Persen	13,85	13,39	13,17	12,92	12,65	12,35	12,35
4	Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,58	73,29	73,62	73,95	74,27	74,58	74,58
5	Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	77	79	81	82	83	83
6	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	63,06	63,63	64,2	64,78	65,36	65,36



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Lingkungan Yang Aman Dan Tentram										
7	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimisas i Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,3	68	69	70,5	71	71,5	71,5

Adapun linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dan Indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

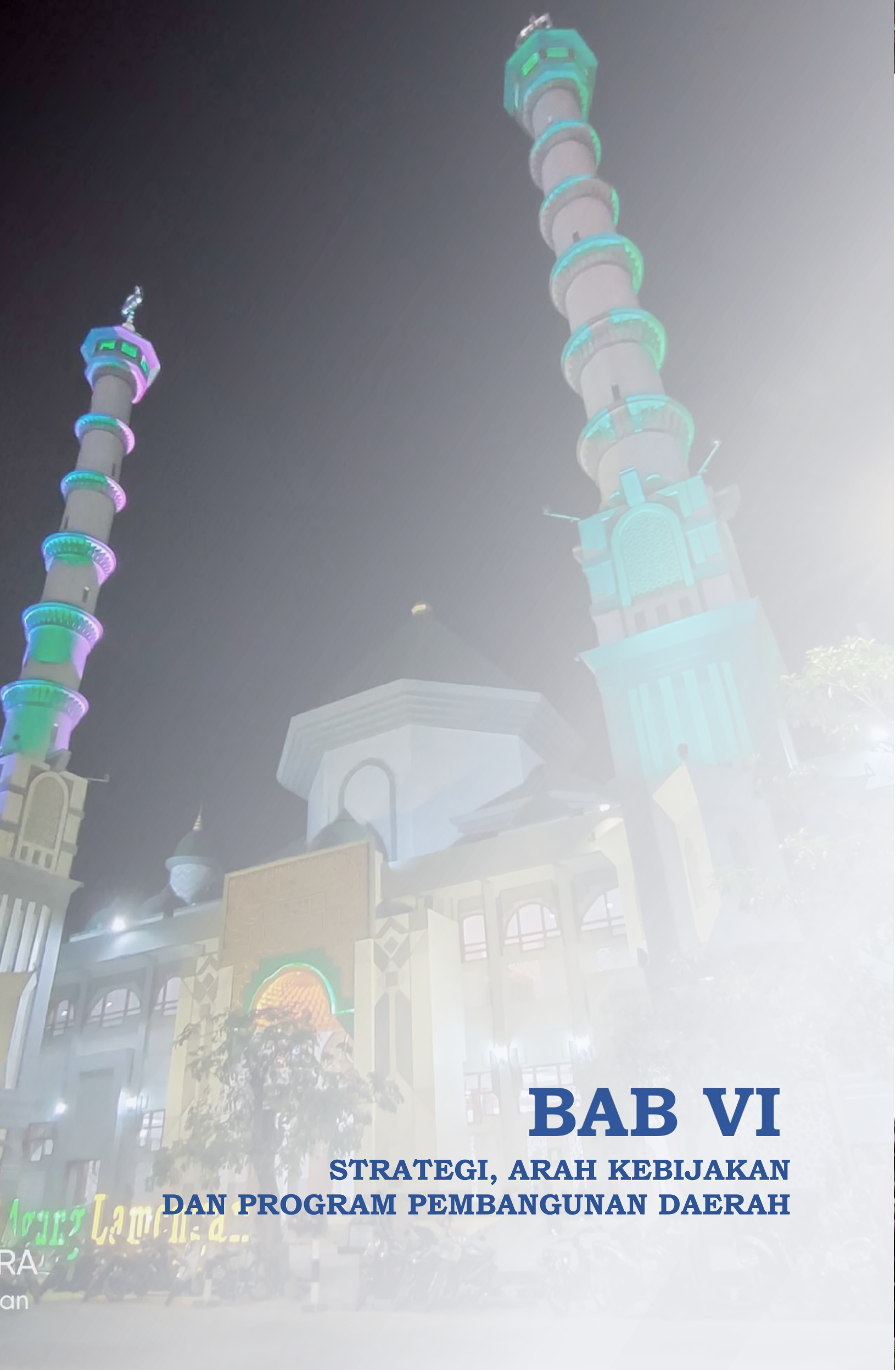
TABEL V.3 MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,93	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	74,05
2				Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	104,84	104,86	104,87	104,88	104,89	104,9	104,9
3			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Prosentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	Persen	3,6	3,88	4,13	4,38	4,63	4,88	4,88
4				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,13	4,97	4,77	4,47	4,23	4,07	4,07
5				Indeks Daya Beli	Indeks	0,743	0,761	0,770	0,778	0,786	0,794	0,794
6			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	-0,16	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,5
7				Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	-9,15	2,85	4,05	5,3	6,62	6,92	6,92
8				Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persen	-2,08	1,95	2,95	4,43	5,91	7,39	7,39
9			Meningkatnya Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persen	2.573.47 0.168. 398	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
10			Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah pengeluaran Wisatawan	Jumlah	N/A	175.50 0.000. 000	201.50 0.000. 000	227.500 .000. 000	253.50 0.000. 000	268.500 .000. 000	268.500 .000. 000
11	Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,638	0,64	0,641	0,642	0,643	0,644	0,644
12			Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,806	0,808	0,808	0,809	0,810	0,811	0,811
13			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	53,6	54	54,6	55,1	55,6	55,6
14	Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	Indeks Infrastruktur	Indeks	80,83	81,33	81,83	82,33	82,83	83,33	83,33
15			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,67	61,69	61,88	62,08	62,28	62,74	62,74
16			Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,68
17	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	Nilai	N/A	67,6	70,3	73,12	76,04	79,08	79,08
18			Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	Nilai	N/A	66,3	67,63	68,98	70,36	71,77	71,77

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram	Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	Nilai	N/A	64,06	65,66	67,31	68,99	70,71	70,71
20			Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	54,7	54,9	55,1	55,3	55,5	55,5
21	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Nilai	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
22				Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,65	3,75	3,85	3,95	4	4
23			Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	60,68	65	68	71	72	74	74
24			Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
25				Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26				Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
27			Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	16	75,00%	131,25 %	200,00 %	281,25 %	375,00 %	375,00 %



BAB VI

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Moerry Lamella...

RA
an

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses consecutive dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Lamongan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Lamongan.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

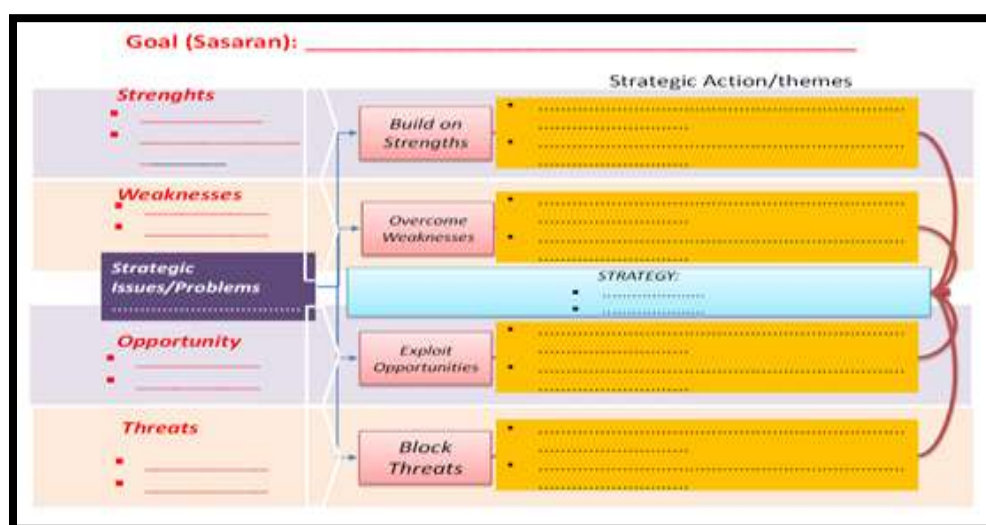
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advise aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi

membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weaknes, opportunity, dan threat*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Hal ini sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ini:



GAMBAR VI.1 PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Sumber: Gambar G-B.8 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat dformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adala strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut comparative advantage. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus

menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divesment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Lamongan bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses analisis SWOT yang telah dilakukan tim penyusun, setidaknya teridentifikasi sekitar 19 alternatif strategi pembangunan pada periode pembangunan RPJMD ini. Alternatif tersebut ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi bayi, balita dan ibu mengandung serta kapasitas kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas dan posyandu.
2. Meningkatkan partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan menyediakan subsidi bagi sekolah dan beasiswa.
3. Meningkatkan fasilitas kepemudaan dan olahraga.
4. Mendorong Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan optimalisasi penyerapan pajak dan retribusi pada sektor Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan industri kreatif serta penguatan Kontribusi Sektor Pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi.
5. Pengembangan Investasi daerah.
6. Meningkatkan upaya penegakan perda dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Kabupaten Lamongan.
7. Memperkuat budaya gotong royong saling bantu di Kabupaten Lamongan melalui diseminasi informasi dan kampanye pelestarian nilai lokal pada level keluarga.
8. Meningkatkan kualitas pengenalan dan penerapan budaya daerah dengan even-even kebudayaan.
9. Menjamin keadilan dalam pengambilan kebijakan dan menekan paham-paham radikalisme.
10. Meningkatkan PDB/Pengeluaran Perkapita dan Akses Pangan belum optimal.
11. Menekan kesenjangan pendapatan dengan meningkatkan kemandirian dan keberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan pendapatan petani.

12. Medorong peningkatan aktivitas industri untuk meningkatkan serarapan tenaga kerja yang adil dan merata.
13. Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi, publik dan sosial.
14. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan.
15. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam kesiapsiagaan bencana.
16. Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif.
17. Meningkatkan Kapasitas ASN yang berkualitas, dinamis, responsif dan menguasai teknologi informasi.
18. Mempercepat transformasi dan reformasi birokrasi yang dinamis dan responsif
19. Meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam manajemen pemerintahan dan keuangan.

Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dengan pembangunan afirmatif yang *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Gender dan Pro-Poor*.
2. Mendorong kemandirian dan peningkatan aktivitas ekonomi sektor unggulan.
3. Meningkatkan realisasi investasi melalui kondusivitas iklim usaha.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkarakter dan berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan.
6. Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi atlit.
7. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan keterjangkauan barang/jasa.
8. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
9. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan menurunkan pencemaran lingkungan
10. Optimalisasi kesiapsiagaan bencana.
11. Meningkatkan kondusifitas sosial dengan berlandaskan nilai budaya lokal dan nilai religius.
12. Meningkatnya kelestarian seni dan budaya tradisional.
13. Meningkatkan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif.
14. Meningkatkan efisiensi birokrasi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Responsif, Tangguh dan Dinamis.
15. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada

pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari poin-poin sebagai berikut ini:

TABEL VI.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN

MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH		
Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dengan pembangunan afirmatif yang <i>Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Gender</i> dan <i>Pro-Poor</i> .	- Penguatan terhadap kelompok perempuan dalam pembangunan baik dibidang ekonomi maupun politik - Optimalisasi program pemberdayaan perempuan dalam rangka perkuatan ekonomi keluarga - Optimalisasi platform media sosial dan lembaga non profit pemberdayaan perempuan baik skala lokal, regional maupun nasional untuk menjangkau lebih banyak sasaran pemberdayaan perempuan - Peningkatan kapasitas dan optimalisasi pemberdayaan petani dan kelembagaan kelompok tani - Optimalisasi fasilitasi peningkatan nilai tambah produk pertanian dan pemasaran produk pertanian. - Peningkatan sarana dan prasarana produksi dalam rangka menekan biaya produksi - Peningkatan akurasi Data Terpadu Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi dan validasi secara berkala - Peningkatan pemberdayaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Penagnanan Kemiskinan secara Terpau melalui peningkatan sinergitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanganan kemiskinan
S.2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		- Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja - Peningkatan bursa kerja baik secara offline maupun online serta - Meningkatkan kemudahan akses penduduk terhadap dunia kerja - Perluasan penempatan tenaga kerja - Peningkatan produktivitas tenaga kerja - Peningkatan pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja - Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran.
S.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Mendorong kemandirian dan peningkatan aktivitas ekonomi sektor unggulan.	- Mempertahankan Lahan Pertanian Berkelanjutan - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian - Minimalisir resiko usaha disektor pertanian, baik yang disebabkan perubahan/anomali iklim maupun Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). - Peningkatan inovasi dibidang pertanian - Peningkatan kualitas SDM pertanian - Peningkatan sarana dan prasarana panen dan pasca panen - Peningkatan agroindustri untuk peningkatan value added produk pertanian. - Penguatan cadangan pangan, panganekaragaman serta keamanan konsumsi pangan masyarakat.
S.4. Meningkatnya Belanja Wisatawan		



		• Peningkatan pertumbuhan industri terutama IKM • Peningkatan fasilitasi perijinan usaha dan non usaha bagi industri kecil dan menengah • Mendorong berkembangnya industri kreatif • Meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen • Meningkatkan fasilitasi permodalan dan pemasaran serta kemitraan. • Pengembangan pasar luar negeri dan ekspor • Peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat • Peningkatan penggunaan produk dalam negeri • Pengembangan pasar daerah dan pasar rakyat. • Pengembangan UMKM dan Koperasi • Peningkatan infrastruktur pendukung wisata • Pengembangan obyek daya tarik wisata daerah maupun pedesaan • Peningkatan SDM pariwisata • Peningkatan promosi wisata
S.5. Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatkan realisasi investasi melalui kondusivitas iklim usaha	• Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pelayanan perijinan

MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHLAK YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.6. Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkarakter dan berkeadilan	• Afirmasi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas SDM pendidikan • Pemerataan tenaga pendidik • Peningkatan pendidikan luar sekolah • Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
S.7. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan	• Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan • Peningkatan kualitas SDM kesehatan • Peningkatan kesehatan ibu dan anak • Memproporsionalkan jumlah tenaga kesehatan • Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular dan menular • Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan • Peningkatan keluarga berencana

S.8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi atlet	• Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan • Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan • Pemberdayaan pemuda • Peningkatan sarana dan prasarana olah raga • Memperbanyak pemusatan latihan • Pengembangan organisasi keolahragaan • Memperbanyak even-even olah raga

MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.9. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	Mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana perhubungan • Meningkatkan ketersediaan air baku • Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih • Meningkatkan pelayanan sanitasi • Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin • Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh
S.10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan menurunkan pencemaran lingkungan	• Peningkatan pengendalian pencemaran air • Peningkatan pengendalian pencemaran udara • Peningkatan ruang terbuka hijau • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
S.11. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Optimalisasi kesiapsiagaan bencana	• Meningkatkan kualitas dan jumlah desa tangguh bencana • Optimalisasi mitigasi bencana • Optimalisasi penanganan bencana • Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam penanganan bencana

MISI 4: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM

Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.12. Meningkatnya Toleransi	Meningkatkan kondusifitas sosial dengan berlandaskan nilai budaya lokal dan nilai religius	• Menjamin kebijakan pemerintah telah memperhatikan keadilan bagi semua pihak • Menekan penyebaran paham-paham radikalisme • Optimalisasi pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat • Meningkatkan upaya penegakan perda dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Kabupaten Lamongan
S.13. Meningkatnya rasa aman masyarakat		

S.14. Meningkatnya masyarakat dalam bergotong royong	solidaritas		• Optimalisasi sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan bagi masyarakat • Memperkuat budaya gotong royong dan tolong menolong • Melestarikan nilai-nilai luhur lokal melalui kampanye dan pembelajaran mulai level keluarga
S.15. Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Masyarakat	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya tradisional	• Peningkatan kualitas inventarisasi objek-objek kebudayaan yang memiliki nilai sejarah dan berharga • Peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya • Peningkatan kompetensi pelaku seni dan budaya • Peningkatan sarana, prasarana dan even aktualisasi seni dan budaya • Memperkuat identitas dan karakter lokalitas Lamongan kepada generasi muda
MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa			
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
S.16. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif.	• Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan • Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik • Peningkatan sarana dan prasana penunjang pelayanan publik • Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan terintegrasi. • Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik	
S.17. Meningkatnya Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatkan efisiensi birokrasi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Responsif, Tangguh dan Dinamis	• Peningkatan kualifikasi ASN • Peningkatan kompetensi ASN • Peningkatan kedisiplinan ASN • Peningkatan kesejahteraan ASN berbasis kinerja • Akselerasi transformasi ASN yang lebih smart, dinamis dan responsif • Penataan struktur organisasi yang proporsional • Penumbuhan budaya berkinerja	

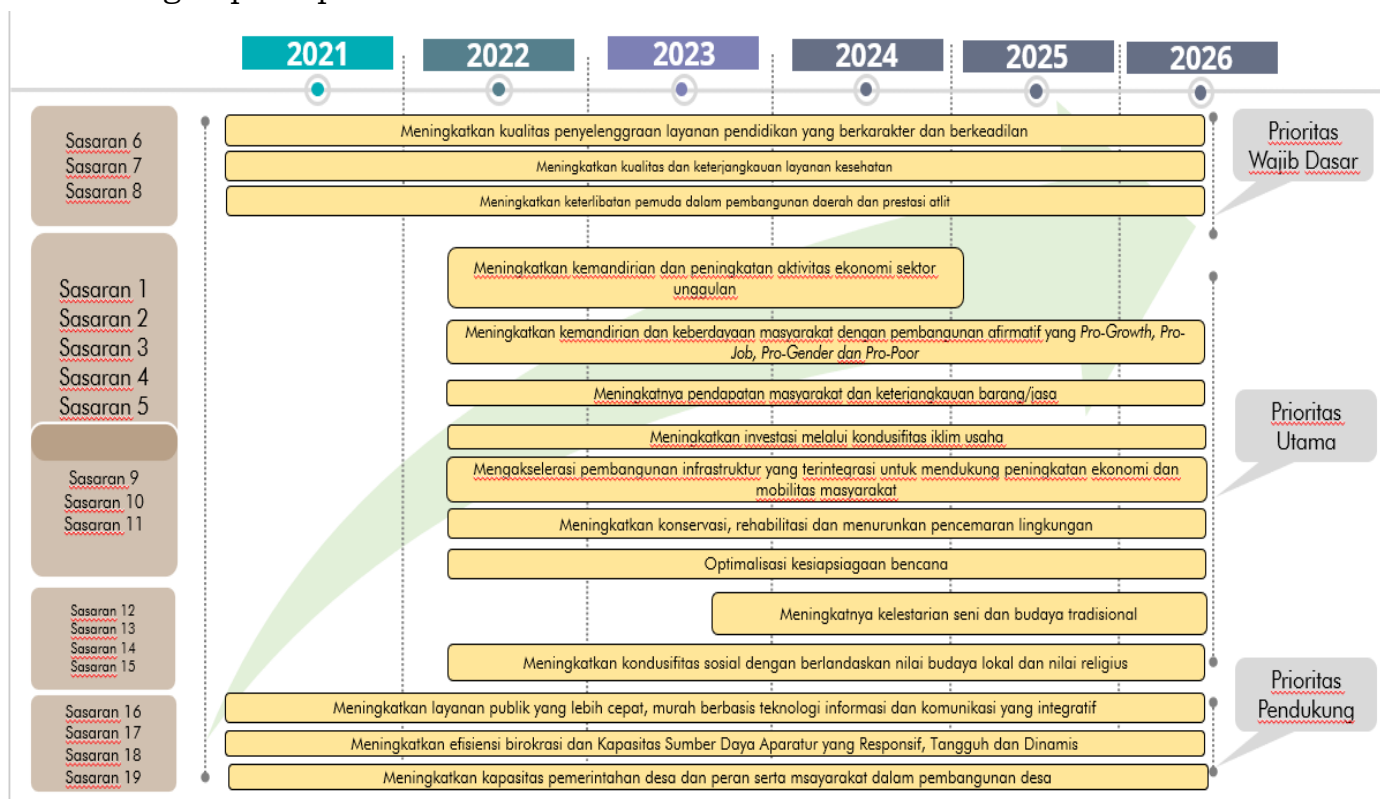


S.18. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal		• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani • Peningkatan kerjasama daerah • Peningkatan kualitas produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Peningkatan pengelolaan arsip daerah • Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah • Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah • Peningkatan pengelolaan Asset Daerah • Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah • Peningkatan pengawasan internal • Peningkatan penyelenggaraan SPIP • Optimalisasi BUMD
S.19. Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa	• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat desa • Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan • Peningkatan Keuangan Desa • Penguatan kelembagaan desa • Pengembangan potensi-potensi ekonomi dan budaya desa

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Disamping itu pula, pada lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyelarasan horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut arsitektur horizon atau timeline pembangunan Kabupaten Lamongan pada periode RPJMD ini.



GAMBAR VI.2 MAPPING STRATEGI PEMBANGUNAN 2021-2026

Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:



GAMBAR VI.3 TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022-2026

Adapun beberapa prioritas pembangunan pada tiap-tiap tahun pembangunan dapat diamati pada tabel berikut ini:

TABEL VI.2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATIF

TAHUN	2022	2023	2024	2025	2026
TEMA	PEMANTAPAN SOSIAL EKONOMI DAN PENINGKATAN LAYANAN DASAR SERTA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI	PENGUATAN DAYA SAING SDM PENUNJANG SOSIAL EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN YANG INKLUSIF	AKTIVASI EKOSISTEM PEREKONOMIAN UNTUK MENJAGA KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	MENGUATKAN STABILITAS SOSIAL EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI SEKTOR UNGGULAN MELALUI PERLUASAN PASAR DAN DAYA SAING REGIONAL	MEMANTAPKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH DAN SDM UNGGUL YANG MERATA DAN BERKEADILAN
PRIORITAS	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan	Pemantapan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta meningkatkan kualitas Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesehatan	Penguatan Kualitas, aksesibilitas dan Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesehatan	Pemutakhiran Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi yang adil dan merata	Pemantapan SDM unggul, maju dan berdaya saing
	Pemantapan Nilai Tambah Komoditas Unggulan dan Pariwisata	Penguatan Kualitas Produksi dan Nilai Tambah Komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar	Pemantapan kemudahan akses pasar dan meningkatkan jaminan harga jual komoditas unggulan	Penguatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan, UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik	Stabilisasi kemandirian ekonomi dan kemajuan UMKM lokal dan produktivitas komoditas unggulan daerah
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan	Pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta Peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan akses modal dan pelatihan keterampilan	Penguatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja serta peningkatan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM yang adil dan merata	Penguatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing berskala regional	Pemantapan kesejahteraan tenaga kerja dan daya saing tenaga kerja lokal serta pengentasan kemiskinan
	Peningkatan layanan infrastruktur dalam rangka pemerataan pembangunan daerah	Pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri Baru dan Ringroad Utara	Optimalisasi penyediaan infrastruktur perekonomian, ruang publik dan infrastruktur dasar serta akses terhadap destinasi wisata yang adil dan merata	Stabilisasi dan Pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik dan infrastruktur dasar serta optimalisasi infrastruktur Kawasan Industri baru dan Realisasi Ringroad Utara	Stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, penunjang akses, ruang publik, dan infrastruktur dasar yang adil dan merata
	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian budaya	Peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah	Peningkatan keamanan dan ketentraman lingkungan	Penguatan Stabilitas dan Kondusifitas Sosial	Penguatan Stabilitas dan Kondusifitas Sosial

Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lamongan disusun dengan tujuan memberikan pedoman dan arah fokus pembangunan tahunan. Dengan mempertimbangan keterbatasan kapasitas fiskal maka tema pembangunan tahunan perlu diarahkan dengan dalam prioritas-prioritas tertentu. Menetapkan prioritas pada tahun tertentu bukan berarti urusan lain yang tidak menjadi prioritas tidak dikerjakan. Muatan prioritas ini paling tidak tercermin dalam afirmasi alokasi anggaran, dan banyak atau sedikitnya kegiatan.

Kategori prioritas perlu dibedakan didasarkan pertimbangan mandatori urusannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan dan Ketentraman Umum senantiasa menjadi prioritas sepanjang tahun. Ini dapat disebut sebagai prioritas wajib. Sehingga prioritas yang bersifat tematik diarahkan untuk menjawab skenario pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah. Ini dapat disebut sebagai Prioritas Utama. Prioritas utama berkaitan dengan penguatan perekonomian, kesejahteraan sosial dan pengembangan infrastruktur. Kaidah yang perlu diperhatikan adalah tema dan prioritas pembangunan harus bisa dituntaskan pada tahun berkenaan, sehingga tahun-tahun berikutnya berfokus pada tahapan prioritas selanjutnya, tanpa harus berfikir menyelesaikan prioritas tahun sebelumnya yang belum selesai.

Tema dan Arah Kebijakan ini bersifat indikatif, mengingat dinamisnya kondisi masa depan yang sarat akan ketidakpastian. Selain itu setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertimbangan prioritas tahunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat. Catatan penting lainnya adalah pada tahun 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak, sehingga arah kebijakan pada tahun 2025 dan 2026 tentunya akan banyak mengalami penyesuaian.

6.3 Program Pembangunan

Tahapan penting dalam perumusan RPJMD yakni merumuskan program pembangunan daerah dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dan berdasarkan prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Urgensi dari tahapan ini karena perumusan program prioritas pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis yang dapat merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan janji-janji atau platform politik tersebut kemudian didefinisikan kedalam program, kegiatan atau sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun 11 program prioritas Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 berdasarkan platform politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VI.3 LINEARITAS PROGRAM POLITIS TERHADAP NOMENKLATUR

No	Bidang	Program Politis Kepala Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera (PERINTIS)		Dinas Pendidikan
1.1		Beasiswa Pendidikan Sampai S2	Program Pengelolaan Pendidikan	
1.2		Beasiswa Bagi Hafidz		
1.3		Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
1.4		Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
2	Kesehatan	Lamongan Sehat		Dinas Kesehatan, RSUD Soegiri & Ngimbang
2.1		Bantuan Layanan Kesehatan di Pesantren	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	
2.2		Homecare Servis		
2.3		Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana RSUD Puskesmas Posyandu	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
3	Ketenagakerjaan	Young Entrepreneur Succes (YES)		
3.1		Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
3.2		Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
3.3		10.000 Wirausaha Baru (Santripreneur & Kepala Keluarga Perempuan Kurang Sejahtera)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA)		
4.1		Pemeliharaan dan pembangunan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PU Binamarga
		Pemeliharaan dan pembangunan Jembatan		
4.2		Ketersedian Air Baku untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU Sumber Daya Air
4.3		Ketersedian Air Bersih Bagi Masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
4.4		Taman Tematik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
4.5		Pengendalian Banjir dan Penanganan Bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU Sumber Daya Air
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Bidang	Program Politis Kepala Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	4.6		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Penanganan dan Penolahan Limbah B3 maupun sampah	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
			Program Pengolahan Persampahan	
5	Pertanian	Lumbung Pangan Lamongan		
5.1		Ketersediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.2		Diversifikasi Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.3		Peningkatan Bantuan Untuk Pemberantasan OPT	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.4		Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
5.5		Pembangunan Pasar Ikan Modern	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.6	Penyediaan Cold Storage untuk Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	
6	Pengembangan UMKM dan IKM	UMKM		
6.1		Fasilitasi Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
6.2		Fasilitasi Pengembangan IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.3		Gerakan Membeli Produk Lamongan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
6.4		Revitalisasi Pasar Desa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
6.5		Membangun Sentra UMKM		
7	Kepemudaan dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga		Dinas Pemuda dan Olahraga
7.1		Revitalisasi Stadion dan Sport Center	Program Pengembangan	

No	Bidang	Program Politis Kepala Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
7.2		Pembinaan Atlet Sejak Dini	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
7.3		Peningkatan Prestasi Olahraga		
7.4		Peningkatan Prestasi Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
8	Kebudayaan dan Pariwisata	Gerakan Membangun Pariwisata Rama dan Terintegrasi (RAMASINTA)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.1		Membangun Destinasi Pariwisata Religi, Bahari dan Heritage	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
8.2		Meningkatkan Industri dan Promosi Wisata	Program Pemasaran Pariwisata	
8.3		Festival Kebudayaan dan Lamongan Religi	Program Pengembangan Kebudayaan	
8.4		Pemeliharaan Situs Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
9	Sosial	Yakin Semua Sejahtera (YES)		Dinas Sosial
9.1		Jaminan Sosial bagi PPKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	
9.2		Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
9.3		Menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Harmonisasi Sosial Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.4		Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
10	Pelayanan Publik	100% Pelayanan Publik Berkualitas		
10.1		Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	
10.2		Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi
10.3		Integrasi Layanan Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
10.4		Meningkatkan Manajerial dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pembangunan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

No	Bidang	Program Politis Kepala Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
11		Desa Berjaya		
11.1		Bantuan Program Pembangunan Dusun	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Pembangunan Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa	
11.2		Pembangunan Desa Berdasarkan Potensi Unggulan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	

Selanjutnya, berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program, perlu membagi anggaran berdasarkan 3 prioritas yakni:

1. Prioritas Pertama (P1) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua (P2) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga (P3) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Perumusan program prioritas pembangunan daerah merupakan tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Hal ini dikarenakan hasil dari perumusan program prioritas dapat menghasilkan rencana pembangunan daerah yang kongkrit dan merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah (P2) merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya janji-janji tersebut didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Keputusan Menteri nomor 50 Tahun 2020.

Merujuk pada amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif *balanced scorecard*. Keempat persepektif tersebut yakni:

1. Perspektif masyarakat/layanan, yakni perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal, yakni perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan, yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM,

sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Perspektif keuangan, yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Mengacu pada uraian di atas dan pembagian prioritas pembangunan daerah, program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan pada RPJMD tahun 2021-2026 beserta kerangka pendanaan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL VI.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah																
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,65	3,55		3,68		4,71		5,33		5,43		5,43		
1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	-0,16	0,5		0,75		1		1,25		1,5		1,5		
p2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	%	70.00%	72.07%	2,424,250,000	72.78%	3,211,206,910	73.49%	3,250,126,738	74.21%	3,290,655,818	75.07%	3,332,874,932	75.07%	3,332,874,932	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
p2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	46.00%	47.30%	22,293,795,150	48.00%	22,334,616,432	48.6%	22,605,311,983	49.30%	22,887,200,224	50.00%	23,180,843,003	50.00%	23,180,843,003	
p2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penurunan luasan gagal panen	%	0.65%	0.55%	334,000,000	0.50%	1,004,648,080	0.45%	1,016,824,415	0.40%	1,029,504,215	0.35%	1,042,712,754	0.35%	1,042,712,754	
p3	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelembagaan/keompok tani yang meningkatkan kapasitasnya	%	59%	63%	3,580,484,000	68%	4,265,831,066	72%	4,317,532,939	76%	4,371,372,574	80%	4,427,457,284	80%	4,427,457,284	
p2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana peternakan dalam kondisi baik	%	2.50%	10.00%	2,620,000,000	15.00%	2,520,754,400	20.00%	2,551,305,943	25.00%	2,583,120,728	30.00%	2,616,262,167	30.00%	2,616,262,167	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
p2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	%	7.15%	28.57%	2,225,000,000	42.86%	2,140,717,000	57.14%	2,166,662,490	71.43%	2,193,680,771	85.71%	2,221,825,696	85.71%	2,221,825,696	
p2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase ternak betina peserta AUTSK	%	2.15%	10.15%	60,000,000	11.44%	57,727,200	12.89%	58,426,854	14.50%	59,155,437	16.28%	59,914,401	16.28%	59,914,401	
p3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Sehat	%	5.16%	8.11%	490,000,000	9.62%	471,438,800	11.16%	477,152,638	12.70%	483,102,732	14.27%	489,300,940	14.27%	489,300,940	
		Prosentase Ternak Unggas Yang Sehat	%	1.01%	1.42%		1.64%		1.89%		2.15%		2.44%		2.44%		
		Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH	%	0,438%	2,705%		4,187%		5,668%		7,149%		8,631%		8,631%		
p3	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan legalitas usaha peternakan	%	0,00073%	0,0125%	35.000.000	0,0235%	33.674.200	0,0344%	34.082.331	0,0454%	34.507.338	0,0564%	34.950.067	0,0564%	34.950.067	
p3	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan kemampuan kelas kelompok	2.63%	244,768,105	3.16%	247,820,363	3.68%	250,999,898	3.68%	250,999,898	3,16%	234.941.493	3,68%	237.955.793	3,68%	237.955.793	
p2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	79,819.32	80,821.81	1,095,000,000	81,225.92	1,053,521,400	81,632.05	1,066,290,079	82,040.21	1,079,586,717	82,450.41	1,093,437,814	82,450.41	1,093,437,814	DINAS PERIKANAN

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
p2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	59,728.16	63,391.84	4,050,000,000	64,172.53	3,896,586,000	64,797.08	3,943,812,622	65,265.49	3,992,991,966	65,577.77	4,044,222,053	65,577.77	4,044,222,053	
p2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ikan Yang Diolah	Ton	89,179.36	90,916.16	902,500,000	91,825.32	868,313,300	92,743.57	878,837,257	93,671.01	889,796,358	94,607.72	901,212,445	94,607.72	901,212,445	
p3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	%	N/A	26.67%	500,000,000	40.00%	481,060,000	53.33%	486,890,447	66.67%	492,961,971	80%	499,286,673	80%	499,286,673	
1.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	-9,15	2,85		4,05		5,3		6,62		6,92		6,92		
p2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	100%	100%	1.350.000.000	100%	3.231.362.000	100%	3.270.526.107	100%	3.311.309.568	100%	3.353.793.670	100%	3.353.793.670	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
p2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase peningkatan omset produk lokal	%	N/A	6%	1.325.000.000	6,50%	2.208.559.000	7%	2.235.326.735	7,50%	2.263.201.259	8%	2.292.238.132	8%	2.292.238.132	
p3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase koefisienvariasi harga antar waktu	%			450.000.000		432.954.000		438.201.402		443.665.774		449.358.006		449.358.006	
		Ir 64 Kwalitas Premium	kg	0,01%	0,93%		0,96%		0,99%		1,03%		1,06%		1,06%		
		Ir.64 Kwalitas Medium	kg	0,01%	0,84%		0,87%		0,89%		0,92%		0,95%		0,95%		
		Gula Dalam Negri	kg	0,03%	2,49%		2,30%		2,13%		1,99%		1,87%		1,87%		
		Tanpa merek/minyak curah	kg	0,02%	1,23%		1,18%		1,14%		1,10%		1,06%		1,06%		
		Daging sapi murni	kg	0,01%	0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		
		Daging ayam boiler	kg	0,06%	0,71%		0,69%		0,67%		0,66%		0,64%		0,64%		
		Telur ayam ras	kg	0,02%	1,16%		1,11%		1,07%		1,04%		1,00%		1,00%		
		Jagung pipilan kering	kg	0,03%	2,56%		2,36%		2,19%		2,04%		1,91%		1,91%		
		Garam Halus	kg	0,11%	2,36%		2,18%		2,04%		1,91%		1,79%		1,79%		
		Cabe merah besar	kg	0,11%	0,92%		0,89%		0,86%		0,84%		0,82%		0,82%		
		cabe rawit	kg	0,18%	1,46%		1,53%		1,61%		1,70%		1,81%		1,81%		
		bawang merah	kg	0,09%	3,55%		3,17%		2,87%		2,62%		2,41%		2,41%		
		bawang putih	kg	0,13%	0,41%		0,41%		0,40%		0,40%		0,39%		0,39%		
p3	Program Pengembangan Ekspor	net ekspor (rupiah)	Juta Rupiah	1.913.123,00	2.069.234,00	225.000.000	2.152.004	216.477.000	2.238.085	219.100.701	2.327.609	221.832.887	2.420.714	224.679.003	2.420.714	224.679.003	
p3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	58,62%	67,62%	120.000.000	72,63%	115.454.400	78,00%	116.853.707	83,77%	118.310.873	89,96%	119.828.802	89,96%	119.828.802	
p3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Berizin	%	68,57%	69,50%	50.000.000	70,00%	45.606.000	70,50%	46.158.745	75,00%	46.734.344	76,00%	47.333.946	76,00%	47.333.946	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
p3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Penurunan Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan	%	1,54%	1,45%	180.000.000	1,40%	164.181.600	1,30%	166.171.481	1,25%	168.243.639	1,20%	170.402.205	1,20%	170.402.205	
p3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Yang Sehat	%	8,88%	9,00%	90.000.000	9,50%	82.090.800	10%	83.085.740	10,50%	84.121.820	11,00%	85.201.103	11,00%	85.201.103	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
p3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikat	%	7.00%	10.00%	459,181,000	13.00%	441,787,224	16.00%	447,141,685	19.00%	452,717,542	22.00%	458,525,908	22.00%	458,525,908	
p3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan	%	1.16%	3.00%	470,000,000	4.00%	928,696,400	5.00%	939,952,200	6.00%	951,673,404	10.00%	963,883,374	10.00%	963,883,374	
1.1.3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persen	-2,08	1,95		2,95		4,43		5,91		7,39		7,39		
p2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase pertambahan dan pembangunan industri	%	1,10%	2%	3.600.000.000	2,05%	5.283.632.000	2,12%	5.347.669.620	2,15%	5.414.355.060	2,20%	5.483.821.235	82,00%	5.483.821.235	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
p3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase data IKM yang masuk dalam SINAS	%	0,20%	0,80%	130.000.000	1%	125.075.600	1,20%	126.591.516	1,40%	128.170.112	1,60%	129.814.535	1,60%	129.814.535	
p3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	%	70,80%	74,80%	70.000.000	76,00%	67.348.400	78%	68.164.663	80,00%	69.014.676	82,00%	69.900.134	1,60%	69.900.134	
p2	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan aset usaha mikro	%	35.63%	44.00%	350,000,000	48.00%	819,242,000	52.00%	829,171,213	56.00%	839,510,978	60.00%	850,281,904	60.00%	850,281,904	
p3	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase penumbuhan usaha mikro	%	0.45%	1.00%	1,550,000,000	1.50%	5,413,786,000	2.00%	5,479,401,086	2.50%	5,547,729,218	3.00%	5,618,906,584	3.00%	5,618,906,584	
1.1.4	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah pengeluaran Wisatawan	Jumlah	N/A	175.500.000.000		201.500.000.000		227.500.000.000		253.500.000.000		268.500.000.000		268.500.000.000		
p2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	14	7,14%	1.575.000.000	14,29%	3.436.589.000	21,43%	3.478.240.459	28,57%	3.521.614.117	35,71%	3.566.796.426	35,71%	3.566.796.426	
p2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang dipromosikan	%	13	7,69%	150.000.000	15,38%	1.136.818.000	23,08%	1.150.596.234	30,77%	1.164.944.169	38,46%	1.179.890.403	38,46%	1.179.890.403	
p3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	%	2,33%	11,26%	365.500.000	16,93%	2.333.379.860	23,17%	2.361.660.424	29,32%	2.391.110.329	35,60%	2.421.788.275	35,60%	2.421.788.275	
1.1.5	Meningkatnya Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persen	#####	1,5		2		2,5		3		3,5		3,5		
p2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	Jumlah	3,619	3,692	550,000,000	3,747	551,666,000	3,803	558,352,192	3,86	565,314,844	3,918	572,567,833	3,918	572,567,833	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
p2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	%	63.20%	64.20%	80,000,000	64.70%	122,969,600	65.20%	124,459,992	65.70%	126,012,008	66.20%	127,628,742	66.20%	127,628,742	
p3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	%	3015	1.50%	100,000,000	0,02	141,212,000	2.50%	142,923,489	3.00%	144,705,745	3.50%	146,562,320	3.50%	146,562,320	
p3	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	%	40.00%	60.00%	295,500,000	70.00%	319,531,460	80.00%	323,404,181	90.00%	327,437,031	100.00%	331,638,049	100.00%	331,638,049	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
p3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaan Yang Berinvestasi	%	64.53%	65.53%	497,462,000	66.03%	478,618,139	66.53%	484,418,991	67.03%	490,459,696	67.53%	496,752,294	67.53%	496,752,294	
1.2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Gini Rasio	Indeks	0,294	0,292		0,291		0,290		0,289		0,288		0,288		
1.2.1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,93	73,97		73,99		74,01		74,03		74,05		74,05		
p2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Persentase Peningkatan Perempuan Produktif Yang Berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik);	%	4%	4,25%	115.380.000	4,50%	205.240.406	4,75%	207.727.919	5,00%	210.318.286	5,25%	213.016.670	5,25%	213.016.670	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
p3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Yang Berperan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	%	70%	72%	57.690.000	74%	252.620.203	76%	255.681.960	78%	258.870.314	80%	262.191.620	80%	262.191.620	
p3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak	%	10%	40%	25.370.000	60%	223.140.484	70%	225.844.947	80%	228.661.234	100%	231.594.957	100%	231.594.957	
p3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Yang Terbentuk	%	4.85%	12.66%	116.000.000	14.77%	230.805.920	16.88%	233.603.288	18.99%	236.516.321	21.10%	239.550.825	21.10%	239.550.825	
p3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan Yang Diselesaikan	%	30%	37%	177.302.000	39%	311.720.700	41%	315.498.755	43%	319.433.025	45%	323.531.350	45%	323.531.350	
p3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Diselesaikan	%	45%	50%	286.898.000	55%	276.030.304	60%	279.375.791	65%	282.859.607	70%	286.488.696	70%	286.488.696	
1.2.2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	104,84	104,86		104,87		104,88		104,89		104,9		104,9		
p2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	%	70,00%	72,07%	2.424.250.000	72,78%	3.211.206.910	73,49%	3.250.126.738	74,21%	3.290.655.818	75,07%	3.332.874.932	75,07%	3.332.874.932	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
p2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	46,00%	47,30%	22.293.795.150	48,00%	22.334.616.432	48.6%	22.605.311.983	49,30%	22.887.200.224	50,00%	23.180.843.003	50,00%	23.180.843.003	
p2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penurunan luasan gagal panen	%	0,65%	0,55%	334.000.000	0,50%	1.004.648.080	0.45%	1.016.824.415	0,40%	1.029.504.215	0,35%	1.042.712.754	0,35%	1.042.712.754	
p3	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelembagaan/keompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	59%	63%	3.580.484.000	68%	4.265.831.066	72%	4.317.532.939	76%	4.371.372.574	80%	4.427.457.284	80%	4.427.457.284	
p2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	%	70,00%	72,07%	2.424.250.000	72,78%	3.211.206.910	73,49%	3.250.126.738	74,21%	3.290.655.818	75,07%	3.332.874.932	75,07%	3.332.874.932	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
p2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	46,00%	47,30%	22.293.795.150	48,00%	22.334.616.432	48.6%	22.605.311.983	49,30%	22.887.200.224	50,00%	23.180.843.003	50,00%	23.180.843.003	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
p2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penurunan luasan gagal panen	%	0,65%	0,55%	334.000.000	0,50%	1.004.648.080	0,45%	1.016.824.415	0,40%	1.029.504.215	0,35%	1.042.712.754	0,35%	1.042.712.754	
p3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Sehat	%	5,16%	8,11%	490,000,000	9,62%	471,438,800	11,16%	477,152,638	12,70%	483,102,732	14,27%	489,300,940	14,27%	489,300,940	
		Prosentase Ternak Unggas Yang Sehat	%	1,01%	1,42%		1,64%		1,89%		2,15%		2,44%		2,44%		
		Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH	%	0,44%	2,71%		4,19%		5,67%		7,15%		8,63%		8,63%		
p3	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan legalitas usaha peternakan	%	0,00073%	0,01%	35.000.000	0,02%	33.674.200	0,03%	34.082.331	0,05%	34.507.338	0,06%	34.950.067	0,06%	34.950.067	
p3	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan kemampuan kelas kelompok	%	59,00%	63,00%	3.580.484.000	68,00%	4.265.831.066	72,00%	4.317.532.939	76,00%	4.371.372.574	80,00%	4.427.457.284	80,00%	4.427.457.284	
p2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	79,819.32	80,821.81	1,095,000,000	81,225.92	1,053,521,400	81,632.05	1,066,290,079	82,040.21	1,079,586,717	82,450.41	1,093,437,814	82,450.41	1,093,437,814	DINAS PERIKANAN
p2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	59,728.16	63,391.84	4,050,000,000	64,172.53	3,896,586,000	64,797.08	3,943,812,622	65,265.49	3,992,991,966	65,577.77	4,044,222,053	65,577.77	4,044,222,053	
p2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ikan Yang Diolah	Ton	89,179.36	90,916.16	902,500,000	91,825.32	868,313,300	92,743.57	878,837,257	93,671.01	889,796,358	94,607.72	901,212,445	94,607.72	901,212,445	
p3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	%	N/A	26.67%	500,000,000	40.00%	481,060,000	53.33%	486,890,447	66.67%	492,961,971	80%	499,286,673	80%	499,286,673	
1.3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	13,85	13,39		13,17		12,92		12,65		12,35		12,35		
1.3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Prosentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	Persen	3,6	3,88		4,13		4,38		4,63		4,88		4,88		
P1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	67.82%	100%	2.713.500.000	100%	2.610.712.620	100%	2.642.354.457	100%	2.675.304.617	100%	2.709.628.775	100%	2.709.628.775	DINAS SOSIAL
P1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	%	100%	100%	50.000.000	100%	3.048.106.000	100%	3.085.049.045	100%	3.123.519.606	100%	3.163.594.363	100%	3.163.594.363	
P1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Direhabilitasi	%	100%	100%	610.000.000	100%	986.893.200	100%	998.854.346	100%	1.011.310.059	100%	1.024.285.167	100%	1.024.285.167	
P1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Terlayani Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	67.82%	100%	1.149.435.100	100%	2.305.894.498	100%	2.333.841.940	100%	2.362.944.949	100%	2.393.261.532	100%	2.393.261.532	
1.3.2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,13	4,97		4,77		4,47		4,23		4,07		4,07		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	71.33%	72.30%	720,000,000	73.21%	692,726,400	74.05%	701,122,244	75.05%	709,865,238	76.08%	718,972,809	76.08%	718,972,809	DINAS TENAGA KERJA
P2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1.34%	1.35%	2,222,000,000	1.36%	2,137,830,640	1.37%	2,163,741,147	1.38%	2,190,722,999	1.39%	2,218,829,976	1.39%	2,218,829,976	
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp/Ora ng	41,726	42,978		44,267		45,595		46,963		48,372		48,372		
P3	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	%	60.05%	60.07%	215,000,000	60.08%	246,105,800	60.09%	249,088,602	60.10%	252,194,737	60.11%	255,430,396	60.11%	255,430,396	
P3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	%	88.85%	88.86%	135,000,000	88.87%	223,136,200	88.88%	225,840,611	88.89%	228,656,843	88.90%	231,590,510	88.90%	231,590,510	
P3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	%	64.71%	64.72%	95,000,000	64.73%	136,651,400	64.74%	138,307,615	64.75%	140,032,311	64.76%	141,828,925	64.76%	141,828,925	
1.3.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks	0,743	0,761		0,770		0,778		0,786		0,794		0,794		
p2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	%	70.00%	72.07%	2,424,250,000	72.78%	3,211,206,910	73.49%	3,250,126,738	74.21%	3,290,655,818	75.07%	3,332,874,932	75.07%	3,332,874,932	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
p2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	46.00%	47.30%	22,293,795,150	48.00%	22,334,616,432	48.6%	22,605,311,983	49.30%	22,887,200,224	50.00%	23,180,843,003	50.00%	23,180,843,003	
p2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penurunan luasan gagal panen	%	0.65%	0.55%	334,000,000	0.50%	1,004,648,080	0.45%	1,016,824,415	0.40%	1,029,504,215	0.35%	1,042,712,754	0.35%	1,042,712,754	
p3	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelembagaan/kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	0,59	0,63	3580484000	0,68	4265831066	0,72	4317532939	0,76	4371372574	0,8	4427457284	0,8	4427457284	
p2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana peternakan dalam kondisi baik	%	2.50%	10.00%	2,620,000,000	15.00%	2,520,754,400	20.00%	2,551,305,943	25.00%	2,583,120,728	30.00%	2,616,262,167	30.00%	2,616,262,167	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
p2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	%	7.15%	28.57%	2,225,000,000	42.86%	2,140,717,000	57.14%	2,166,662,490	71.43%	2,193,680,771	85.71%	2,221,825,696	85.71%	2,221,825,696	
p2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase ternak betina peserta AUTSK	%	2.15%	10.15%	60,000,000	11.44%	57,727,200	12.89%	58,426,854	14.50%	59,155,437	16.28%	59,914,401	16.28%	59,914,401	
p3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Sehat	%	5.16%	8.11%	490,000,000	9.62%	471,438,800	11.16%	477,152,638	12.70%	483,102,732	14.27%	489,300,940	14.27%	489,300,940	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Prosentase Ternak Unggas Yang Sehat	%	1.01%	1.42%		1.64%		1.89%		2.15%		2.44%		2.44%		
		Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH	%	0,44%	2,71%		4,19%		5,67%		7,15%		8,63%		8,63%		
p3	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan legalitas usaha peternakan	%	0,00073%	0,0125%	35.000.000	0,0235%	33.674.200	0,0344%	34.082.331	0,0454%	34.507.338,00	0,0564%	34.950.067	0,0564%	34.950.067	
p3	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan kemampuan kelas kelompok	%	59,00%	63,00%	3.580.484.000	68,00%	4.265.831.066	72,00%	4.317.532.939	76,00%	4.371.372.574	80,00%	4.427.457.284	80,00%	4.427.457.284	
p2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	79,819.32	80,821.81	1,095,000,000	81,225.92	1,053,521,400	81,632.05	1,066,290,079	82,040.21	1,079,586,717	82,450.41	1,093,437,814	82,450.41	1,093,437,814	DINAS PERIKANAN
p2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	59,728.16	63,391.84	4,050,000,000	64,172.53	3,896,586,000	64,797.08	3,943,812,622	65,265.49	3,992,991,966	65,577.77	4,044,222,053	65,577.77	4,044,222,053	
p2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ikan Yang Diolah	Ton	89,179.36	90,916.16	902,500,000	91,825.32	868,313,300	92,743.57	878,837,257	93,671.01	889,796,358	94,607.72	901,212,445	94,607.72	901,212,445	
p3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	%	N/A	26.67%	500,000,000	40.00%	481,060,000	53.33%	486,890,447	66.67%	492,961,971	80%	499,286,673	80%	499,286,673	
p2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	100%	100%	1.350.000.000	100%	3.231.362.000	100%	3.270.526.107	100%	3.311.309.568	100%	3.353.793.670	100%	3.353.793.670	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
p2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase peningkatan omset produk lokal	%	N/A	6%	1.325.000.000	6,50%	2.208.559.000	7%	2.235.326.735	7,50%	2.263.201.259	8%	2.292.238.132	8%	2.292.238.132	
p3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase koefisien variasi harga antar waktu	%			450.000.000		432.954.000		438.201.402		443.665.774		449.358.006		449.358.006	
		Ir 64 Kualitas Premium	kg	0,01%	0,93%		0,96%		0,99%		1,03%		1,06%		1,06%		
		Ir.64 Kualitas Medium	kg	0,01%	0,84%		0,87%		0,89%		0,92%		0,95%		0,95%		
		Gula Dalam Negri	kg	0,03%	2,49%		2,30%		2,13%		1,99%		1,87%		1,87%		
		Tanpa merek/minyak curah	kg	0,02%	1,23%		1,18%		1,14%		1,10%		1,06%		1,06%		
		Daging sapi murni	kg	0,01%	0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		
		Daging ayam boiler	kg	0,06%	0,71%		0,69%		0,67%		0,66%		0,64%		0,64%		
		Telur ayam ras	kg	0,02%	1,16%		1,11%		1,07%		1,04%		1,00%		1,00%		
		Jagung pipilan kering	kg	0,03%	2,56%		2,36%		2,19%		2,04%		1,91%		1,91%		
		Garam Halus	kg	0,11%	2,36%		2,18%		2,04%		1,91%		1,79%		1,79%		
		Cabe merah besar	kg	0,11%	0,92%		0,89%		0,86%		0,84%		0,82%		0,82%		
		cabe rawit	kg	0,18%	1,46%		1,53%		1,61%		1,70%		1,81%		1,81%		
		bawang merah	kg	0,09%	3,55%		3,17%		2,87%		2,62%		2,41%		2,41%		
		bawang putih	kg	0,13%	0,41%		0,41%		0,40%		0,40%		0,39%		0,39%		
p2	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan aset usaha mikro	%	35.63%	44.00%	350,000,000	48.00%	819,242,000	52.00%	829,171,213	56.00%	839,510,978	60.00%	850,281,904	60.00%	850,281,904	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
p3	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase penumbuhan usaha mikro	%	0.45%	1.00%	1,550,000,000	1.50%	5,413,786,000	2.00%	5,479,401,086	2.50%	5,547,729,218	3.00%	5,618,906,584	3.00%	5,618,906,584	
P3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase kebijakan strategis bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.443.180.000	100%	1.460.671.342	100%	1.478.885.913	100%	1.497.860.019	100%	1.497.860.019	BAGIAN PEREKONOMI AN
2	Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman																
2.1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,58	73,29		73,62		73,95		74,27		74,58		74,58		
2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,638	0,64		0,641		0,642		0,643		0,644		0,644		
P1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI	Nilai	113,5	113,53	239.775.245.000	113,54	240.692.558.719	113,55	243.609.752.531	113,56	246.647.566.145	113,57	249.812.054.419	113,57	249.812.054.419	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP/MTS	Nilai	114,05	114,08		114,09		114,10		114,11		114,12		114,12		
		APK PAUD	Nilai	96,62	96,64		96,65		96,66		96,67		96,67		96,67		
		APK Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Nilai	1,15	1,14		1,13		1,12		1,11		1,10		1,10		
P1	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	%	100%	100%	125.000.000	100%	120.265.000	100%	121.722.612	100%	123.240.493	100%	124.821.668	100%	124.821.668	
P1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD, SD, SMP Berkualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4	%	74,92%	74,94%	100.000.000	74,95%	96.212.000	74,96%	97.378.089	74,97%	98.592.394	74,98%	99.857.335	74,98%	99.857.335	
P3	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	%	1.62%	2.64%	1.010.000.000	3,15%	971.741.200	3,65%	983.518.703	4,16%	995.783.182	4,67%	1.008.559.080	4,67%	1.008.559.080	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
P3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	%	30%	50%	280.000.000	70%	300.000.000	80%	303.636.000	90%	307.422.341	100%	311.366.570	100%	311.366.570	
P3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawabann	%	30%	50%	125.000.000	70%	120.265.000	80%	121.722.612	90%	123.240.493	100%	124.821.668	100%	124.821.668	
P3	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	%	N/A	0,00%	0	15.63%	105.393.600	31.25%	106.670.970	46.88%	108.001.157	62.50%	109.386.812	62.50%	109.386.812	
2.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,806	0,808		0,808		0,809		0,810		0,811		0,811		
P1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes Sesuai Standar Akreditasi	%	21%	25%	217.136.340.090	30%	213.911.215.527	35%	216.503.819.460	41%	219.203.622.088	46%	222.016.004.560	46%	222.016.004.560	DINAS KESEHATAN

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	100.00%	100%	772.500.000	100%	743.237.700	100%	752.245.741	100%	761.626.245	100%	771.397.910	100%	771.397.910	
P1	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman Yang Sesuai Standar	%	60%	62%	222.500.000	64%	214.071.700	65%	216.666.249	66%	219.368.077	67%	222.182.570	67%	222.182.570	
P1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	%	49%	50%	4.506.755.500	51%	4.336.039.602	52%	4.388.592.402	53%	4.443.318.149	54%	4.500.325.921	54%	4.500.325.921	
P1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase SPM yang memenuhi standar	%	79.79%	80%	16.095.750.000	81%	15.486.042.990	82%	15.673.733.831	83%	15.869.185.292	84%	16.072.786.939	84%	16.072.786.939	RSUD SOEGIRI
P1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	80.00%	85,50%	21.894.000.000	86.00%	21.064.655.280	86.50%	21.319.958.902	87.00%	21.585.818.790	87.50%	21.862.764.845	87.50%	21.862.764.845	RSUD NGIMBANG
P3	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Data Informasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	%	100%	100%	122.268.400	100%	311.523.453	100%	315.299.117	100%	319.230.897	100%	323.326.630	100%	323.326.630	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
P3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,20%	22.22%	9.447.278.000	22.24%	9.089.415.109	22.26%	9.199.578.820	22.28%	9.314.297.568	22.30%	9.433.800.006	22.30%	9.433.800.006	
P3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Poktan yang aktif Dalam Pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL	%	70.48%	70.50%	929.537.000	70.52%	894.326.138	70.54%	905.165.371	70.56%	916.452.783	70.58%	928.210.873	70.58%	928.210.873	
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	53,6		54		54,6		55,1		55,6		55,6		
P2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	35%	39%	835.000.000	41%	803.370.200	43%	813.107.047	45%	823.246.492	47%	833.808.744	47%	833.808.744	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
P2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	%	12%	20%	9.540.000.000	24%	9.178.624.800	28%	9.289.869.733	32%	9.405.714.408	36%	9.526.389.724	36%	9.526.389.724	
P3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwaran yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	50%	60%	150.000.000	65%	144.318.000	70%	146.067.134	75%	147.888.591	80%	149.786.002	80%	149.786.002	
3	Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan																
3.1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	77		79		81		82		83		83		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah	
					2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
3.1.1	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	Indeks Infrastruktur	Indeks	80,83	81,33		81,83		82,33		82,83		83,33		83,33			
p1	Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	%	84.20%	89.01%	390,512,176,700	90.33%	140,608,138,799	91.12%	142,312,309,441	92.20%	144,086,943,940	93.79%	145,935,579,431	93.79%	145,935,579,431	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	%	83.22%	77.23%		80.10%		82.98%		85.08%		87.17%		87.17%			
p1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase Ketersediaan Air Baku	%	79.17%	80.5%	26,091,003,100	81.0%	55,102,675,903	81.5%	55,770,520,335	82.0%	56,465,978,723	82.5%	57,190,437,230	82.5%	57,190,437,230	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
		Prosentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	%	32.11%	28.56%		29.56%		30.56%		31.56%		32.56%		32.56%			
		Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	68.05%	71.05%		72.55%		74.05%		75.55%		77.05%		77.05%			
p1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Yang Terlayani SPAM	%	51.55%	52.87%	25,315,000,000	53.53%	26,856,067,800	54.19	27,181,563,342	54.85	27,520,517,437	55.51	27,873,605,675	55.51	27,873,605,675	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
p1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	%	30%	60%	3,357,991,000	70%	3,230,790,301	80%	3,269,947,479	90%	3,310,723,724	100%	3,353,200,310	100%	3,353,200,310		
p1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	71.82%	71.91%	1,345,000,000	71.96%	1,294,051,400	72.01%	1,309,735,303	72.05%	1,326,067,702	72.10	1,343,081,151	72.10	1,343,081,151		
p1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	25.36%	32.09%	6,075,000,000	35.45%	5,844,879,000	38.81%	5,915,718,933	42.18%	5,989,487,949	45.54	6,066,333,079	45.54	6,066,333,079		
p1	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	Rasio	57.99	60.14%	2,605,000,000	62.29	2,506,322,600	64.45	2,536,699,230	66.60	2,568,331,869	68.76	2,601,283,567	68.76	2,601,283,567		
p1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	4.16%	4.18%	7,430,000,000	5.04%	7,148,551,600	5.91%	7,235,192,045	6.77%	7,325,414,890	7.63%	7,419,399,963	7.63%	7,419,399,963		
p1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Rasio	11.00	29.57	350,000,000	43.86	336,742,000	59.57	340,823,313	79.29	345,073,380	100	349,500,671	100	349,500,671		
p1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	%	76.95%	77.07%	850,000,000	77.13%	817,802,000	77.18%	827,713,760	77.24%	838,035,351	77.30%	848,787,344	77.30%	848,787,344		
p1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah Korban Bencana	%	N/A	32.26%	910,000,000	48.39%	875,529,200	64.52%	886,140,614	80.65%	897,190,787	100,00%	908,701,745	100,00%	908,701,745		
p1	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	%	N/A	6.12%	6,840,000,000	9.18%	6,580,900,800	12.25%	6,660,661,318	15.31%	6,743,719,764	18.37%	6,830,241,689	18.37%	6,830,241,689		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan /Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah	
					2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
		Persentase Rumah Layak Huni	%	70.27%	70.43%		70.52%		70.60%		70.68%		70.76%		70.76%			
p1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Sudah Dilengkapi PSU (Jalan Lingkungan + Drainase Lingkungan)	%	59.71%	60.72%	43,059,000,000	61.10%	41,427,925,080	61.51%	41,930,031,532	61.96%	42,452,899,025	62.46%	42,997,569,720	62.46%	42,997,569,720		
p3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	17.86	150,000,000	26.79	144,318,000	35.71	146,067,134	44.64	147,888,591	53.57	149,786,002	53.57	149,786,002		
p3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	%	100%	100%	150,000,000	100%	144,318,000	100%	146,067,134	100%	147,888,591	100%	149,786,002	100%	149,786,002		
P3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi	%	92.43	93.43%	4,567,026,920	94.43%	4,394,027,940	95.43%	4,447,283,559	96.43%	4,502,741,185	97.43%	4,560,511,354	97.43%	4,560,511,354	Dinas Perhubungan	
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,67	61,69		61,88		62,08		62,28		62,74		62,74			
P2	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Presentase Pemenuhan Kualitas Air	%	91%	91.5%	2,074,750,000	92.0%	1,996,158,470	92.5%	2,020,351,911	93.0%	2,045,545,699	93.5%	2,071,790,050	93.5%	2,071,790,050	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
P2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Tutupan Lahan	%	39.67%	40.5%	910,000,000	41%	875,529,200	41.5%	886,140,614	42%	897,190,787	42.5%	908,701,745	42.5%	908,701,745		
P2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	APK Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kegiatan atau usaha	12	14	60,000,000	15	57,727,200	16	58,426,854	17	59,155,437	18	59,914,401	18	59,914,401		
P2	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	%	62.20%	64%	1,455,000,000	66%	1,399,884,600	68%	1,416,851,201	70%	1,434,519,336	72%	1,452,924,219	72%	1,452,924,219		
P3	program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dipenuhi	%	100%	100%	150,000,000	100%	144,318,000	100%	146,067,134	100%	147,888,591	100%	149,786,002	100%	149,786,002		
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	%	55.50%	59.00%	285,000,000	60.75%	274,204,200	62.50%	277,527,555	64.25%	280,988,324	66.00%	284,593,404	66.00%	284,593,404		



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Wilayah Yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	%	63.3%	65%	425,000,000	66%	408,901,000	67%	413,856,880	68%	419,017,675	69%	424,393,672	69%	424,393,672	
P3	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	%	12.27%	16%	130,000,000	18%	125,075,600	21%	126,591,516	24%	128,170,112	26%	129,814,535	26%	129,814,535	
P3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100%	100%	65,000,000	100%	62,537,800	100%	63,295,758	100%	64,085,056	100%	64,907,268	100%	64,907,268	
3.1.3	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,6		0,62		0,64		0,66		0,68		0,68		
p1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100%	100%	1,520,296,200	100%	1,662,707,380	100%	1,682,859,393	100%	1,703,844,650	100%	1,725,704,977	100%	1,725,704,977	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
p2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan (beras)	%	443.21%	449.21%	1,162,800,000	452.21%	1,118,753,136	455.21%	1,132,312,424	458.21%	1,146,432,360	461.21%	1,161,141,087	461.21%	1,161,141,087	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
p3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah lumbung pangan yang meningkat statusnya	Lumbu ng pangan	16	20	2,160,000,000	25	2,078,179,200	30	2,103,366,732	35	2,129,595,715	40	2,156,918,428	40	2,156,918,428	
p3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang meningkat statusnya	%	3,85%	8.97%	274,500,000	11.54%	450,376,940	15.38%	455,835,509	19.23%	461,519,777	23.08%	467,441,076	23.08%	467,441,076	
p3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	NA	50.00%	108,500,000	62.50%	198,965,020	75.00%	201,376,476	87.50%	203,887,641	87.50%	206,503,519	87.50%	206,503,519	
4.1	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	63,06		63,63		64,2		64,78		65,36		65,36		
4.1.1	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	Nilai	N/A	67,6		70,3		73,12		76,04		79,08		79,08		
P1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	1.515.000.000	100%	1.457.611.800	100%	1.475.278.055	100%	1.493.674.772	100%	1.512.838.620	100%	1.512.838.620	BANGKESBANGPOL
P1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan dan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bagi Pemuda	%	-	20%	300.000.000	40%	288.636.000	60%	292.134.268	80%	295.777.183	100%	299.572.004	100%	299.572.004	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	-	20%	305.000.000	40%	293.446.600	60%	297.003.173	80%	300.706.802	100%	304.564.871	100%	304.564.871	
P1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, Orpem dan LSM Yang Bertentangan Dengan Asas Pancasila	%	0%	0%	640.000.000	0%	615.756.800	0%	623.219.772	0%	630.991.323	0%	639.086.942	0%	639.086.942	
P2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan,, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	13,574,764,000	100%	15,171,558,260	100%	15,364,371,313	100%	15,568,110,090	100%	15,774,282,109	100%	15,774,282,109	BAGIAN KESEJAHTER AAN MASYARAKAT
4.1.2	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	Nilai	N/A	66,3		67,63		68,98		70,36		71,77		71,77		
P1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Gangguan Tranitibum	%	100%	100%	957.500.000	100%	921.229.900	100%	932.395.206	100%	944.022.175	100%	956.133.979	100%	956.133.979	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
P1	Program Pencegahan,, Penganggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Kejadian Non Kebakaran Yang Tertangani	%	100%	100%	290.027.600	100%	479.041.355	100%	484.847.336	100%	490.893.382	100%	497.191.544	100%	497.191.544	
4.1.3	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	Nilai	N/A	64,06		65,66		67,31		68,99		70,71		70,71		
P1	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	%	100%	100%	127.500.000	100%	322.670.300	100%	326.581.064	100%	330.653.530	100%	334.895.815	100%	334.895.815	DINAS SOSIAL
P1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	TMP	1	1	102.000.000	1	298.136.240	1	301.749.651	1	305.512.469	1	309.432.194	1	309.432.194	
4.1.4	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	54,7		54,9		55,1		55,3		55,5		55,5		
P2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	58%	67%	621.000.000	71%	597.476.520	75%	604.717.935	79%	612.258.768	83%	620.114.048	83%	620.114.048	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
P2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang di Lestarikan	%	69,47%	68,63%	700.000.000	71,57%	673.484.000	74,51%	681.646.626	77,45%	690.146.760	80,39%	699.001.342	80,39%	699.001.342	
P3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni tradisional yang dikembangkan	%	57,07%	59%	140.932.000	60,75%	135.593.496	61,78%	137.236.889	64,40%	138.948.233	65%	140.730.939	65%	140.730.939	
P3	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang dikelola	%	50%	50%	600.000.000	100%	577.272.000	100%	584.268.537	100%	591.554.365	100%	599.144.008	100%	599.144.008	
P3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Daerah dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	%	89%	91%	50.000.000	92,00%	95.606.000	93,00%	96.764.745	94,00%	97.971.401	95,00%	99.228.374	95,00%	99.228.374	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKA AN

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi																
5.1	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,3	68		69		70,5		71		71,5		71,5		
5.1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Nilai	81,78	83,22		83,85		84,48		85,11		85,73		85,73		
P3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Informasi dan Kegiatan Pimpinan yang Terpublikasi	%	100,0%	100%	1.200.000.000	100%	1.154.544.000	100%	1.168.537.073	100%	1.183.108.731	100%	1.198.288.016	100%	1.198.288.016	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
P3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan	%	100,0%	100%	13.451.408.402	100%	12.941.869.052	100%	13.098.724.505	100%	13.262.065.599	100%	13.432.217.901	100%	13.432.217.901	BAGIAN UMUM
P3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Regulasi Yang Di Tetapkan	%	100,0%	100%	1.281.000.000	100%	1.232.475.720	100%	1.247.413.326	100%	1.262.968.570	100%	1.279.172.457	100%	1.279.172.457	BAGIAN HUKUM
P3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Kerjasama Yang Disahkan/ Ditetapkan	%	100,0%	100%	1.150.000.000	100%	1.106.438.000	100%	1.119.848.029	100%	1.133.812.533	100%	1.148.359.348	100%	1.148.359.348	BAGIAN KERJASAMA
P3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Lingkup Pemerintahan Yang Ditindak Lanjuti	%	100,0%	100%	1.500.000.000	100%	1.443.180.000	100%	1.460.671.342	100%	1.478.885.913	100%	1.497.860.019	100%	1.497.860.019	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
P3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	%	100,0%	100%	1.475.000.000	100%	1.419.127.000	100%	1.436.326.819	100%	1.454.237.815	100%	1.472.895.686	100%	1.472.895.686	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
P3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Kebijakan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Yang Ditindaklanjuti	%	100,0%	100%	1.200.000.000	100%	1.154.544.000	100%	1.168.537.073	100%	1.183.108.731	100%	1.198.288.016	100%	1.198.288.016	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
P3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Kebijakan Lingkup Bidang Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	%	100,0%	100%	1.400.000.000	100%	1.346.968.000	100%	1.363.293.252	100%	1.380.293.519	100%	1.398.002.685	100%	1.398.002.685	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
P2	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	%	98,00%	98,10%	196.524.855	98,20%	189.080.493	98,30%	191.372.149	98,40%	193.758.560	98,50%	196.244.482	98,50%	196.244.482	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Prosentase KIA Yang Diterbitkan	%	25,24%	32,00%		34,00%		36,00%		38,00%		40,00%		40,00%		
P2	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	%	98,66%	98,79%	176.658.650	98,82%	169.966.820	98,90%	172.026.818	98,98%	174.171.993	99,06%	176.406.619	99,06%	176.406.619	
		Prosentase Penerbitan Akta Kematian	%	73,51%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
P3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Titik Layanan Yang Terfasilitasi Dengan SAK dan DKB Dalam Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah	2	29	1.513.932.150	29	1.456.584.400	29	1.474.238.203	29	1.492.621.953	29	1.511.772.293	29	1.511.772.293	
P3	Program Pengelolaan Profil	Persentase Buku Profil Kependudukan dan Balihu Yang Tersedia	%	100%	100%	25.000.000	100%	24.053.000	100%	24.344.522	100%	24.648.099	100%	24.964.334	100%	24.964.334	
P3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	%	100%	100%	29.202.373.603	100%	28.096.187.691	100%	28.436.713.486	100%	28.791.319.303	100%	29.160.711.930	100%	29.160.711.930	SEKRETARIAT DPRD
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	41.194.200	100 %	39.633.764	100 %	40.114.125	100 %	40.614.348	100 %	41.135.430	100 %	41.135.430	KECAMATAN LAMONGAN
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	3.298.579.352	100 %	3.163.629.166	100 %	3.201.972.352	100 %	3.241.900.947	100 %	3.283.494.536	100 %	3.283.494.536	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	20.037.500	100 %	19.278.480	100 %	19.512.135	100 %	19.755.451	100 %	20.008.913	100 %	20.008.913	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	8,33%	16,67%	73.091.150	25,00%	70.322.457	33,33%	71.174.765	41,67%	72.062.315	50,00%	72.986.874	50,00%	72.986.874	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	119.114.100	100 %	114.602.058	100 %	115.991.035	100 %	117.437.443	100 %	118.944.165	100 %	118.944.165	KECAMATAN BABAT
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	1.468.644.300	100 %	1.393.012.054	100 %	1.409.895.360	100 %	1.427.476.755	100 %	1.445.791.282	100 %	1.445.791.282	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,76%	19,05%	126.463.150	23,81%	121.672.726	33,33%	123.147.399	42,86%	124.683.047	52,38%	126.282.731	52,38%	126.282.731	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	19.660.000	100 %	18.915.279	100 %	19.144.532	100 %	19.383.265	100 %	19.631.952	100 %	19.631.952	KECAMATAN PACIRAN



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	786.470.940	100 %	736.679.421	100 %	745.607.975	100 %	754.905.707	100 %	764.591.147	100 %	764.591.147	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	6,25%	12,50%	85.017.940	18,75%	81.797.460	25,00%	82.788.846	31,25%	83.821.223	37,50%	84.896.649	37,50%	84.896.649	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	50.000.000	100 %	48.106.000	100 %	48.689.045	100 %	49.296.197	100 %	49.928.667	100 %	49.928.667	KECAMATAN BRONDONG
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	850.839.119	100 %	798.609.333	100 %	808.288.478	100 %	818.367.836	100 %	828.867.495	100 %	828.867.495	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	11,11%	22,22%	75.000.000	33,33%	72.159.000	44,44%	73.033.567	55,56%	73.944.296	66,67%	74.893.001	66,67%	74.893.001	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	85.250.000	100 %	77.020.730	100 %	77.954.221	100 %	78.926.310	100 %	79.938.935	100 %	79.938.935	KECAMATAN TURI
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	34.800.000	100 %	33.481.776	100 %	33.887.575	100 %	34.310.153	100 %	34.750.352	100 %	34.750.352	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	26,32%	31,58%	171.900.000	36,84%	150.388.428	42,11%	152.211.136	47,37%	154.109.209	52,63%	156.086.430	52,63%	156.086.430	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	37.000.000	100 %	35.598.440	100 %	36.029.893	100 %	36.479.186	100 %	36.947.214	100 %	36.947.214	KECAMATAN PUCUK
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	50.500.000	100 %	43.587.060	100 %	44.115.335	100 %	44.665.453	100 %	45.238.511	100 %	45.238.511	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	KECAMATAN SUKODADI
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,88%	11,76%	129.500.000	17,65%	109.594.540	23,53%	110.922.826	35,29%	112.306.033	47,06%	113.746.920	47,06%	113.746.920	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	0	100%	13.000.000	100%	13.157.560	100%	13.321.635	100%	13.492.551	100%	13.492.551	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	34.000.000	100%	26.700.000	100%	27.023.604	100%	27.360.588	100%	27.711.625	100%	27.711.625	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	5%	10%	75.000.000	15%	45.171.080	20%	45.718.553	30%	46.288.664	40%	46.882.547	40%	46.882.547	KECAMATAN TIKUNG
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	56,575,700	100%	52,432,612	100%	53,068,096	100%	53,729,855	100%	54,419,209	100%	54,419,209	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	49,799,050	100%	45,912,662	100%	46,469,123	100%	47,048,593	100%	47,652,227	100%	47,652,227	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10,500,000	100%	10,627,260	100%	10,759,782	100%	10,897,830	100%	10,897,830	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	50,000,000	100%	44,606,000	100%	45,146,625	100%	45,709,603	100%	46,296,057	100%	46,296,057	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	30,77%	38,46%	124,000,000	46,15%	106,302,880	53,85%	107,591,271	61,54%	108,932,934	69,23%	110,330,544	69,23%	110,330,544	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	40.000.000	100 %	38.484.800	100 %	38.951.236	100 %	39.436.958	100 %	39.942.934	100 %	39.942.934	KECAMATAN DEKET
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	83.456.600	100 %	70.295.264	100 %	71.147.243	100 %	72.034.449	100 %	72.958.651	100 %	72.958.651	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	10.000.000	100 %	9.621.200	100 %	9.737.809	100 %	9.859.239	100 %	9.985.733	100 %	9.985.733	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	11,76%	17,65%	61.945.000	23,53%	59.598.523	29,41%	60.320.858	41,18%	61.073.059	52,94%	61.856.626	52,94%	61.856.626	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	25.448.000	100 %	19.484.030	100 %	19.720.176	100 %	19.966.087	100 %	20.222.252	100 %	20.222.252	KECAMATAN KALITENGGAH
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	30.200.000	100 %	24.056.024	100 %	24.347.583	100 %	24.651.197	100 %	24.967.472	100 %	24.967.472	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,00%	10,00%	90.000.000	15,00%	76.590.800	20,00%	77.519.080	30,00%	78.485.743	40,00%	79.492.716	40,00%	79.492.716	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	24.861.500	100 %	23.919.746	100 %	24.209.654	100 %	24.511.548	100 %	24.826.031	100 %	24.826.031	KECAMATAN KEMBANGBAHU
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	28.000.000	100 %	26.939.360	100 %	27.265.865	100 %	27.605.870	100 %	27.960.054	100 %	27.960.054	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	12.000.000	100 %	11.545.440	100 %	11.685.371	100 %	11.831.087	100 %	11.982.880	100 %	11.982.880	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	33,33%	38,89%	49.500.519	44,44%	37.625.439	50,00%	38.081.460	55,56%	38.556.335	61,11%	39.051.013	61,11%	39.051.013	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	31.549.900	100 %	30.354.790	100 %	30.722.690	100 %	31.105.802	100 %	31.504.889	100 %	31.504.889	KECAMATAN MANTUP
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	65.903.200	100 %	53.406.787	100 %	54.054.077	100 %	54.728.131	100 %	55.430.293	100 %	55.430.293	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	17.000.000	100 %	16.356.040	100 %	16.554.275	100 %	16.760.707	100 %	16.975.747	100 %	16.975.747	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	20,00%	26,67%	48.000.800	33,33%	46.182.530	40,00%	46.742.262	46,67%	47.325.138	53,33%	47.932.319	53,33%	47.932.319	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	45.000.000	100%	42.295.400	100%	42.808.020	100%	43.341.836	100%	43.897.912	100%	43.897.912	KECAMATAN
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	69.000.000	100%	61.386.280	100%	62.130.282	100%	62.905.046	100%	63.712.118	100%	63.712.118	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	25.000.000	100%	23.053.000	100%	23.332.402	100%	23.623.357	100%	23.926.445	100%	23.926.445	MODO
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	35%	41%	72.000.000	47%	66.272.640	53%	67.075.864	59%	67.912.300	65%	68.783.615	65%	68.783.615	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	70.000.000	100 %	67.348.400	100 %	68.164.663	100 %	69.014.676	100 %	69.900.134	100 %	69.900.134	KECAMATAN BLULUK
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	52.200.000	100 %	40.222.664	100 %	40.710.163	100 %	41.217.818	100 %	41.746.643	100 %	41.746.643	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	100 %	100 %	30.000.000	100 %	28.863.600	100 %	29.213.427	100 %	29.577.718	100 %	29.957.200	100 %	29.957.200	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	66,67%	66,67%	60.000.000	66,67%	57.727.200	66,67%	58.426.854	66,67%	59.155.437	77,78%	59.914.401	77,78%	59.914.401	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	67.482.800	100 %	64.926.552	100 %	65.713.461	100 %	66.532.908	100 %	67.386.525	100 %	67.386.525	KECAMATAN KARAGBINAN GUN
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	59.800.000	100 %	57.534.776	100 %	58.232.097	100 %	58.958.252	100 %	59.714.686	100 %	59.714.686	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	100 %	100 %	13.000.000	100 %	12.507.560	100 %	12.659.152	100 %	12.817.011	100 %	12.981.454	100 %	12.981.454	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	14.000.000	100 %	13.469.680	100 %	13.632.933	100 %	13.802.935	100 %	13.980.027	100 %	13.980.027	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	9,52%	14,29%	26.500.000	19,05%	25.496.180	23,81%	25.805.194	33,33%	26.126.984	42,86%	26.462.194	42,86%	26.462.194	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100 %	58.500.000	100 %	56.284.020	100 %	56.966.182	100 %	57.676.551	100 %	58.416.541	100 %	58.416.541	KECAMATAN GLAGAH
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	79.00%	100 %	54.700.000	100 %	42.627.964	100 %	43.144.615	100 %	43.682.628	100 %	44.243.076	100 %	44.243.076	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	17,24%	20,69%	90.000.000	24,14%	76.590.800	27,59%	77.519.080	34,48%	78.485.743	41,38%	79.492.716	41,38%	79.492.716	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	36.200.000	100%	29.828.744	100%	30.190.268	100%	30.566.741	100%	30.958.912	100%	30.958.912	KECAMATAN NGIMBANG
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	35.095.500	100%	28.766.082	100%	29.114.727	100%	29.477.788	100%	29.855.988	100%	29.855.988	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	12.329.000	100%	11.861.977	100%	12.005.745	100%	12.155.456	100%	12.311.411	100%	12.311.411	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,26%	10,53%	18.012.000	15,79%	17.329.705	21,05%	17.539.741	31,58%	17.758.462	42,11%	17.986.303	42,11%	17.986.303	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	35.894.000	100 %	29.534.335	100 %	29.892.291	100 %	30.265.048	100 %	30.653.349	100 %	30.653.349	KECAMATAN SUGIO
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	35.700.000	100 %	29.347.684	100 %	29.703.378	100 %	30.073.779	100 %	30.459.626	100 %	30.459.626	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,76%	14,29%	72.919.800	23,81%	60.157.598	33,33%	60.886.708	42,86%	61.645.965	52,38%	62.436.883	52,38%	62.436.883	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	18.359.200	100 %	12.663.754	100 %	12.817.238	100 %	12.977.069	100 %	13.143.565	100 %	13.143.565	KECAMATAN KARANGGEN ENG
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	21.489.500	100 %	15.675.478	100 %	15.865.465	100 %	16.063.307	100 %	16.269.399	100 %	16.269.399	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,56%	11,11%	53.327.000	16,67%	41.306.973	22,22%	41.807.614	33,33%	42.328.955	44,44%	42.872.035	44,44%	42.872.035	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	-	100%	15,000,000	100%	13,750,000	100%	13,916,650	100%	14,090,191	100%	14,270,968	100%	14,270,968	KECAMATAN
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	-	100%	30,700,000	100%	24,364,244	100%	24,659,539	100%	24,967,043	100%	25,287,370	100%	25,287,370	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	-	-	0	100%	10,000,000	100%	10,121,200	100%	10,247,411	100%	10,378,886	100%	10,378,886	SAMBENG
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	-	100%	15,000,000	100%	13,750,000	100%	13,916,650	100%	14,090,191	100%	14,270,968	100%	14,270,968	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,55%	9,09%	63,000,000	13,64%	47,150,000	18,18%	47,721,458	27%	48,316,545	36%	48,936,446	36%	48,936,446	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	50.000.000	100 %	43.106.000	100 %	43.628.445	100 %	44.172.491	100 %	44.739.224	100 %	44.739.224	KECAMATAN KEDUNGPRING
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	72.000.000	100 %	69.272.640	100 %	70.112.224	100 %	70.986.524	100 %	71.897.281	100 %	71.897.281	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	100 %	100 %	23.000.000	100 %	22.128.760	100 %	22.396.961	100 %	22.676.251	100 %	22.967.187	100 %	22.967.187	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,35%	13,04%	60.000.000	21,74%	52.727.200	30,43%	53.366.254	39,13%	54.031.731	47,83%	54.724.958	47,83%	54.724.958	KECAMATAN LAREN
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	-	100%	30.000.000	100%	23.863.600	100%	24.152.827	100%	24.454.013	100%	24.767.758	100%	24.767.758	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	-	100%	30.500.000	100%	27.344.660	100%	27.676.077	100%	28.021.198	100%	28.380.710	100%	28.380.710	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	-	100%	40.000.000	100%	36.000.000	100%	36.436.320	100%	36.890.681	100%	37.363.988	100%	37.363.988	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	-	-	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	KECAMATAN SEKARAN
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	10,00%	15%	99.000.000	20%	94.734.680	25%	95.882.864	35%	97.078.524	45%	98.324.041	45%	98.324.041	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	44.999.850	100 %	43.295.256	100 %	43.819.994	100 %	44.366.430	100 %	44.935.651	100 %	44.935.651	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	38.800.000	100 %	37.330.256	100 %	37.782.699	100 %	38.253.849	100 %	38.744.646	100 %	38.744.646	KECAMATAN SEKARAN
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	13.999.850	100 %	13.469.536	100 %	13.632.786	100 %	13.802.787	100 %	13.979.877	100 %	13.979.877	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	42,86%	47,62%	79.999.600	52,38%	66.969.215	52,38%	67.780.882	57,14%	68.626.110	61,90%	69.506.583	61,90%	69.506.583	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	72.000.000	100 %	59.272.640	100 %	59.991.024	100 %	60.739.112	100 %	61.518.395	100 %	61.518.395	KECAMATAN SARIREJO
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	8.800.000	100 %	8.466.656	100 %	8.569.272	100 %	8.676.131	100 %	8.787.445	100 %	8.787.445	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	11,11%	22,22%	85.500.000	33,33%	72.261.260	44,44%	73.137.066	55,56%	74.049.086	66,67%	74.999.135	66,67%	74.999.135	KECAMATAN SUKORAME
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	40.000.000	100 %	38.484.800	100 %	38.951.236	100 %	39.436.958	100 %	39.942.934	100 %	39.942.934	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	28.500.000	100 %	27.420.420	100 %	27.752.755	100 %	28.098.832	100 %	28.459.340	100 %	28.459.340	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100 %	100 %	18.000.000	100 %	17.318.160	100 %	17.528.056	100 %	17.746.631	100 %	17.974.320	100 %	17.974.320	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	44,44%	55,56%	107.500.000	55,56%	93.427.900	66,67%	94.560.246	66,67%	95.739.412	77,78%	96.967.749	77,78%	96.967.749	KECAMATAN SOLOKURO
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100 %	60.500.000	100 %	52.025.260	100 %	52.655.806	100 %	53.312.424	100 %	53.996.422	100 %	53.996.422	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	20.0%	100 %	45.600.000	100 %	37.872.672	100 %	38.331.689	100 %	38.809.685	100 %	39.307.613	100 %	39.307.613	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	50.20%	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	50.00%	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	10,00%	20,00%	66.000.000	30,00%	55.682.920	40,00%	56.357.797	50,00%	57.060.579	60%	57.792.666	60%	57.792.666	KECAMATAN MADURAN
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100 %	100 %	52.702.600	100 %	45.706.226	100 %	46.260.185	100 %	46.837.049	100 %	47.437.969	100 %	47.437.969	
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100 %	100 %	43.903.250	100 %	37.240.195	100 %	37.691.546	100 %	38.161.560	100 %	38.651.172	100 %	38.651.172	

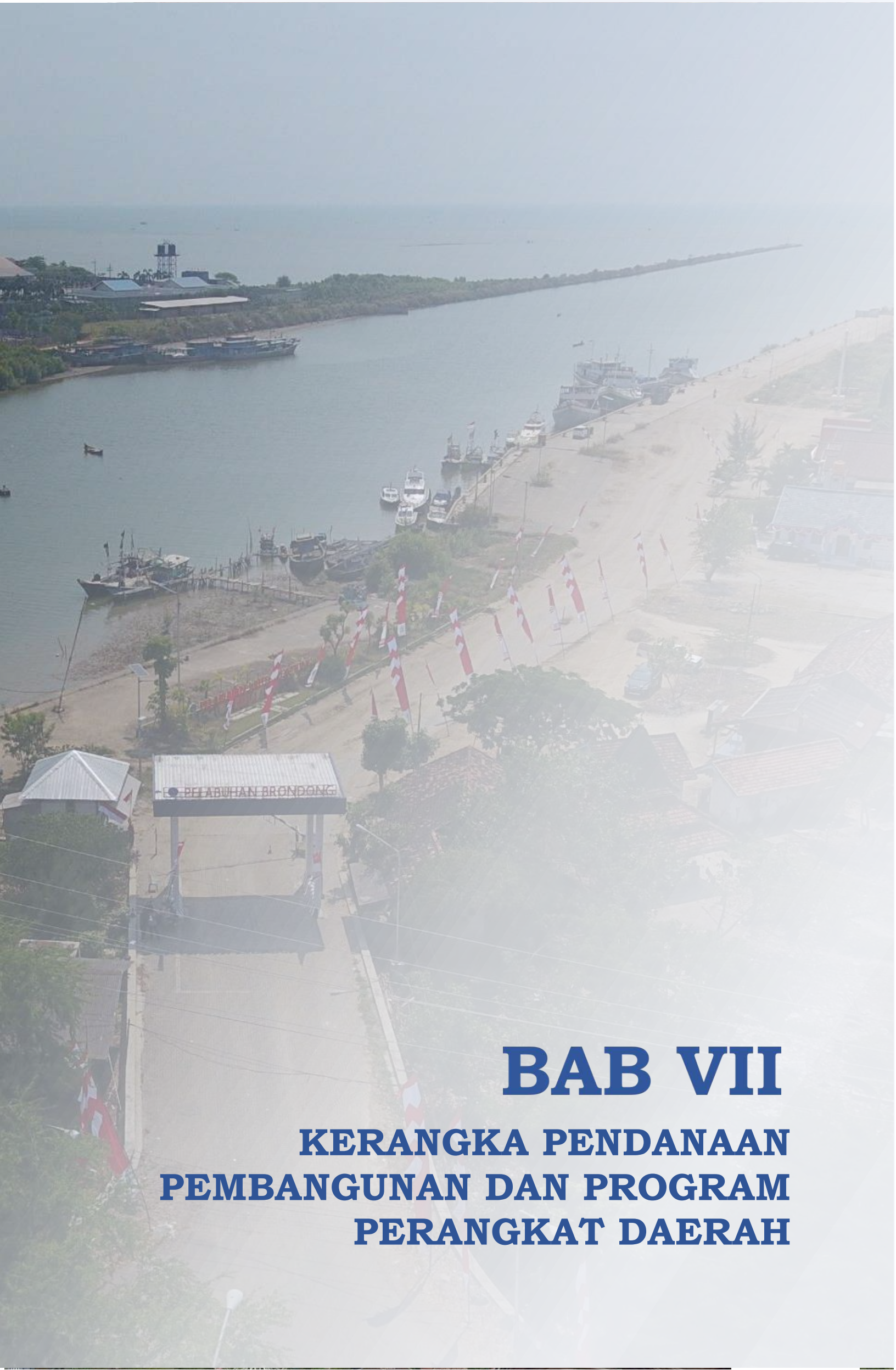
No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
				2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100 %	10.000.000	100 %	10.121.200	100 %	10.247.411	100 %	10.378.886	100 %	10.378.886	
P3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	%	35,29%	41,18%	79.999.950	47,06%	66.969.552	47,06%	67.781.223	52,94%	68.626.455	58,82%	69.506.932	58,82%	69.506.932	
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,65		3,75		3,85		3,95		4		4		
P2	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Terintegrasi	%	12,50%	25%	5.469.500.000	35%	5.262.315.340	45%	5.326.094.602	55%	5.392.511.002	65%	5.461.696.918	65%	5.461.696.918	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A
P3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	%	4,46%	15%	2.173.900.000	20%	2.091.552.668	25%	2.116.902.286	30%	2.143.300.058	35%	2.170.798.598	35%	2.170.798.598	
P3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Terpublikasi	%	100%	100%	300.000.000	100%	288.636.000	100%	292.134.268	100%	295.777.183	100%	299.572.004	100%	299.572.004	
P3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	%	25%	10%	374.800.000	17%	360.602.576	25%	364.973.079	35%	369.524.294	40%	374.265.290	40%	374.265.290	
5.1.2	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	60,68	65		68		71		72		74		74		
P2	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	55	62	1.300.000.000	65	1.250.756.000	70	1.265.915.163	75	1.281.701.125	81	1.298.145.350	81	1.298.145.350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
P3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	Indeks	22.86	21.44	2.797.860.000	24.44	2.691.877.063	27.44	2.724.502.613	28.44	2.758.477.161	30.44	2.793.868.423	30.44	2.793.868.423	
5.1.3	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Nilai SAKIP	Nilai	A	A		A		A		A		A		A		
P2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Organisasi Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.950.000.000	100%	1.876.134.000	100%	1.898.872.744	100%	1.922.551.687	100%	1.947.218.025	100%	1.947.218.025	BAGIAN ORGANISASI
P2	Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tepat Waktu	%	100%	100%	1,274,450,000	100%	1,362,451,334	100%	1,378,964,244	100%	1,396,159,928	100%	1,414,072,660	100%	1,414,072,660	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
P3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	%	N/A	80%	3,107,286,996	81%	3,134,218,615	82%	3,172,205,344	83%	3,211,762,745	84%	3,252,969,661	84%	3,252,969,661	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah	%	15 hasil penelitian/kajian	27%	315,000,000	40%	787,317,800	53%	796,860,092	67%	806,796,937	80%	817,148,142	80%	817,148,142	
	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
P2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase pelaksanaan penganggaran APBD yang tepat waktu	%	100%	100%	548.882.672.500	100%	528.090.996.866	100%	534.491.459.748	100%	541.156.568.251	100%	548.099.607.021	100%	548.099.607.021	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase ketepatan laporan keuangan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
P2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	%	100%	100%	900,000,000	100%	865,908,000	100%	876,402,805	100%	887,331,548	100%	898,716,012	100%	898,716,012	
P3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	%	0,46%	0,51%	4.118.600.000	0,52%	3.962.587.432	0,53%	4.010.613.992	0,54%	4.060.626.348	0,55%	4.112.724.184	0,55%	4.112.724.184	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	-7,50%	3,26%		3,27%		3,28%		3,29%		3,30%		3,30%		
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	%	6,30%	1,86%		1,87%		1,88%		1,89%		1,90%		1,90%		
	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		
P2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	%	80%	84%	682.450.000	86%	622.476.294	87%	630.020.707	88%	637.877.065	90%	646.061.028	90%	646.061.028	INSPEKTORAT
		Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK Yang Ditindaklanjuti	%	78%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		
P3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan Yang Dilegalitaskan	%	60%	64%	615.000.000	66%	591.703.800	68%	598.875.250	70%	606.343.224	72%	614.122.608	72%	614.122.608	
5.1.4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	16	75,00%		131,25%				200,00%		281,25%		375,00%	375,00%	
P2	Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	%	75%	77%	60.837.500.000	79%	58.532.975.500	81%	59.242.395.163	83%	59.981.147.831	85%	60.750.705.957	85%	60.750.705.957	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
P2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Kerjasama antar Desa yang berjalan dengan baik	%	90%	92%	45.000.000	94%	43.295.400	96%	43.820.140	98%	44.366.577	100%	44.935.801	100%	44.935.801	
P2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	%	90%	92%	2.295.000.000	94%	2.208.065.400	96%	2.234.827.153	98%	2.262.695.447	100%	2.291.725.830	100%	2.291.725.830	
P3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase tata kelola administrasi Desa yang tertib	%	100%	100%	3.037.000.000	100%	2.921.958.440	100%	2.957.372.576	100%	2.994.251.012	100%	3.032.667.253	100%	3.032.667.253	





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program prioritas, baik yang bersifat strategis maupun operasional merupakan tanggung jawab kinerja kepala perangkat daerah. Program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak langsung secara langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan dapat mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih namun ada juga yang tidak mendukung secara langsung. Akan tetapi bukan berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan pada perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan tahunan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra, RKPD dan Renja perangkat daerah.

Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik, tentunya perlu diperhatikan pula kapasitas riil Kabupaten Lamongan. Idealnya kapasitas riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Berikut merupakan kondisi Kapasitas Riil Kabupaten Lamongan pada tahun 2022-2026:

TABEL VII. 1 KAPASITAS RIIL KABUPATEN LAMONGAN 2022-2026

Uraian	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	Rp 2.901.059.658.100	Rp 2.960.591.239.847	Rp 2.996.474.338.861	Rp 3.033.772.758.552	Rp 3.072.553.416.796
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Total Penerimaan	Rp 2.906.059.658.100	Rp 2.965.591.239.847	Rp 3.001.474.338.861	Rp 3.038.772.758.552	Rp 3.077.553.416.796
Belanja Tidak Langsung (Belanja – (Belanja Modal + Belanja Barang dan Jasa)	Rp 1.532.253.323.299	Rp 1.233.008.613.316	Rp 1.265.388.464.311	Rp 1.265.778.114.062	Rp 1.276.153.022.964
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000	Rp 72.500.000.000
Total Pengeluaran	Rp 1.604.753.323.299	Rp 1.305.508.613.316	Rp 1.337.888.464.311	Rp 1.338.278.114.062	Rp 1.348.653.022.964
Kapasitas riil	Rp 1.301.306.334.801	Rp 1.660.082.626.531	Rp 1.663.585.874.550	Rp 1.700.494.644.490	Rp 1.728.900.393.832

Sumber : Hasil Data Diolah



Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah yang terdapat pada tabel di atas idealnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program, sehingga harus selaras. Namun dengan adanya perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 menjadi PP No. 12 Tahun 2019, maka nilai/ jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada bab 3 dan tabel di atas tidak sama dengan nilai anggaran dari keseluruhan program perangkat daerah yang terdapat pada bab 7, mengingat keberadaan program perangkat daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 melekat pada semua jenis belanja daerah, sehingga akumulasi dari keseluruhan nilai anggaran program perangkat daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait program prioritas yang dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi, maka dapat diketahui proporsi anggaran pada program perangkat daerah tahun 2022 hingga tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TABEL VII. 2 PROPORSI ANGGARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS ALOKASI BELANJA DAERAH

Prioritas Alokasi Belanja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran(Rp)	%	Anggaran(Rp)	%	Anggaran(Rp)	%	Anggaran(Rp)
Prioritas I	74,30%	2.365.406.898.054	72,12%	2,094,348,708,978	72,12%	2,119,732,215,331	72,12%	2,146,165,276,056	72,12%	2,173,700,576,548
Prioritas II	22,14%	704.691.427.155	23,98%	696,325,230,957	23,98%	704,773,626,523	23,98%	713,574,298,712	23,98%	722,735,890,132
Prioritas III	3,56%	113.461.332.891	3,90%	113,124,672,531	3,90%	114,495,743,562	3,90%	115,923,505,485	3,90%	117,410,804,060
TOTAL	100%	3.183.559.658.100	100%	2,903,798,612,467	100%	2,939,001,585,416	100%	2,975,663,080,253	100%	3,013,847,270,740

Selanjutnya pada tabel di bawah ini akan dijabarkan seluruh program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Lamongan berdasarkan urusan:

TABEL VII.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	2	3	KET	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																Dinas Pendidikan	
1	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	80	81	538.737.291.098	82	518.329.922.511	83	524.612.081.172	84	531.153.993.824	85	537.968.699.565	85	537.968.699.565	Dinas Pendidikan
1	01	002	P1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI		Nilai	113,5	113,53	239.775.245.000	113,54	240.692.558.719	113,55	243.609.752.531	113,56	246.647.566.145	113,57	249.812.054.419	113,57	249.812.054.419	Dinas Pendidikan
					APK SMP/MTS		Nilai	114,05	114,08		114,09		114,10		114,11		114,12		114,12	Dinas Pendidikan	
					APK PAUD		Nilai	96,62	96,64		96,65		96,66		96,67		96,67		96,67	Dinas Pendidikan	
					APK Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Nilai	1,15	1,14		1,13		1,12		1,11		1,10		1,10	Dinas Pendidikan	
1	01	003	P1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	%	100%	100%	125.000.000	100%	120.265.000	100%	121.722.612	100%	123.240.493	100%	124.821.668	100%	124.821.668	Dinas Pendidikan	
1	01	004	P1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD, SD, SMP Berkualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4	%	74,92%	74,94%	100.000.000	74,95%	96.212.000	74,96%	97.378.089	74,97%	98.592.394	74,98%	99.857.335	74,98%	99.857.335	Dinas Pendidikan	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	81,26	82,26	105.735.964.769	82,76	101.730.686.424	83,26	102.963.662.343	83,76	104.247.619.212	84,26	105.585.116.167	84,26	105.585.116.167	Dinas Kesehatan
1	02	002	P1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Sesuai Standar Akreditasi	%	21%	25%	217.136.340.090	30%	213.911.215.527	35%	216.503.819.460	41%	219.203.622.088	46%	222.016.004.560	46%	222.016.004.560	Dinas Kesehatan	
1	02	003	P1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	100.00%	100%	772.500.000	100%	743.237.700	100%	752.245.741	100%	761.626.245	100%	771.397.910	100%	771.397.910	Dinas Kesehatan	
1	02	004	P1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman Yang Sesuai Standar	%	60%	62%	222.500.000	64%	214.071.700	65%	216.666.249	66%	219.368.077	67%	222.182.570	67%	222.182.570	Dinas Kesehatan	
1	02	005	P1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	%	49%	50%	4.506.755.500	51%	4.336.039.602	52%	4.388.592.402	53%	4.443.318.149	54%	4.500.325.921	54%	4.500.325.921	Dinas Kesehatan	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	79	80	190.191.750.000	81	182.987.286.510	82	185.205.092.423	83	187.514.599.925	84	189.920.412.242	84	189.920.412.242	RSUD dr. Soegiri
1	02	002	P1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase SPM yang memenuhi standar	%	79.79%	80%	16.095.750.000	81%	15.486.042.990	82%	15.673.733.831	83%	15.869.185.292	84%	16.072.786.939	84%	16.072.786.939	RSUD dr. Soegiri	
1	02	003	P1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	100%	100%	8.000.000.000	100%	7.696.960.000	100%	7.790.247.155	100%	7.887.391.537	100%	7.988.586.771	100%	7.988.586.771	RSUD dr. Soegiri	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	81,26	81,79	56.657.498.000	81,80	54.511.311.976	81,82	55.171.989.077	81,83	55.859.983.781	81,84	56.576.667.373	81,84	56.576.667.373	RSUD Ngimbang

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	02	002		P1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	80.00%	85,50%	21.894.000.000	86.00%	21.064.655.280	86.50%	21.319.958.902	87.00%	21.585.818.790	87.50%	21.862.764.845	87.50%	21.862.764.845	RSUD Ngimbang
1	02	003		P1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.443.180.000	100%	1.460.671.342	100%	1.478.885.913	100%	1.497.860.019	100%	1.497.860.019	RSUD Ngimbang
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	84	86	6.970.185.000	87	6.706.154.392	88	6.787.432.983	89	6.872.072.273	90	6.960.240.960	90	6.960.240.960	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1	03	010		P1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	%	84,20%	89,01%	390.512.176.700	90,33%	140.608.138.799	91,12%	142.312.309.441	92,20%	144.086.943.940	93,79%	145.935.579.431	93,79%	145.935.579.431	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
						Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	%	83,22%	77,23%		80,10%		82,98%		85,08%		87,17%		87,17%		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
1	03	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82	84	10.932.439.501	85	10.518.318.693	86	10.645.800.715	87	10.778.553.850	88	10.916.842.696	88	10.916.842.696	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1	03	002		P1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Ketersediaan Air Baku	%	79,17%	80,5%	26.091.003.100	81,0%	55.102.675.903	81,5%	55.770.520.335	82,0%	56.465.978.723	82,5%	57.190.437.230	82,5%	57.190.437.230	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
						Prosentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	%	32,11%	28,56%		29,56%		30,56%		31,56%		32,56%		32,56%		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
						Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	68,05%	71,05%		72,55%		74,05%		75,55%		77,05%		77,05%		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	003		P1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Yang Terlayani SPAM	%	51,55%	52,87%	25.315.000.000	53,53%	26.856.067.800	54,19	27.181.563.342	54,85	27.520.517.437	55,51	27.873.605.675	55,51	27.873.605.675	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	004		P1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	%	30%	60%	3.357.991.000	70%	3.230.790.301	80%	3.269.947.479	90%	3.310.723.724	100%	3.353.200.310	100%	3.353.200.310	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	005		P1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	71,82%	71,91%	1.345.000.000	71,96%	1.294.051.400	72,01%	1.309.735.303	72,05%	1.326.067.702	72,10	1.343.081.151	72,10	1.343.081.151	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	006		P1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	25,36%	32,09%	6.075.000.000	35,45%	5.844.879.000	38,81%	5.915.718.933	42,18%	5.989.487.949	45,54	6.066.333.079	45,54	6.066.333.079	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	008		P1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	Rasio	57,99	60,14%	2.605.000.000	62,29	2.506.322.600	64,45	2.536.699.230	66,60	2.568.331.869	68,76	2.601.283.567	68,76	2.601.283.567	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	009		P1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	4,16%	4,18%	7.430.000.000	5,04%	7.148.551.600	5,91%	7.235.192.045	6,77%	7.325.414.890	7,63%	7.419.399.963	7,63%	7.419.399.963	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	011		P1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Rasio	11,00	29,57	350.000.000	43,86	336.742.000	59,57	340.823.313	79,29	345.073.380	100	349.500.671	100	349.500.671	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	03	012		P1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	%	76,95%	77,07%	850.000.000	77,13%	817.802.000	77,18%	827.713.760	77,24%	838.035.351	77,30%	848.787.344	77,30%	848.787.344	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	83	85	7.078.883.400	86	6.810.735.297	87	6.893.281.409	88	6.979.240.628	89	7.068.784.285	89	7.068.784.285	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	04	002	P1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Rumah Korban Bencana	%	N/A	32,26%	910.000.000	48,39%	875.529.200	64,52%	886.140.614	80,65%	897.190.787	100%	908.701.745	100%	908.701.745	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	04	003	P1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	%	N/A	6,12%	6.840.000.000	9,18%	6.580.900.800	12,25%	6.660.661.318	15,31%	6.743.719.764	18,37%	6.830.241.689	18,37%	6.830.241.689	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
					Persentase Rumah Layak Huni	%	70,27%	70,43%		70,52%		70,60%		70,68%		70,76%		70,76%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	04	005	P1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah Yang Sudah Dilengkapi PSU (Jalan Lingkungan + Drainase Lingkungan)	%	59,71%	60,72%	43.059.000.000	61,10%	41.427.925.080	61,51%	41.930.031.532	61,96%	42.452.899.025	62,46%	42.997.569.720	62,46%	42.997.569.720	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	004	P3	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	17,86	150.000.000	26,79	144.318.000	35,71	146.067.134	44,64	147.888.591	53,57	149.786.002	53,57	149.786.002	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	10	005	P3	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	%	100%	100%	150.000.000	100%	144.318.000	100%	146.067.134	100%	147.888.591	100%	149.786.002	100%	149.786.002	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79	80	13.231.879.000	81	12.730.655.423	82	12.884.950.967	83	13.045.626.306	84	13.213.001.691	84	13.213.001.691	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	002	P1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Gangguan Trantibum	%	100%	100%	957.500.000	100%	921.229.900	100%	932.395.206	100%	944.022.175	100%	956.133.979	100%	956.133.979	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	004	P1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Kebakaran dan Kejadian Non Kebakaran Yang Tertangani	%	100%	100%	290.027.600	100%	479.041.355	100%	484.847.336	100%	490.893.382	100%	497.191.544	100%	497.191.544	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	84,75	85,0	4.417.961.800	85,5	4.250.609.407	86,0	4.302.126.793	86,5	4.355.774.314	87,0	4.411.658.899	87,0	4.411.658.899	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	P1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100%	100%	1.520.296.200	100%	1.662.707.380	100%	1.682.859.393	100%	1.703.844.650	100%	1.725.704.977	100%	1.725.704.977	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	83,00	83,10	5.102.947.900	83,20	4.909.648.234	83,30	4.969.153.170	83,34	5.031.118.510	83,35	5.095.667.761	83,35	5.095.667.761	Dinas Sosial
1	06	002	P1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	67,82%	100%	2.713.500.000	100%	2.610.712.620	100%	2.642.354.457	100%	2.675.304.617	100%	2.709.628.775	100,00%	2.709.628.775	Dinas Sosial
1	06	003	P1	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	%	100%	100%	50.000.000	100%	3.048.106.000	100%	3.085.049.045	100%	3.123.519.606	100%	3.163.594.363	100%	3.163.594.363	Dinas Sosial



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	06	004		P1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Direhabilitasi	%	100%	100%	610.000.000	100%	986.893.200	100%	998.854.346	100%	1.011.310.059	100%	1.024.285.167	100%	1.024.285.167	Dinas Sosial	
1	06	005		P1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Terlayani Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	67.82%	100%	1.149.435.100	100%	2.305.894.498	100%	2.333.841.940	100%	2.362.944.949	100%	2.393.261.532	100%	2.393.261.532	Dinas Sosial	
1	06	006		P1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	%	100%	100%	127.500.000	100%	322.670.300	100%	326.581.064	100%	330.653.530	100%	334.895.815	100%	334.895.815	Dinas Sosial	
1	06	007		P1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	TMP	1	1	102.000.000	1	298.136.240	1	301.749.651	1	305.512.469	1	309.432.194	1	309.432.194	Dinas Sosial	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2	07	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	77	79	6.270.359.084	80	6.032.837.882	81	6.105.955.877	82	6.182.097.147	83	6.261.413.453	83	6.261.413.453	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	002		P3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	%	88,85%	88,86%	135.000.000	88,87%	223.136.200	88,88%	225.840.611	88,89%	228.656.843	88,90%	231.590.510	88,90%	231.590.510	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	003		P2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,34%	1,35%	2.222.000.000	1,36%	2.137.830.640	1,37%	2.163.741.147	1,38%	2.190.722.999	1,39%	2.218.829.976	1,39%	2.218.829.976	Dinas Tenaga Kerja	
						Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	41.726	42.978		44.267		45.595		46.963		48.372		48.372		Dinas Tenaga Kerja	
2	07	004		P2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	71,33%	72,30%	720.000.000	73,21%	692.726.400	74,05%	701.122.244	75,05%	709.865.238	76,08%	718.972.809	76,08%	718.972.809	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	005		P3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	%	60,05%	60,07%	215.000.000	60,08%	246.105.800	60,09%	249.088.602	60,10%	252.194.737	60,11%	255.430.396	60,11%	255.430.396	Dinas Tenaga Kerja	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3	32	003		P3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	%	64.71%	64.72%	95.000.000	64.73%	136.651.400	64.74%	138.307.615	64.75%	140.032.311	64.76%	141.828.925	64.76%	141.828.925	Dinas Tenaga Kerja	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	08	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	78.5	79.5	4.390.093.000	80	4.223.796.277	80.5	4.274.988.688	81	4.328.297.797	81.5	4.383.829.858	81.5	4.383.829.858	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2	08	002		P2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Perempuan Produktif Yang Berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik);	%	4%	4,25%	115.380.000	4,50%	205.240.406	4,75%	207.727.919	5,00%	210.318.286	5,25%	213.016.670	5,25%	213.016.670	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	003		P3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan Yang Diselesaikan	%	30%	37%	177.302.000	39%	311.720.700	41%	315.498.755	43%	319.433.025	45%	323.531.350	45%	323.531.350	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	004		P3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Yang Berperan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	%	70%	72%	57.690.000	74%	252.620.203	76%	255.681.960	78%	258.870.314	80%	262.191.620	80%	262.191.620	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	005		P3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak	%	10%	40%	25.370.000	60%	223.140.484	70%	225.844.947	80%	228.661.234	100%	231.594.957	100%	231.594.957	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	006		P3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Yang Terbentuk	%	4.85%	12.66%	116.000.000	14.77%	230.805.920	16.88%	233.603.288	18.99%	236.516.321	21.10%	239.550.825	21.10%	239.550.825	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	08	007		P3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Diselesaikan	%	45%	50%	286.898.000	55%	276.030.304	60%	279.375.791	65%	282.859.607	70%	286.488.696	70%	286.488.696	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	09	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	NA	81.85	23.687.186.900	82.35	22.789.916.260	82.85	23.066.130.045	83.35	23.353.764.687	83.85	23.653.393.488	83.85	23.653.393.488	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	002		P3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah lumbung pangan yang meningkat statusnya	Lumbung pangan	16	20	2.160.000.000	25	2.078.179.200	30	2.103.366.732	35	2.129.595.715	40	2.156.918.428	40	2.156.918.428	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003		P2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan cadangan pangan (beras)	%	443,21%	449,21%	1.162.800.000	452,21%	1.118.753.136	455,21%	1.132.312.424	458,21%	1.146.432.360	461,21%	1.161.141.087	461,21%	1.161.141.087	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004		P3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang meningkat statusnya	%	3,85%	8,97%	274.500.000	11,54%	450.376.940	15,38%	455.835.509	19,23%	461.519.777	23,08%	467.441.076	23,08%	467.441.076	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	005		P3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	NA	50.00%	108.500.000	62.50%	198.965.020	75.00%	201.376.476	87.50%	203.887.641	87.50%	206.503.519	87.50%	206.503.519	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,86	82,92	14.568.435.800	82,95	14.016.583.452	82,97	14.186.464.443	83,00	14.363.369.655	83,05	14.547.651.688	83,05	14.547.651.688	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002		P3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dipenuhi	%	100%	100%	150.000.000	100%	144.318.000	100%	146.067.134	100%	147.888.591	100%	149.786.002	100%	149.786.002	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003		P2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pemenuhan Kualitas Air	%	91%	91,5%	2.074.750.000	92,0%	1.996.158.470	92,5%	2.020.351.911	93,0%	2.045.545.699	93,5%	2.071.790.050	93,5%	2.071.790.050	Dinas Lingkungan Hidup
						Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Lingkungan Hidup	
						Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	004		P2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Tutupan Lahan	%	39.67%	40.5%	910.000.000	41%	875.529.200	41.5%	886.140.614	42%	897.190.787	42.5%	908.701.745	42.5%	908.701.745	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005		P2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kegiatan atau usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3	kegiatan atau usaha	12	14	60.000.000	15	57.727.200	16	58.426.854	17	59.155.437	18	59.914.401	18	59.914.401	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	%	55.50%	59.00%	285.000.000	60.75%	274.204.200	62.50%	277.527.555	64.25%	280.988.324	66.00%	284.593.404	66.00%	284.593.404	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	008		P3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Wilayah Yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	%	63.3%	65%	425.000.000	66%	408.901.000	67%	413.856.880	68%	419.017.675	69%	424.393.672	69%	424.393.672	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	009		P3	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	%	12.27%	16%	130.000.000	18%	125.075.600	21%	126.591.516	24%	128.170.112	26%	129.814.535	26%	129.814.535	Dinas Lingkungan Hidup
				P3		Presentase Perusahaan Yang Memenuhi Semua Aspek Yang Diperkirakan KLHK	%	76%	84%		88%		92%		96%		100%		100%		
2	11	010		P3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100%	100%	65.000.000	100%	62.537.800	100%	63.295.758	100%	64.085.056	100%	64.907.268	100%	64.907.268	Dinas Lingkungan Hidup



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	11	011		P2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	%	62,20%	64%	1.455.000.000	66%	1.399.884.600	68%	1.416.851.201	70%	1.434.519.336	72%	1.452.924.219	72%	1.452.924.219	Dinas Lingkungan Hidup
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai IKM	Nilai	83	85	8.891.764.825	86	8.554.944.773	87	8.658.630.704	88	8.766.603.829	89	8.879.079.356	89	8.879.079.356	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	002		P2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	%	98,00%	98,10%	196.524.855	98,20%	189.080.493	98,30%	191.372.149	98,40%	193.758.560	98,50%	196.244.482	98,50%	196.244.482	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Prosentase KIA Yang Diterbitkan	%	25,24%	32,00%		34,00%		36,00%		38,00%		40,00%		40,00%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	12	003		P2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	%	98,66%	98,79%	176.658.650	98,82%	169.966.820	98,90%	172.026.818	98,98%	174.171.993	99,06%	176.406.619	99,06%	176.406.619	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Prosentase Penerbitan Akta Kematian	%	73,51%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
						Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
						Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	12	004		P3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Titik Layanan Yang Terfasilitasi Dengan SAK dan DKB Dalam Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah	2	29	1.513.932.150	29	1.456.584.400	29	1.474.238.203	29	1.492.621.953	29	1.511.772.293	29	1.511.772.293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	005		P3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Buku Profil Kependudukan dan Baliho Yang Tersedia	%	100%	100%	25.000.000	100%	24.053.000	100%	24.344.522	100%	24.648.099	100%	24.964.334	100%	24.964.334	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2	13	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai IKM	Nilai	80,59	80,63	5.120.980.300	80,65	4.926.997.566	80,67	4.986.712.777	80,69	5.048.897.085	80,71	5.113.674.435	80,71	5.113.674.435	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	002		P2	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	%	75%	77%	60.837.500.000	79%	58.532.975.500	81%	59.242.395.163	83%	59.981.147.831	85%	60.750.705.957	85%	60.750.705.957	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	003		P2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama antar Desa yang berjalan dengan baik	%	90%	92%	45.000.000	94%	43.295.400	96%	43.820.140	98%	44.366.577	100%	44.935.801	100%	44.935.801	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	004		P3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase tata kelola administrasi Desa yang tertib	%	100%	100%	3.037.000.000	100%	2.921.958.440	100%	2.957.372.576	100%	2.994.251.012	100%	3.032.667.253	100%	3.032.667.253	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	005		P2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	%	90%	92%	2.295.000.000	94%	2.208.065.400	96%	2.234.827.153	98%	2.262.695.447	100%	2.291.725.830	100%	2.291.725.830	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai IKM	Nilai	77	79	8.580.631.000	80	8.255.596.698	81	8.355.654.530	82	8.459.849.542	83	8.568.389.411	83	8.568.389.411	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
2	14	002		P3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Informasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	%	100%	100%	122.268.400	100%	311.523.453	100%	315.299.117	100%	319.230.897	100%	323.326.630	100%	323.326.630	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	14	003		P3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,20%	22.22%	9.447.278.000	22.24%	9.089.415.109	22.26%	9.199.578.820	22.28%	9.314.297.568	22.30%	9.433.800.006	22.30%	9.433.800.006	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
2	14	004		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Poktan yang aktif Dalam Pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL	%	70.48%	70.50%	929.537.000	70.52%	894.326.138	70.54%	905.165.371	70.56%	916.452.783	70.58%	928.210.873	70.58%	928.210.873	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	15	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	70,00	73,00	33.021.210.680	76,00	31.770.367.219	79,00	32.155.424.070	82,00	32.556.402.208	85,00	32.974.100.849	85,00	32.974.100.849	Dinas Perhubungan
2	15	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi	%	92,43	93,43%	4.567.026.920	94,43%	4.394.027.940	95,43%	4.447.283.559	96,43%	4.502.741.185	97,43%	4.560.511.354	97,43%	4.560.511.354	Dinas Perhubungan
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	16	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80,91	82	5.379.049.200	83	5.175.290.816	84	5.238.015.341	85	5.303.333.392	86	5.371.375.160	86	5.371.375.160	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	16	002		P3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	%	4,46%	15%	2.173.900.000	20%	2.091.552.668	25%	2.116.902.286	30%	2.143.300.058	35%	2.170.798.598	35%	2.170.798.598	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	16	003		P2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Terintegrasi	%	12,50%	25%	5.469.500.000	35%	5.262.315.340	45%	5.326.094.602	55%	5.392.511.002	65%	5.461.696.918	65%	5.461.696.918	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Terpublikasi	%	100%	100%	300.000.000	100%	288.636.000	100%	292.134.268	100%	295.777.183	100%	299.572.004	100%	299.572.004	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	21	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	%	25%	10%	374.800.000	17%	360.602.576	25%	364.973.079	35%	369.524.294	40%	374.265.290	40%	374.265.290	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,08	84	6.071.859.560	85	5.841.857.520	86	5.912.660.833	87	5.986.391.714	88	6.063.197.119	88	6.063.197.119	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	002		P3	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Yang Berizin	%	68,57%	69,50%	50.000.000	70,00%	48.106.000	70,50%	48.689.045	75,00%	49.296.197	76,00%	49.928.667	76,00%	49.928.667	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	003		P3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Penurunan Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan	%	1,54%	1,45%	180.000.000	1,40%	173.181.600	1,30%	175.280.561	1,25%	177.466.310	1,20%	179.743.202	1,20%	179.743.202	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	004		P3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Sehat KOPERASI	%	8,88%	9,00%	90.000.000	9,50%	86.590.800	10%	87.640.280	10,50%	88.733.155	11,00%	89.871.601	11,00%	89.871.601	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	005		P3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikat	%	7,00%	10,00%	459.181.000	13,00%	441.787.224	16,00%	447.141.685	19,00%	452.717.542	22,00%	458.525.908	22,00%	458.525.908	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	006		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan	%	1,16%	3,00%	470.000.000	4,00%	928.696.400	5,00%	939.952.200	6,00%	951.673.404	10,00%	963.883.374	10,00%	963.883.374	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	007		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan aset usaha mikro	%	35,63%	44,00%	350.000.000	48,00%	819.242.000	52,00%	829.171.213	56,00%	839.510.978	60,00%	850.281.904	60,00%	850.281.904	Dinas Koperasi Dan UM
2	17	008		P2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase penumbuhan usaha mikro	%	0,45%	1,00%	1.550.000.000	1,50%	5.413.786.000	2,00%	5.479.401.086	2,50%	5.547.729.218	3,00%	5.618.906.584	3,00%	5.618.906.584	Dinas Koperasi Dan UM
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	18	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,00	82,60	5.642.543.000	82,90	5.428.803.471	83,20	5.494.600.569	83,50	5.563.118.238	83,80	5.634.493.045	83,80	5.634.493.045	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		
2	18	002	P2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	%	63,20%	64,20%	80.000.000	64,70%	122.969.600	65,20%	124.459.992	65,70%	126.012.008	66,20%	127.628.742	66,20%	127.628.742	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		
2	18	003	P3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	%	40,00%	60,00%	295.500.000	70,00%	319.531.460	80,00%	323.404.181	90,00%	327.437.031	100,00%	331.638.049	100,00%	331.638.049	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		
2	18	004	P2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	Jumlah	3.619	3.692	550.000.000	3.747	551.666.000	3.803	558.352.192	3.860	565.314.844	3.918	572.567.833	3.918	572.567.833	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		
2	18	005	P3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan Yang Berinvestasi	%	64,53%	65,53%	497.462.000	66,03%	478.618.139	66,53%	484.418.991	67,03%	490.459.696	67,53%	496.752.294	67,53%	496.752.294	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		
2	18	006	P3	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	%	3015	1,50%	100.000.000	2%	141.212.000	2,50%	142.923.489	3,00%	144.705.745	3,50%	146.562.320	3,50%	146.562.320	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2	19	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,34	82,34	5.922.088.500	82,84	5.697.759.788	83,34	5.766.816.636	83,84	5.838.728.840	84,34	5.913.639.731	84,34	5.913.639.731	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
	2	19	002	P2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	35%	39%	835.000.000	41%	803.370.200	43%	813.107.047	45%	823.246.492	47%	833.808.744	47%	833.808.744	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	2	19	003	P2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi	%	12%	20%	9.540.000.000	24%	9.178.624.800	28%	9.289.869.733	32%	9.405.714.408	36%	9.526.389.724	36%	9.526.389.724	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	2	19	004	P3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwaran yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	50%	60%	150.000.000	65%	144.318.000	70%	146.067.134	75%	147.888.591	80%	149.786.002	80%	149.786.002	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
2	23	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,14	80,56	10.110.736.200	80,81	9.727.741.513	81,16	9.845.641.740	81,78	9.968.416.892	82,41	10.096.311.681	82,41	10.096.311.681	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
	2	23	002	P3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	%	1.62%	2.64%	1.010.000.000	3,15%	971.741.200	3,65%	983.518.703	4,16%	995.783.182	4,67%	1.008.559.080	4,67%	1.008.559.080	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
	2	23	003	P3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase Koleksi Daerah dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	%	89,01%	91,00%	50.000.000	92,00%	95.606.000	93,00%	96.764.745	94,00%	97.971.401	95,00%	99.228.374	95,00%	99.228.374	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
	2	24	002	P3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	%	30%	50%	280.000.000	70%	300.000.000	80%	303.636.000	90%	307.422.341	100%	311.366.570	100%	311.366.570	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		2	24	003	P3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	30%	50%	125.000.000	70%	120.265.000	80%	121.722.612	90%	123.240.493	100%	124.821.668	100%	124.821.668	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	2	24	004	P3	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	%	N/A	0%	0	15.63%	105.393.600	31.25%	106.670.970	46.88%	108.001.157	62.50%	109.386.812	62.50%	109.386.812	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	25	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	83,05	85,25	7.226.432.600	85,87	6.952.695.333	86,40	7.036.962.001	87,50	7.124.712.917	88,31	7.216.122.983	88,31	7.216.122.983	Dinas Perikanan		
3	25	003	P2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	79.819,32	80.821,81	1.095.000.000	81.225,92	1.053.521.400	81.632,05	1.066.290.079	82.040,21	1.079.586.717	82.450,41	1.093.437.814	82.450,41	1.093.437.814	Dinas Perikanan		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	25	004	P2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	59.728,16		63.391,84	4.050.000.000	64.172,53	3.896.586.000	64.797,08	3.943.812.622	65.265,49	3.992.991.966	65.577,77	4.044.222.053	65.577,77	4.044.222.053	Dinas Perikanan
3	25	005	P3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	%	N/A		26,67%	500.000.000	40,00%	481.060.000	53,33%	486.890.447	66,67%	492.961.971	80%	499.286.673	80%	499.286.673	Dinas Perikanan
3	25	006	P2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ikan Yang Diolah	Ton	89.179,36		90.916,16	902.500.000	91.825,32	868.313.300	92.743,57	878.837.257	93.671,01	889.796.358	94.607,72	901.212.445	94.607,72	901.212.445	Dinas Perikanan
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80		80,80	6.248.034.750	80,81	6.011.359.194	80,82	6.084.216.867	80,83	6.160.087.051	80,84	6.239.120.968	80,84	6.239.120.968	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	22	002	P2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	58,33%		66,67%	621.000.000	70,83%	597.476.520	75%	604.717.935	79,17%	612.258.768	83,33%	620.114.048	83,33%	620.114.048	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	22	003	P2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase kelompok seni tradisional yang dikembangkan	%	57,07%		59,14%	140.932.000	60,75%	135.593.496	61,78%	137.236.889	64,40%	138.948.233	65,28%	140.730.939	65,28%	140.730.939	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	22	005	P2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang di Lestarkan	%	69,47%		68,63%	700.000.000	71,57%	673.484.000	74,51%	681.646.626	77,45%	690.146.760	80,39%	699.001.342	80,39%	699.001.342	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	22	006	P3	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	%	50%		50%	600.000.000	100%	577.272.000	100%	584.268.537	100%	591.554.365	100%	599.144.008	100%	599.144.008	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														35,71%			
3	26	002	P2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	14		7,14%	1.575.000.000	14,29%	3.436.589.000	21,43%	3.478.240.459	28,57%	3.521.614.117	35,71%	3.566.796.426	35,71%	3.566.796.426	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	26	003	P2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang dipromosikan	%	13		7,69%	150.000.000	15,38%	1.136.818.000	23,08%	1.150.596.234	30,77%	1.164.944.169	38,46%	1.179.890.403	38,46%	1.179.890.403	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	26	005	P2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	%	2,33%		11,26%	365.500.000	16,93%	2.333.379.860	23,17%	2.361.660.424	29,32%	2.391.110.329	35,60%	2.421.788.275	35,60%	2.421.788.275	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	27	002	P2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	%	70,00%		72,07%	2.424.250.000	72,78%	3.211.206.910	73,49%	3.250.126.738	74,21%	3.290.655.818	75,07%	3.332.874.932	75,07%	3.332.874.932	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	P2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	46,00%		47,30%	22.293.795.150	48,00%	22.334.616.432	48,6%	22.605.311.983	49,30%	22.887.200.224	50,00%	23.180.843.003	50,00%	23.180.843.003	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	005	P2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase penurunan luasan gagal panen	%	0,65%		0,55%	334.000.000	0,50%	1.004.648.080	0,45%	1.016.824.415	0,40%	1.029.504.215	0,35%	1.042.712.754	0,35%	1.042.712.754	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	P3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelembagaan/kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	59%		63%	3.580.484.000	68%	4.265.831.066	72%	4.317.532.939	76%	4.371.372.574	80%	4.427.457.284	80%	4.427.457.284	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	27	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	77,49		78,49	9.245.159.500	78,99	8.894.952.858	79,49	9.002.759.687	79,99	9.115.024.100	80,49	9.231.969.859	80,49	9.231.969.859	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	002	P2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana peternakan dalam kondisi baik	%	2,50%		10,00%	2.620.000.000	15,00%	2.520.754.400	20,00%	2.551.305.943	25,00%	2.583.120.728	30,00%	2.616.262.167	30,00%	2.616.262.167	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	003	P2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	%	7,15%		28,57%	2.225.000.000	42,86%	2.140.717.000	57,14%	2.166.662.490	71,43%	2.193.680.771	85,71%	2.221.825.696	85,71%	2.221.825.696	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	004	P3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Terlayani	%	5,16%		8,11%	490.000.000	9,62%	471.438.800	11,16%	477.152.638	12,70%	483.102.732	14,27%	489.300.940	14,27%	489.300.940	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
					Prosentase Ternak Unggas Yang Terlayani	%	1,01%		1,42%		1,64%		1,89%		2,15%		2,44%		2,44%		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	
						Prosentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH	%	0,438%	2,705%		4,187%		5,668%		7,149%		8,631%		8,631%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	
3	27	005		P2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase ternak betina peserta AUTSK	%	2,15%	10,15%	60.000.000	11,44%	57.727.200	12,89%	58.426.854	14,50%	59.155.437	16,28%	59.914.401	16,28%	59.914.401	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	006		P3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase peningkatan legalitas usaha peternakan	%	0,00073%	0,0125%	35.000.000	0,0235%	33.674.200	0,0344%	34.082.331	0,0454%	34.507.338	0,0564%	34.950.067	0,0564%	34.950.067	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	007		P3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kemampuan kelas kelompok	%	0,53%	1,58%	251.358.500	2,11%	241.837.040	2,63%	244.768.105	3,16%	247.820.363	3,68%	250.999.898	3,68%	250.999.898	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	78,85	80,00	5.102.015.500	80,25	4.908.751.153	80,50	4.968.245.217	80,75	5.030.199.235	81,00	5.094.736.691	81,00	5.094.736.691	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	003		P2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	100%	100%	1.350.000.000	100%	3.231.362.000	100%	3.270.526.107	100%	3.311.309.568	100%	3.353.793.670	100%	3.353.793.670	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	004		P3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase koefisien variasi harga antar waktu	%			450.000.000		432.954.000		438.201.402		443.665.774		449.358.006		449.358.006	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				P3		lr 64 Kualitas Premium	kg	0,01%	0,93%		0,96%		0,99%		1,03%		1,06%		1,06%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		lr 64 Kualitas Medium	kg	0,01%	0,84%		0,87%		0,89%		0,92%		0,95%		0,95%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Gula Dalam Negri	kg	0,03%	2,49%		2,30%		2,13%		1,99%		1,87%		1,87%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Tanpa merek/minyak curah	kg	0,02%	1,23%		1,18%		1,14%		1,10%		1,06%		1,06%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Daging sapi mumi	kg	0,01%	0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%		0,03%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Daging ayam boiler	kg	0,06%	0,71%		0,69%		0,67%		0,66%		0,64%		0,64%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Telur ayam ras	kg	0,02%	1,16%		1,11%		1,07%		1,04%		1,60%		1,60%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Jagung pipilan kering	kg	0,03%	2,56%		2,36%		2,19%		2,04%		1,91%		1,91%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Garam Halus	kg	0,11%	2,36%		2,18%		2,04%		1,91%		1,79%		1,79%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		Cabe merah besar	kg	0,11%	0,92%		0,89%		0,86%		0,84%		0,82%		0,82%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		cabe rawit	kg	0,18%	1,46%		1,53%		1,61%		1,70%		1,81%		1,81%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		bawang merah	kg	0,09%	3,55%		3,17%		2,87%		2,62%		2,41%		2,41%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				P3		bawang putih	kg	0,13%	0,41%		0,41%		0,40%		0,40%		0,39%		0,39%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3	30	005		P3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	net ekspor (rupiah)	Juta Rupiah	1.913.123	2.069.234	225.000.000	2.152.004	216.477.000	2.238.085	219.100.701	2.327.609	221.832.887	2.420.714	224.679.003	2.420.714	224.679.003	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	006		P3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	58,62%	67,62%	120.000.000	72,63%	115.454.400	78,00%	116.853.707	83,77%	118.310.873	89,96%	119.828.802	89,96%	119.828.802	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	007		P2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan omset produk lokal	%	N/A	6%	1.325.000.000	6,50%	2.208.559.000	7%	2.235.326.735	7,50%	2.263.201.259	8%	2.292.238.132	8%	2.292.238.132	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													2,20%			
3	31	002		P2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertambahan dan pembangunan industri	%	1,10%	2,00%	3.600.000.000	2,05%	5.283.632.000	2,12%	5.347.669.620	2,15%	5.414.355.060	2,20%	5.483.821.235	82,00%	5.483.821.235	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	31	003		P3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	%	70,80%	74,80%	70.000.000	76,00%	67.348.400	78%	68.164.663	80,00%	69.014.676	82,00%	69.900.134	1,60%	69.900.134	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	31	004		P3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data IKM yang masuk dalam SINAS	%	0,20%	0,80%	130.000.000	1,00%	125.075.600	1,20%	126.591.516	1,40%	128.170.112	1,60%	129.814.535	1,60%	129.814.535	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80	81	20.160.716.000	82	19.397.028.078	83	19.632.120.058	84	19.876.932.595	85	20.131.953.641	85	20.131.953.641	Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	001		P3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Selda dan Pimpinan	%	100%	100%	13.451.408.402	100%	12.941.869.052	100%	13.098.724.505	100%	13.262.065.599	100%	13.432.217.901	100%	13.432.217.901	Bagian Umum
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	002		P3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Regulasi Yang Di Tetapkan	%	100%	100%	1.281.000.000	100%	1.232.475.720	100%	1.247.413.326	100%	1.262.968.570	100%	1.279.172.457	100%	1.279.172.457	Bagian Hukum
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	002		P2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	13.574.764.000	100%	15.171.558.260	100%	15.364.371.313	100%	15.568.110.090	100%	15.774.282.109	100%	15.774.282.109	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	002		P3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Pemerintahan Yang Ditindak Lanjuti	%	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.443.180.000	100%	1.460.671.342	100%	1.478.885.913	100%	1.497.860.019	100%	1.497.860.019	Bagian Tata Pemerintahan
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	003		P3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan strategis bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.443.180.000	100%	1.460.671.342	100%	1.478.885.913	100%	1.497.860.019	100%	1.497.860.019	Bagian Perekonomian
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	003		P3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	1.475.000.000	100%	1.419.127.000	100%	1.436.326.819	100%	1.454.237.815	100%	1.472.895.686	100%	1.472.895.686	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	003		P3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.154.544.000	100%	1.168.537.073	100%	1.183.108.731	100%	1.198.288.016	100%	1.198.288.016	Bagian Pengadaan barang dan Jasa
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	001		P3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Informasi dan Kegiatan Pimpinan yang Terpublikasi	%	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.154.544.000	100%	1.168.537.073	100%	1.183.108.731	100%	1.198.288.016	100%	1.198.288.016	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	001		P2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Organisasi Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.950.000.000	100%	1.876.134.000	100%	1.898.872.744	100%	1.922.551.687	100%	1.947.218.025	100%	1.947.218.025	Bagian Organisasi
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	002		P3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Kerjasama Yang Disahkan/Ditetapkan	%	100%	100%	1.150.000.000	100%	1.106.438.000	100%	1.119.848.029	100%	1.133.812.533	100%	1.148.359.348	100%	1.148.359.348	Bagian Kerja Sama
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	003		P3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Lingkup Bidang Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.346.968.000	100%	1.363.293.252	100%	1.380.293.519	100%	1.398.002.685	100%	1.398.002.685	Bagian Sumber Daya Alam
4	02				SEKRETARIAT DPRD																
4	02	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79.06	81	43.724.329.665	82	42.068.052.057	83	42.577.916.848	84	43.108.863.471	85	43.661.950.190	85	43.661.950.190	Sekretariat DPRD
4	02	002		P3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	%	100%	100%	29.202.373.603	100%	28.096.187.691	100%	28.436.713.486	100%	28.791.319.303	100%	29.160.711.930	100%	29.160.711.930	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01				PERENCANAAN																

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	80,77	81,00	13.196.179.400	82,50	13.036.499.154	84,00	13.194.501.524	85,50	13.359.036.958	87,00	13.530.433.402	87,00	13.530.433.402	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	002	P2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tepat Waktu		%	100%	100%	1.274.450.000	100%	1.362.451.334	100%	1.378.964.244	100%	1.396.159.928	100%	1.414.072.660	100%	1.414.072.660	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	003	P3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil		%	N/A	80%	3.107.286.996	81%	3.134.218.615	82%	3.172.205.344	83%	3.211.762.745	84%	3.252.969.661	84%	3.252.969.661	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02			KEUANGAN																	
5	02	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	79,0	85,0	18.018.746.164	85,5	17.336.196.059	86,0	17.546.310.756	86,5	17.765.113.251	87,0	17.993.039.654	87,0	17.993.039.654	BPKAD
5	02	002	P2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan penganggaran APBD yang tepat waktu		%	100%	100%	548.882.672.500	100%	528.090.996.866	100%	534.491.459.748	100%	541.156.568.251	100%	548.099.607.021	100%	548.099.607.021	BPKAD
					Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah		%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD
					Prosentase ketepatan laporan keuangan		%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD
5	02	003	P2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum		%	100%	100%	900.000.000	100%	865.908.000	100%	876.402.805	100%	887.331.548	100%	898.716.012	100%	898.716.012	BPKAD
5	02			KEUANGAN																	
5	02	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	82,01	83,24	13.791.042.074	83,91	13.268.637.400	84,58	13.429.453.286	85,26	13.596.918.568	85,94	13.771.367.033	85,94	13.771.367.033	Badan Pendapatan Daerah
5	02	004	P3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak		%	0,46%	0,51%	4.118.600.000	0,52%	3.962.587.432	0,53%	4.010.613.992	0,54%	4.060.626.348	0,55%	4.112.724.184	0,55%	4.112.724.184	Badan Pendapatan Daerah
			P3		Persentase Peningkatan Pajak Daerah		%	-7,50%	3,26%		3,27%		3,28%		3,29%		3,30%		3,30%		Badan Pendapatan Daerah
			P3		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya		%	6,30%	1,86%		1,87%		1,88%		1,89%		1,90%		1,90%		Badan Pendapatan Daerah
5	03			KEPEGAWAIAN																	
5	03	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	82,26	82,75	6.327.852.000	83,00	6.088.152.966	83,25	6.161.941.380	83,50	6.238.780.789	83,75	6.318.824.347	83,75	6.318.824.347	BKPSDM
5	03	002	P2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN		Indeks	55	62	1.300.000.000	65	1.250.756.000	70	1.265.915.163	75	1.281.701.125	81	1.298.145.350	81	1.298.145.350	BKPSDM
5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5	04	002	P3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN		Indeks	22,86	21,44	2.797.860.000	24,44	2.691.877.063	27,44	2.724.502.613	28,44	2.758.477.161	30,44	2.793.868.423	30,44	2.793.868.423	BKPSDM
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5	05	002	P3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah		%	15 hasil penelitian/kajian	27%	315.000.000	40%	787.317.800	53%	796.860.092	67%	806.796.937	80%	817.148.142	80%	817.148.142	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01			INSPEKTORAT DAERAH																	
6	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		Nilai	78	81	11.706.603.194	82	11.677.826.905	83	11.819.362.167	84	11.966.749.614	85	12.120.283.011	85	12.120.283.011	Inspektorat



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	01	002	P2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	%	80%	84%	682.450.000	86%	622.476.294	87%	630.020.707	88%	637.877.065	90%	646.061.028	90%	646.061.028	Inspektorat
						Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK Yang Ditindaklanjuti	%	78%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		Inspektorat
6	01	003	P3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Yang Dilegalitaskan	%	60%	64%	615.000.000	66%	591.703.800	68%	598.875.250	70%	606.343.224	72%	614.122.608	72%	614.122.608	Inspektorat
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Lamongan
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	93,43	93,53	13.042.437.188	93,63	12.548.389.667	93,73	12.700.476.150	93,83	12.858.851.088	93,93	13.023.830.147	93,93	13.023.830.147	Kecamatan Lamongan
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	41.194.200	100%	39.633.764	100%	40.114.125	100%	40.614.348	100%	41.135.430	100%	41.135.430	Kecamatan Lamongan
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	3.298.579.352	100%	3.163.629.166	100%	3.201.972.352	100%	3.241.900.947	100%	3.283.494.536	100%	3.283.494.536	Kecamatan Lamongan
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Lamongan
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	20.037.500	100%	19.278.480	100%	19.512.135	100%	19.755.451	100%	20.008.913	100%	20.008.913	Kecamatan Lamongan
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	8,33%	16,67%	73.091.150	25,00%	70.322.457	33,33%	71.174.765	41,67%	72.062.315	50,00%	72.986.874	50,00%	72.986.874	Kecamatan Lamongan
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Babat
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,26	82,14	7.000.847.150	82,39	6.735.655.060	82,76	6.817.291.199	83,04	6.902.302.821	83,17	6.990.859.366	83,17	6.990.859.366	Kecamatan Babat
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	119.114.100	100%	114.602.058	100%	115.991.035	100%	117.437.443	100%	118.944.165	100%	118.944.165	Kecamatan Babat
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	1.468.644.300	100%	1.393.012.054	100%	1.409.895.360	100%	1.427.476.755	100%	1.445.791.282	100%	1.445.791.282	Kecamatan Babat
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Babat
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Babat
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,76%	19,05%	126.463.150	23,81%	121.672.726	33,33%	123.147.399	42,86%	124.683.047	52,38%	126.282.731	52,38%	126.282.731	Kecamatan Babat
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Paciran
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	86,11	86,11	3.883.033.610	87,00	3.735.944.297	87,50	3.781.223.942	88,00	3.828.375.804	88,50	3.877.493.866	88,50	3.877.493.866	Kecamatan Paciran
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	19.660.000	100%	18.915.279	100%	19.144.532	100%	19.383.265	100%	19.631.952	100%	19.631.952	Kecamatan Paciran
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	786.470.940	100%	736.679.421	100%	745.607.975	100%	754.905.707	100%	764.591.147	100%	764.591.147	Kecamatan Paciran
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Paciran



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Paciran
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	6,25%	12,50%	85.017.940	18,75%	81.797.460	25,00%	82.788.846	31,25%	83.821.223	37,50%	84.896.649	37,50%	84.896.649	Kecamatan Paciran
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Brondong
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	86,11	87,15	3.746.672.131	87,25	3.604.748.191	87,50	3.648.437.739	87,75	3.693.933.757	88,00	3.741.326.927	88,00	3.741.326.927	Kecamatan Brondong
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	50.000.000	100%	48.106.000	100%	48.689.045	100%	49.296.197	100%	49.928.667	100%	49.928.667	Kecamatan Brondong
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	850.839.119	100%	798.609.333	100%	808.288.478	100%	818.367.836	100%	828.867.495	100%	828.867.495	Kecamatan Brondong
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Brondong
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Brondong
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	11,11%	22,22%	75.000.000	33,33%	72.159.000	44,44%	73.033.567	55,56%	73.944.296	66,67%	74.893.001	66,67%	74.893.001	Kecamatan Brondong
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Turi
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,25	83,22	2.843.331.500	83,85	2.735.626.103	84,48	2.768.781.891	85,11	2.803.308.601	85,73	2.839.275.051	85,73	2.839.275.051	Kecamatan Turi
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	85.250.000	100%	77.020.730	100%	77.954.221	100%	78.926.310	100%	79.938.935	100%	79.938.935	Kecamatan Turi
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	34.800.000	100%	33.481.776	100%	33.887.575	100%	34.310.153	100%	34.750.352	100%	34.750.352	Kecamatan Turi
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Turi
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Turi
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	26,32%	31,58%	171.900.000	36,84%	150.388.428	42,11%	152.211.136	47,37%	154.109.209	52,63%	156.086.430	52,63%	156.086.430	Kecamatan Turi
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Pucuk
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,26	82,26	3.116.514.550	82,76	2.998.460.979	83,26	3.034.802.326	83,76	3.072.646.311	84,26	3.112.068.363	84,26	3.112.068.363	Kecamatan Pucuk
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	37.000.000	100%	35.598.440	100%	36.029.893	100%	36.479.186	100%	36.947.214	100%	36.947.214	Kecamatan Pucuk
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	50.500.000	100%	43.587.060	100%	44.115.335	100%	44.665.453	100%	45.238.511	100%	45.238.511	Kecamatan Pucuk
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Pucuk
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Pucuk
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,88%	11,76%	129.500.000	17,65%	109.594.540	23,53%	110.922.826	35,29%	112.306.033	47,06%	113.746.920	47,06%	113.746.920	Kecamatan Pucuk
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Sukodadi



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,26	82,26	2.817.840.110	83	2.711.100.327	83	2.743.958.863	84	2.778.176.030	84	2.813.820.028	84	2.813.820.028	Kecamatan Sukodadi
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	0	100%	13.000.000	100%	13.157.560	100%	13.321.635	100%	13.492.551	100%	13.492.551	Kecamatan Sukodadi
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	34.000.000	100%	26.700.000	100%	27.023.604	100%	27.360.588	100%	27.711.625	100%	27.711.625	Kecamatan Sukodadi
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sukodadi
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sukodadi
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	5%	10%	75.000.000	15%	45.171.080	20%	45.718.553	30%	46.288.664	40%	46.882.547	40%	46.882.547	Kecamatan Sukodadi
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Tikung
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,50	83,00	2.948.704.960	83,50	2.837.008.016	84,26	2.871.392.553	84,50	2.907.198.818	85,00	2.944.498.179	85,00	2.944.498.179	Kecamatan Tikung
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	56.575.700	100%	52.432.612	100%	53.068.096	100%	53.729.855	100%	54.419.209	100%	54.419.209	Kecamatan Tikung
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	49.799.050	100%	45.912.662	100%	46.469.123	100%	47.048.593	100%	47.652.227	100%	47.652.227	Kecamatan Tikung
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.500.000	100%	10.627.260	100%	10.759.782	100%	10.897.830	100%	10.897.830	Kecamatan Tikung
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	50.000.000	100%	44.606.000	100%	45.146.625	100%	45.709.603	100%	46.296.057	100%	46.296.057	Kecamatan Tikung
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	30,77%	38,46%	124.000.000	46,15%	106.302.880	53,85%	107.591.271	61,54%	108.932.934	69,23%	110.330.544	69,23%	110.330.544	Kecamatan Tikung
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Deket
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,9	85	3.234.650.040	86	3.112.121.496	87	3.149.840.409	88	3.189.118.919	89	3.230.035.315	89	3.230.035.315	Kecamatan Deket
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	40.000.000	100%	38.484.800	100%	38.951.236	100%	39.436.958	100%	39.942.934	100%	39.942.934	Kecamatan Deket
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	83.456.600	100%	70.295.264	100%	71.147.243	100%	72.034.449	100%	72.958.651	100%	72.958.651	Kecamatan Deket
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Deket
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	10.000.000	100%	9.621.200	100%	9.737.809	100%	9.859.239	100%	9.985.733	100%	9.985.733	Kecamatan Deket
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	11,76%	17,65%	61.945.000	23,53%	59.598.523	29,41%	60.320.858	41,18%	61.073.059	52,94%	61.856.626	52,94%	61.856.626	Kecamatan Deket
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Kalitengah
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,25	79,80	2.318.499.200	80,25	2.230.674.450	80,75	2.257.710.225	81,25	2.285.863.871	81,75	2.315.191.505	81,75	2.315.191.505	Kecamatan Kalitengah
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	25.448.000	100%	19.484.030	100%	19.720.176	100%	19.966.087	100%	20.222.252	100%	20.222.252	Kecamatan Kalitengah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	30.200.000	100%	24.056.024	100%	24.347.583	100%	24.651.197	100%	24.967.472	100%	24.967.472	Kecamatan Kalitengah
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Kalitengah
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Kalitengah
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,00%	10,00%	90.000.000	15,00%	76.590.800	20,00%	77.519.080	30,00%	78.485.743	40,00%	79.492.716	40,00%	79.492.716	Kecamatan Kalitengah
7	01				KECAMATAN															Kecamatan Kembangbahu	
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,95	83,20	2.986.923.151	83,40	2.873.778.502	83,60	2.908.608.697	83,80	2.944.879.048	84,00	2.982.661.846	84,00	2.982.661.846	Kecamatan Kembangbahu
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	24.861.500	100%	23.919.746	100%	24.209.654	100%	24.511.548	100%	24.826.031	100%	24.826.031	Kecamatan Kembangbahu
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	28.000.000	100%	26.939.360	100%	27.265.865	100%	27.605.870	100%	27.960.054	100%	27.960.054	Kecamatan Kembangbahu
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Kembangbahu
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	12.000.000	100%	11.545.440	100%	11.685.371	100%	11.831.087	100%	11.982.880	100%	11.982.880	Kecamatan Kembangbahu
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	33,33%	38,89%	49.500.519	44,44%	37.625.439	50,00%	38.081.460	55,56%	38.556.335	61,11%	39.051.013	61,11%	39.051.013	Kecamatan Kembangbahu
7	01				KECAMATAN															Kecamatan Mantup	
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80,2	85	2.480.833.300	86	2.386.859.335	87	2.415.788.070	88	2.445.912.947	89	2.477.294.010	89	2.477.294.010	Kecamatan Mantup
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	31.549.900	100%	30.354.790	100%	30.722.690	100%	31.105.802	100%	31.504.889	100%	31.504.889	Kecamatan Mantup
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	65.903.200	100%	53.406.787	100%	54.054.077	100%	54.728.131	100%	55.430.293	100%	55.430.293	Kecamatan Mantup
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Mantup
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	17.000.000	100%	16.356.040	100%	16.554.275	100%	16.760.707	100%	16.975.747	100%	16.975.747	Kecamatan Mantup
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	20,00%	26,67%	48.000.800	33,33%	46.182.530	40,00%	46.742.262	46,67%	47.325.138	53,33%	47.932.319	53,33%	47.932.319	Kecamatan Mantup
7	01				KECAMATAN															Kecamatan Modo	
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,50	82,50	3.128.949.000	83,00	3.010.424.412	83,50	3.046.910.756	84,00	3.084.905.733	84,50	3.124.485.073	84,50	3.124.485.073	Kecamatan Modo
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	45.000.000	100%	42.295.400	100%	42.808.020	100%	43.341.836	100%	43.897.912	100%	43.897.912	Kecamatan Modo
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	69.000.000	100%	61.386.280	100%	62.130.282	100%	62.905.046	100%	63.712.118	100%	63.712.118	Kecamatan Modo
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	25.000.000	100%	23.053.000	100%	23.332.402	100%	23.623.357	100%	23.926.445	100%	23.926.445	Kecamatan Modo

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Modo
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	35,29%	41,18%	72.000.000	47,06%	66.272.640	52,94%	67.075.864	58,82%	67.912.300	64,71%	68.783.615	64,71%	68.783.615	Kecamatan Modo
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Bluluk
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,75	80,75	2.438.172.180	81,25	2.345.814.218	81,75	2.374.245.486	82,25	2.403.852.327	82,75	2.434.693.753	82,75	2.434.693.753	Kecamatan Bluluk
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	70.000.000	100%	67.348.400	100%	68.164.663	100%	69.014.676	100%	69.900.134	100%	69.900.134	Kecamatan Bluluk
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	52.200.000	100%	40.222.664	100%	40.710.163	100%	41.217.818	100%	41.746.643	100%	41.746.643	Kecamatan Bluluk
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	30.000.000	100%	28.863.600	100%	29.213.427	100%	29.577.718	100%	29.957.200	100%	29.957.200	Kecamatan Bluluk
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Bluluk
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	66,67%	66,67%	60.000.000	66,67%	57.727.200	66,67%	58.426.854	66,67%	59.155.437	77,78%	59.914.401	77,78%	59.914.401	Kecamatan Bluluk
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Karangbinangun
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,75	80,75	2.779.148.700	81,25	2.673.874.547	81,75	2.706.281.907	82,25	2.740.029.242	82,75	2.775.183.817	82,75	2.775.183.817	Kecamatan Karangbinangun
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	67.482.800	100%	64.926.552	100%	65.713.461	100%	66.532.908	100%	67.386.525	100%	67.386.525	Kecamatan Karangbinangun
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	59.800.000	100%	57.534.776	100%	58.232.097	100%	58.958.252	100%	59.714.686	100%	59.714.686	Kecamatan Karangbinangun
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	13.000.000	100%	12.507.560	100%	12.659.152	100%	12.817.011	100%	12.981.454	100%	12.981.454	Kecamatan Karangbinangun
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	14.000.000	100%	13.469.680	100%	13.632.933	100%	13.802.935	100%	13.980.027	100%	13.980.027	Kecamatan Karangbinangun
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	9,52%	14,29%	26.500.000	19,05%	25.496.180	23,81%	25.805.194	33,33%	26.126.984	42,86%	26.462.194	42,86%	26.462.194	Kecamatan Karangbinangun
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Glagah
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,05	82,75	3.216.439.040	83,45	3.094.600.329	84,15	3.132.106.885	84,85	3.171.164.258	85,55	3.211.850.295	85,55	3.211.850.295	Kecamatan Glagah
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	58.500.000	100%	56.284.020	100%	56.966.182	100%	57.676.551	100%	58.416.541	100%	58.416.541	Kecamatan Glagah
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	79,00%	100%	54.700.000	100%	42.627.964	100%	43.144.615	100%	43.682.628	100%	44.243.076	100%	44.243.076	Kecamatan Glagah
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Glagah
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Glagah
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	17,24%	20,69%	90.000.000	24,14%	76.590.800	27,59%	77.519.080	34,48%	78.485.743	41,38%	79.492.716	41,38%	79.492.716	Kecamatan Glagah
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Ngimbang



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,70	82,90	3.038.310.500	83,00	2.923.219.298	83,10	2.958.648.716	83,20	2.995.543.066	83,30	3.033.975.883	83,30	3.033.975.883	Kecamatan Ngimbang
7	01	002	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	36.200.000	100%	29.828.744	100%	30.190.268	100%	30.566.741	100%	30.958.912	100%	30.958.912	Kecamatan Ngimbang
7	01	003	P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	35.095.500	100%	28.766.082	100%	29.114.727	100%	29.477.788	100%	29.855.988	100%	29.855.988	Kecamatan Ngimbang
7	01	004	P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	12.329.000	100%	11.861.977	100%	12.005.745	100%	12.155.456	100%	12.311.411	100%	12.311.411	Kecamatan Ngimbang
7	01	005	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0%	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Ngimbang
7	01	006	P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,26%	10,53%	18.012.000	15,79%	17.329.705	21,05%	17.539.741	31,58%	17.758.462	42,11%	17.986.303	42,11%	17.986.303	Kecamatan Ngimbang
7	01			KECAMATAN																Kecamatan Sugio
7	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,25	82,05	3.412.161.860	82,65	3.282.909.169	83,25	3.322.698.028	83,85	3.364.132.072	84,45	3.407.293.887	84,45	3.407.293.887	Kecamatan Sugio
7	01	002	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	35.894.000	100%	29.534.335	100%	29.892.291	100%	30.265.048	100%	30.653.349	100%	30.653.349	Kecamatan Sugio
7	01	003	P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	35.700.000	100%	29.347.684	100%	29.703.378	100%	30.073.779	100%	30.459.626	100%	30.459.626	Kecamatan Sugio
7	01	004	P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sugio
7	01	005	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sugio
7	01	006	P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,76%	14,29%	72.919.800	23,81%	60.157.598	33,33%	60.886.708	42,86%	61.645.965	52,38%	62.436.883	52,38%	62.436.883	Kecamatan Sugio
7	01			KECAMATAN																Kecamatan Karanggeneng
7	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,26	82,26	2.931.407.630	82,76	2.820.365.909	83,26	2.854.548.744	83,76	2.890.144.967	84,00	2.927.225.527	84,00	2.927.225.527	Kecamatan Karanggeneng
7	01	002	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	18.359.200	100%	12.663.754	100%	12.817.238	100%	12.977.069	100%	13.143.565	100%	13.143.565	Kecamatan Karanggeneng
7	01	003	P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	21.489.500	100%	15.675.478	100%	15.865.465	100%	16.063.307	100%	16.269.399	100%	16.269.399	Kecamatan Karanggeneng
7	01	004	P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Karanggeneng
7	01	005	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Karanggeneng
7	01	006	P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	5,56%	11,11%	53.327.000	16,67%	41.306.973	22,22%	41.807.614	33,33%	42.328.955	44,44%	42.872.035	44,44%	42.872.035	Kecamatan Karanggeneng
7	01			KECAMATAN																Kecamatan Sambeng
7	01	001	P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	82,95	85	2.758.985.400	86	2.654.475.033	87	2.686.647.270	88	2.720.149.762	89	2.755.049.283	89	2.755.049.283	Kecamatan Sambeng
7	01	002	P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	-	100%	15.000.000	100%	13.750.000	100%	13.916.650	100%	14.090.191	100%	14.270.968	100%	14.270.968	Kecamatan Sambeng

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	-	100%	30.700.000	100%	24.364.244	100%	24.659.539	100%	24.967.043	100%	25.287.370	100%	25.287.370	Kecamatan Sambeng
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	-	-	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sambeng
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	-	100%	15.000.000	100%	13.750.000	100%	13.916.650	100%	14.090.191	100%	14.270.968	100%	14.270.968	Kecamatan Sambeng
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,55%	9,09%	63.000.000	13,64%	47.150.000	18,18%	47.721.458	27,27%	48.316.545	36,36%	48.936.446	36,36%	48.936.446	Kecamatan Sambeng
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Kedungpring
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	85,54	86,54	2.857.385.280	87,04	2.749.147.526	87,54	2.782.467.194	88,04	2.817.164.560	88,54	2.853.308.781	88,54	2.853.308.781	Kecamatan Kedungpring
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	50.000.000	100%	43.106.000	100%	43.628.445	100%	44.172.491	100%	44.739.224	100%	44.739.224	Kecamatan Kedungpring
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	72.000.000	100%	69.272.640	100%	70.112.224	100%	70.986.524	100%	71.897.281	100%	71.897.281	Kecamatan Kedungpring
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	100%	100%	23.000.000	100%	22.128.760	100%	22.396.961	100%	22.676.251	100%	22.967.187	100%	22.967.187	Kecamatan Kedungpring
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Kedungpring
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	4,35%	13,04%	60.000.000	21,74%	52.727.200	30,43%	53.366.254	39,13%	54.031.731	47,83%	54.724.958	47,83%	54.724.958	Kecamatan Kedungpring
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Laren
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,9	85	2.844.811.000	86	2.737.049.559	87	2.770.222.600	88	2.804.767.276	89	2.840.752.440	89	2.840.752.440	Kecamatan Laren
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	-	100%	30.000.000	100%	23.863.600	100%	24.152.827	100%	24.454.013	100%	24.767.758	100%	24.767.758	Kecamatan Laren
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	-	100%	30.500.000	100%	27.344.660	100%	27.676.077	100%	28.021.198	100%	28.380.710	100%	28.380.710	Kecamatan Laren
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	-	100%	40.000.000	100%	36.000.000	100%	36.436.320	100%	36.890.681	100%	37.363.988	100%	37.363.988	Kecamatan Laren
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELEGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	-	-	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Laren
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	10,00%	15%	99.000.000	20%	94.734.680	25%	95.882.864	35%	97.078.524	45%	98.324.041	45%	98.324.041	Kecamatan Laren
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Sekaran
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80,7	85	2.803.541.700	86	2.697.343.540	87	2.730.035.344	88	2.764.078.885	89	2.799.542.017	89	2.799.542.017	Kecamatan Sekaran
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	44.999.850	100%	43.295.256	100%	43.819.994	100%	44.366.430	100%	44.935.651	100%	44.935.651	Kecamatan Sekaran
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	38.800.000	100%	37.330.256	100%	37.782.699	100%	38.253.849	100%	38.744.646	100%	38.744.646	Kecamatan Sekaran
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sekaran

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	13.999.850	100%	13.469.536	100%	13.632.786	100%	13.802.787	100%	13.979.877	100%	13.979.877	Kecamatan Sekaran
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	42,86%	47,62%	79.999.600	52,38%	66.969.215	52,38%	67.780.882	57,14%	68.626.110	61,90%	69.506.583	61,90%	69.506.583	Kecamatan Sekaran
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Sarirejo
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,26	82,26	2.721.575.550	82,76	2.618.482.268	83,26	2.650.218.273	83,76	2.683.266.495	84,26	2.717.692.804	84,26	2.717.692.804	Kecamatan Sarirejo
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	72.000.000	100%	59.272.640	100%	59.991.024	100%	60.739.112	100%	61.518.395	100%	61.518.395	Kecamatan Sarirejo
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	8.800.000	100%	8.466.656	100%	8.569.272	100%	8.676.131	100%	8.787.445	100%	8.787.445	Kecamatan Sarirejo
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sarirejo
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sarirejo
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	11,11%	22,22%	85.500.000	33,33%	72.261.260	44,44%	73.137.066	55,56%	74.049.086	66,67%	74.999.135	66,67%	74.999.135	Kecamatan Sarirejo
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Sukorame
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79,75	85	2.475.268.000	86	2.381.504.848	87	2.410.368.687	88	2.440.425.984	89	2.471.736.650	89	2.471.736.650	Kecamatan Sukorame
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	40.000.000	100%	38.484.800	100%	38.951.236	100%	39.436.958	100%	39.942.934	100%	39.942.934	Kecamatan Sukorame
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	28.500.000	100%	27.420.420	100%	27.752.755	100%	28.098.832	100%	28.459.340	100%	28.459.340	Kecamatan Sukorame
7	01	004	P3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Sukorame
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	100%	100%	18.000.000	100%	17.318.160	100%	17.528.056	100%	17.746.631	100%	17.974.320	100%	17.974.320	Kecamatan Sukorame
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	44,44%	55,56%	107.500.000	55,56%	93.427.900	66,67%	94.560.246	66,67%	95.739.412	77,78%	96.967.749	77,78%	96.967.749	Kecamatan Sukorame
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Solokuro
7	01	001	P1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,33	81,55	2.301.328.270	81,72	2.214.153.955	81,89	2.240.989.501	82,06	2.268.934.640	82,23	2.298.045.072	82,23	2.298.045.072	Kecamatan Solokuro
7	01	002	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	60.500.000	100%	52.025.260	100%	52.655.806	100%	53.312.424	100%	53.996.422	100%	53.996.422	Kecamatan Solokuro
7	01	003	P3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	20,00%	100%	45.600.000	100%	37.872.672	100%	38.331.689	100%	38.809.685	100%	39.307.613	100%	39.307.613	Kecamatan Solokuro
7	01	004	P4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	50,20%	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Solokuro
7	01	005	P3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	50,00%	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Solokuro
7	01	006	P3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	10,00%	20,00%	66.000.000	30,00%	55.682.920	40,00%	56.357.797	50,00%	57.060.579	60%	57.792.666	60%	57.792.666	Kecamatan Solokuro
7	01				KECAMATAN																Kecamatan Maduran



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	81,76	82,76	2.615.247.200	83,26	2.516.181.636	83,76	2.546.677.757	84,26	2.578.434.829	84,76	2.611.516.148	84,76	2.611.516.148	Kecamatan Maduran
7	01	002		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	%	100%	100%	52.702.600	100%	45.706.226	100%	46.260.185	100%	46.837.049	100%	47.437.969	100%	47.437.969	Kecamatan Maduran
7	01	003		P3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	%	100%	100%	43.903.250	100%	37.240.195	100%	37.691.546	100%	38.161.560	100%	38.651.172	100%	38.651.172	Kecamatan Maduran
7	01	004		P3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Maduran
7	01	005		P3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	%	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kecamatan Maduran
7	01	006		P3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	%	35,29%	41,18%	79.999.950	47,06%	66.969.552	47,06%	67.781.223	52,94%	68.626.455	58,82%	69.506.932	58,82%	69.506.932	Kecamatan Maduran
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	01	001		P1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80,23	80,30	4.310.190.000	80,60	4.146.920.003	80,80	4.197.180.673	81,00	4.249.519.516	81,20	4.304.040.852	81,20	4.304.040.852	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	002		P1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan dan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bagi Pemuda	%	-	20%	300.000.000	40%	288.636.000	60%	292.134.268	80%	295.777.183	100%	299.572.004	100%	299.572.004	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	003		P1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	%	-	20%	1.744.320.200	40%	1.678.245.351	60%	1.698.585.684	80%	1.719.767.048	100%	1.741.831.659	100%	1.741.831.659	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	004		P1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas, Orpem dan LSM Yang Bertentangan Dengan Asas Pancasila	%	0%	0%	640.000.000	0%	615.756.800	0%	623.219.772	0%	630.991.323	0%	639.086.942	0%	639.086.942	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	005		P1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	-	20%	305.000.000	40%	293.446.600	60%	297.003.173	80%	300.706.802	100%	304.564.871	100%	304.564.871	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	006		P1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterliban Umum	%	100%	100%	1.515.000.000	100%	1.457.611.800	100%	1.475.278.055	100%	1.493.674.772	100%	1.512.838.620	100%	1.512.838.620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					TOTAL					3.183.559.658.100,00		2.903.798.612.466,73		2.939.001.585.416,44		2.975.663.080.253,47		3.013.847.270.740,31		3.013.847.270.740,31	

BAB VIII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah maka diperlukan Indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama periode jabatan yakni tahun 2021-2026. Indikator kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan telah ditetapkan sebagaimana yang disajikan pada Bab V.

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamongan, ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama yang disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,65	3,55	3,68	4,71	5,33	5,43	5,43
2	Gini Rasio	Indeks	0,294	0,292	0,291	0,29	0,289	0,288	0,288
3	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	13,85	13,39	13,17	12,92	12,65	12,35	12,35
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,58	73,29	73,62	73,95	74,27	74,58	74,58
5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	77	79	81	82	83	83
6	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	63,06	63,63	64,2	64,78	65,36	65,36
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,3	68	69	70,5	71	71,5	71,5

Selanjutnya dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah daerah secara umum berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka indikator kinerja utama dan sasaran dibagi kedalam 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Adapun pembagian dan target indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,65	3,55	3,68	4,71	5,33	5,43	5,43
1.2	Gini Rasio	Indeks	0,294	0,292	0,291	0,29	0,289	0,288	0,288
1.3	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	13,85	13,39	13,17	12,92	12,65	12,35	12,35
1.4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,58	73,29	73,62	73,95	74,27	74,58	74,58
1.5	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	63,06	63,63	64,2	64,78	65,36	65,36
1.6	Indeks Daya Beli	Indeks	0,743	0,761	0,77	0,778	0,786	0,794	0,794



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	URUSAN WAJIB DASAR								
1.1	Pendidikan								
1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,638	0,64	0,641	0,642	0,643	0,644	0,644
1.2	Kesehatan								
1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,806	0,808	0,808	0,809	0,81	0,811	0,811
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.3.2	Indeks Infrastruktur	Indeks	80,83	81,33	81,83	82,33	82,83	83,33	83,33
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1.4.1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	N/A	6,12	9,18	12,25	16,37	18,37	18,37
1.4.2	Persentase Rumah Layak Huni yang ditangani	Persen	70,27	70,43	70,52	70,60	70,68	70,76	70,76
1.5	Sosial								
1.5.1	Persentase PPKS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	3,6	3,88	4,13	4,38	4,63	4,88	4,88
1.5.2	Nilai Solidaritas	Persen	N/a	64,06	65,66	67,31	68,99	70,71	70,71
1.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1.6.1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	N/a	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,68
1.6.2	Nilai Toleransi	Nilai	N/a	67,6	70,3	73,12	76,04	79,08	79,08
1.6.3	Nilai Stabilitas	Nilai	N/a	66,3	67,63	68,98	70,36	71,77	71,77
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
2.1	Tenaga Kerja								
2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,13	4,97	4,77	4,47	4,27	4,07	4,07
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,93	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	74,05
2.2.3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Pangan								
2.3.1	Persentase ketersediaan pangan	Persen	443,21	486,08	494,87	498,88	503	511,73	511,73
2.4	Pertanahan								
2.4.1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	N/A	17,86	26,79	35,71	44,64	53,57	53,57
2.5	Lingkungan Hidup								
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,67	61,69	61,88	62,08	62,28	62,74	62,74
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.6.1	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Persen	98,00	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50	98,50
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.7.1	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	16	75	131,25	200	281,25	375	375
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								



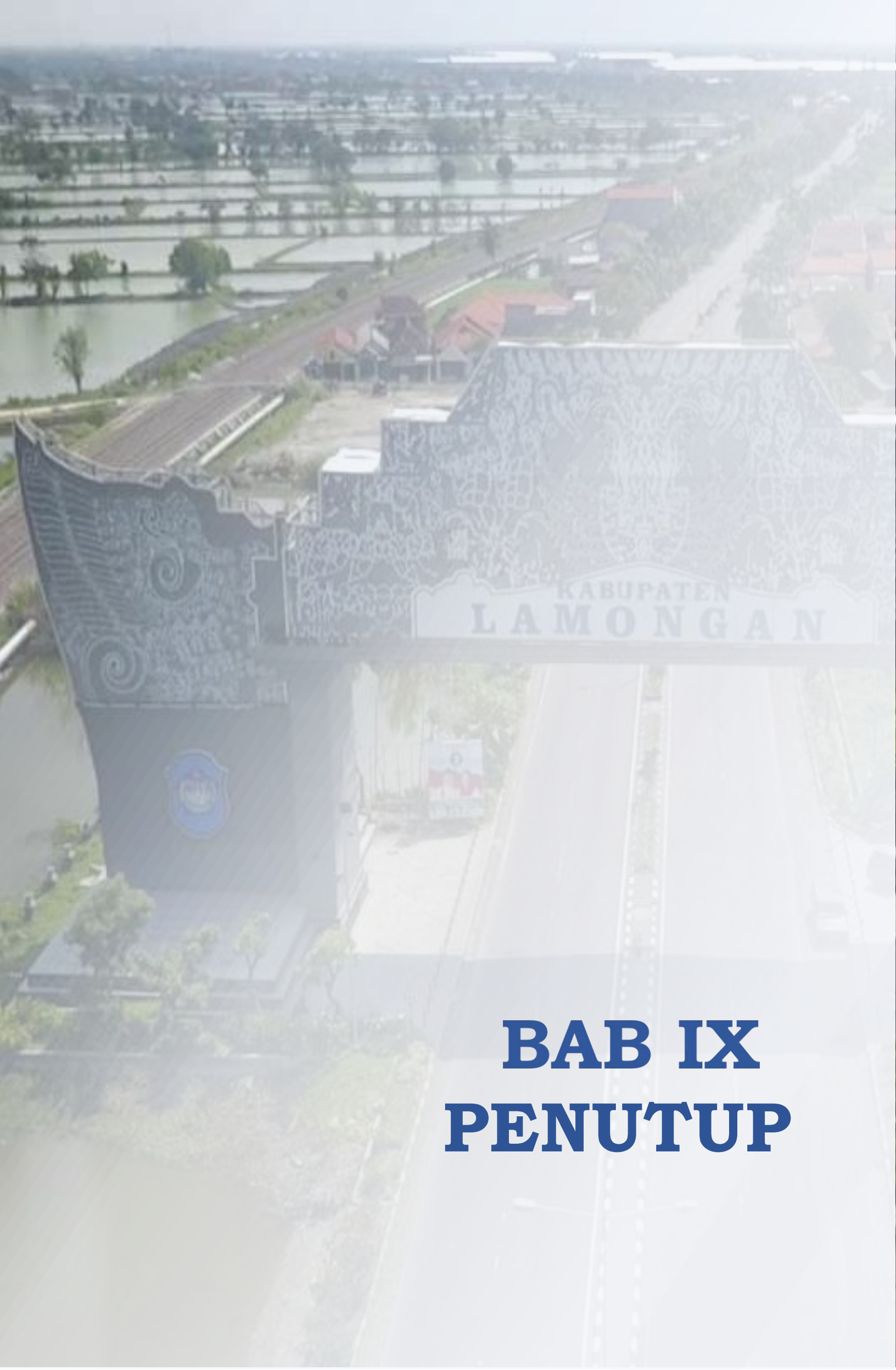
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
2.8.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun	Angka	1,91	1,89	1,87	1,85	1,83	1,81	1,81
2.9	Perhubungan								
2.9.1	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	71,5	77,9	81,6	85,3	88,9	92,6	92,6
2.10	Komunikasi dan Informatika								
2.10.1	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,65	3,75	3,85	3,95	4	4
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.11.1	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
2.12	Pemuda dan Olahraga								
2.12.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/a	53,6	54	54,6	55,1	55,6	55,6
2.13	Statistik								
2.13.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persandian								
2.14.1	Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	Persen	25	10	17	25	35	40	40
2.15	Kebudayaan								
2.15.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/a	53,6	54	54,6	55,1	55,6	55,6
2.16	Perpustakaan								
2.16.1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	60,00	60,05	60,10	60,15	60,20	60,25	60,25
2.17	Kearsipan								
2.17.1	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	URUSAN PILIHAN DAERAH								
3.1	Kelautan dan Perikanan								
3.1.1	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	139.547 ,48 Ton	3,34	4,19	4,93	5,56	6,08	6,08
3.2	Pariwisata								
3.2.1	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Nilai	N/a	175.500. 000.000	201.500. 000.000	227.500. 000.000	253.500. 000.000	268.500. 000.000	268.500. 000.000
3.3	Pertanian								
3.3.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	-0,16	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,5
3.4	Perdagangan								
3.4.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	-9,15	2,85	4,05	5,3	6,62	6,92	6,92
3.5	Perindustrian								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
3.5.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persen	-2,08	1,95	2,95	4,43	5,91	7,39	7,39
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Penanaman Modal								
1.1.1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persen	2.573. 470. 168. 398	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.3.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	77	79	81	82	83	83
3	Pertanian								
2.1	Nilai Tukar Petani	Nilai	104,84	104,86	104,87	104,88	104,89	104,9	104,9
4	Urusan Penunjang: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,3	68	69	70,5	71	71,5	71,5
4.2	Nilai Sakip	Skor	A	A	A	A	A	A	A
4.3	Opini BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.4	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
4.5	Indeks Profesionalitas Aparatur	Skor	60,68	65	68	70	72	74	74
4.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73

Berdasarkan indikator kinerja daerah di atas, dapat difahami bahwa di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 telah memuat indikator makro dalam rangka menjamin keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan . Adapun target indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VIII.3 INDIKATOR MAKRO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021INSPE-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,65	3,55	3,68	4,71	5,33	5,43	5,43
2	Gini Rasio	Indeks	0,294	0,292	0,291	0,29	0,289	0,288	0,288
3	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	13,85	13,39	13,17	12,92	12,65	12,35	12,35
4	Tingkat Pengangguran Tebuka	Persen	5,13	4,97	4,77	4,47	4,23	4,27	4,07
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,58	73,29	73,62	73,95	74,27	74,58	74,58

An aerial photograph of a coastal town. In the foreground, a large blue monument with intricate white patterns and a crest is visible. The monument is shaped like a traditional Javanese roof. Behind it, a road runs parallel to the coast, with buildings and trees on either side. The ocean is visible in the background, with a small boat on the water.

KABUPATEN
LAMONGAN

BAB IX

PENUTUP

Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam Visi dan Misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RK). Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Lamongan sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Lamongan, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tahun 2024 merupakan tahun transisi masa jabatan Bapak Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA dan Drs. KH, Abdul Rouf, M.Ag. Dalam hal dilaksanakan pilkada serentak, maka tahun 2024 merupakan tahun transisi, sepanjang belum ditetapkan RPJMD untuk masa jabatan kepala daerah yang baru, maka RPJMD ini masih menjadi pedoman pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Program-program pada tahun 2025 diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di Jawa Timur, dan Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun

Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Terhadap adanya perubahan pada SOTKD pengampu program yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan dan tidak merubah standar perhitungan, target indikator kinerja, strategi, arah kebijakan dan program dapat dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Kepala Daerah tanpa harus melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD dan memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Lamongan.
- c. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Lamongan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
- d. Dalam rangka mengawal pelaksanaan target kinerja Visi-Misi Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja yang ada dalam RPJMD ini perlu untuk diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Indikator Kinerja Daerah yang dilengkapi dengan definisi operasional, rumus, penanggungjawab dan metode pengukuran;
- e. Dalam hal terdapat perubahan/penyesuaian secara redaksional, akibat perubahan standar penulisan nomenklatur, standar perhitungan indikator kinerja, dan redaksional teknis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka dilakukan penyesuaian dengan peraturan kepala daerah tentang penjelasan perubahan nomenklatur pada perda RPJMD ini, dengan sebelumnya mendapat persetujuan dari DPRD.

9.3 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022-2026. Pemerintah bersama dengan DPRD Kabupaten Lamongan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan tahunan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
RPJMD TAHUN 2021-2026

